



Growing Stronger for a Greater Impact



Laporan 2025 PT Arkora Hydro Tbk

The 2025 Report of PT Arkora Hydro Tbk

Buku ini merupakan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (selanjutnya kedua laporan tersebut dapat juga disebut sebagai “Laporan”) PT Arkora Hydro Tbk (atau disebut juga “Arkora Hydro” atau “Perseroan” untuk periode pelaporan 2025).

Sama dengan tahun sebelumnya, Perseroan mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dalam 1 (satu) buku yang sama. Pengungkapan Laporan Tahunan disampaikan terlebih dahulu, namun dengan beberapa bagian yang memuat pembahasan mengenai Laporan Keberlanjutan, sebelum kemudian pengungkapan informasi yang lebih rinci mengenai Laporan Keberlanjutan disampaikan pada bagian terpisah.

Laporan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

This report book contains the Annual Report and Sustainability Report (hereinafter the two reports can also be identified as “Report”) of PT Arkora Hydro Tbk (hereinafter can also be called as “Arkora Hydro” or “Company”) for the reporting period of 2025.

Continuing the Company's last year report, the Annual Report and Sustainability Report are prepared in a single book. The Annual Report is disclosed first, along with certain parts of the Sustainability Report, prior to detailed information about the Sustainability Report in a separate section.

This Report contains financial conditions, operation results, projections, plans, strategies, policies, as well as objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws and regulations, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to prospective risks, uncertainties, and other factors that can cause the actual results to differ materially from the expected results.

Pernyataan-pernyataan prospektif dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perseroan serta lingkungan bisnis tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan. Perseroan menghimbau agar pembaca dapat menggunakan informasi tersebut secara bijak dalam pengambilan keputusan.

Laporan Tahunan dibuat sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan Keberlanjutan juga dibuat sesuai dengan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 sebagai realisasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Laporan ini dapat dilihat dan diunduh di situs web (website) resmi Perseroan yaitu **www.arkora.com**.

Penyebutan satuan mata uang “Rupiah” atau “Rp” merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang “Rupiah” sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Prospective statements are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company, and the business environment where the Company conducts its business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected. Thus, the Company urges stakeholders to use this information wisely in making decisions.

The Annual Report was prepared based on the Circular Letter of Financial Services Authority (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies. The Sustainability Report was also prepared based on SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021, which also become the realization of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.51/POJK.03/2017 Concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institution, Issuers and Public Companies. This Report is available and can be downloaded on the Company's official website on **www.arkora.com**.

This Report used “Rupiah” or “Rp”, which refers to the Republic of Indonesia's official currency. All financial information is presented in “Rupiah”, per Indonesian Financial Accounting Standards.



Tema Laporan 2025 Cover Story of the 2025 Report

Growing Stronger for a Greater Impact

Pada tahun 2025, Arkora Hydro hadir dengan tema **“Growing Stronger for a Greater Impact”**. Secara konsisten, setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Selama 15 tahun, Perseroan selalu bertumbuh dan meningkatkan kontribusinya untuk memberikan dampak yang lebih besar dari sisi penyediaan energi listrik yang hijau. Hal ini terlihat dari pencapaian penandatanganan kontrak baru untuk Proyek PLTA Pongbembe dengan kapasitas 20 MW. Selain itu, produksi listrik Perseroan di 2025 mencapai 151.800 MWh. Pencapaian ini menandakan pertumbuhan usaha yang terus meningkat untuk berkontribusi lebih besar bagi Indonesia yang lebih hijau.

In 2025, Arkora Hydro adopted the theme “Growing Stronger for a Greater Impact.” Over the past three years. For 15 years, the Company has consistently grown and increased its contribution for making a greater impact in its green electricity generation. This is reflected in the signing of a new contract for the Pongbembe Hydropower Plant Project with a capacity of 20 MW. In addition, the Company's electricity production in 2025 reached 151,800 MWh. This achievement signifies the Company's continued business growth and its increasing contribution for a greener Indonesia.



Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tema perjalanan Arkora Hydro setiap tahunnya selalu berfokus pada peningkatan kontribusi Perseroan terhadap pengembangan energi bersih dengan konsep keberlanjutan.

Over the past 3 (three) years, Arkora Hydro has consistently focused its annual themes on enhancing its contribution to the development of clean energy with a sustainability concept.



Pada tahun 2022, pertumbuhan usaha semakin membuat Perseroan percaya diri untuk meningkatkan produksi energi terbarukan melalui tema "Increasing Renewable Energy for a Bright Future" yang juga menandakan tahun pertama Arkora Hydro menjadi Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

In 2022, the Company's growing confidence led it to adopt the theme "Increasing Renewable Energy for a Bright Future," which also marked Arkora Hydro's first year as a publicly traded company listed on the Indonesia Stock Exchange.



Pada tahun 2023, Perseroan menerbitkan *Green Bond* untuk mempertegas identitas Arkora Hydro sebagai entitas bisnis yang mengimplementasikan praktek bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui operasional dan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air. Pencapaian ini menjadi sebuah wujud nyata perjalanan Perseroan untuk mendukung kemajuan Indonesia melalui energi bersih.

In 2023, the Company issued Green Bonds to further establish its identity as a business that implements environmentally friendly and sustainable operations through the operations and construction of hydropower plant projects. This achievement is a tangible manifestation of the Company's commitment to empower Indonesia using clean energy.



Pada tahun 2024, Arkora Hydro hadir dengan tema "Advancing Sustainable Growth through Hydropower" untuk menandakan berjalannya Proyek Yaentu yang telah memulai *Commercial Operation Date* (COD) pada bulan Oktober tahun 2024 serta mengupayakan untuk mendapatkan potensi pembangkit tenaga listrik baru. *Milestone* bersejarah ini semakin memperkuat perjalanan keberlanjutan Perseroan untuk mencapai total produksi energi terbarukan sebesar 261.2 MW melalui berbagai proyek pembangkit listrik dengan tipe aliran sungai langsung (*run-of-river*).

In 2024, Arkora Hydro introduced the theme "Advancing Sustainable Growth through Hydropower" to mark the commencement of the Commercial Operation Date (COD) for the Yaentu Project. This historic milestone further strengthens the Company's sustainability journey towards achieving a total renewable energy production of 261.2 MW through various run-of-river hydropower projects.



Daftar Isi

Table Of Content

01 Ikhtisar Kinerja 2025 2025 Performance Highlight		03 Profil Perusahaan Company Profile		04 Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis	
10	Pencapaian Pendapatan Achievement of Revenue	48	Informasi Umum General Information	94	Gambaran Umum Ekonomi dan Industri Economic and Industry Overview
10	Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	49	Skala Usaha Business Scale	95	Strategi Pemasaran Marketing Strategies
10	Produksi Listrik Power Production	49	Riwayat Singkat Perseroan Company in Brief	96	Tinjauan Operasional Operational Review
11	Kinerja Berkelanjutan Sustainable Performance	51	Informasi Perubahan Nama Perseroan Information of the Company's Name Changes	97	Kapasitas Produksi Production Capacity
11	Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	52	Jejak Langkah Milestone	104	Tinjauan Keuangan Financial Review
14	Grafik-Grafik Graphs	54	Visi dan Misi Vision and Mission	113	Rasio Keuangan Financial Ratio
15	Ikhtisar Kinerja Lingkungan dan Sosial Social and Environment Highlights	55	Nilai-Nilai dan Budaya Korporasi Corporate Culture	114	Tingkat Kolektibilitas Piutang Collectability
15	Ikhtisar Kinerja Saham Share Performance Highlights	56	Bidang Usaha Business Line	115	Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Capital Structure and Management Policy
17	Aksi Korporasi Corporate Action	60	Wilayah Operasional Operational Area	116	Target dan Realisasi 2025, Proyeksi 2026 2025 Target and Realization, 2026 Projection
18	Perhargaan dan Sertifikasi Tahun 2025 Awards and Certifications in 2025	62	Struktur Organisasi Organizational Structure	118	Investasi Barang Modal Capital Goods Investment
19	Peristiwa Penting 2025 Significant Events In 2025	65	Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	120	Prospek Usaha Business Prospect
02 Laporan Manajemen Management Report		69	Profil Direksi Profile of the Board of Directors	Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Changes in Accounting Policies Implemented by The Company in The Fiscal Year	
22	Laporan Dewan Komisaris Report of The Board of Commissioners	74	Demografi Karyawan Human Resources	121	Kebijakan dan Pembagian Dividen Dividend Policy and Distribution
30	Laporan Direksi Report of The Board of Directors	76	Struktur Grup Arkora Hydro Group Structure of Arkora Hydro	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Use of Proceeds from Public Offering	
42	Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan & Keberlanjutan 2025 PT Arkora Hydro Tbk Statement of The Board of Commissioners and Directors on The Responsibility for The 2025 Annual & Sustainability Report of PT Arkora Hydro Tbk	78	Daftar Entitas Anak List of Subsidiaries	Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan Manajemen Management and Employees Share Ownership Program (MESOP/ESOP)	
		84	Ventura Bersama Joint Ventures	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun Buku Changes to The Laws and Regulations in The Fiscal Year	
		84	Informasi Pemegang Saham Information of Shareholders		
		87	Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham Share Issuance and Listing Chronology		
		87	Kronologis Penerbitan Efek Lainnya Other Share Issuance Chronologies		
		88	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and Professions		
		90	Informasi Pada Website Perseroan Information on the Company's Website		

05 Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

126	Prinsip dan Komitmen Kebijakan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Implementation Principle and Commitment
127	Landasan Hukum Penerapan GCG Legal Basis of GCG Implementation
128	Tujuan Penerapan GCG GCG Implementation Objectives
131	Struktur Penerapan Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Implementation Structure
132	Sosialisasi dan Internalisasi GCG GCG Socialization and Internalization
132	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)
143	Direksi Board of Directors
149	Dewan Komisaris Board of Commissioners
155	Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris Dan Dasar Penilaiannya Performance Assessment of the Committees Under the Board of Commissioners and the Basis of its Assessment
160	Komite Audit Audit Committee
168	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter
174	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
179	Unit Audit Internal (UAI) Internal Audit Unit
183	Akuntan Publik Public Accountant
184	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
186	Manajemen Risiko Risk Management
191	Kode Etik Code Of Ethics
193	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
194	Program Anti-Korupsi Anti Corruption Program

195	Kebijakan Anti Persaingan Tidak Sehat Anti-Unfair Competition Policy
195	Kepatuhan Perpajakan Tax Compliance
196	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation Of Public Good Corporate Governance

06 Laporan Keberlanjutan Sustainability Report

206	Tentang Laporan Keberlanjutan About This Sustainability Report
207	Komitmen Terhadap Net Zero Emission Commitment to Net Zero Emission
209	Strategi Keberlanjutan Arkora Arkora's Sustainability Strategy
211	Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainable Performance Highlights
211	Kinerja Ekonomi Economic Performance
212	Kinerja Lingkungan Environmental Performance
214	Kinerja Sosial Social Performance
218	Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance
226	Kinerja Sosial Social Performance
236	Lembar Umpan Balik Feedback Form
238	Indeks Isi POJK No.51 OJK.03/2017 POJK No.51/Ojk.03/2017 Content Index
244	Pendapat Ahli Lingkungan Terhadap Kerangka Kerja Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (GreenBond) Environmental Experts' Opinions on The Green Bond Framework
260	Laporan Keuangan Financial Statements



01

Ikhtisar Kinerja 2025 2025 Performance Highlight





Pencapaian Pendapatan

Achievement of Revenue



Rp 343.321.381.981

Naik 44% dibandingkan tahun 2024

Increasing 44% compared to 2024

Laba Bersih Tahun Berjalan

Net Profit for the Year

Rp 63.893.319.501

Profitabilitas tetap terjaga positif dengan kenaikan
53% dibandingkan tahun 2024.

Profitability stays positive with a 53% increase
compared to 2024.



Produksi Listrik

Power Production



151.800
Mwh/Year
Mwh/Tahun

Kinerja Berkelanjutan Sustainable Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Jumlah Penjualan Total Sales	Rp Juta Rp Million	343.321	238.914	178.790
Total Produksi Total Production	MWh/Tahun MWh/Year	151.800	94.448	97.611
Jumlah Kota Total Cities	Wilayah Area	3	3	3
Jumlah Karyawan Total Employees	Orang People	72	75	83
Jumlah Biaya CSR Total CSR Costs	Rp Juta Rp Million	234,4	415	104

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in Thousand Rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	2025	2024	2023
Aset Lancar Current Assets	281.587.195	161.654.656	153.639.875
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	1.414.956.619	1.157.700.003	1.003.999.477
Jumlah Aset Total Assets	1.696.543.814	1.319.354.659	1.157.639.352
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	427.916.926	86.905.949	70.224.782
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	752.426.585	780.821.990	649.498.365
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.180.343.511	867.727.939	719.723.147
Jumlah Ekuitas Total Equity	516.200.303	451.626.720	437.916.205



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in Thousand Rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	2025	2024	2023
Pendapatan Revenue	343.321.382	238.914.422	178.790.287
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(253.608.621)	(180.343.010)	(104.821.918)
Laba Kotor Gross Profit	89.712.761	58.571.412	73.968.369
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	59.962.102	21.124.301	57.271.466
Manfaat (Beban) Pajak Tax Expenses	3.931.218	20.676.370	(18.163.360)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan: Net Profit (Loss) For the Years:	63.893.320	41.800.671	39.108.106
Laba (rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Profit (Loss) Attributable to Owners of the Company	63.903.456	41.799.739	39.074.272
Laba (rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali Profit (Loss) Attributable to Non Controlling Interest	(10.137)	932	33.834
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan: Comprehensive Profit (Loss) For the Year:	64.573.583	41.517.946	37.905.013
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Comprehensive Profit (Loss) Attributable to Owners of the Company	64.583.720	41.517.026	37.873.534
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non- pengendali Comprehensive Profit (Loss) Attributable to Non-Controlling Interest	(10.137)	921	31.479
Laba (Rugi) Per Saham Earnings (Loss) per Share	22	14	13

Laporan Arus Kas Statement of Cash Flow

(Disajikan dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in Million Rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	2025	2024	2023
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flow from (for) Operating Activities	(141.458)	(94.790)	(14.750)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flow from (for) Investing Activities	(12.135)	(29.183)	(76.074)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flow from (for) Financing Activities	207.160	78.049	65.841

Perhitungan Rasio-Rasio Calculation of Ratios

Uraian Description	2025	2024	2023
Rasio Usaha Business Ratio			
Gross Profit Margin Gross Profit Margin	26,13%	24,52%	41,37%
Return on Asset Return on Asset	3,77%	3,17%	3,38%
Return on Equity Return on Equity	12,38%	9,19%	8,93%
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio			
Rasio Lancar Current Ratio	65,80%	186,01%	218,78%
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio			
Liabilitas terhadap Aset Liability to Assets	0,70x	0,66x	0,62x
Liabilitas terhadap Ekuitas Liability to Equity	2,29x	1,92x	1,64x



Grafik-Grafik Graphs

Laporan Laba/Rugi Income Statement

dalam ribu Rupiah
in thousand Rupiah

Pendapatan Revenues

2025		343.321.382
2024		238.914.422
2023		178.790.287

Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues

2025		(253.608.621)
2024		(180.343.010)
2023		(104.821.918)

Laba Bersih Net profit

2025		63.893.319
2024		41.800.671
2023		39.108.106

Neraca Balance Sheet

dalam ribu Rupiah
in thousand Rupiah

Aset Assets

2025		1.696.543.814
2024		1.319.354.659
2023		1.157.639.351

Liabilitas Liabilities

2025		1.180.343.511
2024		867.727.939
2023		719.723.147

Ekuitas Equity

2025		516.200.303
2024		451.626.720
2023		437.916.205

Ikhtisar Kinerja Lingkungan dan Sosial Social and Environment Highlights

Uraian Description	Jumlah Total
Laki-laki Male	67
Perempuan Female	5
Jam Kerja Nihil Kecelakaan Zero Accident Hours	0
Penggunaan Energi (GJ) Energy Consumption	808,02
Konsumsi Air (m ₃)* Water Consumption	273.569.090
Realisasi Dana CSR (juta)** CSR Fund Utilization	234,4

* Penggunaan air (dikembalikan ke sumber air)

*Water consumption (return to the water resource)

**Perhitungan termasuk Entitas Anak Perseroan

**Calculation includes Subsidiaries of the Company

Ikhtisar Kinerja Saham Share Performance Highlights

PT Arkora Hydro Tbk secara resmi mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) dengan kode saham ARKO pada 8 Juli 2022. Perseroan menawarkan sejumlah 579.900.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) lembar saham baru pada penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering/IPO*), atau setara dengan 20% *enlarged capital*, dengan harga penawaran Rp300,- per lembar saham.

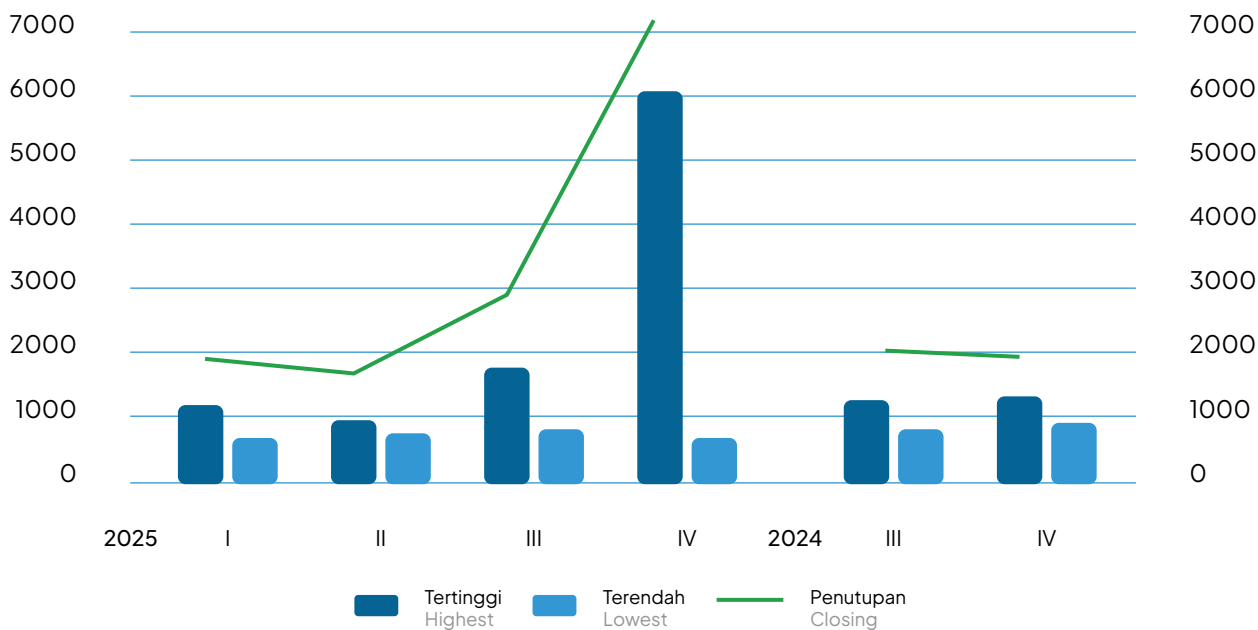
PT Arkora Hydro Tbk officially listed its shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI/IDX) with the ticker code ARKO on July 8, 2022. The Company offered 579,900,000 (five hundred seventy-nine million nine hundred thousand) new shares in the initial public offering shares (*Initial Public offering/IPO*), or the equivalent of 20% *enlarged capital*, with offering price at Rp300,- per share.



Pergerakan Harga Saham Stock Price Movement

Triwulan Quarter	Jumlah Saham Beredar (lembar saham) Total Outstanding Shares (shares)	Harga Saham Price of Share			Volume Perdagangan (ribu lembar saham) Trading Volume (thousand shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp dalam miliar) Market Capitalization (Full Rp)
		Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing		
2025						
I	2.928.495.000	1.120	675	870	33.370,00	2.548
II	2.928.495.000	965	740	800	14.754,00	2.343
III	2.928.495.000	1.980	785	1.650	116.933,00	4.832
IV	2.928.495.000	6.075	1.295	5.950	491.403,00	17.425
2024						
III	2.928.495.000	1.205	825	965	161.529,80	2.826,00
IV	2.928.495.000	1.250	920	920	61.874,50	2.694,22

Grafik Harga Pergerakan Saham Tahun 2024 - 2025 2024 - 2025 Stock Price Movement Chart



Aksi Korporasi Corporate Action

Di sepanjang tahun 2025, tidak terdapat aksi korporasi, yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait tanggal pelaksanaan aksi korporasi; rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; jumlah saham beredar sesudah aksi korporasi; jumlah saham konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan harga saham sesudah aksi korporasi.

In 2025, there are no corporate actions causing changes in shares like stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of convertible securities, also additions and capital reduction. Thus, there is no information over implementation date of the corporate actions; stock split ratio, reverse stock ratio, stock dividends, bonus shares, number of issued convertible securities, and changes in nominal value of shares; number of outstanding shares post corporate action; number of exercised conversion shares (if any); and share prices post corporate actions.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*) Share Suspension and/or Delisting

Pada tahun 2025, Perseroan menerima pemberitahuan dari Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan penghentian sementara (*suspensi*) perdagangan saham Perseroan yang dilakukan dalam dua periode, yaitu pada 25 November 2025 serta pada periode 27 November 2025 hingga 11 Desember 2025.

In 2025, the Company received notifications from the Indonesia Stock Exchange regarding the temporary suspension of trading in the Company's shares, which occurred in two periods, namely on November 25, 2025 and from November 27, 2025 to December 11, 2025.

Setelah kedua periode *suspensi* tersebut berakhir, saham Perseroan kembali diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara normal hingga akhir periode pelaporan per 31 Desember 2025.

Following the end of both suspension periods, the Company's shares were traded normally again on the Indonesia Stock Exchange as of the end of the reporting period on December 31, 2025.

Suspensi perdagangan saham tersebut dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan.

The suspension of share trading was given by the Indonesia Stock Exchange due to a significant cumulative increase in the Company's share price.

Perseroan senantiasa memenuhi kewajiban keterbukaan informasi dengan menyampaikan laporan fakta material serta memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia dan masyarakat atau pemegang saham secara tepat waktu atas setiap kejadian atau informasi material yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company strives to fulfill its disclosure obligations by submitting material fact reports and providing timely explanations to the Indonesia Stock Exchange and to the public or shareholders regarding any events or material information that may affect the Company's share price, in accordance with applicable laws and regulations.

Perseroan berkomitmen untuk terus mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi, guna menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

The Company remains committed to complying with all capital market regulations, particularly those related to reporting obligations and information disclosure, in order to maintain the trust of shareholders and other stakeholders.



Informasi Mengenai Obligasi Sukuk atau Obligasi Konversi yang Masih Beredar Information Related to Issued Bonds, Sukuk or Conversion Bonds

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan memiliki obligasi berwawasan lingkungan yang telah direview ulang oleh Ahli Lingkungan (SDG UI) dengan rincian sebagai berikut:

Until December 31, 2025, the Company has the green bonds that have been reviewed by Environmental Experts (SDG UI) with these details:

No	Nama Obligasi Bond Name	Tahun Penerbitan Issuance Year	Tenor (Tahun) Tenure (Year)	Jumlah Obligasi Total Bonds	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga (%) Interest Rate (%)	Peringkat Rating	Wali Amanat Trustee	Tujuan Penerbitan Objectives
1	Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 - Seri A Green Bond I Arkora Hydro 2023 - A Series	2023	3	Rp318,060 Miliar Rp318.060 Billion	8 Agustus 2026 August 8, 2026	9,50	idA+(pg)	PT. Bank Negara Indonesia Tbk	Refinancing Pinjaman dan Modal Kerja Perseoran Corporate Refinancing Loans and Work Capital
2	Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 - Seri B Green Bond I Arkora Hydro 2023 - B Series	2023	5	Rp21,835 Miliar Rp21.835 Billion	8 Agustus 2028 August 8, 2028	10,00	idA+(pg)	PT. Bank Negara Indonesia Tbk	Refinancing Pinjaman dan Modal Kerja Perseoran Corporate Refinancing Loans and Work Capital

Perhargaan dan Sertifikasi Tahun 2025 Awards and Certifications in 2025

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2025 Valid Certificates in 2025

No	Jenis Sertifikasi Certifications	Tanggal Dikeluarkan Sertifikasi Date of Certifications	Masa Berlaku Hingga Period of Certifications	Dikeluarkan Oleh Issued by
1	Sertifikat Kompetensi Bidang Pemeliharaan Pembangkit Competency Certificate in Power Plant Maintenance	07 Februari 2024 February, 07 2024	3 Tahun 3 Years	Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Certification Institution for Electrical Power Engineering Personnel Competency
2	Sertifikat Kompetensi Pengoperasian Unit Pembangkit Competency Certificate in Power Plant Operation	20 November 2024 November, 20 2024	3 Tahun 3 Years	Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Certification Institution for Electrical Power Engineering Personnel Competency

Peristiwa Penting 2025 Significant Events In 2025

04 September 2025
September 04, 2025



Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) Proyek Pongbembe dan Tahap Awal Konstruksi Signing of the Power Purchase Agreement PPA for the Project Pongbembe and Early Stage of Construction

Pada tanggal 4 September 2025, Perseroan melakukan penandatanganan kontrak Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) untuk Proyek Pongbembe dengan kapasitas sebesar 20MW oleh PT Nosu Hydro, dan telah memulai konstruksi Proyek Pongbembe.

On September 4, 2025, the Company signed the Power Purchase Agreement (PPA) for Project Pongbembe 20MW by PT Nosu Hydro, and started the construction of the Project Pongbembe.

23 September 2025
September, 23 2025



Ulang Tahun ke-15 PT Arkora Hydro Tbk 15th Anniversary PT Arkora Hydro Tbk

Dalam rangka memperingati Ulang Tahun Perseroan yang ke-15, Perseroan menyelenggarakan kegiatan perayaan internal sebagai bentuk apresiasi atas perjalanan dan pencapaian Perseroan sejak didirikan.

In commemoration of the Company's 15th Anniversary, the Company held an internal celebration as a form of appreciation for the Company's journey and achievements since its establishment.



02

Laporan Manajemen Management Report





Laporan Dewan Komisaris

Report of The Board of Commissioners

Dari sisi operasional, Perseroan mencatatkan kinerja yang solid dengan kapasitas kontrak mencapai 62,8 MW, penambahan proyek PLTA Pongbembe 20 MW, serta realisasi produksi listrik sebesar 92,45% dari target tahunan, mencerminkan pencapaian yang patut diapresiasi.

From an operational perspective, the Company generated solid performance, achieving contracted capacity of 62.8 MW, securing the addition of the 20 MW Project Pongbembe Hydropower, and realizing 92.45% of its annual electricity production target, reflecting an accomplishment worthy of appreciation.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menunjukkan kinerja yang solid dan progresif dari sisi pendapatan dan produksi listrik yang terjaga sepanjang tahun. Perseroan juga telah menambah satu Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) baru yaitu Proyek Pongbembe dengan kapasitas 20 MW. Kami memberikan apresiasi atas upaya Direksi menghadapi dinamika pasar dan memanfaatkan peluang untuk mendorong pertumbuhan.

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Throughout 2025, the Company demonstrated solid and progressive performance in revenue growth and consistently maintained electricity production throughout the year. The Company also added one new project that has commenced its Commercial Operation Date (COD) and secured a Power Purchase Agreement (PPA), namely the Project Pongbembe with a capacity of 20 MW. We really appreciate what the Board of Directors has done in navigating market dynamics and capitalizing on opportunities to drive growth.



Arya Pradana Setiadharmas

Komisaris Utama
President Commissioner

Pandangan Terhadap Situasi Ekonomi dan Industri Overview of The Economic and Industrial Situation

Tahun 2025 merupakan tahun yang menantang karena ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian mulai dari perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, hingga fragmentasi perdagangan internasional. Situasi global juga berdampak pada Indonesia, namun seiring dengan selesainya proses pergantian pemerintah pada akhir 2024, kondisi Indonesia tetap stabil karena arah kebijakan menjadi lebih jelas dan membuat kepercayaan investor meningkat sehingga mendorong realisasi investasi di berbagai sektor. Hal ini terlihat dari pertumbuhan penanaman modal dalam negeri dan asing (PMDN dan PMA) yang tumbuh 9,74% (y-on-y) dan 12,66% (c-to-c) menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia.

The year 2025 was a challenging period as the global economy remained marked by uncertainty, including a global economic slowdown, geopolitical tensions, and fragmentation of international trade. These global conditions also affected Indonesia. However, following the completion of the government transition at the end of 2024, Indonesia's condition remained stable as policy direction became clearer, boosting investor confidence and encouraging investment realization across various sectors. This was reflected in the growth of domestic and foreign investment (PMDN and PMA), which increased by 9.74% (y-on-y) 12.66% (c-to-c), respectively, according to Indonesia Investment Coordinating Board.



Total investasi di sektor energi mencapai USD31,7 miliar dan subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE) mencapai USD2,4 miliar. Bauran energi dari energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025 telah mencapai 15,8% dari total energi yang diutilisasi di Indonesia. Pencapaian ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025–2034 yang menargetkan penambahan kapasitas pembangkit hingga 69,5 GW, dengan 42,6 GW atau 61% di antaranya berasal dari EBT.

Perkembangan positif sektor EBT nasional semakin memperlihatkan peluang besar di sektor ini. Kami mengapresiasi Perseroan yang menunjukkan capaian progresif untuk meningkatkan produksi listrik melalui proyek baru dan memastikan keandalan pasokan listrik dari proyek-proyek yang telah ada.

Penilaian Atas Kinerja Direksi Assessment of The Board of Directors' Performance

Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi melalui evaluasi berkala atas pencapaian kinerja keuangan dan operasional Perseroan. Penilaian tersebut dilakukan dengan menelaah realisasi kinerja usaha, termasuk profitabilitas, serta keandalan operasional proyek berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan strategi bisnis yang efektif dalam memperkuat posisi Perseroan di sektor energi terbarukan. Dalam aspek keuangan, Perseroan mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 44% dari tahun sebelumnya sehingga mencapai Rp343,3 miliar. Peningkatan pendapatan mendorong peningkatan laba bersih sebesar 53% dari tahun sebelumnya sehingga mencapai Rp63,8 miliar pada tahun 2025. Pertumbuhan pendapatan telah sesuai dengan target Perseroan.

Dari sisi operasional, Perseroan berhasil mencapai kapasitas kontrak 62,8 MW dari total *pipeline* proyek lebih dari 300 MW. Terdapat penambahan kontrak baru melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Proyek PLTA Pongbembe dengan kapasitas 20 MW. Perseroan berhasil merealisasikan produksi listrik sebesar 151.800 MWh, atau setara dengan 92,45% dari target Daya Produksi Tahunan (DPT) 164.201 MWh, sesuai dengan perjanjian dengan PT PLN (Persero). Pencapaian kinerja operasional yang mendekati target sangat patut diapresiasi.

Total investment in the energy sector amounted to USD31.7 billion, while the new and renewable energy and energy conservation (EBTKE) subsector recorded USD2.4 billion. The renewable energy mix in 2025 reached 15.8% of total energy utilization in Indonesia. This achievement aligns with the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2025–2034, which targets additional power generation capacity of up to 69.5 GW, of which 42.6 GW or 61% will come from renewable energy sources.

The positive development of the national renewable energy sector continues to highlight significant opportunities. We appreciate the Company's progressive achievements in increasing electricity production through new projects while ensuring the reliability of power supply from existing projects.

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors through periodic assessments of the Company's financial and operational achievements. This evaluation includes a review of business performance, including profitability, as well as the operational reliability of projects based on the plans and targets of the Company.

The Board of Commissioners is of the view that the Board of Directors has implemented business strategies that are effective to strengthen the Company's position in the renewable energy sector. From a financial perspective, the Company recorded revenue growth of 44% (y-on-y), reaching Rp343.3 billion. This revenue increase contributed to a rise in net profit of 53% compared to the previous year, amounting to Rp63.8 billion in 2025. The growth in revenue is already in accordance with the Company's target.

From an operational standpoint, the Company successfully achieved contracted capacity of 62.8 MW from a total project pipeline exceeding 300 MW. This included the addition of a new contract through the signing of the Power Purchase Agreement for the Project Pongbembe Hydropower with a capacity of 20 MW. The Company successfully achieved electricity production of 151,800 MWh, equivalent to 92.45% of the Annual Production Target (DPT) of 164,201 MWh, in accordance with the agreement with PT PLN (Persero). This operational achievement, which closely approached the target, is highly commendable.

Dewan Komisaris juga mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap regulasi, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), implementasi manajemen risiko, serta tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris. Sepanjang tahun, semua aspek tersebut juga telah dijalankan oleh Direksi dengan optimal sesuai dengan standar *best practice* yang berlaku di industri saat ini.

Berdasarkan evaluasi tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah memperlihatkan kinerja yang positif dalam mengelola Perseroan. Mereka telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan mengelola Perseroan sejalan dengan strategi dan mencapai target.

The Board of Commissioners also considered aspects of regulatory compliance, the implementation of Good Corporate Governance (GCG), risk management practices, and follow-up on recommendations issued by the Board of Commissioners. Throughout the year, all of these aspects were optimally implemented by the Board of Directors in accordance with current industry best practices.

Based on this evaluation, the Board of Commissioners concludes that the Board of Directors has demonstrated positive performance in managing the Company, fulfilling their duties and responsibilities effectively, and managing the Company in line with its strategy and targets.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan Supervision on The Implementation of The Company's Strategy

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh perumusan dan implementasi strategi yang ditetapkan oleh Direksi. Proses tersebut dilakukan melalui rapat rutin dengan Direksi, evaluasi kinerja, dan pemanfaatan komite pendukung yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Kedua komite telah mendukung kami secara penuh, bertindak independen, serta memberikan pendapat dan rekomendasi yang akurat, terkait pelaporan keuangan, kinerja operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Sepanjang tahun 2025, kami telah mengadakan rapat gabungan untuk memonitor kinerja Direksi dan pencapaian Perseroan secara berkala. Total terdapat 6 kali rapat gabungan yang membahas *update* hasil keuangan, produksi listrik setiap proyek yang beroperasi dan pembangunan proyek baru.

Secara khusus, Dewan Komisaris dan Direksi memberikan perhatian terhadap sejumlah agenda strategis perihal evaluasi produksi listrik, pemantauan pembangunan proyek yang sedang berlangsung yaitu PLTA Tomoni (10 MW) dan PLTA Kukusan 2 (5,4 MW), serta persetujuan pengembangan proyek. Kami mendukung dan senantiasa memantau perkembangan *pipeline* proyek dengan ekspansi 300 MW dalam lima tahun ke depan untuk mendukung target *Net Zero Emission 2060*.

The Board of Commissioners carries out its supervisory function over the formulation and implementation of strategies established by the Board of Directors. This process is conducted through regular meetings with the Board of Directors, performance evaluations, and the utilization of supporting committees, namely the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee. Both committees have fully supported the Board of Commissioners, acted independently, and provided accurate opinions and recommendations related to financial reporting, operational performance, and regulatory compliance.

Throughout 2025, joint meetings were held regularly to monitor the performance of the Board of Directors and the Company's achievements. A total of 6 joint meetings were conducted to discuss financial performance updates, electricity production from operating projects, and the development of new projects.

In particular, the Board of Commissioners and the Board of Directors focused on several strategic agendas, including the evaluation of electricity production, monitoring the construction of ongoing projects such as the Tomoni Hydropower Plant (10 MW) and the Kukusan 2 Hydropower Plant (5.4 MW), as well as approving project development initiatives. We support and continuously monitor the development of the project pipeline, targeting an expansion of 300 MW over the next five years to support the *Net Zero Emission 2060* target.



Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Direksi atas kegiatan pengelolaan Perseroan dan implementasi strategi yang dijalankan, antara lain:

1. Agar Direksi senantiasa menjalin relasi yang baik dengan pelanggan utama Perseroan.
2. Semakin selektif memilah jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik Perseroan yang kompeten dan berpengalaman.
3. Terus berupaya memperoleh pendanaan yang kompetitif serta meminimalkan risiko keuangan selama pengerjaan proyek.
4. Mempertahankan pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien.
5. Memberikan rekomendasi terkait ekspansi dengan mencari potensi untuk membangun proyek baru, serta arahan terkait berbagai inisiatif strategis lainnya.

Dewan Komisaris juga telah memastikan langkah strategis Direksi mematuhi prinsip tata kelola yang baik serta memantau implementasi proyek utama, analisis risiko, dan peluang bisnis. Pengawasan juga dilakukan melalui tinjauan laporan audit internal dan pemantauan hubungan dengan pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan strategi.

Pandangan Atas Prospek Usaha Business Outlook Overview

Memasuki tahun 2026, Dewan Komisaris memandang bahwa perkembangan sektor EBT di Indonesia akan semakin progresif. Pemerintah Indonesia terlihat semakin memperkuat komitmennya untuk meningkatkan kualitas investasi melalui penguatan hilirisasi, pengembangan industri berbasis energi bersih, serta penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan kepastian untuk berbisnis di sektor EBT. Hal ini terlihat bahwa kapasitas EBT semakin meningkat setiap tahunnya.

Melihat prospek yang positif, Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi untuk semakin jeli dalam melihat peluang pembangunan pembangkit listrik EBT. Direksi perlu untuk terus membina hubungan baik dengan pelanggan utama dan memastikan kinerja proyek sesuai dengan target pemenuhan listrik sehingga Perseroan dapat terus dipercaya untuk menangani proyek-proyek lainnya.

Throughout 2025, the Board of Commissioners also delivered several recommendations to the Board of Directors regarding the management of the Company and the implementation of its strategy, which included:

1. Continuously maintaining positive relationships with the Company's main customer.
2. Being more selective in choosing competent and experienced professional service providers to support power plant projects.
3. Continuously striving to secure competitive financing and minimize financial risks during project execution.
4. Maintaining effective and efficient management of financial resources.
5. Providing recommendations related to expansion by identifying potential new project developments and other strategic initiatives.

The Board of Commissioners has also ensured that the strategic steps of the Board of Directors complied with good governance principles and has monitored the implementation of key projects, risk analysis, and business opportunities. Supervision was also conducted through reviews of internal audit reports and monitoring of stakeholder relationships to support strategy execution.

Entering 2026, the Board of Commissioners views the development of the renewable energy sector in Indonesia as increasingly progressive. The Indonesian Government continues to strengthen its commitment to improving investment quality through downstream industry development, clean energy-based industry growth, simplification of licensing processes, and enhanced business certainty in the renewable energy sector. This is reflected in the steady increase in renewable energy capacity each year.

Given these positive prospects, the Board of Commissioners consistently encourages the Board of Directors to be more proactive in identifying opportunities for renewable energy power plant development. The Board of Directors must continue to foster strong relationships with key customers and ensure that project performance meets electricity supply targets so that the Company will be trusted to handle future projects.

Kami telah melihat bahwa rencana bisnis Direksi ke depannya telah memperhitungkan prospek pertumbuhan EBT dan peningkatan investasi yang didorong Pemerintah Indonesia. Target untuk memenuhi DPT yang telah disetujui PLN selalu menjadi fokus utama Perseroan. Pencapaian DPT dengan sendirinya akan semakin meningkatkan profitabilitas Perseroan. Ini merupakan sebuah target yang kami percaya akan dapat direalisasikan dengan tingkat pencapaian optimal.

We have observed that the Board of Directors' future business plans have taken into account the growth prospects of renewable energy and increased investment driven by the Indonesian Government. Achieving the DPT of PLN remains a primary focus of the Company. The achievement will directly enhance the Company's profitability. This is a goal we believe can be realized with optimal performance.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Overview of The Corporate Governance Implementation

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan secara baik dan konsisten. Penerapan prinsip-prinsip GCG telah menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Direksi juga telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan dan penegakan kebijakan internal Perseroan.

The Board of Commissioners believes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) throughout 2025 has been carried out well and consistently. The application of GCG principles has served as the main foundation for decision-making and business operations. The Board of Directors has also demonstrated a strong commitment to ensure compliance with regulation and enforce the Company's internal policies.

Secara khusus, Dewan Komisaris memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi untuk memperkuat penerapan GCG yang meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peningkatan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko, serta peningkatan transparansi dan kualitas pelaporan.

In particular, the Board of Commissioners has provided direction and recommendations to strengthen GCG implementation, including compliance with laws and regulations, enhancement of internal control effectiveness and risk management, as well as improved transparency and reporting quality.

Satu hal yang ingin kami cermati adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* yang telah berjalan baik untuk mendukung penerapan GCG. Kedua hal tersebut berperan penting dalam menjaga integritas setiap karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang etis dan bebas dari praktik kecurangan.

One area of particular highlight is the effective implementation of the Internal Control System and the Whistleblowing System, both of which play a crucial role in maintaining employee integrity and fostering an ethical work environment, free from fraud

Ke depan, Dewan Komisaris mendorong agar penerapan GCG terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan dinamika industri serta tantangan bisnis. Hal ini penting, terutama untuk memastikan prosedur internal sesuai perkembangan risiko bisnis. Dengan demikian, penerapan GCG dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan memperkuat kepercayaan terhadap Perseroan.

Going forward, the Board of Commissioners encourages continuous improvement of GCG practices in line with industry dynamics and business challenges. This is important, particularly to ensure internal procedures are evolving with current business risks. In this way, GCG implementation can deliver added value to all stakeholders and strengthen trust in the Company.



Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Changes in The Composition of The Board of Commissioners

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, there have been no changes to the composition of the Board of Commissioners. Thus, the composition of the Board of Commissioners remains as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Arya Pradana Setiadharma	Komisaris Utama President Commissioner
Iwan Hadiangoro	Komisaris Commissioner
Drs. Indarto, S.H.	Komisaris Independen Independent Commissioner

Apresiasi dan Penutup Appreciation and Closing Statement

Atas nama Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, PLN sebagai pelanggan utama, Mitra Bisnis, serta seluruh Pemangku Kepentingan. Dukungan dan kepercayaan kepada Perseroan sangatlah berarti untuk menjalankan operasional secara berkelanjutan. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Direksi dan seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasi yang kuat untuk mendukung pencapaian kinerja Perseroan yang positif dan terus bertumbuh.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our gratitude to the Shareholders, PLN as the Company's main customer, Business Partners, and all Stakeholders. Your support and trust are invaluable in enabling the Company to operate sustainably. We also extend our appreciation to the Board of Directors and all employees for their hard work and dedication in supporting the Company's positive and growing performance.

Jakarta, Maret 2026
Jakarta, March 2026

Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners,

Arya Pradana Setiadharma
Komisaris Utama
President Commissioner





Laporan Direksi

Report of The Board of Directors

Direksi menetapkan strategi penguatan Perseroan sebagai pengembang dan operator pembangkit listrik tenaga air berbasis energi terbarukan melalui peningkatan kapasitas terkontrak, pengelolaan *pipeline* proyek berkelanjutan, penerapan prinsip ESG, serta optimalisasi kinerja pembangkit yang mendorong pertumbuhan pendapatan.

The Board of Directors set a strategy to strengthen the Company's position as a renewable hydropower plant developer and operator by increasing contracted capacity, managing a sustainable project pipeline, implementing ESG principles, and optimizing power plant performance to drive revenue growth.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan penuh rasa syukur, kami menyampaikan Laporan Direksi atas kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025. Perseroan terus menunjukkan pencapaian yang progresif dengan peningkatan pendapatan, profitabilitas, dan konsistensi pencapaian produksi. Selain itu, kami bangga menyampaikan bahwa telah mendapatkan kontrak baru untuk Proyek PLTA Pongbembe dengan kapasitas 20 MW. Perseroan terus berkembang dan memanfaatkan pertumbuhan industri energi terbarukan yang positif di Indonesia.

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

With sincere gratitude, we hereby present the Report of the Board of Directors on the Company's performance throughout 2025. The Company continued to demonstrate progressive achievements, marked by increases in revenue, profitability, and consistent production performance. In addition, we are proud to report that the Project Pongbembe Hydropower with a capacity of 20 MW has secured a new contract. The Company continues to grow and capitalize on the positive growth of Indonesia's renewable energy industry.



Aldo Henry Artoko

Direktur Utama
President Director

Perumusan Strategi Memanfaatkan Peluang Pembangkit EBT **Strategic Development in Utilizing The Opportunity in Renewable Project**

Sebagai Direksi, kami bertanggung jawab merumuskan strategi dan kebijakan strategis dengan memperhatikan arah pengembangan usaha, kondisi pasar, serta regulasi di sektor ketenagalistrikan. Kami melakukan kajian dan analisis atas peluang pengembangan proyek energi terbarukan, menyusun rencana strategis dan target kinerja Perseroan, serta menetapkan kebijakan operasional dan keberlanjutan yang selaras dengan visi dan misi Perseroan.

Melalui kajian terhadap kondisi eksternal yang membentuk bidang industri Perseroan, kami menganalisa bahwa bauran energi dari energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025 telah mencapai 15,8% dari total energi yang diutilisasi di Indonesia. Hingga Desember 2025, total kapasitas terpasang EBT mencapai 15.630 MW, dengan penambahan kapasitas terbesar dalam lima tahun terakhir.

As the Board of Directors, we are responsible for formulating strategies and strategic policies by taking into account the direction of business development, market conditions, and regulations in the electricity sector. We conduct studies and analyses of renewable energy project development opportunities, formulate the Company's strategic plans and performance targets, and establish operational and sustainability policies aligned with the Company's vision and mission.

Based on an assessment of external conditions shaping the Company's industry, we analyzed that the share of new and renewable energy (EBT) in Indonesia's energy mix in 2025 reached 15.8% of total energy utilization. As of December 2025, total installed EBT capacity reached 15,630 MW, representing the largest capacity addition over the past five years.



Rencana strategis peningkatan porsi EBT akan didukung oleh peran *Independent Power Producer* (IPP) yang menyumbang 73% dari total nilai proyek pembangkitan, atau sekitar 50,7 GW. Nilai investasi dari pihak swasta ini mencapai Rp1.566,1 triliun dari total investasi sebesar Rp2.133,7 triliun. Ini adalah langkah besar bagi Perseroan untuk memperkuat posisi di pasar energi bersih, seiring dengan permintaan listrik yang terus meningkat, termasuk dari kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan proyek kendaraan listrik.

Direksi memanfaatkan peluang pengembangan pembangkit EBT dengan menetapkan strategi penguatan posisi Perseroan sebagai pengembang dan operator pembangkit listrik tenaga air berbasis energi terbarukan. Strategi tersebut meliputi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kapasitas terkontrak dengan PLN, pengelolaan dan pengembangan pipeline proyek jangka menengah dan panjang, serta penerapan prinsip keberlanjutan melalui kebijakan ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Selain itu, Perseroan menetapkan kebijakan untuk menjaga keandalan operasional pembangkit yang telah beroperasi serta mengoptimalkan struktur pembiayaan proyek guna mendukung ekspansi usaha yang berkelanjutan.

Dalam memastikan implementasi strategi, Direksi melakukan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang terstruktur. Proses tersebut dilakukan melalui rapat Direksi secara berkala untuk memantau progres pengembangan proyek dan kinerja operasional, evaluasi laporan manajemen dan laporan keuangan, serta koordinasi intensif dengan unit kerja terkait. Kami juga melakukan pengawasan terhadap pencapaian target kapasitas terkontrak, pelaksanaan proyek, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Menghadapi Tantangan dengan Memastikan Kinerja Operasional Navigating Through Challenges, Ensuring Operational Reliability

Tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 berkaitan dengan risiko operasional pembangkit yang telah beroperasi, serta kondisi geografis dan karakteristik wilayah proyek yang memerlukan pengelolaan teknis dan operasional yang cermat. Selain itu, Perseroan juga perlu menjaga kesinambungan kinerja operasional di tengah perubahan kondisi eksternal yang berdampak pada sektor energi.

Dalam menghadapi tantangan, Perseroan menerapkan langkah-langkah pengelolaan operasional yang konsisten dan berkelanjutan. Sebagai Direksi, kami mengarahkan seluruh unit kerja untuk dapat bekerja secara berkelanjutan

The strategic plan to increase the share of EBT is supported by the role of Independent Power Producers (IPPs), which contribute 73% of the total value of power generation projects, or approximately 50.7 GW. Investment value from the private sector amounted to Rp1,566.1 trillion out of total investment of Rp2,133.7 trillion. This represents a significant step for the Company to strengthen its position in the clean energy market, in line with continuously increasing electricity demand, including from industrial estates, special economic zones, and electric vehicle projects.

The Board of Directors capitalizes on opportunities in renewable power plant development by establishing strategies to strengthen the Company's position as a developer and operator of hydropower plants based on renewable energy. These strategies include capacity development through increasing contracted capacity with PLN, management and development of the medium-terms and long-term project pipeline, and the application of sustainability principles through ESG (Environmental, Social, and Governance) policies. In addition, the Company has set policies to maintain the operational reliability of existing power plants and to optimize project financing structures to support sustainable business expansion.

To ensure the strategy is implemented effectively, the Board of Directors applies control and supervision mechanisms that are well-structured. These are carried out through regular meetings of the Board of Directors to monitor the progress of project completion and operational performance, evaluations of management and financial reports, and intensive coordination with relevant work units. We also supervise the achievement of contracted capacity targets, project execution, and compliance with applicable regulations.

Challenges faced in 2025 were related to operational risks of existing power plants, as well as geographical conditions and characteristics of project area that require careful technical and operational management. In addition, the Company needed to maintain the continuity of operational performance amid changes in external conditions affecting the energy sector.

In addressing these challenges, the Company implemented consistent and sustainable operational management measures. As the Board of Directors, we directed all work units to continuously optimize the performance of

mengoptimalkan kinerja setiap pembangkit yang beroperasi melalui pelaksanaan program pemeliharaan (*maintenance*) yang terencana dan berkala, pemantauan kondisi peralatan secara rutin, serta peningkatan koordinasi antar tim operasional di lapangan.

Upaya-upaya tersebut terbukti efektif untuk memastikan keandalan dan efisiensi operasional pembangkit agar tetap terjaga. Hasilnya, Perseroan dapat meminimalkan gangguan operasional dan mempertahankan tingkat produksi listrik yang optimal sepanjang tahun 2025.

Pencapaian Kinerja Positif Achieving Positive Performance

Sepanjang tahun 2025, Perseroan berhasil mencapai kapasitas terkontrak sebesar 62,8 MW dari total *pipeline* proyek lebih dari 300 MW. Perseroan memperoleh kontrak baru melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Proyek PLTA Pongbembe dengan kapasitas 20 MW. Perseroan juga berhasil memproduksi tenaga listrik sebesar 151.800 MWh, atau setara dengan 92,4%. Pencapaian ini mencerminkan keandalan operasional pembangkit, efektivitas pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta komitmen Perseroan dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik.

Dari sisi keuangan, pendapatan bertumbuh sebesar 43,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga mencapai Rp343,3 miliar. Pertumbuhan pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah sesuai dengan target pertumbuhan 40–45%. Pertumbuhan pendapatan terealisasi karena didorong oleh optimalisasi kinerja pembangkit, meningkatnya realisasi produksi tenaga listrik, dan tentunya peningkatan progress konstruksi Proyek Kukusan 2, Proyek Tomoni, dan tentu Proyek Pongbembe yang baru dimulai pada akhir tahun. Kenaikan pendapatan mencerminkan efektivitas pengelolaan aset dan konsistensi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik PLN. Kinerja finansial menunjukkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi yang sehat dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Kami juga terus melakukan studi kelayakan dan identifikasi potensi proyek baru untuk meningkatkan kapasitas terkontrak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berjalan beriringan dengan upaya untuk memastikan kinerja pembangkit yang telah beroperasi tetap sesuai dengan target produksi tahunan yang sudah disepakati dengan PLN.

operating power plants through a planned and periodic maintenance program, routine monitoring of equipment conditions, and enhanced coordination among on-site operational teams.

These have proven effective in ensuring the reliability and efficiency of power plant operations. As a result, the Company was able to minimize operational disruptions and maintain optimal electricity production levels throughout 2025.

Throughout 2025, the Company successfully achieved a contracted capacity of 62.8 MW from a total project pipeline exceeding 300 MW. The Company secured a new contract through the signing of a Power Purchase Agreement for the Project Pongbembe Hydropower with a capacity of 20 MW. The Company also successfully generated 151,800 MWh of electricity, equivalent to 92.4%. This achievement reflects the reliability of power plant operations, the effectiveness of operations and maintenance activities, and the Company's commitment to ensure the continuity of electricity supply.

From a financial perspective, revenue grew by 43.7% compared to the previous year, reaching Rp343.3 billion. This revenue growth was in line with the targeted growth of 40–45%. The increase in revenue was driven by optimized power plant performance, higher electricity production, and the advancement of construction progress for the Project Kukusan 2, Project Tomoni, and the Project Pongbembe, which commenced at the end of the year. Revenue growth reflects effective asset management and the Company's consistency in conducting business operations in accordance with PLN power purchase agreements. Overall financial performance indicates that the Company remains in a sound condition and in line with its work plan.

We also continued to conduct feasibility studies and identify potential new projects to increase contracted capacity compared to the previous year. These were carried out in parallel with initiatives to ensure that existing power plants continue to meet annual production targets agreed with PLN.



Penerapan Tata Kelola Perusahaan Implementation of Corporate Governance

Sebagai Direksi, kami mengelola Perseroan dengan memastikan penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan regulasi yang berlaku, terutama di sektor pasar modal. Kami percaya bahwa penerapan tata kelola menjadi dasar utama untuk mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Menurut pandangan kami, Perseroan telah menerapkan tata kelola yang baik sepanjang tahun 2025 melalui kepatuhan terhadap regulasi, penguatan fungsi pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Langkah-langkah tersebut antara lain dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan dan prosedur internal, pelaksanaan rapat organ tata kelola secara rutin, pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan regulator dan perjanjian dengan para pemangku kepentingan.

Kami akan memastikan bahwa Perseroan akan terus mengembangkan penerapan GCG ke depannya dengan memperkuat budaya kepatuhan, meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan GCG secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kinerja Perseroan yang berkelanjutan dan selaras dengan strategi pertumbuhan jangka panjang.

Kinerja Keberlanjutan [D.1] Sustainability Performance [D.1]

Penerapan prinsip keberlanjutan melalui kebijakan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) menjadi sangat penting bagi Perseroan yang menjalankan proyek energi terbarukan. Penciptaan nilai jangka panjang dari proyek-proyek Perseroan di tengah tantangan lingkungan, risiko iklim, dan harapan pemangku kepentingan, menjadikan penerapan ESG menjadi pendorong utama memastikan ketahanan bisnis dan pengelolaan reputasi usaha yang positif.

As the Board of Directors, we manage the Company by ensuring the implementation of governance practices in accordance with GCG principles and applicable regulations, particularly in the capital market sector. We believe that good governance forms the primary foundation for supporting business sustainability and enhancing stakeholder trust.

In our view, throughout 2025 the Company implemented good corporate governance through regulatory compliance, strengthening the supervisory functions of the Board of Directors and the Board of Commissioners, implementing risk management and internal control systems, and enhancing transparency and accountability. These measures included refining internal policies and procedures, holding regular governance body meetings, fulfilling information disclosure obligations, and increasing compliance with regulatory requirements and agreements with stakeholders.

We will continue to ensure that the Company further develops GCG implementation by strengthening a culture of compliance, enhancing the effectiveness of risk management and internal controls, and continuously evaluating and improving GCG policies. Through these, the Company is expected to have a sustainable performance that is aligned with long-term growth strategies.

The implementation of sustainability principles through ESG (*Environmental, Social, and Governance*) policies is critically important for the Company, which operates renewable energy projects. Creating long-term value from the Company's projects amid environmental challenges, climate risks, and stakeholder expectations makes ESG a key driver in ensuring business resilience and positive reputation management.

Nilai-Nilai Keberlanjutan

Perseroan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dengan mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai keberlanjutan yang dilaksanakan seluruh karyawan berakar penyediaan energi bersih yang ramah lingkungan sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional menuju *Net Zero Emission 2060*.

Sebagai Direksi, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan dan nilai-nilai keberlanjutan senantiasa terintegrasi dalam perencanaan strategis, pengelolaan operasional, serta pengembangan usaha. Kami senantiasa mendorong penerapan praktik operasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial melalui budaya kepatuhan dan transparansi. Hal tersebut juga dijaga dengan memastikan terselenggaranya komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, termasuk regulator, mitra usaha, dan masyarakat sekitar wilayah operasional.

Tantangan dan Peluang Penerapan Keberlanjutan

Tantangan penerapan keberlanjutan berasal dari operasional proyek dengan kondisi geografis yang menantang. Selain itu, pembinaan hubungan dengan masyarakat juga menjadi isu yang dinamis karena perubahan kebutuhan mereka seiring dengan perubahan eksternal dari berbagai aspek. Perseroan juga dihadapkan pada tantangan regulasi keberlanjutan yang semakin ketat dan kompleks.

Di tengah berbagai tantangan, Perseroan tetap mampu mencapai kinerja operasional yang optimal sebesar 92,5% dari target yang telah ditetapkan bersama dengan PLN. Hal ini menandakan bahwa isu geografis operasional proyek, pendekatan sosial terhadap masyarakat sekitar, dan kepatuhan terhadap regulasi keberlanjutan, semuanya telah berhasil dilalui dengan baik.

Peluang dalam menerapkan praktik keberlanjutan tentunya sangat erat dengan masa depan bisnis Perseroan. Perkembangan regulasi keberlanjutan, kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan, serta perkembangan bauran EBT dari total utilisasi energi di Indonesia membawa peluang bisnis yang lebih ke depannya bagi Perseroan. Dengan terus berfokus pada pengoperasian proyek yang optimal dengan menerapkan praktik-praktik keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi pendukungnya, maka Perseroan memiliki prospek yang cerah ke depannya.

Sustainability Values

The Company integrates sustainability principles into its business strategy by emphasizing a balance between economic growth, environmental preservation, and social responsibility. The sustainability values embraced by all employees are rooted in the provision of clean, environmentally friendly energy while supporting the national energy transition agenda toward Net Zero Emissions 2060.

As the Board of Directors, we are committed to ensuring that sustainability principles and values are consistently integrated into strategic planning, operational management, and business development. We continuously encourage the implementation of environmentally and socially responsible operational practices through a culture of compliance and transparency. This is also supported by ensuring effective communication with stakeholders, including regulators, business partners, and communities surrounding operational areas.

Challenges and Opportunities in Sustainability Implementation

Sustainability challenges came from project operations in geographically challenging conditions. In addition, fostering relationships with local communities is a dynamic issue due to changing needs influenced by various external factors. The Company also faces increasingly stringent and complex sustainability regulations.

Amid these challenges, the Company was able to achieve optimal operational performance, with DPT fulfillment reaching 92.5% of the PLN's target. This demonstrates that operational geographical issues, social engagement with surrounding communities, and compliance with sustainability regulations have all been effectively managed.

Opportunities in implementing sustainability practices are closely linked to the Company's future business prospects. Developments in sustainability regulations, increasing public awareness of sustainability, and growth in the EBT share of Indonesia's total energy utilization create further business opportunities for the Company. By continuing to focus on optimal project operations while implementing sustainable practices and complying with supporting regulations, the Company has a promising outlook for the future.



Risiko Keberlanjutan

Pencapaian keberlanjutan sangat bergantung pada pengelolaan risiko keberlanjutan. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan mitigasi risiko keberlanjutan dengan menetapkan kebijakan, strategi, serta kerangka manajemen risiko yang terintegrasi dengan kegiatan usaha Perseroan, serta memastikan implementasinya di seluruh lini organisasi.

Dari sisi ekonomi, terdapat ketergantungan pada kondisi hidrologi, fluktuasi produksi energi, serta potensi keterlambatan proyek yang dapat memengaruhi kinerja operasional dan keuangan. Perseroan menghadapi risiko tersebut dengan menerapkan perencanaan proyek yang matang dan memantau kinerja pembangkit secara berkala.

Aspek sosial berkaitan dengan penerimaan dan dukungan masyarakat di sekitar wilayah proyek, potensi konflik pemanfaatan sumber daya air, serta risiko kesehatan dan keselamatan selama tahap konstruksi maupun operasi pembangkit. Perseroan mengelola hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dengan secara proaktif melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan proyek melalui komunikasi dan konsultasi yang berkelanjutan. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, Perseroan turut berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Risiko lingkungan mencakup potensi sedimentasi sungai, gangguan terhadap ekosistem perairan dan keanekaragaman hayati, serta dampak kegiatan konstruksi dan operasi terhadap lingkungan sekitar. Langkah-langkah mitigasi dilakukan melalui pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara konsisten melalui penerapan langkah pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan sejak tahap perencanaan hingga operasi. Pemantauan lingkungan dilakukan secara berkala, disertai dengan tindakan korektif apabila diperlukan.

Pencapaian Aspek Keberlanjutan

Pada aspek ekonomi, Perseroan berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang melalui pengembangan energi terbarukan yang efisien serta berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Seperti yang telah disampaikan, kinerja DPT sangat memuaskan. Selain itu, Perseroan memenuhi persyaratan keberlanjutan yang ditetapkan oleh lembaga pendanaan (*lender*), termasuk penerapan *Environmental and Social Management System* (ESMS) sesuai dengan IFC Performance Standards, sebagai bagian dari upaya menjaga kelangsungan usaha dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Sustainability Risks

Achieving sustainability performance is highly dependent on effective sustainability risk management. The Board of Directors is responsible for managing and mitigating sustainability risks by establishing policies, strategies, and an integrated risk management framework aligned with the Company's business activities, and ensuring their implementation across all organizational levels.

From an economic perspective, risks include dependence on hydrological conditions, fluctuations in energy production, and potential project delays that may affect operational and financial performance. The Company addresses these risks through careful project planning and regular monitoring of power plant performance.

Social aspects are related to community acceptance and support around project areas, potential conflicts over water resource utilization, and occupational health and safety risks during construction and operation phases. The Company manages harmonious relationships with communities and local stakeholders by proactively engaging them from the project planning stage through ongoing communication and consultation. Through its corporate social responsibility programs, the Company also contributes to social and economic development in communities surrounding its operational areas.

Environmental risks include potential river sedimentation, disturbances to aquatic ecosystems and biodiversity, and environmental impacts from construction and operational activities. Mitigation measures are implemented through consistent environmental management and monitoring, including preventive and impact control measures from the planning stage through operation. Environmental monitoring is conducted regularly, accompanied by corrective actions where necessary.

Sustainability Achievements

In the economic aspect, the Company focuses on creating long-term value through efficient renewable energy development while contributing to national energy resilience. As previously explained, DPT performance was highly satisfactory. In addition, the Company complies with sustainability requirements set by lenders, including the implementation of an *Environmental and Social Management System* (ESMS) in accordance with IFC Performance Standards to maintain business continuity and stakeholder trust. The Company's projects also generate

Keberadaan proyek-proyek Perseroan juga turut memberikan dampak ekonomi tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, penggunaan jasa dan material lokal, serta peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah proyek.

Dalam aspek sosial, Perseroan menempatkan masyarakat dan tenaga kerja sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam pengembangan proyek. Perseroan melaksanakan program-program pengelolaan dan pemantauan sosial yang mengacu pada dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) serta *Social Management Plan* yang dipersyaratkan oleh lender.

Perseroan memastikan pemenuhan aspek ketenagakerjaan yang adil dan aman, termasuk penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh kegiatan konstruksi dan operasi. Dalam hubungan dengan masyarakat, Perseroan aktif melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sekitar proyek. Mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) disediakan dan dikelola secara transparan untuk memastikan setiap keluhan atau masukan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konstruktif, sejalan dengan prinsip IFC Performance Standard 1.

Bergerak di sektor energi terbarukan, Perseroan berkomitmen melindungi lingkungan hidup dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Seluruh kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen AMDAL dan UKL-UPL, termasuk pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) telah dipenuhi dan dilaporkan secara berkala.

Perseroan juga berfokus mengendalikan kualitas air, khususnya pada tahap konstruksi, pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di sekitar lokasi proyek. Sejalan dengan persyaratan lembaga pembiayaan dan IFC Performance Standards, Perseroan menerapkan prinsip pencegahan dan mitigasi dampak lingkungan sejak tahap perencanaan, konstruksi, hingga operasi pembangkit. Melalui pendekatan ini, Perseroan berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus memaksimalkan manfaat dari pengembangan energi bersih dan rendah emisi.

indirect economic impacts through job creation, use of local services and materials, and increased economic activity in surrounding areas.

In the social aspect, the Company places communities and its workforce as key stakeholders in project development. The Company implements social management and monitoring programs in accordance with environmental documents (AMDAL/UKL-UPL) and the Social Management Plan required by lenders.

The Company ensures fair and safe labor practices, including the application of Occupational Health and Safety (OHS) standards across all construction and operational activities. In its engagement with communities, the Company actively communicates and consults with local stakeholders, including regional governments and nearby communities. A grievance mechanism is provided and managed transparently to ensure that any complaints or feedback from communities are addressed constructively, in line with IFC Performance Standard 1.

Operating in the renewable energy sector, the Company is committed to protecting the environment and managing natural resources responsibly. All environmental management and monitoring obligations outlined in AMDAL and UKL-UPL documents, including the implementation of Environmental Management Plans (RKL) and Environmental Monitoring Plans (RPL), have been fulfilled and reported on a regular basis.

The Company also focuses on controlling water quality, particularly during construction, waste management, biodiversity protection, and watershed management around project sites. In line with lender requirements and IFC Performance Standards, the Company applies preventive and mitigation principles from the planning, construction, and operational stages. Through this approach, the Company seeks to minimize negative environmental impacts while maximizing the benefits of clean and low-emission energy development.



Prospek Usaha Business Prospect

Perseroan optimistis terhadap prospek perkembangan EBT. Diperkirakan, peningkatan permintaan listrik akan mencapai 205 TWh pada periode 2025–2034 dengan dukungan pembangunan transmisi sepanjang 47.758 km dan gardu listrik sebesar 107.950 MVA. Terlihat juga bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas investasi melalui penguatan hilirisasi, pengembangan industri berbasis energi bersih, serta penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan kepastian untuk berbisnis di sektor EBT. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum investasi pada sektor EBT pada tahun 2026 dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Sebagai Direksi, kami berharap bahwa dukungan kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan dan investasi keberlanjutan akan terus meningkat. Hal ini akan memungkinkan Perseroan untuk berkontribusi lebih banyak dalam mencapai target energi bersih.

Ke depannya, Perseroan menyiapkan strategi yang selaras dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menekankan pengembangan energi terbarukan. Porsi pembangkit hidro sebesar 7.587 MW pada tahun 2025 merupakan yang terbesar di antara pembangkit EBT lainnya sehingga Perseroan telah berada di jalur yang tepat. Perseroan akan berfokus pada optimalisasi dan percepatan proyek-proyek untuk memenuhi persyaratan PLN dan memperoleh kontrak kapasitas. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan peluang untuk terus berekspansi dan mengembangkan proyek-proyek baru.

Komposisi Direksi Composition of The Board of Directors

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi. Dengan demikian, susunan komposisi Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

The Company remains optimistic about the prospects for renewable energy development. Electricity demand is projected to reach 205 TWh during the 2025–2034 period, supported by the development of 47,758 km of transmission lines and substations with a capacity of 107,950 MVA. The Indonesian Government has also demonstrated its commitment to improving investment quality by strengthening downstream industries, developing clean energy industries, simplifying licensing processes, and enhancing business certainty in the EBT sector. These measures are expected to maintain investment momentum in the EBT sector in 2026 and support sustainable national economic growth.

As the Board of Directors, we hope that policies in favor of growth and sustainable investment will continue to strengthen, enabling the Company to contribute more significantly toward achieving clean energy targets.

Going forward, the Company is preparing strategies aligned with PLN's RUPTL 2025–2034, which emphasizes renewable energy development. Hydropower capacity of 7,587 MW in 2025 represents the largest share among other EBT power plants, indicating that the Company is on the right track. The Company will focus on optimizing and accelerating projects to meet PLN requirements and secure capacity contracts. This strategy is expected to enhance opportunities for continued expansion and the development of new projects.

As of December 31, 2025, there were no changes to the Board of Directors' composition. Therefore, the composition of the Company's Board of Directors remains as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama President Director
Ricky Hartono	Direktur Director
Ismu Nugroho	Direktur Director
Boy Gemino Kalauserang	Direktur Director

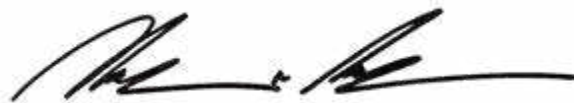
Apresiasi dan Penutup Appreciation and Closing Statement

Setiap pencapaian dan keberhasilan yang diraih Perseroan sepanjang 2025 merupakan hasil dari kolaborasi yang kuat dengan Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, Dewan Komisaris, para Karyawan, serta seluruh Mitra Bisnis dan Regulator dan kami sangat mengapresiasi dukungan semua pihak. Perseroan akan terus menyediakan aliran energi bersih yang dapat diandalkan untuk mewujudkan Indonesia yang hijau dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik.

Every achievement and success throughout 2025 is the result of strong collaboration with Shareholders, Stakeholders, the Board of Commissioners, Employees, as well as all Business Partners and Regulators and we really appreciate everyone for their supports. The Company will continue to provide a reliable supply of clean energy to help realize a green and sustainable Indonesia for a better future.

Jakarta, Maret 2026
Jakarta, March 2026

Atas nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors,



Aldo Henry Artoko

Direktur Utama
President Director



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank





Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan & Keberlanjutan 2025 PT Arkora Hydro Tbk

Statement of The Board of Commissioners and Directors on The Responsibility for The 2025 Annual & Sustainability Report of PT Arkora Hydro Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan & Keberlanjutan 2025 PT Arkora Hydro Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan & Keberlanjutan ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, state that all information in the 2025 Annual & Sustainability Report of PT Arkora Hydro Tbk is presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents in this Annual & Sustainability Report. This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Maret 2026
Jakarta, March 2026

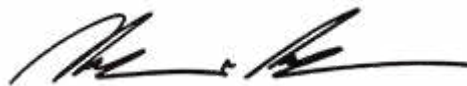
Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Arya Pradana Setiadharma
Komisaris Utama
President Commissioner

Iwan Hadiangoro
Komisaris
Commissioner

Drs. Indarto S.H
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi
Board of Directors



Aldo Henry Artoko
Direktur Utama
President Director



Ricky Hartono
Direktur
Director



Ismu Nugroho
Direktur
Director



Boy Gemino Kalauserang
Direktur
Director



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank





03

Profil Perusahaan Company Profile





Informasi Umum General Information

Nama Perusahaan
Name of Company

PT Arkora Hydro Tbk

Bidang Usaha
Line of Business

Pembangkitan Tenaga Listrik
Electric Power Generation

Kode Saham
Ticker Code

ARKO

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

5 Agustus 2010
August 5, 2010

Bursa
Exchange

Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis

Akta Pendirian No. 15, tanggal 5 Agustus 2010 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia.
Deed of Establishment No. 15 dated August 5, 2010, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E. ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

Jumlah Karyawan per 31 Desember 2025
Total Employee as of December 31, 2025

72 orang
72 people

Alamat Kantor Pusat [C.2]
Address of Head Office [C.2]

Treasury Tower Level 9 Unit G-H
District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Phone +62 (021) 50333144

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp231.960.000.000
Rp231,960,000,000

Situs Web
Website

www.arkora.com

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid-Up Capital

Rp73.212.375.000
Rp73,212,375,000

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Ricky Hartono
corporate.secretary@arkora.com

Pencatatan Saham
Share Listing

8 Juli 2022
July 8, 2022

Hubungan Investor
Investor Relation

Nicko Yosafat
n.yosafat@arkora.com

Skala Usaha [C.3]

Business Scale [C.3]

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Total Aset Total Assets	Rp Juta Rp Million	1.696.544	1.319.355	1.157.639
Total Liabilitas Total Liabilities	Rp Juta Rp Million	1.180.344	867.728	719.723
Jumlah Karyawan Total Employees	Orang People	72	75	83
Komposisi Kepemilikan Saham Composition of Share Ownership	- PT Arkora Bakti Indonesia (41,89%) - PT Energia Prima Nusantara (26,55%) - Masyarakat Public (31,56%)			
Wilayah Operasional Operational Area	Seluruh aktivitas usaha Perseroan berada di wilayah Indonesia, dengan kantor pusat di Jakarta dan 5 (lima) PLTA yang tersebar di Garut, Tanggamus, Luwu Timur, Poso dan Tana Toraja. The Company's business activities are located in Indonesia, with its headquarters in Jakarta and 5 (five) HPP in several areas including Garut, Tanggamus, Luwu Timur, Poso and Tana Toraja.			

Riwayat Singkat Perseroan

Company in Brief

PT Arkora Hydro Tbk ("Perseroan") adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik yang berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama PT Arkora Hydro berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 5 Agustus 2010. Akta tersebut kemudian telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-40544.AH.01.01 Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010. Hingga laporan ini dipublikasikan, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 4 Maret 2022 ("Akta Perseroan No. 12/2022"). Nama Perseroan diubah menjadi PT Arkora Hydro Tbk berdasarkan Akta No. 12 oleh Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn. Pencantuman Tbk (singkatan dari kata terbuka) merupakan pemenuhan persyaratan sebagai perusahaan terbuka.

PT Arkora Hydro Tbk ("Company") is a company engaged in electric power generation, located in Jakarta. The Company was founded under the name of PT Arkora Hydro, based on Deed of Establishment No. 15 dated August 5, 2010. This deed was then ratified by the Minister of Law and Human Rights based on the Decree of Minister of Law and Human Rights No. AHU-40544.AH.01.01 of 2010, dated August 18, 2010. Until this report was published, the Company had undergone several changes to its Articles of Association, with the latest change restated based on the Deed of Circular Resolution of Shareholders No. 12 dated March 4, 2022 (Company Deed No. 12/2022). The Company's name was changed to PT Arkora Hydro Tbk based on Deed No. 12 by Notary Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn. The inclusion of Tbk (an abbreviation of the word public) meets one of the requirements of a public company.



Perseroan semakin menunjukkan eksistensinya dengan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*) dan menjadi perusahaan terbuka dengan mencatatkan sahamnya pada 8 Juli 2022 di Bursa Efek Jakarta dengan kode saham "ARKO". Paska tercatat dalam Bursa, Perseroan bergerak semakin aktif dalam menangkap berbagai peluang bisnis dan tumbuh bertambah besar sebagai salah satu perusahaan pembangkitan tenaga listrik di Indonesia.

Perseroan memiliki dedikasi yang tinggi untuk terus menerus memberikan kontribusinya dalam pengembangan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan energi terbarukan di Indonesia melalui pembangunan Pembangkit Listrik aliran sungai langsung (*run-of-river*), terutama pada daerah-daerah terpencil dengan permintaan yang stabil tetapi memiliki pasokan energi listrik yang tidak mencukupi. Keberhasilan Perseroan dalam menjalankan roda bisnis sampai hari ini diimbangi dengan pemberian manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar guna membangun masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Dengan dukungan tenaga ahli yang memiliki pengalaman serta kompetensi yang mumpuni dalam bidang Pembangkitan Listrik Perseroan telah memperoleh keberhasilannya dengan memiliki pembangkit listrik yang beroperasi sebesar 62,8 MW serta *pipeline project* dengan total kapasitas lebih dari 300 MW sampai dengan tahun 2025.

Sinergi solid yang terjalin antara seluruh komponen Perseroan memungkinkan Perseroan untuk meraih peluang-peluang pasar yang baru sehingga daya saing dan posisi Perseroan tetap kompetitif di industri yang digeluti. Dengan begitu, Perseroan optimis dapat terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

The Company consistently shows its existence by officially listing its shares on the Indonesia Stock Exchange by holding an initial public offering (IPO) and becoming a public company by listing its shares on July 8, 2022 on the Jakarta Stock Exchange with ticker code "ARKO". After being listed on the Stock Exchange, the Company agilely moves in capturing multiple business opportunities and grows bigger as one of the electric power generation companies in Indonesia.

The Company is highly dedicated to continuously contributing to the development and operation of Hydropower Plants (HPP) in Indonesia. It aims to accelerate the development of renewable energy in Indonesia through the construction of run-of-river hydropower plants, particularly in remote areas with stable demand but an insufficient supply of electrical energy. The Company's success in running its business to date is balanced by providing maximum benefits to the surrounding community in building a sustainable future for Indonesia.

Supported by experts with experience and competence in the field of hydropower, the Company has succeeded in having a 17.4 MW operating power plant in 2021. Currently, the Company has 62.8 MW, along with pipeline projects with a total capacity of more than 300 MW.

The solid synergy existing between all components of the Company enables the Company to seize new market opportunities thus its competitiveness and position remain high in its industry. Through this way, the Company is optimistic that it will be able to continue making a significant contribution to the national economy.

Informasi Perubahan Nama Perseroan Information of the Company's Name Changes

Sejak berdirinya pada tahun 2010 hingga akhir 2025, Perseroan tidak melakukan perubahan nama.

Since its establishment in 2010 and until the end of 2025, the Company has never changed its name.





Jejak Langkah Milestone



2012

Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik Proyek Cikopo

Perseroan memperoleh Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) pertama kali untuk kapasitas Proyek Cikopo 7,4 MW dengan PLN dan mulai melakukan konstruksi Proyek Cikopo pada tahun 2013.

Signing of the Cikopo Power Purchase Agreement

The Company obtained the first Power Purchase Agreement (PPA) for a capacity of Project Cikopo 7.4 MW with PLN and started the construction of Project Cikopo in 2013.



2017

Operasional Cikopo

Proyek Cikopo mulai beroperasi.

Cikopo Operational

Project Cikopo has been operating commercially.



2010

Pendirian Perusahaan

Perseroan didirikan dengan nama PT Arkora Hydro pada tahun 2010 dengan mengedepankan energi terbarukan dalam prinsipnya.

Company establishment

The Company was established under the name of PT Arkora Hydro in 2010 by prioritizing renewable energy in its principles.



2014

Penandatanganan PJBL Koro Tomasa

Penandatanganan PJBL untuk Proyek Koro Tomasa dengan kapasitas 10 MW dan Perseroan memulai konstruksi Proyek Koro Tomasa.

Signing of the Koro Tomasa PPA

Signing a PPA contract for a capacity of Koro Tomasa Project 10 MW and also the Company started the construction of Project Koro Tomasa.



2020

Operasional Koro Tomasa dan PJBL Koro Yaentu

Perseroan berhasil melakukan komersial Proyek Koro Tomasa dan melakukan penandatanganan dengan kapasitas Proyek Koro Yaentu 10 MW

Operations of Koro Tomasa and PPA Koro Yaentu

Project Koro Tomasa has been operating commercially and PPA for Project Koro Yaentu 10 MW.



2024

Operasional Proyek Koro Yaentu

- Proyek Tomoni berhasil mendapatkan pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada tanggal 15 Agustus 2024.
- Proyek Koro Yaentu telah beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Oktober 2024.

Project Koro Yaentu Operational

- Project Tomoni received financing from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) on August 15, 2024.
- Project Koro Yaentu has been operating commercially.

2022

Go-Public

- Perseroan resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "ARKO" pada 8 Juli 2022.
- Perseroan melakukan penandatanganan PJBL Proyek Kukusan 2 (5.4 MW) di Tanggamus, Lampung dan memulai konstruksi.

Go-Public

- The Company was officially listed on the Indonesia Stock Exchange with ticker code "ARKO" on July 8, 2022.
- The Company signed the PPA for Project Kukusan 2 (5.4 MW) in Tanggamus, Lampung and commenced construction.



2025

Penandatanganan PJBL Proyek Pongbembe dan Tahap Awal Konstruksi

Penandatanganan kontrak PJBL untuk Proyek Pongbembe (20 MW) dan Perseroan memulai konstruksi Proyek Pongbembe.

Signing of the PPA for the Pongbembe Project and Early Stage of Construction

Signing a PPA contract for Project Pongbembe (20 MW) and also the Company started the construction of Project Pongbembe.

2023



Penerbitan Green Bonds

- Perseroan menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan "Green Bonds" dan telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 9 Agustus 2023.
- Proyek Kukusan 2 mendapatkan fasilitas pembiayaan konstruksi PLTA dari PT Indonesia Infrastructure Finance.
- Perseroan melalui anak perusahaannya, PT Arkora Hydro Malili telah menandatangani PJBL dengan PLN untuk mengembangkan Proyek Tomoni dengan kapasitas produksi 10 MW.

Green Bonds Issuance

- The Company issued Environmentally Friendly Bond "Green Bonds" and was listed on the Indonesia Stock Exchange on August 9, 2023.
- Project Kukusan 2 received funding from PT Indonesia Infrastructure Finance.
- The Company, through its subsidiary PT Arkora Hydro Malili, has signed a Power Purchase Agreement (PPA) with PLN to develop the Tomoni Project with 10 MW production capacity.

2021

Pembiayaan Proyek Koro Yaentu

- Perseroan memulai konstruksi Proyek Koro Yaentu.
- Proyek Koro Yaentu mendapatkan pembiayaan dari PT Indonesia Infrastructure Finance.

Project Koro Yaentu Financing

- The Company started the construction of Project Koro Yaentu.
- Project Koro Yaentu received funding from PT Indonesia Infrastructure Finance.



Visi dan Misi [C.1] Vision and Mission [C.1]

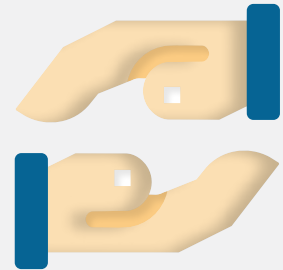


Visi Vision

Memperluas portofolio proyek energi terbarukan kami dan menjadi pemimpin pasar pembangkit listrik dari energi terbarukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

Expanding our portfolio of renewable energy projects and becoming the market leader in generating electricity from renewable energy in an environmentally and socially responsible manner.

Misi Mission



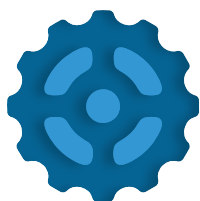
Mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia yang akan mengurangi emisi karbon dan membangun masa depan yang berkelanjutan.

Developing renewable energy potential in Indonesia to reduce carbon emissions and build a sustainable future.

Penetapan Visi dan Misi Declaration of Vision and Mission

Visi dan Misi Perseroan senantiasa ditinjau oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan pernyataan yang berlaku saat ini dinilai masih relevan dengan tujuan usaha dan kondisi saat ini.

The Company's Vision and Mission are being reviewed regularly by the Board of Commissioners and the Board of Directors, and the current statements are considered to be relevant to the business goals and current conditions.



Nilai-Nilai dan Budaya Korporasi [C.1] Corporate Culture [C.1]

Perseroan menerapkan budaya korporasi sesuai dengan nilai yang berlaku bagi Arkora Hydro dan anak usahanya, yaitu:

Pentingnya Kualitas dan Keberlanjutan Proyek

Kami bercita-cita memberikan solusi nilai tambah terkemuka secara proaktif, menyeluruh, dan andal, serta memberikan layanan terbaik secara profesional, hemat, dan tepat waktu.

Integritas

Kami selalu bertindak dengan integritas dan mematuhi standar etika dan moral tertinggi dalam segala hal yang kami lakukan. Kami menunjukkan kejujuran dan keterbukaan kepada orang lain dan diri kami sendiri dengan menegakkan transparansi, keadilan, dan kepedulian mutlak untuk kesejahteraan planet ini dan berjuang untuk kesejahteraan karyawan kami, klien kami, dan masyarakat. Kami menjalankan semua bisnis kami secara sadar dan bertanggung jawab.

Sinergi

Kami bekerja dalam kesatuan, percaya akan keragaman, dan beranggapan bahwa membangun masyarakat lokal adalah kunci kesuksesan. Dengan bekerja sama dengan kelompok dan masyarakat lokal, kami saling mengembangkan satu sama lain untuk menjadi individu yang lebih baik dan sebagai pemain tim di seluruh fase proyek kami. Kerja sama timlah yang membuat impian menjadi kenyataan.

Dedikasi

Kami berdedikasi untuk negara kami, perusahaan kami, dan lingkungan kami. Kami percaya keberhasilan perusahaan ini akan menjadi kontribusi kami bagi pertumbuhan bangsa kita. Kami berkomitmen penuh dan mendedikasikan diri kami melalui integritas dan sinergi untuk tujuan yang lebih besar dari diri kami sendiri.

The Company applies a corporate culture that aligns with the values upheld by Arkora Hydro and its subsidiaries:

The Importance of Project Quality and Sustainability

We aspire to provide leading added-value solutions proactively, comprehensively, and reliably, while also providing the best services professionally, economically, and timely.

Integrity

We consistently act with integrity, adhering to the highest ethical and moral standards in everything we do. We demonstrate honesty and transparency to others and ourselves by taking transparency, fairness, and absolute concern seriously for the well-being of the planet and our employees, our clients, and society. We carry our business consciously and responsibly.

Synergy

We work in unity, believe in diversity, and believe that building local communities is the key to success. By working together with local groups and communities, we develop each other to become better individuals and team players throughout all phases of our projects. Teamwork is what makes dreams come true.

Dedication

We are dedicated to our country, our company, and our environment. We believe the success of this company will be our contribution to the growth of our nation. We are fully committed and dedicated through integrity and synergy to a cause greater than ourselves.



Bidang Usaha [C.4] Business Line [C.4]

Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar Terakhir

Kegiatan dan bidang usaha Perseroan sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan tenaga listrik.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah:

- a. Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111)
Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan, dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.

Namun, kegiatan usaha utama Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah kegiatan Pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi aliran dan terjunan air.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah:

- a. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121)
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.

Line of Business Based on the Latest Articles of Association

The Company's activities and business fields are in line with Article 3 of the Articles of Association, the Company's intents and purposes are to carry out business in the field of power generation.

The Company's Major Business Activities based on the Articles of Association are:

- a. Electric Power Generation (KBLI 35111)
This group includes producing electric power through power generation using multiple energy sources. First, fossil energy sources such as coal, gas, fuel oil and diesel. Second, renewable energy sources such as geothermal heat, wind, bioenergy, sunlight, water flows and waterfalls, movement and temperature differences in ocean layers. Third, hybrid energy sources that combine fossil energy sources with renewable energy, and energy originating from energy storage technology.

However, the current major business activity of the Company is generating electricity through water flow and waterfall energy sources.

Supporting Business Activities:

The Company's Supporting Business Activities based on the Articles of Association are:

- a. Operation of Power Supply Installations (KBLI 35121)
This group includes operations by other parties for facilities producing electrical energy, electric power transmission system facilities and electric power distribution systems.

b. Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (KBLI 35122)

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

c. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129)

Kelompok ini mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)

Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk juga jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

b. Operation of Power Utilization Installations (KBLI 35122)

This group includes operations by other parties for installation facilities utilizing electric power, including installations using high voltage electricity, installations using medium voltage electricity, and installations using low voltage electricity.

c. Other Electric Power Supporting Activities (KBLI 35129)

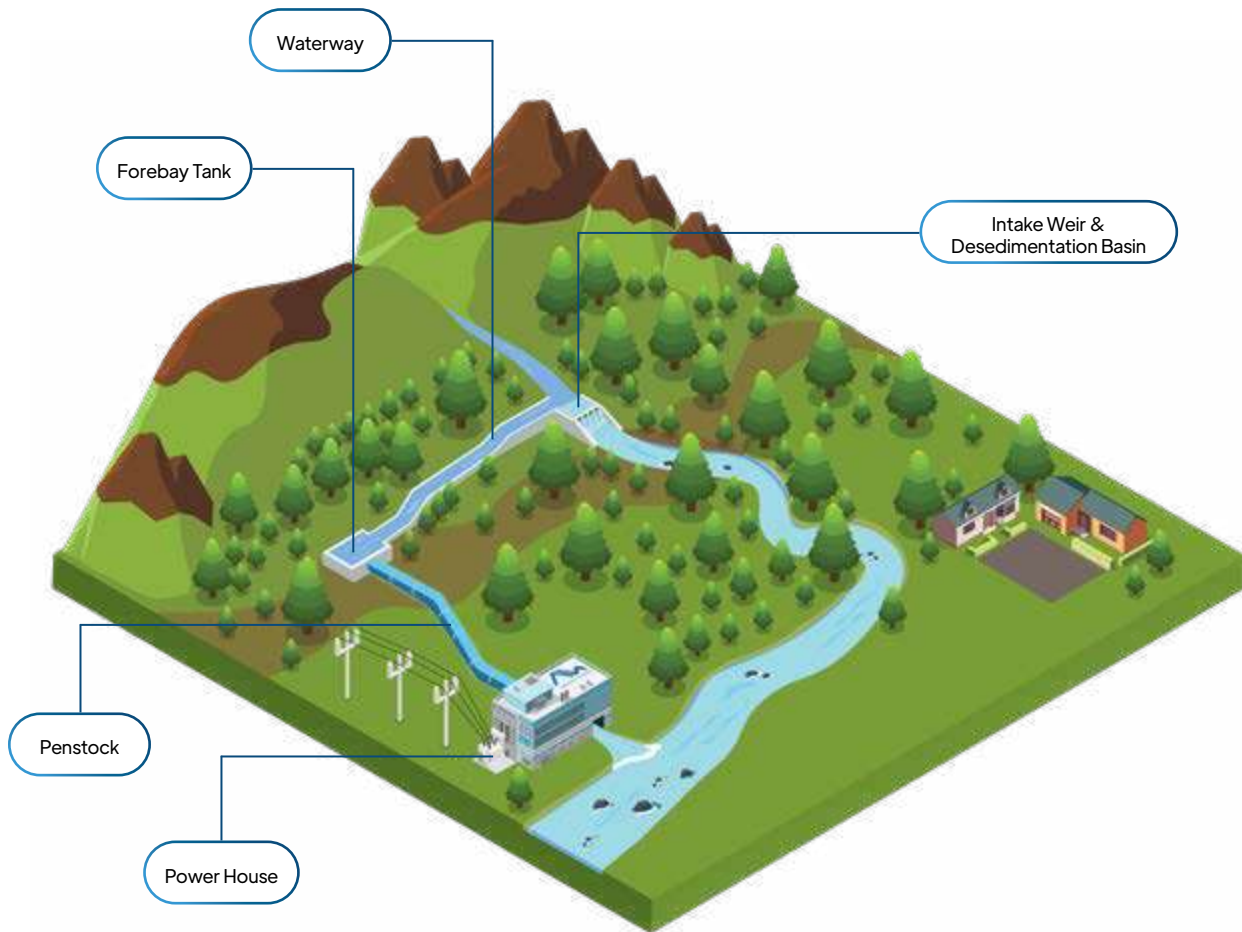
This group includes other services directly related to the supply and utilization of electric power but are not included in groups 35121 to. 35122, such as meter recording services, billing and electricity credit/token trading activities along with other electricity supporting activities.

d. Other Management Consulting Activities (KBLI 70209)

Includes providing advice, guidance and business operational assistance and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; finance-related decisions; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; scheduling plan and production control. The provision of business services include advice, guidance and operational assistance for types of management functions, management consultations for agronomists and agricultural economists in agricultural and similar fields, design of accounting methods and procedures, cost accounting program, budget monitoring procedures, advice and assistance to business and community services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information and others. This also includes infrastructure investment study services.



Gambaran Sederhana Skema PLTA Aliran Sungai Langsung Simple Diagram of a Run-of-River Hydropower Plant



Bidang Usaha Yang Dijalankan Pada Tahun 2025 dan Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan Business Line Operated in 2025 and the Disclosure in the Financial Statement

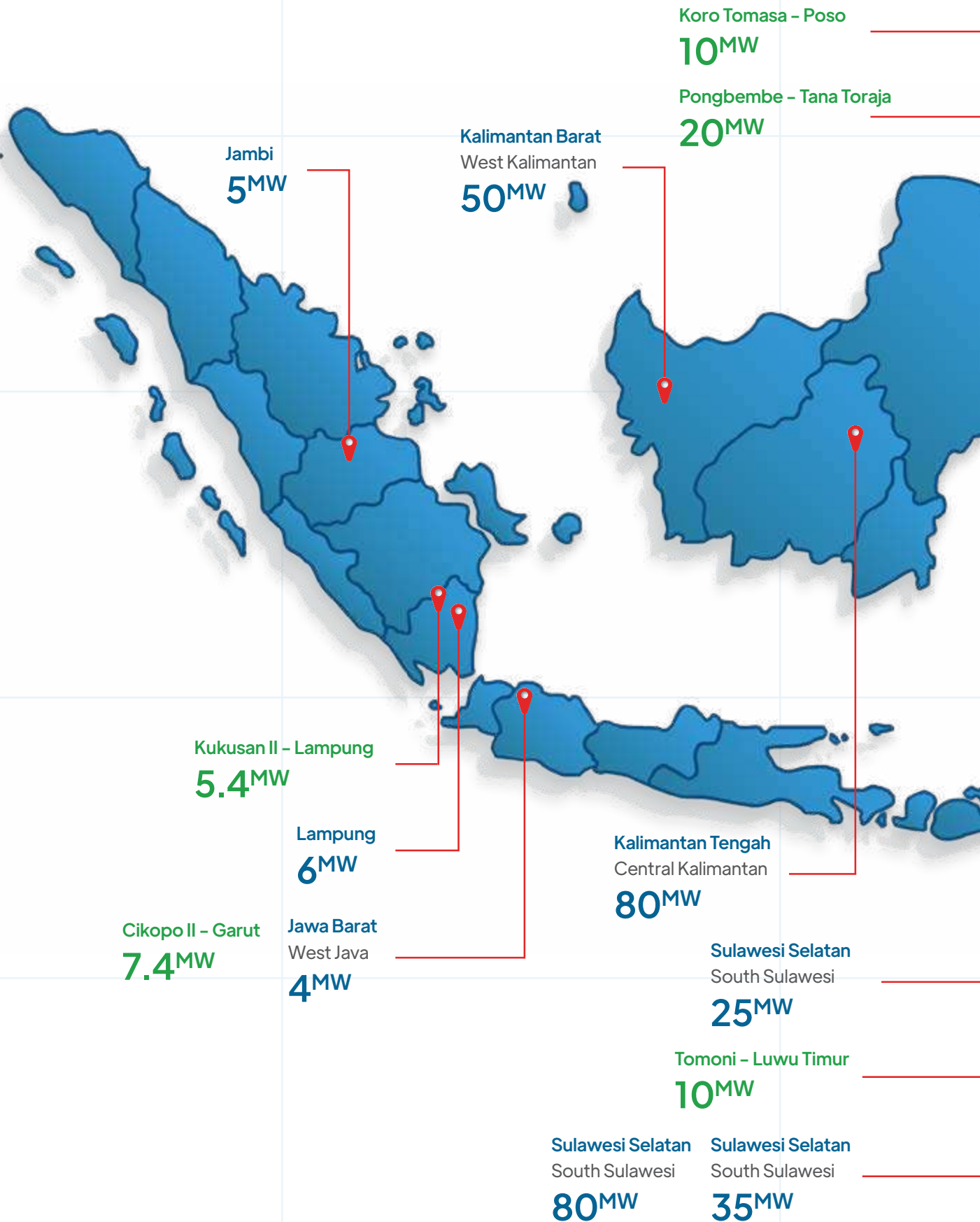
Sepanjang tahun 2025, Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama yang sesuai dengan Anggaran Dasar terakhirnya. Informasi tentang kegiatan usaha di atas juga telah tercantum dalam Laporan Keuangan PT Arkora Hydro Tbk untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.

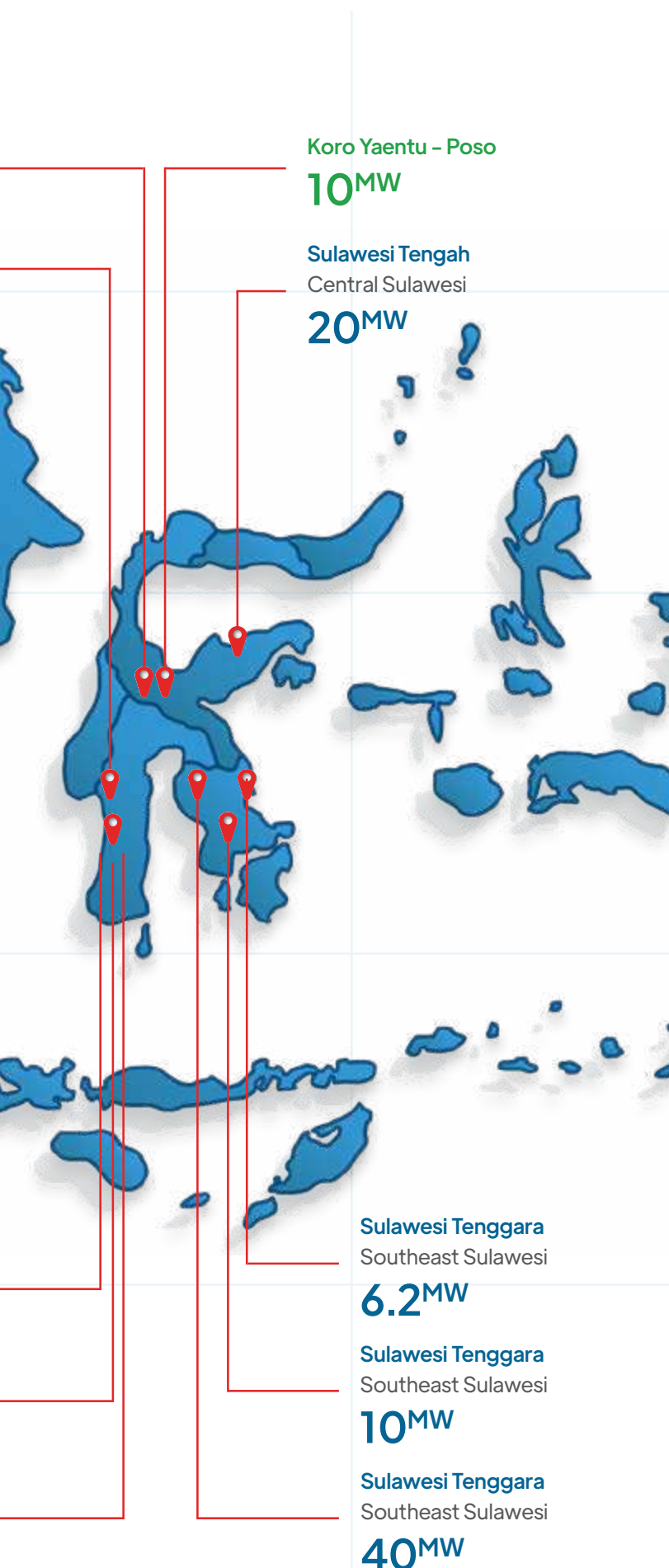
The Company has conducted major business activities in accordance with its latest Articles of Association in 2025. Information on the aforementioned business activities has also been included in the Financial Statement of PT Arkora Hydro Tbk for the fiscal year ending on December 31, 2025.





Wilayah Operasional Operational Area





Kapasitas Kontrak Contracted Capacity

62.8^{MW}

Kontrak Saat Ini Current Pipeline

>300^{MW}

Kantor Pusat | Head Office

Treasury Tower Level 9 Unit G-H
District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Phone +62 (021) 50333144

Sedang Beroperasi | In Operation

- **Proyek Cikopo 2** | Project Cikopo 2
Desa Panawa, Pamulihan, Garut, Jawa Barat.
Panawa Village, Pamulihan, Garut, West Java.
- **Proyek Koro Yaentu** | Project Koro Yaentu
Desa Kamba, Pamona Timur, Poso, Sulawesi Tengah.
Kamba Village, East Pamona, Poso, Central Sulawesi.
- **Proyek Koro Tomasa** | Project Koro Tomasa
Desa Kuku, Pamona Utara, Poso, Sulawesi Tengah.
Kuku Village, Northern Pamona, Poso, Central Sulawesi.

Dalam Pembangunan | Under Construction

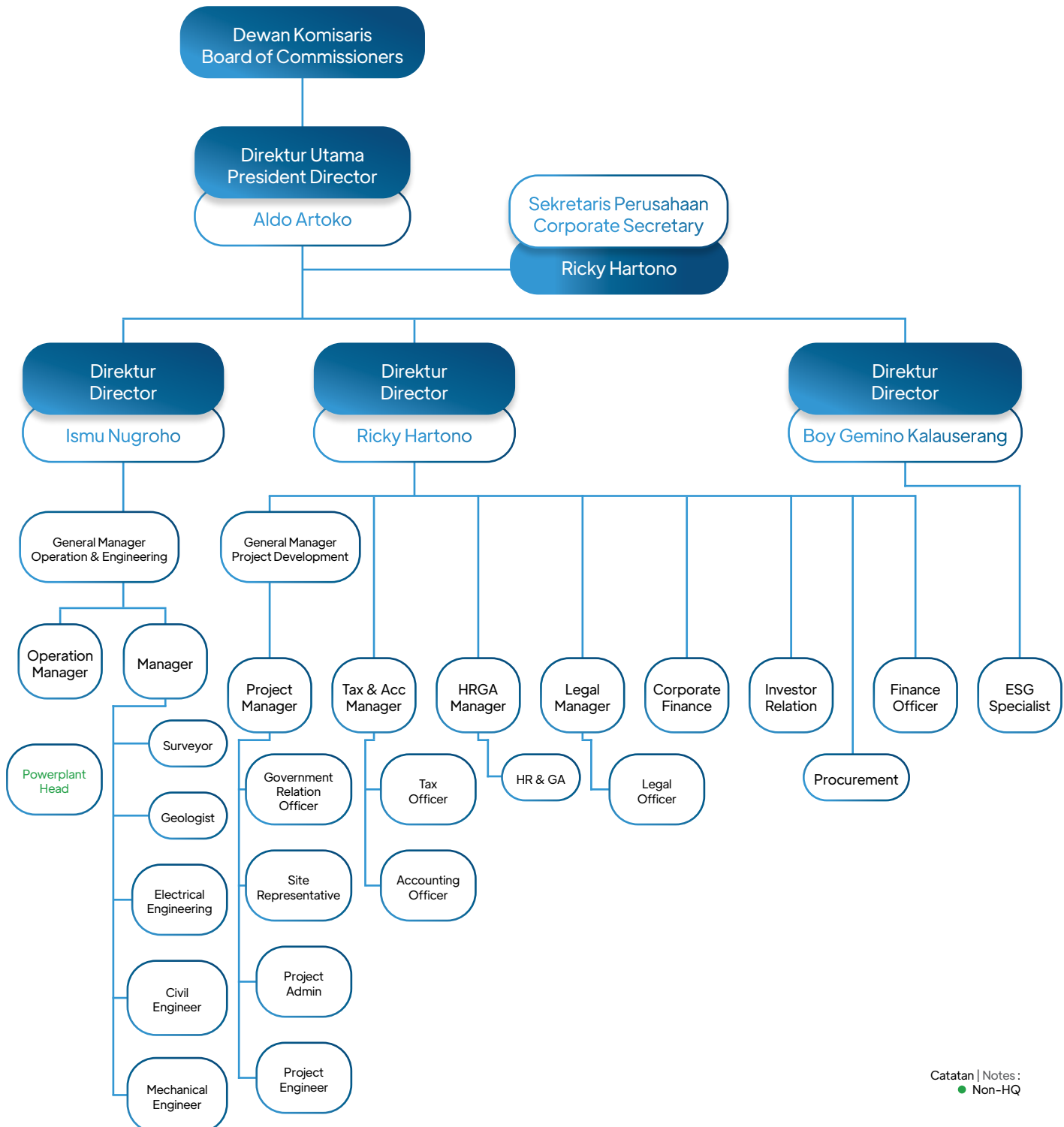
- **Proyek Kukusan 2** | Project Kukusan 2
Desa Way Panas, Wonosobo, Tanggamus, Lampung.
Way Panas Village, Wonosobo, Tanggamus, Lampung.
- **Proyek Tomoni** | Project Tomoni
Desa Ujung Baru dan Rantemario, Kecamatan Tomoni,
Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
Ujung Baru Village and Rantemario, Tomoni Subdistrict, East
Luwu Regency, South Sulawesi Province.
- **Proyek Pongbembe** | Project Pongbembe
Desa Pongbembe dan Puangbembe Mesakada, Kecamatan
Simbuang, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan
Pongbembe Village and Puangbembe Mesakada Village,
Simbuang Subdistrict, Tana Toraja District, South Sulawesi
Province, Indonesia



Struktur Organisasi Organizational Structure

Perseroan telah menetapkan struktur organisasi yang berlaku hingga 31 Desember 2025. Struktur organisasi yang berlaku telah memperhatikan kondisi bisnis saat ini dan perkembangan ke depannya.

The Company has established an organizational structure valid until December 31, 2025. The applicable organizational structure takes into account current business conditions and future developments.



Catatan | Notes:
● Non-HQ

Keanggotaan Dalam Asosiasi [C.5] Membership in Association [C.5]

Nama Asosiasi Name of Association	Status	Skala Scale
Indonesia Corporate Secretary Association	Anggota Aktif Active Member	Nasional National
Asosiasi Investor Relations Indonesia	Pengurus Committee	Nasional National

Perubahan Organisasi Yang Bersifat Signifikan [C.6] Significant Changes Within the Organization [C.6]

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan organisasi yang berpengaruh signifikan bagi kelangsungan usaha Perseroan.

In 2025, there are no organizational changes with significant impact on the Company's business continuity.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Changes in Membership of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Sepanjang tahun 2025, hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan pada 2026, tidak terdapat perubahan pada komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

No changes to the composition of the Board of Commissioners and Directors' members have been made throughout 2025 until this Annual Report is published in 2026.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 Composition of Members of Board of Commissioners as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term of Office
Arya Pradana Setiadharna	Komisaris Utama President Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022 Deed of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022	22 September 2022–22 September 2027, periode kedua September 22, 2022–September 22, 2027, second period
Iwan Hadiangoro	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022 Deed of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022	22 September 2022–22 September 2027, periode pertama September 22, 2022–September 22, 2027, first period
Drs. Indarto, S.H.	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022 Deed of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022	22 September 2022–22 September 2027, periode kedua September 22, 2022–September 22, 2027, second period



Susunan Keanggotaan Direksi per 31 Desember 2025

Composition of Members of the Board of Directors as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term of Office
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022 Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022	22 September 2022–22 September 2027, periode kedua September 22, 2022–September 22, 2027, second period
Ricky Hartono	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022 Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022	22 September 2022–22 September 2027, periode kedua September 22, 2022–September 22, 2027, second period
Ismu Nugroho	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022 Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022	22 September 2022–22 September 2027, Periode kedua September 22, 2022–September 22, 2027, second period
Boy Gemino Kalauserang	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022 Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022	22 September 2022–22 September 2027, Periode pertama September 22, 2022–September 22, 2027, first period

Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners





Arya Pradana Setiadharma

Komisaris Utama | President Commissioner



Warga Negara : Indonesia
Nationality : Indonesian



Usia : 41 tahun
Age : 41 years old



Domisili : DKI Jakarta
Domicile : DKI Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022.

Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders Resolution of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022.

Riwayat Pendidikan Educational Background

1. Sarjana *Industrial Engineering*, Purdue University (2006).
2. Master *Industrial Engineering*, Purdue University (2007).
1. Bachelor of Industrial Engineering, Purdue University (2006).
2. Master of Industrial Engineering, Purdue University (2007).

Riwayat Karier Employment History

1. Direktur PT Qlue Performa Indonesia (2016 – 2024);
2. Direktur PT Awam Integrasi Sandidata (2017 – 2024).
1. Director of PT Qlue Performa Indonesia (2016 – 2024);
2. Director of PT Awam Integrasi Sandidata (2017 – 2024).

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

1. Direktur Utama PT Prasetya Dwidharma (2008 – sekarang);
2. Direktur PT Verdanco Engineering (2010 – sekarang);
3. Komisaris Utama PT Nodeflux Teknologi Indonesia (2016 – sekarang);
4. Menjadi Komisaris di beberapa Perusahaan dalam grup Perusahaan.
1. President Director of PT Prasetya Dwidharma (2008 – present);
2. Director of PT Verdanco Engineering (2010 – present);
3. President Commissioner of PT Nodeflux Teknologi Indonesia (2016 – present);
4. Commissioner in several companies within the group.

Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia, perusahaan induk Perseroan.

Affiliated with the shareholders of PT Arkora Bakti Indonesia, the Company's parent company.

Kepemilikan Langsung di Perseroan Ownership in the Company

Beliau memiliki saham pada PT Arkora Hydro Tbk sebesar 1.725.000 atau setara dengan 0,06% berdasarkan Laporan Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2025.

He has shares in PT Arkora Hydro Tbk amounting to 1,725,000 shares or equivalent to 0.06% based on the Shareholders Register Report as of December 31, 2025.



Iwan Hadiangoro

Komisaris | Commissioner



Warga Negara : Indonesia
Nationality : Indonesian



Usia : 57 tahun
Age : 57 years old



Domisili : DKI Jakarta
Domicile : DKI Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022.

Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022.

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sarjana Ekonomi (Manajemen Keuangan) dari Universitas Indonesia (1995).

Bachelor of Economics (Financial Management) from the University of Indonesia (1995).

Riwayat Karier Employment History

1. *Chief Financial Officer* PT GE Finance Indonesia (1998 – 2010);
2. *Direktur Keuangan* Astra Sedaya Finance (2006–2008);
3. *Chief Group Treasury & Investor Relations* PT Astra International Tbk (2010 – 2015).
1. CFO and Chief Financial Officer PT GE Finance Indonesia (1998 – 2010);
2. Finance Director Astra Sedaya Finance (2006–2008)
3. Chief Group Treasury & Investor Relations at PT Astra International Tbk (2010 – 2015).

Kepemilikan Langsung di Perseroan Ownership in the Company

Beliau tidak memiliki saham di PT Arkora Hydro Tbk.

He has no share ownership in PT Arkora Hydro Tbk.

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

1. Direktur PT United Tractors Tbk (2015 – sekarang);
2. Presiden Direktur PT Unitra Persada Energia (2019 – sekarang);
3. Presiden Direktur PT Danusa Tambang Nusantara (2023 – sekarang);
4. Direktur Utama PT Energia Prima Nusantara (2024 – sekarang);
5. Direktur PT Karya Supra Perkasa, (2020 – sekarang);
6. Direktur Unitra Power Pte. Ltd (2019 – sekarang);
7. Komisaris Utama PT Unitra Nusantara Persada,, PT Bina Pertiwi Energi, PT Sumbawa Jutaraya, PT Agincourt Resources, PT Rajawali Sigi Lestari, PT Anugerah Surya Pacific Resources, PT Stargate Pasific Resources, PT Stargate Mineral Asia, dan PT Stargate Dua Pasific Resources (2024 – sekarang);
8. Komisaris Utama PT Supreme Energy Sriwijaya (2024 – sekarang);
9. Komisaris PT Bhumi Jati Power (2016 – sekarang);
10. Komisaris PT Acset Indonusa Tbk (2018 – sekarang);
11. Komisaris PT United Tractors Pandu Engineering (2023 – sekarang);
12. Komisaris PT Bhumi Jepara Services (2024 – sekarang).
1. Director of PT United Tractors Tbk (2015 – present);
2. President Director of PT Unitra Persada Energia (2019 – present);
3. President Director of PT Danusa Tambang Nusantara (2023 – present);
4. President Director of PT Energia Prima Nusantara (2024 – present);
5. Director of PT Karya Supra Perkasa, (2020 – present);
6. Director of Unitra Power Pte. Ltd (2019 – present);
7. President Commissioner of PT Unitra Nusantara Persada, PT Ilthabi Energia Tenagahydro, PT Redelong Hydro Energy, PT Bina Pertiwi Energi, PT Sumbawa Jutaraya, PT Agincourt Resources, PT Rajawali Sigi Lestari, PT Anugerah Surya Pacific Resources, PT Stargate Pacific Resources, PT Stargate Mineral Asia, and PT Stargate Dua Pacific Resources (2024 – present);
8. Vice President Commissioner of PT Supreme Energy Sriwijaya (2024 – present);
9. Commissioner of PT Bhumi Jati Power (2016 – present);
10. Commissioner of PT Acset Indonusa Tbk (2018 – present);
11. Commissioner of PT United Tractors Pandu Engineering (2023 – present);
12. Commissioner of PT Bhumi Jepara Services (2024 – present).

Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors and is not affiliated with any Major/Controlling Shareholders.



Warga Negara : Indonesia
Nationality : Indonesian



Usia : 75 tahun
Age : 75 years old



Domisili : DKI Jakarta
Domicile : DKI Jakarta

Drs. Indarto. SH

Komisaris Independen | Independent Commissioner

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022.

Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022.

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya (1995).

Bachelor of Laws from Bhayangkara University, Surabaya (1995).

Riwayat Karier Employment History

1. Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Purwakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Jawa Barat (1998 – 1999);
 2. Wakil Direktur Pidana Korupsi, Komando Reserse (Koserse) Polri (1999 – 2001);
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (2001 – 2002);
 4. Karo Analisis Bareskrim Polri (2002 – 2004);
 5. Direktur Pidana Korupsi, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) (2004 – 2006);
 6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur (2006 – 2008).
1. Regional Police Chief (Kapolwil) of Purwakarta, West Java Regional Police (Polda) of Republic of Indonesia (1998 – 1999);
 2. Deputy Director for Corruption Crimes (Koserse), National Police Investigation Command (1999 – 2001);
 3. Head of the Regional Police (Kapolda) of Southeast Sulawesi, Republic of Indonesia (2001 – 2002);
 4. Head of Analysis Bureau of National Police Criminal Investigation Department (2002 – 2004);
 5. Deputy Director of Corruption Crimes, National Police Criminal Investigation Agency of the Republic of Indonesia (Bareskrim Polri) (2004 – 2006);
 6. Head of the Regional Police (Kapolda) of East Kalimantan, Republic of Indonesia (2006 – 2008).

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain.

He has no concurrent position in other companies.

Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors and is not affiliated with any Major/Controlling Shareholders.

Kepemilikan Langsung di Perseroan Ownership in the Company

Beliau tidak memiliki saham di PT Arkora Hydro Tbk.

He has no share ownership in PT Arkora Hydro Tbk.

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors





Aldo Henry Artoko

Direktur Utama | President Director



Warga Negara : Indonesia
Nationality : Indonesian



Usia : 41 tahun
Age : 41 years old



Domisili : DKI Jakarta
Domicile : DKI Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022.

Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022.

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sarjana *Manufacturing Engineering and Management*, University of New South Wales (2008).

Bachelor's Degree in Manufacturing Engineering and Management, University of New South Wales (2008).

Riwayat Karier Employment History

1. Penilaian, Perbaikan Mesin dan Proses Produksi Rheem, Australia (2007 - 2008);
2. Konsultan Manajemen Proyek, PT Parsons Brinckerhoff, Australia (2008 - 2010).
1. Assessment, Improvement of Machinery and Production Processes at Rheem, Australia (2007 - 2008);
2. Project Management Consultant, PT Parsons Brinckerhoff, Australia (2008 - 2010).

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

1. Komisaris PT Verdanco Engineering (2010 - sekarang)
2. Menjadi Direksi dan Komisaris di beberapa perusahaan dalam grup Perseroan.
1. Commissioner, PT Verdanco Engineering (2010 - Present)
2. Director and Commissioner of several companies within the Company's group.

Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Utama/Pengendali.

He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors or with any Major/Controlling Shareholders.

Kepemilikan Langsung di Perseroan Ownership in the Company

Beliau memiliki saham pada PT Arkora Hydro Tbk sebesar 4.820.600 lembar saham atau setara dengan 0,16% berdasarkan Laporan Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2025

He has shares in PT Arkora Hydro Tbk amounting to 4,820,600 shares or equivalent to 0.16% based on the Shareholders Register Report as of December 31, 2025.



Ricky Hartono

Direktur | Director



Warga Negara : Indonesia
Nationality : Indonesian



Usia : 41 tahun
Age : 41 years old



Domisili : DKI Jakarta
Domicile : DKI Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022.

Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022.

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sarjana *Chemical Engineering*, University of Minnesota (2007).

Bachelor's Degree in Chemical Engineering, University of Minnesota (2007).

Riwayat Karier Employment History

1. *Product Manager* PT Deka Medica (2009 – 2011);
2. *Business Development Manager* PT Nugraha Siti Kumala (2010 – 2017).

1. Product Manager at PT Deka Medica (2009 – 2011);
2. Business Development Manager at PT Nugraha Siti Kumala (2010 – 2017).

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

1. Direktur PT Arkora Hydro Sulawesi (2018 – sekarang);
2. Direktur PT Arkora Energi Baru (2020 – sekarang);
3. Direktur PT Arkora Tenaga Matahari (2021 – sekarang); dan
4. Menjadi Direksi dan Komisaris di beberapa perusahaan dalam grup Perseroan.

1. Director of PT Arkora Hydro Sulawesi (2018 – present);
2. Director of PT Arkora Energi Baru (2020 – present);
3. Director of PT Arkora Tenaga Matahari (2021 – present).
4. Director and Commissioner of several companies within the Company's group.

Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia, perusahaan induk Perseroan.

Affiliated with the shareholders of PT Arkora Bakti Indonesia, the Company's parent company.

Kepemilikan Langsung di Perseroan Ownership in the Company

Beliau tidak memiliki saham di PT Arkora Hydro Tbk.

He has no share ownership in PT Arkora Hydro Tbk.



Ismu Nugroho

Direktur | Director



Warga Negara : Indonesia
Nationality : Indonesian



Usia : 71 tahun
Age : 71 years old



Domisili : DKI Jakarta
Domicile : DKI Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022.

Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022.

Riwayat Pendidikan Educational Background

1. Sarjana Teknik Sipil, Universitas Diponegoro (1983).
2. Master Teknik Jalan Raya, Institut Teknologi Bandung (1985).
1. Bachelor of Civil Engineering, Diponegoro University (1983).
2. Master of Highway Engineering, Bandung Institute of Technology (1985).

Riwayat Karier Employment History

1. *Civil Construction Superintendent* PT Sapto Renggo (1981 – 1982);
2. *Project Site Engineer* PT Sapto Renggo (1982 – 1984);
3. *Project Site* PT PLN (Persero) (1993 – 2007);
4. *Deputy Manager Engineering Hydro dan Diesel Generation* PT PLN (Persero) Pusenlis (2007 – 2020).
1. Civil Construction Superintendent at PT Sapto Renggo (1981 – 1982);
2. Project Site Engineer at PT Sapto Renggo (1982 – 1984);
3. Project Site at PT PLN (Persero) (1993 – 2007);
4. Deputy Manager of Engineering Hydro dan Diesel Generation at PT PLN (Persero) Pusenlis (2007 – 2020).

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

1. Direktur PT Arkora Sulawesi Selatan (2011 – sekarang)
2. Menjadi Direksi dan Komisaris di beberapa Perusahaan dalam grup Perseroan.
1. Director at PT Arkora Sulawesi Selatan (2011 – present)
2. Director and Commissioner of several companies within the Company's group.

Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/ Pengendali.

He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors and is not affiliated with any Major/Controlling Shareholders.

Kepemilikan Langsung di Perseroan Ownership in the Company

Beliau tidak memiliki saham di PT Arkora Hydro Tbk.
He has no share ownership in PT Arkora Hydro Tbk.



Boy Gemino Kalauserang

Direktur | Director



Warga Negara : Indonesia
Nationality : Indonesian



Usia : 52 tahun
Age : 52 years old



Domisili : DKI Jakarta
Domicile : DKI Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 84 tanggal 22 September 2022.

Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Arkora Hydro Tbk No. 84 dated September 22, 2022.

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Sarjana Hukum, Universitas Gajah Mada (1996).

Bachelor of Law, Gajah Mada University (1996).

Riwayat Karier
Employment History

1. Manager Legal PT United Tractors Pandu Engineering (2000 – 2004);
2. Kepala Bagian Hukum dan Kepala Penasihat Hukum PT Pamapersada Nusantara (2004 – 2021);
3. Komisaris PT Bina Pertiwi Energi (2021 – 2022);

1. Legal Manager of PT United Tractors Pandu Engineering (2000 – 2004);
2. Head of Legal and Chief Legal Counsel at PT Pamapersada Nusantara (2004 – 2021);
3. Commissioner of PT Bina Pertiwi Energi (2021 – 2022).

Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationship

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

He has no affiliated relationship with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors and is not affiliated with any Major/Controlling Shareholders.

Rangkap Jabatan
Concurrent Positions

1. Direktur Utama PT Unitra Nusantara Persada (2018 – sekarang)
2. Direktur PT Energia Prima Nusantara (2014 – sekarang)
3. Wakil Direktur PT Supreme Energy Rantau Dedap (2023 – sekarang)
4. Komisaris PT Itabhi Energia Tenaga Hidro (2021 – sekarang)
5. Komisaris PT Redelong Hydro Energy (2021 – sekarang)
6. Komisaris PT Uway Energi Perdana (2021 – sekarang)
7. Direksi PT Jabar Environmental Solution (2023 – sekarang)

1. President Director of PT Unitra Nusantara Persada (2018 – present);
2. Director of PT Energia Prima Nusantara (2014 – present);
3. Deputy Director of PT Supreme Energy Rantau Dedap (2023 – present)
4. Commissioner of PT Itabhi Energia Hidro Power (2021 – present);
5. Commissioner of PT Redelong Hydro Energy (2021 – present);
6. Commissioner of PT Uway Energi Perdana (2021 – present).
7. Director of PT Jabar Environmental Solution (2023 – present);

Kepemilikan Langsung di Perseroan
Ownership in the Company

Beliau tidak memiliki saham di PT Arkora Hydro Tbk.

He has no share ownership in PT Arkora Hydro Tbk.



Demografi Karyawan

Human Resources

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya mewujudkan visi dan misi dan Perseroan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan karyawan.

Per 31 Desember 2025, jumlah karyawan Perseroan di kantor pusat, di luar dari karyawan entitas anak, tercatat sebanyak 72 orang, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 75 orang.

Human Resources (HR) is an important element in realizing the vision and mission, and the Company is very concerned with the management and development of its employees.

As of December 31, 2025, the number of employees at the Company's headquarters, excluding employees of subsidiaries, was recorded at 72, representing a decrease compared to 75 employees last year.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Composition of Employees Based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2025	2024	2023
Laki-Laki Male	67	69	74
Perempuan Female	5	6	9
Jumlah Total	72	75	83

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Composition of Employees Based on Age

Usia Age	2025	2024	2023
>55 tahun >55 years old	7	7	5
46 – 55 tahun 46 – 55 years old	15	15	18
31 – 45 tahun 31 – 45 years old	35	37	41
<30 tahun <30 years old	15	16	19
<21 tahun <21 years old	0	0	0
Jumlah Total	72	75	83

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Composition of Employees Based on Educational Level

Tingkat Pendidikan Educational Level	2025	2024	2023
>S1 >Bachelor's Degree	19	22	25
Diploma Associate Degree	5	5	7
SMA atau Sederajat Senior High School or Equivalent	21	21	23
<SMA <Senior High School	27	27	28
Jumlah Total	72	75	83

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Composition of Employees Based on Organizational Level

Level Organisasi Organizational Level	2025	2024	2023
General Manager	1	1	1
Manager	5	5	4
Supervisor	3	3	3
Staf Senior Senior Staff	2	2	3
Staf Staff	39	42	47
Non-Staf Non-Staff	22	22	25
Jumlah Total	72	75	83

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

Composition of Employees Based on Employment Status

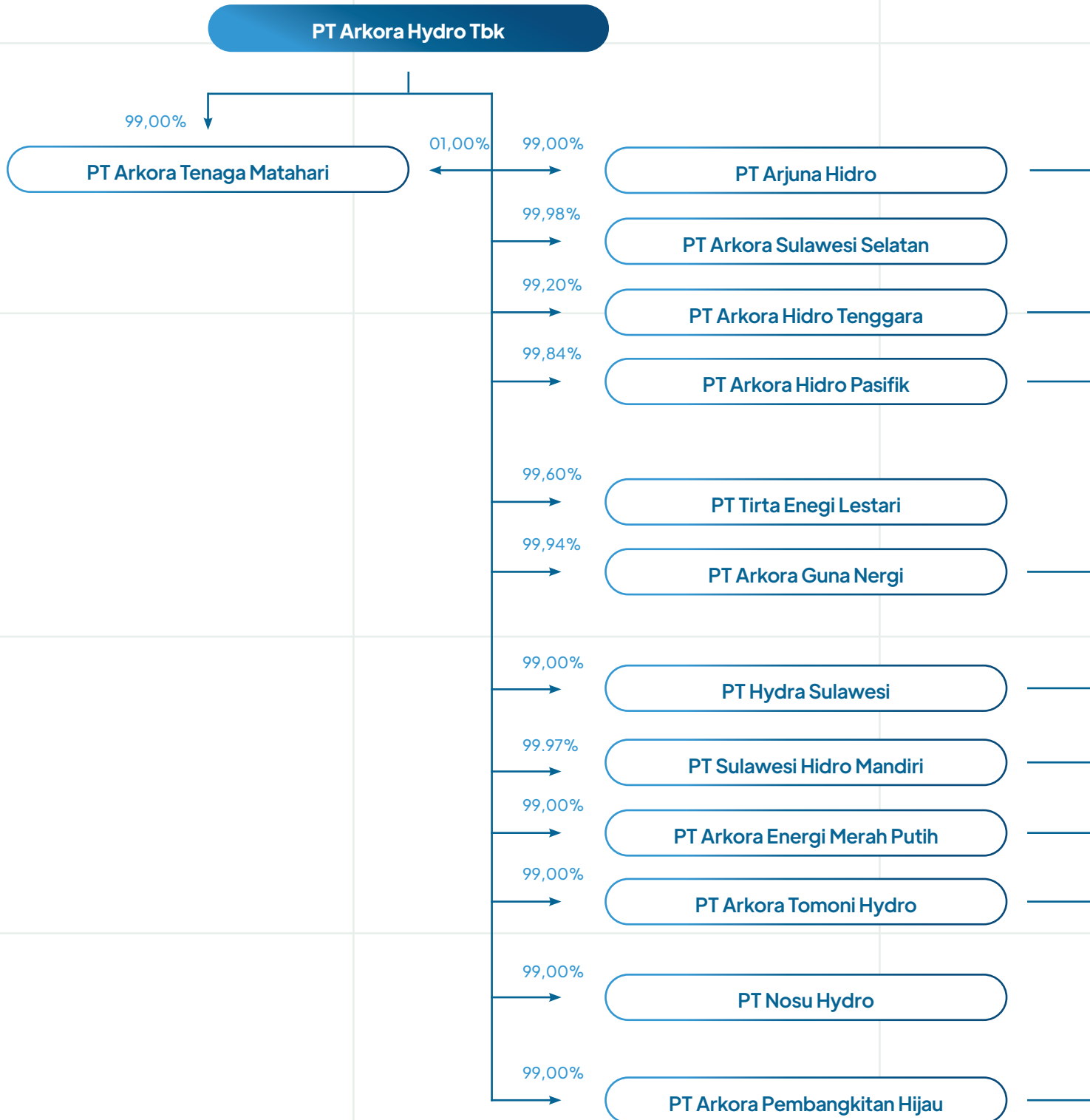
Status Ketenagakerjaan Employment Status	2025	2024	2023
Karyawan Tetap Permanent Employees	66	67	68
Karyawan Tidak Tetap Contract Employees	6	8	15
Jumlah Total	72	75	83

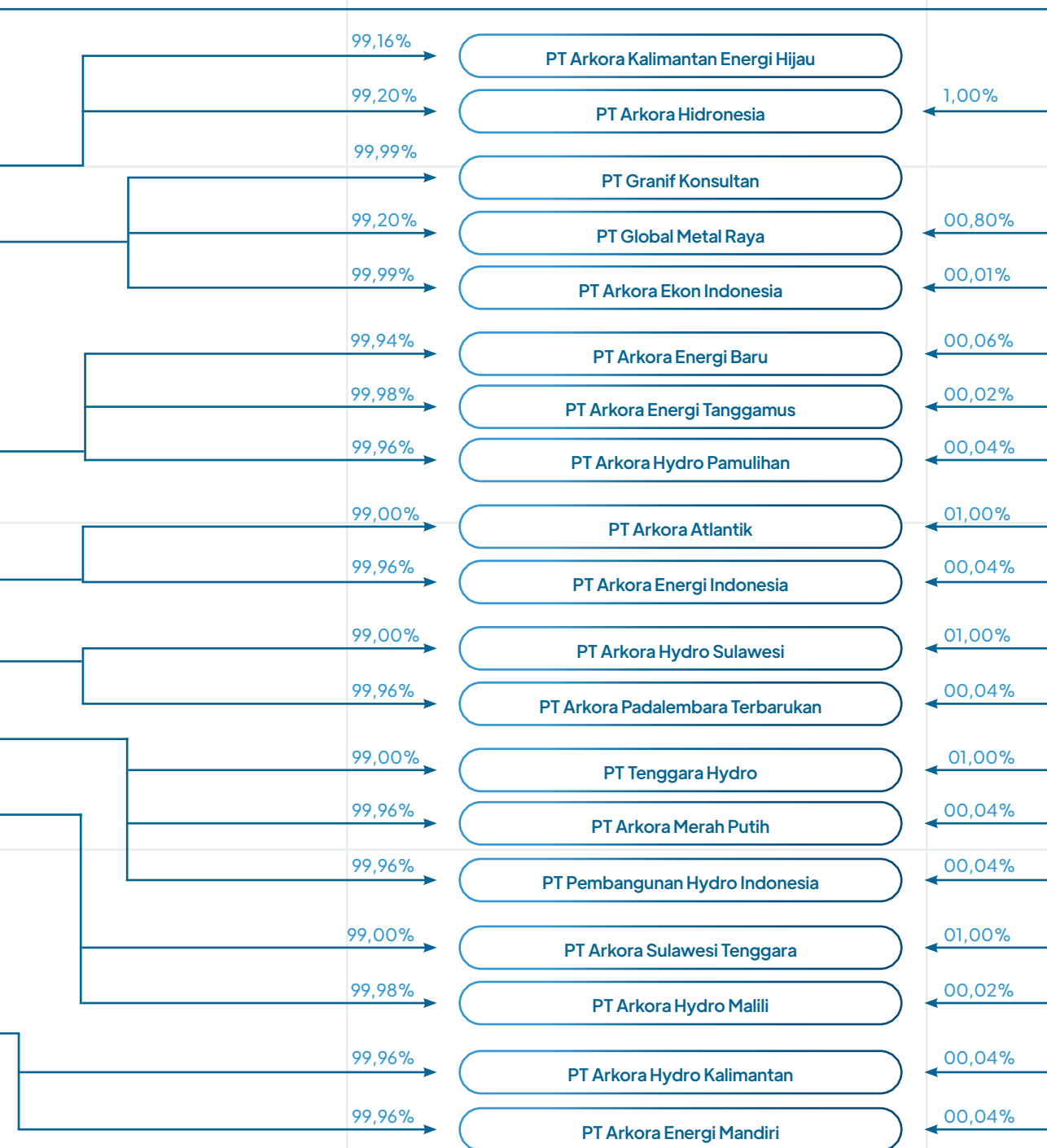


Struktur Grup Arkora Hydro

Group Structure of Arkora Hydro

Struktur grup Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:
The Company's group structure as of December 31, 2025 is:







Daftar Entitas Anak

List of Subsidiaries

Nama Entitas Subsidiaries	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Tahun Usaha Komersial Dimulai Commercial Starting Year	Modal Disetor (Rp) Paid Up Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Status
Daftar Entitas Anak Perseroan List of the Company's Subsidiaries						
PT Arkora Sulawesi Selatan	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2011	105.000.000	99,98%	Telah Beroperasi Operating
PT Arkora Hidro Tenggara	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2012	2.000.000	99,20%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arjuna Hidro	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2012	2.000.000	99%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Hidro Pasifik	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2011	2.000.000	99,84%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Tirta Energi Lestari	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2013	250.000	99,60%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Guna Energi	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2012	32.211.000	99,94%	Belum Beroperasi Not Yet Operating

Nama Entitas Subsidiaries	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Tahun Usaha Komersial Dimulai Commercial Starting Year	Modal Disetor (Rp) Paid Up Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Status
PT Hydra Sulawesi	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2011	2.000.000	99%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Sulawesi Hidro Mandiri	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2012	59.420.000	99,97%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Energi Merah Putih	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2011	2.000.000	99%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Pembangkitan Hijau	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2012	2.000.000	99%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Tomoni Hydro	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2012	2.000.000	99%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Nosu Hydro	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2011	2.000.000	99%	Belum Beroperasi Not Yet Operating



Nama Entitas Subsidiaries	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Tahun Usaha Komersial Dimulai Commercial Starting Year	Modal Disetor (Rp) Paid Up Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Status
PT Arkora Tenaga Matahari	(i) Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya; (ii) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya; (iii) aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya; (iv) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (v) instalasi listrik; (vi) pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik, (vii) konstruksi bangunan sipil elektrik. (i) Rental and leasing activities without option rights for mining and energy machines and equipment; (ii) wholesale trade in machinery, tools and other equipment; (iii) other electricity supporting activities; (iv) other management consulting activities; (v) electrical installations; (vi) operation of installations using electrical power, (vii) construction of electrical civil buildings.	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2021	19.250.000	100%	Belum Beroperasi Not Yet Operating

Nama Entitas Subsidiaries	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Tahun Usaha Komersial Dimulai Commercial Starting Year	Modal Disetor (Rp) Paid Up Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Status
Entitas Anak Tidak Langsung Indirect Subsidiaries						
PT Arkora Hydro Sulawesi	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2011	60.000.000	1. PT Sulawesi Hidro Mandiri: 99% 2. PT Arjuna Hidro 1%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Energi Baru	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2012	32.211.000	1. PT Arkora Guna Nergi: 99,94% 2. PT Arjuna Hidro 0,06%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Atlantik	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2012	2.000.000	1. PT Hydra Sulawesi: 99% 2. PT Arjuna Hidro :1%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Hidronesia	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2012	2.000.000	1. PT Arkora Hidro Tenggara : 99% 2. PT Arjuna Hidro: 1%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Sulawesi Tenggara	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2012	2.000.000	1. PT Arkra Tomoni Hidro : 99% 2. PT Arjuna Hidro: 1%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Tenggara Hidro	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2012	2.000.000	1. PT Arkora Energi Merah Putih: 99% 2. Aldo Henry Artoko: 1%	Belum Beroperasi Not Yet Operating



Nama Entitas Subsidiaries	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Tahun Usaha Komersial Dimulai Commercial Starting Year	Modal Disetor (Rp) Paid Up Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Status
PT Granif Konsultan	1. Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI. 2. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2011	800.000	1. PT Arkora Hidro Pasifik: 99,99% 2. Graha Sasra: 0,01%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Hydro Malili	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2022	5.000.000	1. PT Arkona Tomoni Hydro: 99,98% 2. PT Arjuna Hidro: 0,02%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Energi Tanggamus	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2022	5.000.000	1. PT Arkona Tomoni Hydro: 99,98% 2. PT Arjuna Hidro: 0,02%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Kalimantan Energi Hijau	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2022	2.500.000	1. PT Arkora Hidro Tenggara 99,96% 2. Aldo Artoko 0,04%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Hydro Pamulihan	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2023	2.500.000	1. PT Arkora Guna Nergi 99,96% 2. PT Arjuna Hidro 0,04%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Padalembara Terbaru	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2023	2.500.000	1. PT Sulawesi Hidro Mandiri 99,96% 2. PT Arjuna Hidro 0,04%	Belum Beroperasi Not Yet Operating

Nama Entitas Subsidiaries	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Tahun Usaha Komersial Dimulai Commercial Starting Year	Modal Disetor (Rp) Paid Up Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Status
PT Arkora Hydro Kalimantan	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2023	2.500.000	1. Arkora Pembangkitan Hijau 99,96% 2. PT Arjuna Hidro 0,04%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Global Metal Raya	1. Real Estate 2. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis 1. Real Estate 2. Technical, Scientific and Professional Activities	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2013	250.000	1. PT Arkora Hidro Pasifik 99,20% 2. PT Arjuna Hidro 0,80%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Energi Mandiri	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2024	2.500.000	1. PT Arkora Pembangkit Hijau 99,96% 2. PT Arjuna Hidro 0,04%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Ekon Indonesia	Konstruksi	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2024	10.000.000	1. PT Arkora Hidro Pasifik 99,99% 2. PT Arjuna Hidro 0,01%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Energi Indonesia	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2024	2.500.000	1. PT Hydra Sulawesi 99,96% 2. PT Arjuna Hidro 0,04%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Arkora Merah Putih	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2025	2.500.000	1. PT Arkora Energi Merah Putih 99,96% 2. PT Arjuna Hidro 0,04%	Belum Beroperasi Not Yet Operating
PT Pembangunan Hydro Indonesia	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2025	2.500.000	1. PT Arkora Energi Merah Putih 99,96% 2. PT Arjuna Hidro 0,04%	Belum Beroperasi Not Yet Operating



Ventura Bersama Joint Ventures

Hingga akhir 2025, Perseroan tidak memiliki perusahaan asosiasi dan penyertaan saham pada ventura bersama.

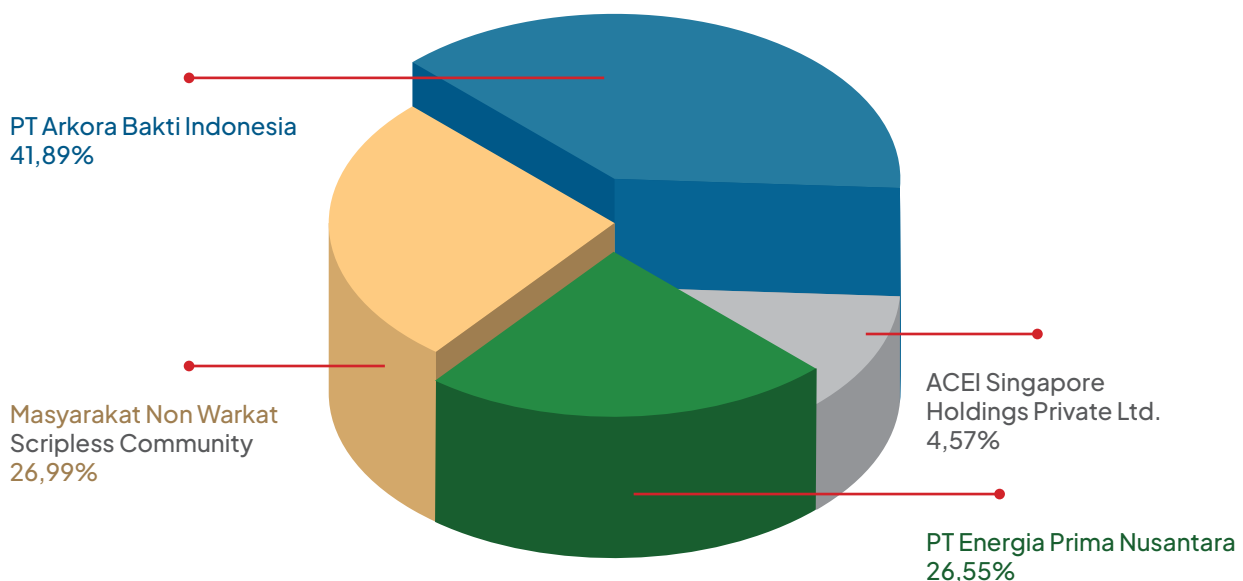
Until the end of 2025, the Company has no associated companies and investments in joint ventures.

Informasi Pemegang Saham Information of Shareholders

Kepemilikan Saham Perseroan Ownership of the Company's Shares

	1 Januari 2025 January 1, 2025		31 Desember 2025 31 December, 2025	
Kepemilikan di atas 5% Ownership Above 5%				
Nama Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares	Persentase (%) Percentage (%)	Jumlah Saham Total Shares	Persentase (%) Percentage (%)
PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	47,52	1.226.692.775	41,89
PT Energia Prima Nusantara	777.487.893	26,55	777.487.893	26,55
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	295.038.107	10,07	133.970.882	4,57
Kepemilikan di bawah 5% Ownership below 5%				
Masyarakat Non Warkat Scripless Community	464.209.000	15,86	924.314.332	26,99%
Jumlah Total	2.928.495.000	100,00%	2.928.495.000	100,00%

Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan per 31 Desember 2025 Composition of the Company's Share Ownership as of December 31, 2025



Kepemilikan Saham Perseroan oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Ownership of the Company's Shares by Members of the Board of Commissioners and Directors

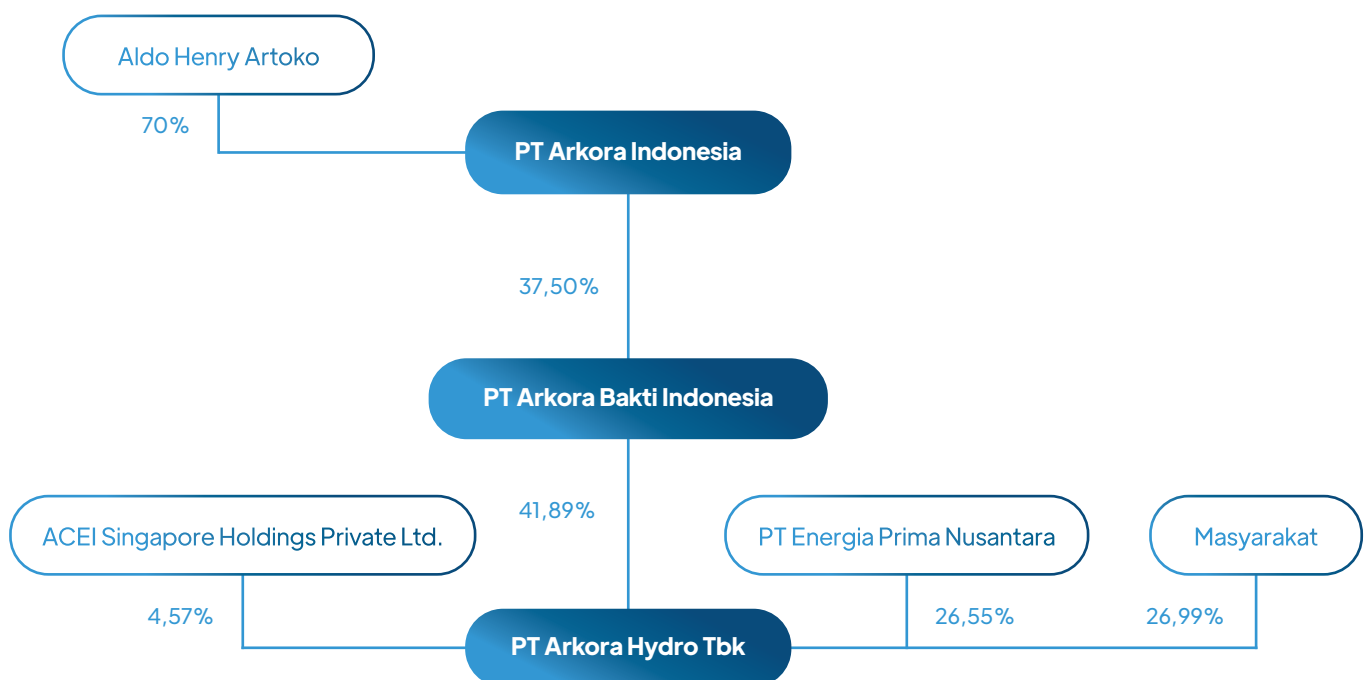
Nama Pemegang Saham Shareholders	Jabatan Position	1 Januari 2025 January 1, 2025		31 Desember 2025 December 31, 2025	
		Jumlah Saham Total Shares	Persentase (%) Percentage (%)	Jumlah Saham Total Shares	Persentase (%) Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Arya Pradana Setiadharma	Komisaris Utama President Commissioner	1.725.000	0,06	1.725.000	0,06
Drs. Indarto, S.H.	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-
Iwan Hadiangoro	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Direksi Board of Directors					
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama President Director	3.130.000	0,11	4.820.600	0,16
Ricky Hartono	Direktur Director	-	-	-	-
Ismu Nugroho	Direktur Director	-	-	-	-
Boy Gemino Kalauserang	Direktur Director	-	-	-	-
Jumlah Total		4.855.000	0,17	6.545.600	0,22



Kepemilikan Saham Berdasarkan Klasifikasi Share Ownership based on Classification

Nama Name	2025				2024			
	Jumlah Investor Total Investor	Jumlah Saham (Lembar Saham) Total Shares	Jumlah Nominal (Rp25) Total Nominal (Rp25)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Investor Total Investor	Jumlah Saham (Lembar Saham) Total Shares	Jumlah Nominal (Rp25) Total Nominal (Rp25)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Pemodal Lokal National Investor								
Perusahaan Terbatas NPWP	25	2.453.470.018	61.336.750.450	83,78	20	2.471.611.593	61.790.289.825	84,40
Individual - Domestic	2.561	320.132.600	8.003.315.000	10,93	2.136	161.015.800	4.025.395.000	5,50
Individual Foreign Kitas - NPWP	2	203.200	5.080.000	0,01	-	-	-	-
Subtotal Pemegang Saham Lokal	2.588	2.773.805.818	69.345.145.450	94,72	2.156	2.632.627.393	65.815.684.825	89,90
Pemodal Asing Foreign Investor								
Individual - Foreign	24	185.400	4.635.000	0,01	24	325.000	8.125.000	0,01
Institution - Foreign	14	154.503.782	3.862.594.550	5,28	5	295.542.607	7.388.565.175	10,09
Subtotal Pemegang Saham Asing	38	154.689.182	3.867.229.550	5,28	29	295.867.607	7.396.690.175	10,10
Jumlah Total	2.626	2.928.495.000	73.212.375.000	100,00	2.185	2.928.495.000	73.212.375.000	100,00

Informasi Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Information of Major and/or Controlling Shareholders



No	Nama Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
1	PT Arkora Bakti Indonesia	1.226.692.775	41,89

PT Arkora Bakti Indonesia merupakan perusahaan yang beroperasi pada bidang usaha Aktivitas Perusahaan Holding. Pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia adalah PT Arkora Indonesia dengan persentase kepemilikan 37,5%, Arya Pradana Setiadharna dengan kepemilikan 17,06%, Ardi Dwinanta Setiadharna dengan kepemilikan 17,06%, Ismu Nugroho dengan kepemilikan 8,19%, Graha Sasra Aditya Zen dengan kepemilikan 4,31%, dan Josephine Kongoasa dengan kepemilikan 15,88%. PT Arkora Bakti Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat pada alamat Treasury Tower Level 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53. Jakarta Selatan. PT Arkora Bakti Indonesia didirikan pada tahun 2014 berdasarkan dasar hukum Akta Pendirian No. 35 Tanggal 12 Desember 2014.

PT Arkora Bakti Indonesia is a company engaged in the Holding Company Activities business sector. The shareholders of PT Arkora Bakti Indonesia are PT Arkora Indonesia with an ownership percentage of 37.5%, Arya Pradana Setiadharna with 17.06% ownership, Ardi Dwinanta Setiadharna with 17.06% ownership, Ismu Nugroho with 8.19% ownership, Graha Sasra Aditya Zen with 4.31% ownership, and Josephine Kongoasa with 15.88% ownership. PT Arkora Bakti Indonesia is domiciled in South Jakarta, with its head office located at Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. PT Arkora Bakti Indonesia was founded in 2014 based on the legal basis of Deed of Establishment No. 35 dated December 12, 2014.

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham Share Issuance and Listing Chronology

Tahun Penerbitan Saham Year of Share Issuance	Jumlah Lembar Saham yang Ditawarkan Number of Shares Offered	Nilai Nominal Saham Value of Share	Harga Penawaran Saham untuk Masing-Masing Tindakan Korporasi (Corporate Action) Share offering Price for Each Corporate Action	Jumlah Saham Tercatat setelah Masing-Masing Tindakan Korporasi (Corporate Action) Total Listed Shares after Each Corporate Action	Nama Bursa Saham Stock Exchange
2022	579.000.000	Rp25	Rp268 s/d Rp310	2.928.495.000	Bursa Efek Indonesia (BEI) Indonesia Stock Exchange (IDX)

Kronologis Penerbitan Efek Lainnya Other Share Issuance Chronologies

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak menerbitkan efek lain dalam bentuk apapun selain yang telah dijelaskan pada Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham di atas. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan efek, *corporate action*, perubahan jumlah efek, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, serta peringkat efek.

As of December 31, 2025, the Company did not issue other shares in any form other than those described in Share Issuance and Listing above. Thus, there is no information regarding the chronology of share listing, corporate actions, changes in the number of shares, names of stock exchanges where other shares are listed, and its rate.



Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions and Professions

Nama Institusi Institution Name	Lingkup Pekerjaan Scope of Work	Periode Penugasan Appointment Period	Biaya yang Dibayarkan Fees Paid
Akuntan Publik Public Accountant			
KAP Liana Ramon Xenia & Rekan The Plaza Office Tower, 32nd Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350	Memberikan audit Laporan Keuangan Perseroan. Providing audit services for the Company's Financial Statement.	2025	Rp1.576.500.000
Notaris Notary			
Darmawan Tjoa, SH, SE Jl. K.H. Mas Mansyur No.47, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230	Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek. The scope of a Notary's duties as a supporting profession in a Public offering includes, but not limited to, preparing and executing deeds related to the Public offering, including amendments to all of the Company's Articles of Association, Underwriting Agreement and Securities Administration Management Agreement.	2025	
Konsultan Hukum Legal Consultant			
Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners Generali Tower Penthouse floor Grand Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940	Meliputi pelaksanaan pemeriksaan dari segi hukum secara independen sesuai dengan norma, Standar Profesi, dan Kode Etik Konsultan Hukum, serta penyusunan dan penyampaian laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta-fakta yang berkaitan dengan Perseroan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Selain itu, Konsultan Hukum memberikan pendampingan dan nasihat hukum kepada Perseroan sehubungan dengan setiap tindakan korporasi (<i>corporate action</i>) yang dilakukan oleh Perseroan. This includes conducting independent legal reviews in accordance with norms, Professional Standards, and the Code of Ethics for Legal Consultants, as well as preparing and submitting legal review reports on facts relating to the Company as submitted by the Company to the Legal Consultant. In addition, the Legal Consultant provides legal assistance and advice to the Company in relation to any corporate actions taken by the Company.	2025	

Nama Institusi Institution Name	Lingkup Pekerjaan Scope of Work	Periode Penugasan Appointment Period	Biaya yang Dibayarkan Fees Paid
Biro Administrasi Efek Share Registrar			
PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office. RVGW+P2R, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jakarta 14240.	Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan. Coordinate with the Managing Underwriter and Allotment Manager regarding share order data, reports in the Initial Public offering of Shares in accordance with applicable regulations. In the event of this Public offering, it is necessary to conduct an independent legal examination, in Coordinate with the Managing Underwriter and Allotment Manager regarding share order data, reports in the Initial Public offering of Shares in accordance with applicable regulations. Coordinate with the Allotment Manager and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia regarding the shares resulting from the allotment which will be distributed to Securities Sub Accounts of Buyers, conduct the distribution of shares from the allotment and compile a List of Shareholders from the Initial Public offering of Shares. BAE is also responsible for issuing Collective Share Certificates (SKS), if necessary.	2025	Rp55.000.000



Informasi Pada Website Perseroan

Information on the Company's Website



Perseroan memiliki situs web resmi yang dapat digunakan oleh semua pihak, yaitu arkora-hydro.com

Seluruh informasi yang tersaji pada laman web ditampilkan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Situs web ini dioptimalkan penggunaannya sebagai media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan beragam informasi mengenai Perseroan kepada para Pemangku Kepentingan eksternal.

Perseroan berkomitmen akan terus mengoptimalkan penggunaan situs web Perseroan sebagai media yang paling efektif dan efisien untuk mempromosikan produk dan/atau layanan yang disediakan Perseroan, serta untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan/berita/informasi penting lainnya kepada para pemangku kepentingan.

Pemenuhan Informasi Pada Situs Web Perusahaan

Dengan diberlakukannya peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang situs web emiten atau perusahaan publik, situs resmi Perseroan telah disusun dan dilengkapi dengan informasi terkini.

The Company has an official website able to be accessed by all parties, named arkora-hydro.com

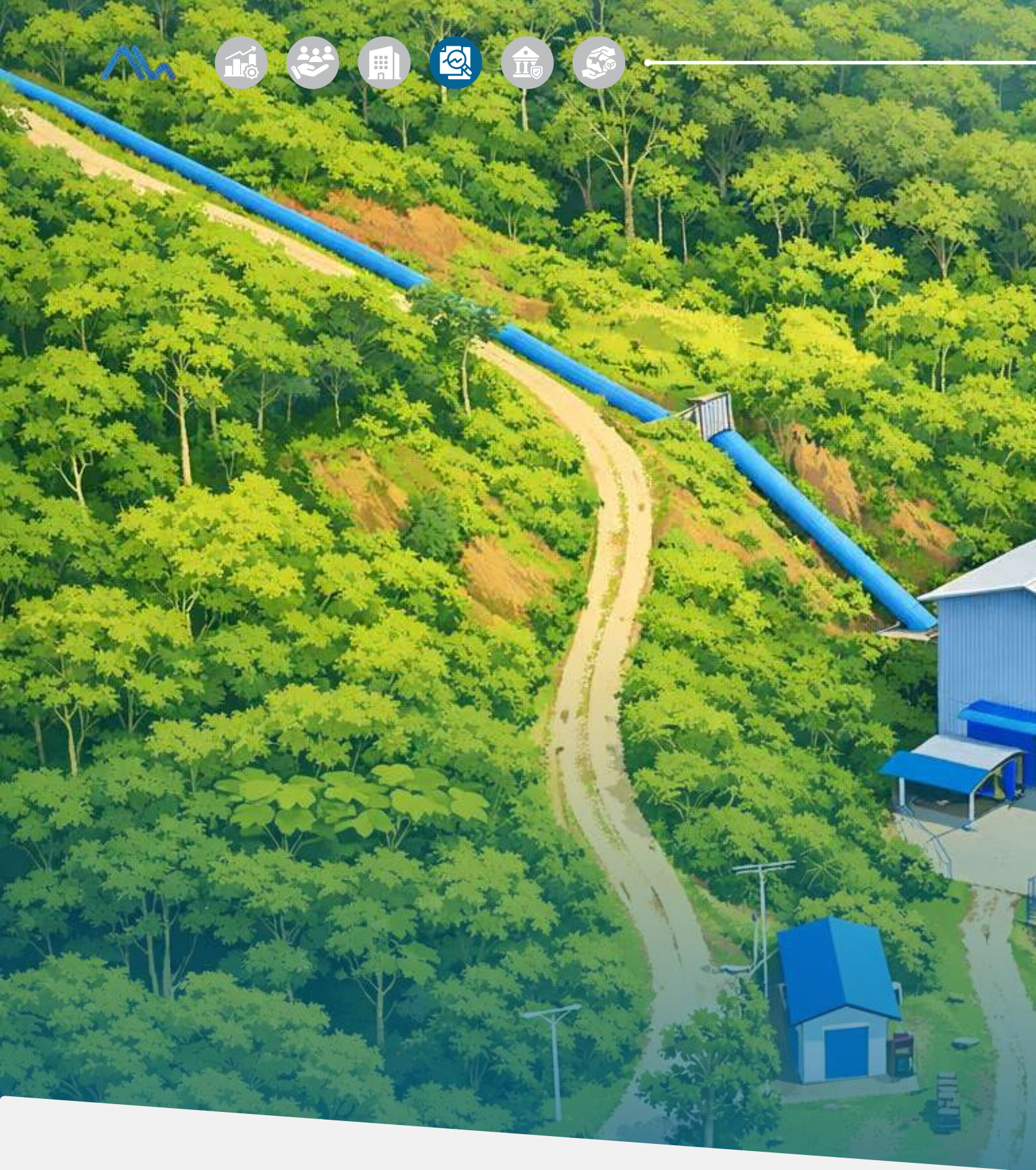
The information presented on the web page is displayed in 2 (two) languages, both Indonesian and English. This website is optimized to be used as an effective communication medium to present information about the Company to external stakeholders.

The Company is committed to continue optimizing the use of the website as the most effective and efficient media to promote the products and/or services provided by the Company and also to communicate matters related to policy/news/other important information to stakeholders.

Information on the Company's Website

As the OJK regulation no. 8/POJK.04/2015 regarding issuer or public company websites has taken place, the Company's official website has been prepared and equipped with the latest information.

No	Informasi Information	Keterangan Description
1	Tentang Kami About Us	Berisi tentang berbagai informasi mengenai Perseroan dengan sub menu: - Visi dan Misi, menyampaikan informasi mengenai visi dan misi Perusahaan. <i>Milestone</i>, berisi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang perusahaan berdiri. - Team, berisi tentang informasi profil Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Company Structure</i>, berisi tentang informasi Struktur Perseroan. <i>Organization Structure</i>, berisi tentang informasi Struktur Organisasi. Contains information of the Company with these sub menus: - Vision and Mission, conveying information of the Company's vision and mission. - Milestone, contains important events that occurred throughout the company's existence. - Team, displaying the profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors. - Company Structure, contains information about the Company's structure. - Organization Structure, contains information about the Organizational Structure.
2	Proyek Project	Berisikan tentang informasi proyek Perseroan Contains information about the Company's projects
3	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hydropower (HPP)	Memuat tentang operasional bisnis Perseroan di bidang PLTA dan mekanisme kerja dari PLTA. Contains information about the Company's business operations in the hydropower sector and the working mechanisms of the hydropower plant.
4	Hubungan Investor Investor Relations	Berisi tentang berbagai informasi mengenai Hubungan Investor dengan sub menu: <i>Prospectus</i>, berisi tentang informasi Prospektus Perseroan. <i>Annual and Sustainability Report</i>, berisi tentang informasi <i>Annual Report dan Sustainability Report Perseroan</i>. <i>Financial Statement</i>, berisi tentang informasi Laporan Keuangan Perseroan. <i>Financial Highlights</i>, berisi tentang informasi Ikhtisar Keuangan Perseroan. <i>Company Presentation</i>, berisi tentang kontak Investor Relation Perseroan. <i>Press Release</i>, berisi tentang informasi Siaran Pers Perseroan. <i>Information Disclosure</i>, berisi tentang keterbukaan informasi Perseroan. <i>Shareholder Information</i>, berisi tentang informasi Pemegang Saham Perseroan. <i>General Meeting of Shareholders</i>, berisi tentang informasi RUPST & LB Perseroan. <i>Dividend Policy</i>, berisi tentang informasi Kebijakan Dividen Perseroan. Contains information of the Company's Investor Relations with the sub menu: - Prospectus, containing information about the Company's Prospectus. - Annual and Sustainability Report, containing information about the Company's Annual Report and Sustainability Report. - Financial Report, containing information about the Company's Financial Statements. - Financial Highlights, containing information about the Company's Financial Highlights. - Company Presentation, containing information about the Company's Investor Relations department. - Press Release, containing information about the Company's Press Releases. - Information Disclosure, containing information about the Company's information disclosure. - Shareholder Information, containing information about the Company's Shareholders. - General Meeting of Shareholders, containing information about the Company's AGMS and LBH. - Dividend Policy, containing information about the Company's Dividend Policy.
5	Tata Kelola Perusahaan Governance	Berisi tentang berbagai informasi mengenai Perseroan dengan sub menu: <i>Audit Committee</i>, berisi informasi mengenai struktur, dasar pengangkatan, profil, tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari Komite Audit. <i>Nomination and Remuneration Committee</i>, berisi informasi mengenai struktur, dasar pengangkatan, profil, tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari Komite Nominasi & Remunerasi. <i>Internal Audit</i>, berisi informasi mengenai struktur, dasar pengangkatan, profil, tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari Internal Audit. <i>Supporting Entities</i>, berisi informasi mengenai Lembaga & Profesi Penunjang. <i>Corporate Secretary</i>, berisi informasi mengenai struktur, dasar pengangkatan, profil, tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari Sekretaris Perusahaan. Contains information of the Company with these sub menus: - Audit Committee, contains information on the structure, basis of appointment, profile, duties, responsibilities, and authority of the Audit Committee. - Nomination and Remuneration Committee, contains information on the structure, basis of appointment, profile, duties, responsibilities, and authority of the Nomination & Remuneration Committee. - Internal Audit, contains information on the structure, basis of appointment, profile, duties, responsibilities, and authority of Internal Audit. - Supporting Entities, contains information on supporting institutions and professions. - Corporate Secretary, contains information on the structure, basis of appointment, profile, duties, responsibilities, and authority of the Corporate Secretary.



04 Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis





Gambaran Umum Ekonomi dan Industri

Economic and Industry Overview

Tahun 2025 merupakan tahun yang menantang karena perekonomian global bergerak fluktuatif seiring dinamika regulasi perdagangan multilateral yang dipengaruhi oleh kebijakan Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor. Inisiatif tersebut memicu kebijakan proteksionisme global dan mendorong negara-negara untuk mencari tujuan ekspor baru, sehingga menyebabkan arus impor yang tidak terkendali.

Indonesia juga terdampak oleh serbuan impor, terutama dari Tiongkok, yang mengalihkan tujuan pasarnya setelah tarif tinggi ditetapkan oleh AS. Dihadapkan pada tantangan tersebut, perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh secara resilien sebesar 5,11% sepanjang tahun 2025 (c-to-c) secara kumulatif menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu catatan penting pada tahun 2025 adalah pertumbuhan penanaman modal dalam negeri dan asing (PMDN dan PMA) yang masing-masing tumbuh sebesar 9,74% (y-on-y) dan 12,66% (c-to-c) menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia. Pertumbuhan investasi ini menjadi indikasi positif, seiring dengan status Perseroan sebagai pengembang listrik independen yang erat kaitannya dengan penanaman modal swasta.

Pemerintah Indonesia memiliki target besar di bidang keberlanjutan, khususnya dengan ditetapkannya agenda transisi energi nasional menuju *Net Zero Emission* 2060. Upaya pencapaian target tersebut diperkuat oleh peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT) yang pada tahun 2025 mencapai 15,8% dari total energi yang digunakan di Indonesia. Hingga Desember 2025, total kapasitas terpasang EBT mencapai 15.630 MW, dengan penambahan kapasitas terbesar dalam lima tahun terakhir.

Lebih lanjut, realisasi kapasitas pembangkit EBT meliputi pembangkit hidro sebesar 7.587 MW, bioenergi 3.148 MW, panas bumi 2.744 MW, surya 1.494 MW, gasifikasi batubara 450 MW, angin 152 MW, sampah 36 MW, dan lainnya sebesar 18 MW. Data tersebut menunjukkan bahwa pembangkit hidro memiliki porsi terbesar dalam bauran energi terbarukan, yaitu sebesar 48,54%. Catatan ini merepresentasikan peluang pertumbuhan sekaligus ketepatan eksekusi strategi Perseroan dalam memanfaatkan potensi sumber daya energi terbarukan yang melimpah di Indonesia.

The year 2025 was a challenging period as the global economy experienced volatility amid changes in multilateral trade regulations influenced by the United States' (US) import tariff policies. These initiatives triggered global protectionist policies and encouraged countries to seek new export destinations, resulting in an uncontrolled flow of imports.

Indonesia was also affected by the influx of imports, particularly from China, which redirected its market destinations following the imposition of high tariffs by the US. Despite these challenges, Indonesia's economy remained resilient, recording cumulative growth of 5.11% throughout 2025 (c-to-c), according to Statistics Indonesia (BPS). One notable development in 2025 was the growth in both domestic and foreign investment (PMDN and PMA), which increased by 9.74% (y-on-y) and 12.66% (c-to-c), respectively, according to Indonesia Investment Coordinating Board. This investment growth serves as a positive indicator, particularly given the Company's position as an independent power producer that is closely linked to private sector investment.

The Indonesian Government has set ambitious sustainability targets, particularly through the establishment of the national energy transition agenda toward Net Zero Emissions by 2060. Efforts to achieve this target were strengthened by an increase in the renewable energy mix, which reached 15.8% of total energy utilization in Indonesia in 2025. As of December 2025, total installed renewable energy capacity reached 15,630 MW, representing the largest capacity addition in the past five years.

Furthermore, the realization of renewable power generation capacity consisted of hydropower at 7,587 MW, bioenergy at 3,148 MW, geothermal at 2,744 MW, solar at 1,494 MW, coal gasification at 450 MW, wind at 152 MW, waste-to-energy at 36 MW, and other sources totalling 18 MW. These figures indicate that hydropower accounts for the largest share of the renewable energy mix, at 48.54%. This reflects significant growth potential as well as the appropriateness of the Company's strategy execution in leveraging Indonesia's abundant and highly promising renewable energy resources.

Strategi Pemasaran Marketing Strategies

Perseroan memiliki hubungan bisnis yang bersifat strategis dan berkelanjutan dengan PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pelanggan dari aktivitas bisnis Perseroan di sektor PLTA aliran sungai langsung (*run-of-river hydropower*).

Hingga akhir tahun 2025, total produksi listrik Perseroan mencapai 151.800 MWh, lebih tinggi bila dibandingkan dengan total produksi listrik pada tahun sebelumnya yang mencapai 94.447,64 MWh. Saat ini, Perseroan memiliki pembangkit yang sudah beroperasi di Proyek Cikopo 2 - Garut (7,4 MW), Proyek Koro Tomasa - Poso (10 MW), dan Proyek Koro Yaentu - Poso (10 MW).

Energi listrik yang dihasilkan oleh masing-masing proyek didistribusikan melalui infrastruktur jaringan yang dibangun hingga mencapai titik serah (*point of delivery*) sebagaimana disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN. Dengan mekanisme tersebut, Perseroan turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung ketersediaan pasokan listrik nasional berbasis energi bersih, sementara PLN selaku *off-taker* bertanggung jawab penuh atas kegiatan transmisi lebih lanjut, pengaturan sistem kelistrikan, serta penjualan listrik kepada masyarakat luas di berbagai wilayah Indonesia.

Saat ini, Perseroan konsisten dalam mengembangkan proyek-proyek berbasis energi aliran sungai langsung dengan kapasitas yang ada di dalam *pipeline* sebesar lebih dari 300 MW dan terus bertambah tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan keseriusan Perseroan dalam menggarap potensi pembangkit listrik tenaga air yang masih sangat besar di Indonesia. Dari total 95 GW potensi yang ada di Indonesia, hanya sekitar 7,56 GW yang baru diutilisasi. Dengan kata lain, hanya 7,95% dari total potensi yang ada yang telah digarap. Dengan demikian, peluang Perseroan masih terbuka lebar.

Mengingat bahwa hingga akhir tahun 2025 Perseroan masih memiliki satu pelanggan utama, yaitu PT PLN (Persero), serta telah terikat dalam perjanjian jual beli tenaga listrik jangka panjang, maka fokus kegiatan pemasaran Perseroan saat ini diarahkan sepenuhnya pada pemenuhan kewajiban pasokan listrik sesuai dengan ketentuan kontrak yang berlaku.

The Company maintains a strategic and sustainable business relationship with PT PLN (Persero) as the sole customer for the Company's business activities in the run-of-river hydropower sector.

As of the end of 2025, the Company's total electricity production reached 151.800 MWh, higher than the total electricity production in the previous year, which amounted to 94,447.64 MWh. Currently, the Company operates power plants at the Project Cikopo 2 - Garut (7.4 MW), the Project Koro Tomasa - Poso (10 MW), and the Project Koro Yaentu - Poso (10 MW).

The electricity generated by each project is distributed through network infrastructure built up to the agreed point of delivery in accordance with the power purchase agreements with PLN. Through this mechanism, the Company makes a significant contribution to supporting the availability of national electricity supply based on clean energy, while PLN, as the off-taker, is fully responsible for further transmission activities, grid management, and the sale of electricity to the wider public across various regions in Indonesia.

Currently, the Company consistently develops run-of-river projects, with a pipeline exceeding 300 MW and growing each year. This underscores the Company's commitment to tapping Indonesia's vast hydropower potential. Of the country's estimated 95 GW potential, only about 7.56 GW has been utilized, just 7.95%, leaving substantial opportunities for the Company to expand.

Considering that as of the end of 2025 the Company still has one main customer, namely PT PLN (Persero), and is bound by long-term power purchase agreements, the Company's marketing activities are currently focused entirely on fulfilling its electricity supply obligations in accordance with the terms of the applicable contracts.



Perseroan senantiasa menjaga keandalan operasional pembangkit serta kualitas produksi listrik guna memastikan pasokan yang stabil dan berkelanjutan bagi PLN. Ke depan, meskipun Perseroan belum menetapkan keputusan untuk secara aktif mencari pelanggan baru, Perseroan tetap terbuka terhadap berbagai peluang kerja sama dengan pihak lain, khususnya dari sektor swasta, sepanjang sejalan dengan strategi pengembangan usaha.

Perseroan juga terus mencermati perkembangan regulasi, iklim investasi, serta potensi pengembangan proyek-proyek baru di sektor energi terbarukan sebagai bagian dari upaya untuk memperluas portofolio usaha serta memperkuat kontribusi Perseroan dalam mendukung ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

Tinjauan Operasional

Operational Review

PT Arkora Hydro Tbk bergerak di bidang pengembangan, kepemilikan, dan pengoperasian fasilitas pembangkit listrik berbasis tenaga air yang memanfaatkan aliran sungai langsung (*run-of-river*). PLTA dengan jenis *run-of-river* merupakan jenis pembangkit listrik yang tidak memerlukan pembangunan bendungan besar untuk penyimpanan air, sehingga memiliki dampak lingkungan yang relatif lebih rendah, waktu pembangunan yang lebih singkat, serta lebih adaptif terhadap kondisi geografis di berbagai wilayah Indonesia.

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan telah memiliki 3 (tiga) proyek yang telah beroperasi secara komersial dengan total kapasitas terpasang sebesar 27,4 MW. Selain itu, jika ditotal dengan kapasitas pembangkit yang telah dikontrakkan (*contracted capacity*), maka total kapasitas pembangkit yang dimiliki Perseroan mencapai 62,8 MW. Perseroan juga memiliki portofolio proyek dalam tahap pengembangan (*pipeline projects*) dengan total kapasitas lebih dari 300 MW yang tersebar di sejumlah wilayah dengan potensi sumber daya air yang memadai.

Pipeline proyek tersebut mencerminkan kesiapan dan kesinambungan pertumbuhan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Perseroan senantiasa berfokus pada kegiatan pengembangan dan pengoperasian PLTA secara profesional, efektif, dan berkelanjutan.

The Company continuously maintains the operational reliability of its power plants and the quality of its electricity generation to ensure a stable and sustainable supply to PLN. Looking ahead, although the Company has not yet decided to actively seek new customers, it remains open to various collaboration opportunities with other parties, particularly from the private sector, provided that such opportunities are in line with the Company's business development strategy.

The Company also continues to closely monitor regulatory developments, the investment climate, and the potential development of new projects in the renewable energy sector as part of its efforts to expand its business portfolio and further strengthen its contribution to supporting sustainable national energy security.

PT Arkora Hydro Tbk operates in the development, ownership, and operation of hydropower generation facilities utilizing run-of-river systems. Run-of-river hydropower plants are a type of power generation that does not require the construction of large dams for water storage, thereby having a relatively lower environmental impact, shorter development time, and greater adaptability to the geographical conditions across various regions in Indonesia.

As of the end of 2025, the Company has 3 (three) projects that are commercially operational with a total installed capacity of 27.4 MW. In addition, when combined with the contracted capacity, the Company's total power generation capacity amounts to 62.8 MW. The Company also has a portfolio of projects under development (*pipeline projects*) with a total capacity of more than 300 MW, which are located across several regions with adequate hydropower potential.

All of the pipeline projects reflect the Company's preparedness and the sustainability of its long-term business growth. The Company remains consistently focused on the professional, effective, and sustainable development and operation of hydropower plants.

Kapasitas Produksi Production Capacity

Perseroan dengan 3 (tiga) proyek pembangkit listrik yang dimilikinya yaitu Proyek Cikopo (7,4 MW), Proyek Koro Tomasa (10 MW), dan Proyek Koro Yaentu (10 MW) mampu menghasilkan listrik dengan mencatatkan total produksi listrik mencapai 151.800 MWh. Perseroan juga memiliki proyek yang sedang berada dalam masa konstruksi yaitu Proyek Kukusan 2 (5,4 MW) dan Proyek Tomoni (10 MW) di mana kedua proyek ini merupakan sumber pendapatan non operasional (Pendapatan Konstruksi) bagi Perseroan. Sementara itu, Proyek Pongbembe (20 MW) baru memulai tahap awal konstruksi pada akhir tahun sehingga belum tercermin dalam laporan keuangan tahun 2025.

Perseroan menghitung kapasitas produksinya berdasarkan proyek yang telah beroperasi, namun menghitung jumlah pendapatan berdasarkan segmen operasi dari semua proyek yang dimiliki, termasuk yang belum beroperasi/dalam masa konstruksi (non operasional).

Pada dasarnya, Perseroan memperoleh pendapatan dari hasil operasional proyek, yakni produksi listrik yang dijual ke PLN. Namun, metode akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan turut mencatat pendapatan konstruksi sebagai bagian dari pendapatan usaha Perseroan.

Berikut disampaikan penjelasan mengenai profitabilitas masing-masing segmen operasi proyek dan operasi lainnya.

Segmen Operasi Proyek Cikopo 2 (7,4 MW) Operating Segment of Project Cikopo 2 (7.4 MW)

Proyek Cikopo 2 terletak di Garut, Jawa Barat, sekitar 220 km dari Jakarta. Proyek Cikopo 2 telah beroperasi secara penuh pada Maret 2017 dengan kapasitas produksi sebesar 7,4 MW dan perkiraan output energi tahunan sebesar 52.000 MWh.

Sebagian besar wilayah tangkapan air Proyek Cikopo 2 terletak di dalam area hutan lindung, sehingga memungkinkan terjadinya debit air yang lebih stabil sepanjang tahun. Debit yang telah ditentukan adalah 3,2 m³/detik dengan *net head* setinggi 264 m.

The Company, with its 3 (three) operational power plant projects, namely Project Cikopo (7.4 MW), Project Tomasa (10 MW), and Project Koro Yaentu (10 MW), has successfully generated electricity, recording a total production of 151.800 MWh. The Company also has projects currently under construction, namely Project Kukusan 2 (5.4 MW) and Project Tomoni (10 MW), both of which serve as sources of non-operational revenue (Construction Income) for the Company. Meanwhile, Project Pongbembe (20 MW) only commenced the initial stage of construction at the end of the year and therefore has not yet been reflected in the Company's 2025 financial statements.

The Company calculates its production capacity based on the projects that are already operational but determines its total revenue based on the operational segments of all its projects, including those that are still under construction (non-operational).

Essentially, the Company generates revenue from the operational activities of its projects, specifically from the electricity sold to PLN. However, the accounting method applied by the Company also records construction revenue as part of the Company's operating revenue.

The following is an explanation of the profitability of each project operational segment and other business operations.

The Project Cikopo 2 is located in Garut, West Java, approximately 220 km from Jakarta. The Project Cikopo 2 has been fully operational since March 2017, with a production capacity of 7.4 MW and an estimated annual energy output of 52,000 MWh.

A significant portion of the Project Cikopo 2 watershed area is situated within a protected forest zone, which helps maintain a more stable water flow throughout the year. The designated flow rate is 3.2 m³/second with a net head of 264 meters.



Lokasi Location	Jawa Barat West Java
Kapasitas Capacity	7,4 MW
Net Head Net Head	264 meter
Jenis Turbin Turbine Type	Vertical Pelton Turbine
Manufaktur Turbin Manufacture	Wasserkraft Volk AG

Profitabilitas Operasional Proyek Cikopo 2 (7,4 MW) Profitability from the Operation of Project Cikopo 2 (7.4 MW)

Dalam Rupiah
In Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nilai Nominal Nominal Value	Persentase Percentage
Pendapatan Revenues	44.045.012.799	44.418.264.000	(373.251.201)	-0,84%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	16.052.268.329	14.614.077.082	1.438.191.247	9,84%
Laba Kotor Gross Profit	27.992.744.470	29.804.186.918	(1.811.442.448)	-6,08%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	(16.691.486.841)	(11.951.812.532)	(4.739.674.309)	-39,66%

Pada tahun 2025, pendapatan dari operasional Proyek Cikopo 2 berjumlah Rp44,05 miliar, menurun 0,84% dibanding pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp44,42 miliar. Hal ini diakibatkan oleh perubahan tarif PLN yang baru berubah dari yang semula Rp1.100/kWh menjadi Rp850/kWh pada April 2025.

In 2025, revenue from the operations of the Project Cikopo 2 amounted to Rp44.05 billion, which decreased by 0.84% compared to the 2024 revenue of Rp44.42 billion. This was due to the change in PLN's tariff, which was adjusted in April 2025 from Rp1,100/kWh to Rp850/kWh.

Beban pokok pendapatan tahun 2025 tercatat sebesar Rp16,05 miliar dan beban usaha sebesar Rp21,35 miliar. Terjadi peningkatan pada beban pokok pendapatan dan beban usaha masing-masing sebesar 9,84% dan 8,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara garis besar, peningkatan beban terjadi karena terdapat pemeliharaan berbagai perlengkapan di dalam rumah pembangkit yang belum dilakukan pada tahun 2024.

The cost of revenue in 2025 was recorded at Rp16.05 billion, and operating expenses amounted to Rp21.35 billion. There was an increase in the cost of revenue and operating expenses by 9.84% and 8.74%, respectively, compared to the previous year. Overall, the increase in expenses was due to maintenance works on various equipment inside the powerhouse that had not been carried out in 2024.

Dengan demikian, pada akhir tahun 2025, Perseroan masih mencatatkan rugi dari operasional Proyek Cikopo 2 sebesar Rp16,69 miliar. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pencatatan laporan keuangan berdasarkan segmen operasi turut memasukkan

Thus, at the end of 2025, the Company still recorded a loss from the operations of the Project Cikopo 2 amounting to Rp16.69 billion. However, it should be noted that the financial reporting by operating segment also allocates the head office's operational

beban operasional kantor pusat pada Proyek Cikopo. Hal ini membuat beban Proyek Cikopo menjadi lebih tinggi dibanding proyek lainnya yang telah beroperasi.

expenses to the Project Cikopo 2, resulting in higher recorded expenses for the Project Cikopo 2 compared to the Company's other operating projects.

Segmen Operasi Proyek Koro Tomasa (10 MW) Operating Segment of Project Koro Tomasa (10 MW)

Proyek Koro Tomasa merupakan PLTA aliran sungai langsung yang berada di Poso, Sulawesi Tengah dan telah beroperasi secara komersial sejak Maret 2020. Proyek Koro Tomasa memiliki kapasitas pembangkit sebesar 10,0 MW dengan perkiraan output energi tahunan sebesar 63.072 MWh.

The Project Koro Tomasa is a run-of-river hydropower plant located in Poso, Central Sulawesi, and has been commercially operational since March 2020. The Project Koro Tomasa has a generation capacity of 10.0 MW with an estimated annual energy output of 63,072 MWh.

Proyek Koro Tomasa memiliki debit yang telah ditentukan sebesar 4,5 m³/detik dengan 258 net head dengan ketinggian bendungan adalah 590 meter di atas permukaan laut, yang memungkinkan air dialihkan ke dalam pipa menuju cekungan sedimen, untuk disalurkan melalui air terbuka sebelum memasuki penstock.

The Project Koro Tomasa has a designated water flow rate of 4.5 m³/second with a net head of 258 meters. The dam is situated at an altitude of 590 meters above sea level, allowing water to be diverted into a pipeline leading to a sediment basin, then channeled through an open waterway before entering the penstock.

Lokasi Location	Sulawesi Tengah Central Sulawesi
Kapasitas Capacity	10 MW
Net Head Net Head	258 meter
Jenis Turbin Turbine Type	Horizontal Pelton Turbine
Manufaktur Turbin Manufacture	Voith

Profitabilitas Operasional Proyek Koro Tomasa (10 MW) Profitability from the Operation of Project Koro Tomasa (10 MW)

Dalam Rupiah
In Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nilai Nominal Nominal Value	Persentase Percentage
Pendapatan Revenues	10.223.837.783	7.754.345.093	2.469.492.690	31,85%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	10.532.657.666	7.519.800.354	3.012.857.312	40,07%
Laba Kotor Gross Profit	(308.819.883)	234.544.739	(543.364.622)	(231,67%)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	1.442.268.626	6.193.421.008	(4.751.152.382)	-76,71%



Pada tahun 2025, pendapatan dari operasional Proyek Koro Tomasa berjumlah Rp10,22 miliar, bertambah sebesar 31,85% dibanding pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp7,75 miliar. Hal ini diakibatkan oleh curah hujan yang lebih tinggi pada tahun 2025 dibanding tahun 2024.

Beban pokok pendapatan tahun 2025 tercatat sebesar Rp10,53 miliar dan beban usaha sebesar Rp808,42 juta. Terjadi kenaikan pada beban pokok pendapatan dan beban usaha masing-masing sebesar 40,07% dan 9,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara garis besar, peningkatan beban terjadi karena terdapat pemeliharaan berbagai perlengkapan di dalam rumah pembangkit yang belum dilakukan pada tahun 2024.

Dengan demikian, pada akhir tahun 2025, Perseroan mencatatkan laba Rp1,44 miliar dari operasional Proyek Koro Tomasa, menurun 76,71% dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2025, revenue from the Project Koro Tomasa operations amounted to Rp10.22 billion, representing an increase of 31.85% compared to the previous year's revenue of Rp7.75 billion. This increase was mainly due to higher rainfall in 2025 compared to 2024.

The cost of revenues in 2025 was recorded at Rp10.53 billion, while operating expenses amounted to Rp808.42 million. There was an increase in both the cost of revenue and operating expenses by 40.07% and 9.56%, respectively, compared to the previous year. In general, the increase in expenses occurred due to maintenance of various equipment in the power plant facility, which had not been carried out in 2024.

Therefore, by the end of 2025, the Company recorded a profit of Rp1.44 billion from the Tomasa Project operations, representing a decrease of 76.71% compared to the previous year.

Segmen Operasi Proyek Koro Yaentu (10 MW) Operating Segment of Project Koro Yaentu (10 MW)

Proyek Koro Yaentu merupakan PLTA aliran sungai langsung yang berada di Poso, Sulawesi Tengah dan telah beroperasi secara komersial sejak Maret 2024. PLTA ini memiliki kapasitas produksi pembangkit sebesar 10 MW dengan perkiraan output energi tahunan sebesar 63.011 MWh.

Proyek Koro Yaentu memiliki debit air sebesar 7,2 m³/detik dengan tinggi *net head* mencapai 165 m yang dilengkapi dengan dua turbin Francis horizontal.

The Project Koro Yaentu is a run-of-river hydropower plant (PLTA) located in Poso, Central Sulawesi, and has been operating commercially since March 2024. The project has a generation capacity of 10 MW with an estimated annual energy output of 63,011 MWh.

The Project Koro Yaentu has a water discharge of 7.2 m³/second with a net head of 165 meters and is equipped with two horizontal Francis turbines.

Lokasi Location	Sulawesi Tengah Central Sulawesi
Kapasitas Capacity	10 MW
Net Head Net Head	165 meter
Jenis Turbin Turbine Type	Horizontal Pelton Turbine
Manufaktur Turbin Manufacture	Voith

Profitabilitas Operasional Proyek Koro Yaentu (10 MW)

Profitability from the Operation of Project Koro Yaentu (10 MW)

Dalam Rupiah
In Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nilai Nominal Nominal Value	Persentase Percentage
Pendapatan Revenues	4.274.208.684	25.260.756.564	(20.986.547.880)	-83,08%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	1.961.859.408	92.428.995.626	90.467.136.218	-97,88%
Laba Kotor Gross Profit	2.312.349.276	67.168.239.062	69.480.588.338	-103,44%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	10.509.818.992	(37.007.001.129)	47.516.820.121	128,40%

Pada tahun 2025, pendapatan dari operasional Proyek Koro Yaentu berjumlah Rp4,27 miliar, menurun 83,08% dibanding pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp25,26 miliar. Hal ini diakibatkan oleh pengakuan pendapatan Jasa Konstruksi berakhir setelah proses konstruksi selesai pada September 2024. Dengan demikian, pengakuan pendapatan untuk Proyek Koro Yaentu berasal dari pendapatan pengoperasian dan perawatan (*Operation and Maintenance/OM income*). Pendapatan OM akan dicatat selama periode operasional, yaitu sejak COD hingga berakhirnya masa konsesi.

Beban pokok pendapatan tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,96 miliar dan beban usaha sebesar Rp13,03 miliar. Terdapat penurunan pada beban pokok pendapatan dan sebesar 97,88% dan beban usaha naik sebesar 33,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pengakuan pendapatan yang berbeda setelah proses konstruksi berakhir, pengakuan beban pun berubah dari yang sebelumnya beban konstruksi menjadi beban pengoperasian dan perawatan pembangkit.

Dengan demikian, pada akhir tahun 2025, Proyek Koro Yaentu mencatatkan keuntungan untuk pertama kalinya setelah proyek beroperasi yakni sebesar Rp10,51 miliar.

In 2025, revenue from the Project Koro Yaentu operations amounted to Rp4.27 billion, representing a decrease of 83.08% compared to the previous year's revenue of Rp25.26 billion. This decline occurred because the recognition of construction service revenue ended after the construction process was completed in September 2024. Therefore, revenue recognition for the Project Koro Yaentu now comes from Operation and Maintenance (OM) income. OM income will be recorded throughout the operational period, starting from the Commercial Operation Date (COD) until the end of the concession period.

The cost of revenue in 2025 was recorded at Rp1.96 billion, while operating expenses amounted to Rp13.03 billion. The cost of revenue decreased by 97.88%, while operating expenses increased by 33.07% compared to the previous year. With the change in revenue recognition after the completion of the construction phase, the recognition of expenses also changed from construction expenses to power plant operation and maintenance expenses.

As a result, by the end of 2025, the Project Koro Yaentu recorded a profit for the first time since the project began operations, amounting to Rp10.51 billion.



Segmen Operasi Proyek Kukusan 2 (5,4 MW) Operating Segment of Project Kukusan 2 (5,4 MW)

Proyek Kukusan 2 merupakan PLTA aliran sungai langsung yang berlokasi di Lampung. Pembangunan Proyek Kukusan 2 dimulai pada kuartal kedua tahun 2022 dan baru saja beroperasi pada Februari 2026. Proyek Kukusan 2 memiliki kapasitas produksi pembangkit sebesar 5,4 MW dengan perkiraan output energi tahunan sebesar 35.024 MWh.

Proyek Kukusan 2 memiliki debit air sebesar 5 m³/detik dengan tinggi *net head* mencapai 124,6 m yang dilengkapi dengan dua turbin Francis horizontal.

The Project Kukusan 2 is a run-of-river hydropower plant (PLTA) located in Lampung. Construction of the Project Kukusan 2 began in the second quarter of 2022 and the plant commenced operations in February 2026. The Project Kukusan 2 has a generation capacity of 5.4 MW with an estimated annual energy output of 35,024 MWh.

The project has a water discharge of 5 m³/second with a net head of 124.6 meters and is equipped with two horizontal Francis turbines.

Lokasi Location	Lampung
Kapasitas Capacity	5,4 MW
Net Head Net Head	124,6 meter
Jenis Turbin Turbine Type	Francis Turbine
Manufaktur Turbin Manufacture	Voith

Profitabilitas Operasional Proyek Kukusan 2 (5,4 MW) Profitability from the Operation of Project Kukusan 2 (5.4 MW)

Dalam Rupiah
In Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nilai Nominal Nominal Value	Persentase Percentage
Pendapatan Revenues	116.365.953.518	93.755.411.475	22.610.542.043	24,12%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	124.564.581.348	62.380.302.721	62.184.278.627	99,69%
Laba Kotor Gross Profit	(8.198.627.830)	31.375.108.754	(39.573.736.584)	-126,13%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	3.314.722.372	32.497.458.236	(29.182.735.864)	-89,9%

Walaupun belum beroperasi tahun 2025, Perseroan telah mencatatkan pendapatan dari Proyek Kukusan 2 dari pendapatan Jasa Konstruksi sebesar Rp116,37 miliar, meningkat 24,12% dibanding pendapatan tahun 2024 sebesar Rp93,76 miliar. Hal ini diakibatkan oleh progres konstruksi yang berhasil diakselerasi di sepanjang tahun 2025 sehingga pada Februari 2026, Proyek Kukusan 2 mulai beroperasi secara komersil.

Although it had not yet commenced operations in 2025, the Company recorded revenue from the Project Kukusan 2 in the form of Construction Service amounting to Rp116.37 billion, representing an increase of 24.12% compared to Rp93.76 billion in 2024. This was driven by the accelerated construction progress throughout 2025, thus in February 2026, the Project Kukusan 2 commenced its commercial operations.

Beban pokok pendapatan tahun 2025 tercatat sebesar Rp124,56 miliar. Terjadi peningkatan pada beban pokok pendapatan dan beban usaha masing-masing sebesar 99,69% dan 30,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara garis besar, peningkatan beban pada masing-masing pos terjadi karena pengerjaan konstruksi yang telah mencapai tahap finalisasi.

Dengan demikian, pada akhir tahun 2025, Perseroan mencatatkan keuntungan sebesar Rp3,31 miliar atau turun sebanyak 89,8% dari Proyek Kukusan 2.

The cost of revenue in 2025 was recorded at Rp124.56 billion. The cost of revenue and operating expenses increased by 99.69% and 30.12%, respectively, compared to the previous year. In general, the increase in expenses across these accounts occurred as the construction works had reached the finalization stage.

As a result, by the end of 2025, the Company recorded a profit of Rp3.31 billion from the Project Kukusan 2, representing a decrease of 89.8% compared to the previous year.

Segmen Operasi Proyek Tomoni (10 MW) Operating Segment of Project Tomoni (10 MW)

Proyek Tomoni berlokasi di Poso. Pembangunan Proyek Tomoni dimulai pada kuartal kedua tahun 2024 dengan target COD pada tahun 2026. Proyek Tomoni memiliki kapasitas produksi pembangkit sebesar 10 MW dengan perkiraan output energi tahunan sebesar 56.940 MWh.

Proyek Tomoni memiliki debit air sebesar 11,9 m³/detik dengan tinggi *net head* mencapai 95 m yang dilengkapi dengan dua turbin Francis horizontal.

The Project Tomoni is located in Poso. Construction of the Project Tomoni began in the second quarter of 2024 with a target COD in 2026. The Tomoni Project has a generation capacity of 10 MW with an estimated annual energy output of 56,940 MWh.

The project has a water discharge of 11.9 m³/second with a net head of 95 meters, and is equipped with two horizontal Francis turbines.

Lokasi Location	Poso
Kapasitas Capacity	10 MW
Net Head Net Head	257 meter
Jenis Turbin Turbine Type	Francis Turbine
Manufaktur Turbin Manufacture	Flovel



Profitabilitas Operasional Proyek Tomoni (10 MW) Profitability from the Operation of Project Tomoni (10 MW)

Dalam Rupiah
In Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Change	
			Nilai Nominal Nominal Value	Persentase Percentage
Pendapatan Revenues	168.272.369.197	67.139.238.347	101.133.130.850	150,63%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	125.623.819.714	47.208.695.573	78.415.124.141	166,10%
Laba Kotor Gross Profit	42.648.549.483	19.930.542.774	22.718.006.709	113,99%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	49.404.704.113	17.182.163.826	32.222.540.287	187,53%

Walaupun belum beroperasi, Perseroan telah mencatatkan pendapatan dari Proyek Tomoni yang berasal dari pendapatan konstruksi.

Pada tahun 2025, pendapatan dari Proyek Tomoni tercatat Rp168,27 miliar, meningkat 150,63% dibanding pendapatan tahun 2024 sebesar Rp67,14 miliar. Hal ini diakibatkan progres konstruksi proyek yang makin terakselerasi dan semakin mendekati rampungnya konstruksi proyek.

Beban pokok pendapatan tahun 2025 tercatat sebesar Rp125,62 miliar. Terjadi peningkatan pada beban pokok pendapatan dan beban usaha masing-masing sebesar 166,10% dan 113,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara garis besar, peningkatan beban pada masing-masing pos terjadi karena progres konstruksi yang terus berjalan.

Dengan demikian, pada akhir tahun 2025, Perseroan mencatatkan peningkatan laba 187,53% dari Proyek Tomoni dan mencapai Rp49,40 miliar.

Although it has not yet commenced operations, the Company has recorded revenue from the Project Tomoni, derived from construction revenue.

In 2025, revenue from the Project Tomoni reached Rp168.27 billion, representing an increase of 150.63% compared to Rp67.14 billion in 2024. This increase was driven by the accelerated progress of the project's construction, bringing it closer to completion.

The cost of revenue in 2025 was recorded at Rp125.62 billion. Both the cost of revenue and operating expenses increased by 166.10% and 113.99%, respectively, compared to the previous year. In general, the increase in expenses across these accounts was driven by the ongoing progress of the project's construction.

As a result, by the end of 2025, the Company recorded a 187.53% increase in profit from the Project Tomoni, reaching Rp49.40 billion.

Tinjauan Keuangan Financial Review

Diskusi dan analisis keuangan berikut diambil dari Laporan Keuangan PT Arkora Hydro Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa pengecualian sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 9 Maret 2026.

The following discussion and financial analysis are derived from the Financial Statements of PT Arkora Hydro Tbk for the year ended December 31, 2025, which were audited in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia by the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia and Partners, based on the Audit Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants, with an unqualified opinion as stated in its report dated March 9, 2026.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statements of Financial Position

Aset

Assets

Dalam Rupiah
In Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Changes
Aset Lancar Current Assets			
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	99.328.536.129	37.303.720.622	166%
Piutang Usaha Pihak Ketiga Trade Accounts Receivable Third Party	17.665.607.887	15.879.455.725	11%
Piutang Lain-lain Other Accounts Receivable			
Pihak Berelasi Related Parties	0	2.671.988	-100%
Pihak Ketiga Third Parties	21.191.564.306	802.648.838	2.540%
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Advances and Prepaid Expenses	1.932.260.777	2.253.857.060	-14%
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	1.827.847.361	2.986.827.921	-39%
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi - Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Financial Assets from Concession Project - Current	139.641.378.222	102.425.474.126	36%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	281.587.194.682	161.654.656.280	74%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets			
Uang Muka Pembelian Aset Tetap Advances for Purchase Property, Plant and Equipment	14.734.966.276	2.675.750.818	451%
Aset Tetap Property, Plant And Equipment	205.844.287.282	208.430.481.129	-1%
Aset Hak Guna Sewa - Bersih Right-Of-Use Assets - Net	178.903.536	536.710.656	-67%
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi - Jatuh Tempo Lebih Dari Satu Tahun Financial Assets from Concession Project - Non-Current	1.081.106.285.383	842.077.527.197	28%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Asset	14.641.972.083	7.767.301.947	89%
Aset Tak Berwujud Intangible Asset	48.944.630.319	41.871.661.923	17%
Goodwill Goodwill	275.000.000	275.000.000	0%
Aset Lain-Lain Other Assets	49.230.574.361	54.065.568.990	-9%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	1.414.956.619.240	1.157.700.002.657	22%
Jumlah Aset Total Assets	1.696.543.813.922	1.319.354.658.937	29%



Aset Lancar Current Assets

Nilai aset lancar Perseroan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp281,59 miliar, yang mengalami peningkatan 74% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut disebabkan oleh peningkatan signifikan terutama pada komponen kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak ketiga, dan aset keuangan dari proyek konsesi yang jatuh tempo dalam satu tahun.

The value of the Company's current assets at the end of 2025 amounted to Rp281.59 billion, which increased by 74% compared to the previous year. This change was due to significant increase in some components such as cash and cash equivalent, third party other receivables, and current portion of financial assets from concession project.

Aset Tidak Lancar Non-Current Assets

Nilai aset tidak lancar Perseroan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.414,96 miliar, yang mengalami peningkatan 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut disebabkan oleh peningkatan signifikan beberapa komponen seperti aset keuangan dari proyek konsesi yang jatuh tempo lebih dari satu tahun serta uang muka pembelian aset tetap.

The value of the Company's non-current assets at the end of 2025 amounted to Rp1.414,96 billion, which increased by 22% compared to the previous year. This change was due to significant increase in some components such as non-current portion of financial assets from concession project and advances for purchase property, plant, and equipment.

Total Aset Total Assets

Nilai total aset Perseroan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.696,54 miliar, yang mengalami peningkatan 29% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut disebabkan oleh peningkatan yang sangat signifikan terhadap beberapa komponen terutama aset keuangan dari proyek konsesi (baik yang jatuh tempo dalam satu tahun maupun yang lebih) serta kas dan setara kas.

The value of the Company's total assets at the end of 2025 amounted to Rp1.696,54 billion, which increased by 29% compared to the previous year. This change was due to significant increase in some components, especially financial assets from concession projects (both current and non-current) and also cash and cash equivalent.

Liabilitas Liabilities

Dalam Rupiah
In Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Changes
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities			
Cerukan dan Utang Bank Bank Loan and Overdraft	23.950.149.122	15.492.118.620	55%
Utang Usaha dan Lainnya Trade And Others Accounts Payable			
Pihak Berelasi Related Parties	5.966.315.254	12.500.189.783	-52%
Pihak Ketiga Third Parties	16.976.412.006	9.018.505.043	88%
Utang Pajak Taxes Payable	4.515.065.036	1.747.742.173	158%

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Changes
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Current Maturities of Long-Term Liabilities			
Utang Bank Bank Loans	1.614.285.719	1.614.285.720	0%
Utang Lainnya Other Payable	5.078.004.000	5.078.004.000	0%
Utang Obligasi Bonds Payable	318.060.000.000	-	100%
Pinjaman Berjangka Term Loans	16.943.704.084	15.413.555.706	10%
Pinjaman dari Pihak Berelasi Loan From Related Parties	13.054.491.230	3.764.240.381	247%
Biaya Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	11.282.919.402	13.944.036.578	-19%
Utang Retensi Retention Payable	10.475.579.634	8.333.271.086	26%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	427.916.925.478	86.905.949.090	392%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities			
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Long-Term Liabilities - Net of Current Maturities			
Utang Bank Bank Loans	5.111.904.756	6.726.190.462	-24%
Utang Lainnya Other Payable	5.077.984.000	10.155.988.000	-50%
Utang Obligasi Bonds Payable	16.302.925.715	332.502.209.993	-95%
Pinjaman Berjangka Term Loans	430.723.234.813	272.976.325.411	58%
Pinjaman dari Pihak Berelasi Loan from Related Party	211.055.312.024	76.223.182.056	177%
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	74.036.800.853	73.107.397.699	1%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Obligations	10.118.422.888	9.130.696.201	11%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	752.426.585.049	780.821.989.820	-4%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.180.343.510.536	867.727.938.910	36%



Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities

Nilai liabilitas jangka pendek Perseroan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp427,92 miliar, yang mengalami peningkatan 392% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut disebabkan oleh terutama adanya utang obligasi yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun.

The value of the Company's current liabilities at the end of 2025 amounted to Rp427.92 billion, which increased by 392% compared to the previous year. This change was mainly due to bonds payable that reach maturity within one year.

Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities

Nilai liabilitas jangka panjang Perseroan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp750,87 miliar, yang mengalami penurunan 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut disebabkan terutama oleh penurunan utang obligasi karena sebagian besar jatuh tempo dalam waktu satu tahun namun juga diiringi dengan peningkatan signifikan pada bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun untuk komponen pinjaman berjangka dan pinjaman pihak berelasi.

The value of the Company's non-current liabilities at the end of 2025 amounted to Rp750.87 billion, which decreased by 4% compared to the previous year. This change was mainly due to decrease of bonds payable because a lot of its amount is due within one year, while in the same time having a significant increase for non-current portion of term loans and loans from related party.

Total Liabilitas Total Liabilities

Nilai total liabilitas Perseroan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.180,34 miliar, yang mengalami peningkatan 36% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pada komponen laba ditahan sejalan dengan kenaikan laba Perseroan.

The value of the Company's total liabilities at the end of 2025 amounted to Rp1.180.34 billion, which increased by 36% compared to the previous year. This change was mainly due to an increase in retained earnings in line with the Company's profit growth..

Ekuitas Equity

Dalam Rupiah
In Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Changes
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.928.495.000 saham pada tanggal 31 December 2025 (31 Desember 2024: 2.928.495.000 saham) Subscribed and paid-up - 2,928,495,000 shares at December 31, 2025 (December 31, 2024: 2,928,495,000 shares)	73.212.375.000	73.212.375.000	0%
Tambahan Modal Disetor Additional Paid - In Capital	225.900.774.933	225.900.774.933	0%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	2.443.385.889	1.763.121.613	39%
Saldo Laba Retained Earnings			
Dicadangkan Appropriated	4.000.000.000	2.000.000.000	100%

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Changes
Belum Dicapangkan Unappropriated	209.507.648.301	147.604.192.497	42%
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of the Company	515.064.184.122	450.480.464.043	14%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	1.136.119.263	1.146.255.984	-1%
Jumlah Ekuitas Total Equity	516.200.303.385	451.626.720.027	14%

Total Ekuitas Total Equity

Nilai total ekuitas Perseroan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp516,2 miliar, yang mengalami peningkatan 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan signifikan pada komponen laba ditahan, baik yang sudah dicadangkan maupun yang belum dicadangkan.

The value of the Company's total equity at the end of 2025 amounted to Rp516.2 billion, which increased by 14% compared to the previous year. This change was mainly due to significant increase in retained earnings component, both appropriated or unappropriated.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Dalam Rupiah
In Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Changes
Pendapatan Revenues	343.321.381.981	238.914.421.879	44%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(253.608.620.917)	(180.343.009.777)	41%
Laba Kotor Gross Profit	89.712.761.064	58.571.412.102	53%
Beban Usaha Operating Expenses			
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(72.246.197.414)	(57.297.289.789)	26%
Beban Keuangan Finance Costs	(78.525.798.093)	(64.022.275.785)	23%
Penghasilan Keuangan Finance Income	98.236.254.546	83.415.953.971	18%
Kerugian Atas Selisih Kurs – Bersih Loss on Foreign Exchange – Net	8.071.810	150.706.178	-95%
(Kerugian) Keuntungan Lain-Lain – Bersih Other (Loss) Gain – Net	22.777.009.760	305.794.049	7.348%
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	59.962.101.673	21.124.300.726	184%
Beban Pajak Tax Expenses	3.931.217.828	20.676.370.493	-81%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	63.893.319.501	41.800.671.219	53%



Uraian Description	2025	2024	Perubahan Changes
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak Other Comprehensive Income Net of Tax			
Pos-Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Items that will not Reclassified Subsequently to Profit or Loss:			
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Atas Program Imbalan Kerja Pasti Actuarial (Loss) Gain of Defined Benefit Plan	872.133.150	(362.467.631)	-341%
Pajak Dari (Kerugian) Keuntungan Aktuarial Tax of Actuarial (Loss) Gain	(191.869.293)	79.742.879	-341%
Jumlah Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak Total Other Comprehensive Income for The Year - Net of Tax	680.263.857	(282.724.752)	-341%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	64.573.583.358	41.517.946.467	56%
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Net Income for the Year Attributable to:			
Pemilik Entitas Induk Owners of the Company	63.903.455.804	41.799.739.448	53%
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	(10.136.303)	931.771	-1.199%
Jumlah Total	63.893.319.501	41.800.671.219	53%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:			
Pemilik Entitas Induk Owners of the Company	64.583.720.080	41.517.025.840	56%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	(10.136.722)	920.627	-1.201%
Jumlah Total	64.573.583.358	41.517.946.467	56%
Laba Per Saham Earnings per Share	22	14	57%

Pendapatan Revenues

Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp343,32 miliar pada akhir tahun 2025. Jumlah ini 44% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya terutama karena adanya peningkatan signifikan pendapatan jasa konstruksi dari proyek-proyek kami yang konstruksinya masih berjalan (Kukusan dan Tomoni).

The Company recorded revenue of Rp343.32 billion at the end of 2025. This amount was 44% higher than the previous year mainly due to significant increase in construction services revenue from our ongoing projects that were still under construction (Kukusan and Tomoni).

Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue

Beban pokok pendapatan Perseroan pada akhir tahun 2025 berjumlah Rp73,27 miliar, mengalami peningkatan sebesar 41% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ini disebabkan terutama oleh peningkatan signifikan biaya konstruksi, sejalan dengan progresi konstruksi pada proyek-proyek yang masih dalam tahap pembangunan (Tomoni dan Kukusan).

The Company's cost of revenue at the end of 2025 amounted to Rp73.27 billion, an increase of 41% compared to the previous year. This change was mainly due to significant increase in construction cost, in line with construction progress within ongoing projects that is still under construction (Tomoni and Kukusan).

Laba Kotor Gross Profit

Laba kotor Perseroan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp89,71 miliar. Terjadi peningkatan 53% dibandingkan tahun sebelumnya yang terjadi terutama karena adanya peningkatan pendapatan yang komponen terbesarnya adalah pendapatan jasa konstruksi yang dibarengi dengan usaha menjaga tingkat biaya terkait.

The Company's gross profit at the end of 2025 amounted to Rp89.71 billion. There was an increase of 53% compared to the previous year, which occurred mainly due to increase in revenue, which the biggest component is construction revenue that also accompanied by efforts to maintain the level of related costs .

Laba Neto Tahun Berjalan Net Profit for The Year

Laba neto tahun berjalan untuk tahun 2025 tercatat sebesar Rp63,89 miliar. Terjadi peningkatan 53% dibandingkan tahun sebelumnya yang terjadi karena peningkatan pendapatan yang sangat signifikan dibarengi dengan mempertahankan tingkat biaya yang ada.

The net profit for the year of 2025 amounted to Rp63.89 billion. There was an increase of 53% compared to the previous year, which occurred due to very significant increase in revenue while also maintaining the level of related costs.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for The Year

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2025 tercatat sebesar Rp64,57 miliar. Terjadi peningkatan 56% dibandingkan tahun sebelumnya yang terjadi karena adanya peningkatan signifikan pada keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti.

The comprehensive income for the year of 2025 amounted to Rp64.57 billion. There was an increase of 56% compared to the previous year, which occurred due to significant increase of actuarial gain from defined benefit plan.



Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statement of Cash Flows

Dalam Rupiah
In Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Changes
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flow from (for) Operating Activities	(141.457.941.698)	(94.789.594.634)	-49%
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flow from (for) Investing Activities	(12.135.427.924)	(29.182.626.855)	58%
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flow from (for) Financing Activities	207.160.154.624	78.049.393.295	165%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank Net Increase (Decrease) in Cash and Bank	53.566.785.005	(45.922.828.194)	217%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Bank at the Beginning of the Year	21.811.602.002	67.734.430.196	-68%
Cerukan Bank Bank Overdraft	(23.950.149.122)	(15.492.118.620)	-55%
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	99.328.536.129	37.303.720.622	166%

Arus Kas Aktivitas Operasi Cash Flows of Operating Activities

Pada tahun 2025, arus kas yang digunakan Perseroan untuk operasi tercatat sebesar Rp141,46 miliar, penggunaan kas meningkat 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena peningkatan signifikan pada pembayaran kas pada pemasok.

In 2025, the cash flow used by the Company for operations amounted to Rp141.46 billion, which increased by 49% compared to the previous year. This increase was due to significant increase in payment to suppliers.

Arus Kas Aktivitas Investasi Cash Flows of Investing Activities

Arus kas untuk investasi yang dikeluarkan Perseroan tercatat sebesar Rp12,14 miliar di sepanjang tahun 2025, menurun 58% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena tidak adanya pengeluaran untuk perolehan aset lainnya dan uang muka pembelian aset tetap sebagaimana yang terjadi pada tahun 2024.

The cash flow for investment activities spent by the Company throughout 2025 amounted to Rp12.14 billion, which decreased by 58% compared to the previous year. This decrease was due to there is no expenditure for addition of other assets and advance for purchase of property, plant, and equipment as how it is on 2024.

Arus Kas Aktivitas Pendanaan Cash Flows of Financing Activities

Pada tahun 2025, Perseroan menerima kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp207,16 miliar, meningkat 165% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan signifikan pada penerimaan pinjaman berelasi serta penerimaan pinjaman berjangka.

In 2025, the Company received cash from financing activities amounting to Rp207.16 billion, which increased by 165% from the previous year. This increase was due to significant increase in proceeds from related party loan and proceeds from term loans.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at The End of The Year

Pada akhir tahun 2025, saldo kas dan setara kas akhir tahun berjumlah Rp99,33 miliar. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 166% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh penerimaan substansial pada arus kas aktivitas pendanaan.

At the end of 2025, the cash and cash equivalents balance at the end of the year amounted to Rp99.33 billion. This value increased by 166% compared to the previous year, which was due to substantial proceeds in cashflow of financing activities .

Rasio Keuangan Financial Ratio

Uraian Description	2025	2024
Rasio Lancar Current Ratio		
Gross Profit Margin	26,13%	24,52%
Return on Asset	3,77%	3,17%
Return on Equity	12,38%	9,26%
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio		
Rasio Lancar Current Ratio	65,80%	186,01%
Rasio Kas Cash Ratio	23,21%	42,93%
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio		
Liabilitas terhadap Aset Liabilities to Assets	0,70x	0,66x
Liabilitas terhadap Ekuitas Liabilities to Equity	2,29x	1,92x

Rasio Likuiditas Liquidity Ratio

Rasio likuiditas mengacu pada rasio lancar, Perseroan melakukan penghitungan dengan membandingkan nilai aset lancar dengan liabilitas jangka pendek.

Per 31 Desember 2025, rasio rasio lancar Perseroan tercatat sebesar 65,8%. Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya karena peningkatan signifikan pada liabilitas jangka pendek yang disebabkan oleh utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam satu tahun.

Nilai rasio memperlihatkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

The liquidity ratio refers to the current ratio, and the Company calculates it by comparing the value of current assets with current liabilities.

As of December 31, 2025, the Company's current ratio amounted to 65.8%. This was lower than the previous year due to significant increase in current liability due to bonds payable that is to be due within one year.

The ratio indicates that the Company has sufficient ability to meet its short-term obligations.



Rasio Solvabilitas Solvency Ratio

Rasio solvabilitas diukur dengan menghitung rasio perbandingan antara liabilitas dan ekuitas (*Debt to Equity Ratio/DER*) serta perbandingan antara liabilitas dan aset (*Debt to Asset Ratio/DAR*).

Pada 31 Desember 2025, Perseroan mencatatkan DER sebesar 2,29x dan DAR sebesar 0,70x. Terjadi peningkatan pada nilai DER dan DAR dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya peningkatan jumlah total liabilitas yang dibandingkan dengan tahun 2024.

Peningkatan yang stabil pada rasio solvabilitas memperlihatkan bahwa Perseroan mampu menjaga kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjang tiap tahunnya.

The solvency ratio is measured by calculating the ratio between liabilities and equity (*Debt to Equity Ratio/DER*) as well as the ratio between liabilities and assets (*Debt to Asset Ratio/DAR*).

As of December 31, 2025, the Company recorded a DER of 2,29x and a DAR of 0,70x. There was an increase in the DER and DAR compared to the previous year due to increase of total liabilities compared to the year of 2024.

The stable increase in the solvency ratio shows that the Company is able to maintain a good ability to meet its long-term obligations each year.

Tingkat Kolektibilitas Piutang Collectability

Tingkat kolektibilitas piutang mengacu pada durasi pengumpulan piutang oleh Perseroan dalam 1 (satu) periode tertentu. Pada 31 Desember 2025, pengumpulan piutang Perseroan adalah 20–25 hari, sama seperti tahun sebelumnya.

Perseroan senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan PLN sebagai pelanggan utama melalui pemenuhan seluruh kewajiban operasional secara konsisten, termasuk memastikan produksi listrik yang stabil, andal, serta sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Kinerja proyek yang optimal turut berdampak positif pada pembayaran dari PLN.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menghadapi kendala dalam proses penagihan maupun penerimaan pembayaran sehingga tidak terdapat piutang bermasalah (*non-performing receivables*) yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Kondisi ini menegaskan kemampuan Perseroan dalam menjaga tingkat kolektibilitas piutang pada level yang sangat baik.

The accounts receivable collectability rate refers to the duration of the Company's receivables collection in a specific period. As of December 31, 2025, the Company's receivables collection period was 20–25 days, the same as the previous year.

The Company consistently maintains a strong relationship with PLN as its main customer by fulfilling all operational obligations, including ensuring stable and reliable electricity production in accordance with the provisions of the power purchase agreement. The optimal performance of the project has also contributed positively to the payment from PLN.

Throughout 2025, the Company did not encounter any obstacles in the billing or payment process, resulting in no non-performing receivables that could potentially cause financial losses. This condition reaffirms the Company's ability to maintain an excellent level of receivables collectability.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen

Capital Structure and Management Policy

Struktur Modal

Capital Structure

Dalam Rupiah
In Rupiah

Struktur Modal Capital Structure	2025	Kontribusi Contribution	2024	Kontribusi Contribution	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
					Nominal	Persentase Percentage
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	427.916.925.487	25%	86.905.949.092	7%	341.010.976.395	392%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	752.426.585.049	44%	780.821.989.820	59%	(28.395.404.771)	-4%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.180.343.510.537	70%	867.727.938.910	66%	312.615.517.626	36%
Ekuitas Equity	516.200.303.386	30%	451.626.720.027	34%	64.573.583.359	14%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.696.543.813.922		1.319.354.658.937		377.189.154.985	29%

Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Management Policy on Capital Structure

Struktur modal Perseroan disusun dengan menggunakan perbandingan antara penggunaan modal sendiri dan pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam praktiknya, Perseroan lebih mengutamakan porsi liabilitas jangka panjang dan ekuitas sebagai komponen utama struktur pendanaan. Kedua elemen ini dinilai lebih sesuai dengan karakteristik bisnis *run-of-river hydropower* yang membutuhkan investasi awal besar, namun memberikan arus pendapatan yang stabil dalam jangka panjang.

Komposisi liabilitas jangka panjang dan ekuitas pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 juga tercatat tidak mengalami perubahan signifikan, menandakan konsistensi strategi pendanaan Perseroan. Manajemen Perseroan menilai bahwa struktur modal tersebut adalah ideal untuk mendukung pembangunan proyek, mempersiapkannya mencapai target operasi komersial, dan mengelola proyek dengan optimal untuk memastikan arus pendapatan yang stabil dari penjualan tenaga listrik kepada pelanggan utama, yaitu PLN.

The Company's capital structure is arranged by comparing the use of internal capital and borrowings, both current and non-current. In practice, the Company prioritizes non-current liabilities and equity as the main components of its funding structure. These two elements are considered more suitable for the characteristics of run-of-river hydropower operations, which require substantial initial investment but generate stable long-term revenue streams.

The composition of long-term liabilities and equity in 2025, compared to 2024, did not show significant changes, indicating the consistency of the Company's funding strategy. Management believes that this capital structure is ideal to support project development, prepare the facilities to reach commercial operation targets, and manage the project optimally to ensure stable revenue streams from electricity sales to the main customer, PLN.



Manajemen secara berkala melakukan peninjauan dan evaluasi menyeluruh terhadap struktur modal Perseroan. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha, mengoptimalkan struktur pendanaan, dan pada akhirnya memaksimalkan nilai serta pengembalian bagi para Pemegang Saham.

Management also conducts regular and comprehensive reviews and evaluations of the Company's capital structure. The objective is to maintain business continuity, optimize the funding structure, and ultimately maximize value creation and returns for Shareholders.

Target dan Realisasi 2025, Proyeksi 2026 [F.2, F.3] 2025 Target and Realization, 2026 Projection [F.2, F.3]

Kegiatan usaha Perseroan sangat erat kaitannya dengan kapasitas dan kinerja produksi listrik yang dihasilkan oleh proyek. Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah mengoperasikan 3 (tiga) proyek yaitu proyek Cikopo 2 (7,4 MW), proyek Koro Tomasa (10 MW), Proyek Koro Yaentu (10 MW).

The Company's business activities are closely related to the capacity and performance of electricity production generated by its projects. Throughout 2025, the Company operated 3 (three) projects, namely the Project Cikopo 2 (7.4 MW), the Project Koro Tomasa (10 MW), and the Project Koro Yaentu (10 MW).

Proyek-proyek tersebut menjadi kontributor utama dalam mendukung pencapaian pendapatan Perseroan serta menjadi dasar penetapan target produksi tahunan. Mengingat karakteristik *run-of-river hydropower* yang memanfaatkan energi terbarukan dari aliran sungai langsung, maka target produksi listrik proyek juga merupakan target yang sejalan dengan operasional berkelanjutan.

These projects served as the main contributors to the Company's revenue achievement and formed the basis for setting the annual production targets. Considering the characteristics of run-of-river hydropower, which utilizes renewable energy sourced directly from river flow, the electricity production targets of each project are aligned with sustainable operational principles.

Hingga akhir 2025, Perseroan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan capaian sebesar 100,62%. Pencapaian ini dapat dicapai karena adanya peningkatan signifikan pada pendapatan jasa konstruksi.

As of the end of 2025, the Company successfully met the targets set out in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), achieving 100,62%. This achievement was made possible by significant increase in construction revenue

Memasuki tahun 2026, Perseroan menetapkan target total produksi listrik sebesar 194.863.166 MWh yang akan dicapai melalui produksi site baru, yaitu Kukusan II dan pada saat bersamaan mempertahankan tingkat produksi pada site Cikopo dan Koro Tomasa serta memastikan peningkatan produksi pada site Koro Yaentu.

Entering 2026, the Company has set a total electricity production target of 194.863.166 MWh, which will be pursued through new operating site which is Kukusan II and in the same time ensuring the same level of productivity for Cikopo and Tomasa site while ensuring increase of production for Koro Yaentu site.

Pencapaian target produksi dari seluruh proyek akan membawa Perseroan mencapai target-target keuangan pada tahun 2025 dan menetapkan target tahun 2026.

Achieving the production targets across all projects will enable the Company to reach its financial targets for 2025 and establish clear objectives for 2026.

Pencapaian Target Produksi Proyek Tahun 2025, dan Proyeksi 2026 Achievement of Projects' Production Target in 2025, and Projection for 2026

Dalam MWh
In MWh

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2025 2025 Target	Capaian 2025 2025 Achievement		Target 2026 2026 Target
			Nilai Nominal Nominal Value	Pencapaian Achievement	
Proyek Cikopo - 7,4 MW	49,128.608 MWh	42,738.625	44.418.264.000	115%	42,698.718
Proyek Tomasa 10 MW	60,272.478 MWh	57,510.000	7.754.345.093	105%	57,702.000
Proyek Koro Yaentu 10 MW	42,399.451 MWh	63,951.913	25.260.756.564	66%	61,860.508
Proyek Kukusan 7,4 MW	-	-	-	-	32,601.940
Jumlah Total	151,800.537 MWh	164.200.538	77.433.365.657	92%	194,863.166

Pencapaian Target Keuangan Tahun 2025, dan Proyeksi 2026 Achievement of Financial Target in 2025, and Projection for 2026

Dalam Rupiah
In Rupiah

Uraian Description	Target 2025 2025 Target	Capaian 2025 2025 Achievement		Target 2026 2026 Target
		Nilai Nominal Nominal Value	Pencapaian Achievement	
Pendapatan Revenues	341.194.670.583	343.321.381.981	100,62%	456.800.630.733
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	256.409.068.548	253.608.620.917	98,91%	290.869.230.341
Laba Kotor Gross Profit	84.785.602.035	89.712.761.064	105,81%	165.931.400.391
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	62.280.100.877	63.893.319.501	102,59%	99.803.756.935
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income (Loss) for the Year	60.364.161.675	64.573.583.358	106,97%	96.733.467.585



Investasi Barang Modal

Capital Goods Investment

Pada tahun 2025, Perseroan melakukan aktivitas investasi barang modal pada aset tetap, yang tercatat menjadi nilai biaya perolehan dan akumulasi penyusutan.

Nilai biaya perolehan aset Perseroan tetap pada tahun 2025 berjumlah Rp11,317 miliar, mengalami penurunan sebesar 64% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai akumulasi penyusutan pada tahun 2025 mencapai Rp13,91 miliar, mengalami peningkatan sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya.

In 2025, the Company carried out capital investment activities in fixed assets, which were recorded as the acquisition cost and accumulated depreciation.

The acquisition cost of the Company's fixed assets in 2025 amounted to Rp11.317 billion, which decreased by 64% compared to the previous year. The accumulated depreciation in 2025 reached Rp13.91 billion, showing an increase of 15% compared to the previous year.

Dalam Rupiah
In Rupiah

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Changes
Biaya Perolehan Acquisition Costs			
Pemilikan Langsung Direct Acquisition			
Peralatan Equipment	7.081.554.389	1.716.680.542	313%
Kendaraan Vehicles	2.188.457.735	278.125.540	687%
Jaringan Tegangan Menengah Medium Voltage Transmission	-	29.458.271.242	-100%
Turbin Turbine	-	-	-
Perlengkapan Equipment	2.047.950.000	-	-
Bangunan Building	-	46.463.160	-100%
Jumlah Total	11.317.962.124	31.499.540.484	-64%
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation			
Pemilikan Langsung Direct Acquisition			
Peralatan Equipment	1.686.241.522	786.138.812	114%
Renovasi Bangunan Building Renovation	1.195.722.381	1.296.464.045	-8%
Kendaraan Vehicles	549.461.339	383.907.359	43%
Jaringan Tengah Menengah Medium Voltage Transmission	1.207.135.383	1.158.863.241	4%

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Changes
Bangunan Proyek Project Building	5.352.556.029	4.488.357.580	19%
Turbin Turbine	3.940.039.317	3.940.039.316	0%
Jumlah Total	13.931.155.971	12.053.770.353	16%

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal Capital Goods Investment

Pada tahun 2025, investasi barang modal yang dilakukan Perseroan dalam Rupiah tidak dapat dikategorikan sebagai investasi yang memiliki ikatan material. Jumlah nilai nominal investasi berada di kisaran Rp11,31 miliar dan meningkat 4% dari total aset tahun sebelumnya. Investasi ini merupakan investasi rutin yang dikeluarkan Perseroan dan diperlukan untuk melakukan kegiatan operasional, sehingga tidak memerlukan keputusan dari Pemegang Saham.

Sumber dana untuk investasi sebagian besar berasal dari internal Perseroan. Sumber dana yang berasal dari kesepakatan dengan pihak eksternal tidak tergolong material dalam hal jumlah nilai nominal ataupun tujuannya.

In 2025, the capital investment made by the Company in Rupiah cannot be categorized as materially significant. The investment amounted to approximately Rp11.31 billion, representing an increase of 4% compared to the total assets of the previous year. This investment is part of the Company's routine expenditure necessary to support operational activities and therefore, it does not require approval from the Shareholders.

The funding for the investment was primarily sourced from the Company's internal resources. Funds obtained through agreements with external parties are not considered material in terms of either nominal value or purpose.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investments, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition or Debt/Capital Restructuring

Pada tahun 2025, tidak terdapat informasi perihal investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal yang bersifat material ataupun mengandung benturan kepentingan. Semua informasinya telah disampaikan dalam Laporan Tahunan ini, sesuai dengan Laporan Keuangan Teraudit yang telah dipublikasikan.

In 2025, the Company has financial information regarding material investments, expansions, divestments, mergers/acquisitions, or debt/equity restructuring that could result in a conflict of interest. All such information has been disclosed in this Annual Report, in accordance with the audited Financial Statements that have been published.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Subsequent to The Accountant's Report Date

Perseroan dapat menegaskan bahwa tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal pelaporan akuntan. Hal ini juga sesuai dengan pengungkapan dalam Laporan Keuangan (Audited) yang telah dipublikasikan.

The Company confirms that there were no material information or facts occurring after the accountant's reporting date. This is also in line with the disclosures in the published Audited Financial Statements.



Prospek Usaha Business Prospect

Pada tahun 2025, Perseroan berhasil mencapai kapasitas kontrak sebesar 62,8 MW dari total *pipeline* proyek yang melebihi 300 MW. Dengan pencapaian tersebut, Perseroan turut berkontribusi dalam penambahan kapasitas energi baru terbarukan (EBT) terpasang di Indonesia, yang pada akhir Desember 2025 tercatat sebesar 15.630 MW, termasuk kapasitas pembangkit hidro sebesar 7.587 MW. Peningkatan ini juga sejalan dengan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam membuka lebih banyak tender pembangunan pembangkit listrik guna memperkuat infrastruktur energi dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Dukungan kebijakan yang pro-pertumbuhan serta iklim investasi yang berkelanjutan membuat Perseroan optimistis untuk menambah jumlah proyek pembangkit listrik pada tahun 2026.

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026. Berdasarkan dokumen tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 ditargetkan berada pada kisaran 5,2%-5,8%, dengan tingkat inflasi sebesar 1,5%-3,5% serta nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500-Rp16.900 per dolar AS. Strategi nasional yang ditetapkan pemerintah mencakup stabilisasi harga, penguatan daya beli masyarakat, serta peningkatan peluang untuk memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Diperkirakan peningkatan permintaan listrik akan mencapai 205 TWh pada periode 2025-2034, yang didukung oleh pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 km dan gardu listrik dengan kapasitas sebesar 107.950 MVA. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas investasi melalui penguatan hilirisasi, pengembangan industri berbasis energi bersih, serta penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan kepastian berusaha di sektor EBT.

Seiring dengan target pertumbuhan ekonomi dan berbagai stimulus untuk mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, kebutuhan listrik nasional diperkirakan akan terus meningkat. Dalam konteks ini, Perseroan memiliki peluang yang signifikan untuk mengambil peran aktif dan berkontribusi dalam mendukung inisiatif Pemerintah Indonesia.

In 2025, the Company successfully secured contracted capacity of 62.8 MW from a total project pipeline exceeding 300 MW. Through this achievement, the Company contributed to the increase in Indonesia's installed renewable energy capacity, which stood at 15,630 MW as of the end of December 2025, including 7,587 MW of hydropower capacity. This growth is in line with the Indonesian Government's initiative to open more tenders for power plant development in order to strengthen energy infrastructure and enhance national energy resilience. Supported by pro-growth policies and a sustainable investment climate, the Company remains optimistic about expanding its power generation project portfolio in 2026.

Furthermore, the Indonesian Government has issued the 2026 Macroeconomic Framework and Fiscal Policy Guidelines (KEM-PPKF). According to the document, national economic growth in 2026 is projected to range between 5.2% and 5.8%, with an inflation rate of 1.5%-3.5% and an exchange rate in the range of Rp16,500-Rp16,900 per US dollar. The national strategy outlined by the government includes price stabilization, strengthening purchasing power, and increasing opportunities to reinforce household consumption as the main driver of economic growth.

It is estimated that electricity demand will increase to 205 TWh during the 2025-2034 period, supported by the development of 47,758 km of transmission lines and substations with a total capacity of 107,950 MVA. The Indonesian Government has also demonstrated its commitment to continuously improving the quality of investment through the strengthening of downstream industries, the development of clean energy-based industries, as well as the simplification of licensing processes and the enhancement of business certainty in the renewable energy sector.

In line with economic growth targets and various stimulus aimed at boosting household consumption, national electricity demand is expected to continue rising. In this context, the Company has significant opportunities to play an active role and contribute to supporting the Government of Indonesia's initiatives.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi Material Transaction Information Ccontaining Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Pada tahun 2025, tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dengan pihak berelasi. Walaupun demikian, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi yaitu pemegang saham, yang mencakup piutang dan pinjaman.

Transaksi antar pihak berelasi diperlakukan berbeda dengan transaksi dengan pihak lainnya, namun tetap menggunakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip yang berlaku di bidang akuntansi dan keuangan Indonesia. Direksi menentukan setiap transaksi dan Dewan Komisaris mengetahui dan turut mengawasi setiap transaksi.

Sesuai dengan informasi yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Teraudit yang telah dipublikasikan pada Catatan No 29.

In 2025, there were no material transactions involving conflicts of interest with related parties. However, the Company did engage in transactions with related parties, including shareholders, which involved receivables and loans.

Transactions between related parties are treated differently from transactions with other parties, but are still conducted in accordance with policies that align with the principles of accounting and finance in Indonesia. The Board of Directors determines each transaction, and the Board of Commissioners is aware of and oversees every transaction.

In accordance with the information disclosed in the published Audited Financial Statements under Note No. 29.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku

Changes in Accounting Policies Implemented by The Company in The Fiscal Year

Pada tahun buku berjalan, Perseroan/Grup telah mengadopsi beberapa amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), antara lain Amandemen PSAK 221 terkait Kekurangan Ketertukaran serta Amandemen PSAK 117 tentang Kontrak Asuransi. Amandemen tersebut memberikan panduan tambahan terkait penilaian ketertukaran mata uang serta prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kontrak asuransi.

Penerapan amandemen standar tersebut tidak memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan/Grup, mengingat Perseroan/Grup tidak memiliki kontrak yang memenuhi definisi kontrak asuransi sebagaimana diatur dalam PSAK 117.

During the current fiscal year, the Company/Group has adopted several amendments to Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK), including Amendment to PSAK 221 on Exchange Impaired and Amendment to PSAK 117 on Insurance Contracts. These amendments provide additional guidance on the assessment of currency convertibility and the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of insurance contracts.

The application of these amendments to the standards has no material impact on the Company/Group's consolidated financial statements, given that the Company/Group does not have any contracts that meet the definition of insurance contracts as stipulated in PSAK 117.



Kebijakan dan Pembagian Dividen

Dividend Policy and Distribution

Kebijakan pembagian dividen Perseroan mengikuti ketentuan yang berlaku umum dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kinerja usaha. Kebijakan pembagian dividen Perseroan ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

The Company's dividend distribution policy follows generally accepted practices by taking into account its financial condition and business performance. The dividend policy is determined based on the provisions set out in the Articles of Association and approved by the Shareholders through the GMS.

Mengingat bahwa proyek-proyek Perseroan belum seluruhnya berjalan dan terdapat proyek-proyek lainnya yang akan dikembangkan, maka diputuskan untuk tidak membagikan dividen dalam dua tahun terakhir: 2024 dan 2025.

Considering that not all of the Company's projects are fully operational and that additional projects are still in the development pipeline, it was decided not to distribute dividends in the past two years: 2024 and 2025.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Perseroan telah merealisasikan dan menggunakan seluruh dana hasil penawaran umum. Dengan demikian, tidak terdapat informasi lainnya yang dapat diungkapkan mengenai penggunaan dana penawaran umum dalam Laporan Tahunan ini.

The Company has fully realized and utilized all funds from the public offering. Therefore, there is no additional information to disclose regarding the use of the public offering funds in this Annual Report.

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan Manajemen

Management and Employees Share Ownership Program (MESOP/ESOP)

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan (ESOP) atau program kepemilikan saham oleh manajemen (MESOP). Program tersebut telah berakhir pada tanggal 7 Juli 2023 dan tidak lagi dilakukan hingga akhir tahun 2025. Dengan demikian, informasi tersebut tidak disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

The Company does not have an Employee Stock Ownership Program (ESOP) or a Management Employee Stock Ownership Program (MESOP). These programs ended on July 7, 2023, and have not been carried out until the end of 2025. Therefore, this information is not presented in this Annual Report.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun Buku

Changes to The Laws and Regulations in The Fiscal Year

Tidak terdapat perubahan signifikan pada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan pada tahun 2025.

There were no significant changes in laws and regulations related to the Company's business in 2025.





HYDROPOWER PLANT PROJECTS - TOMASA



Project Tom

Location : Poso, Cent

Capacity : 10 MW (2

COD : 2020

Period : 15 years



05

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance





Prinsip dan Komitmen Kebijakan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Implementation Principle and Commitment

Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi kunci penting dalam penilaian pemegang saham terhadap kinerja Perseroan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) juga menjadi sebuah mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan Perseroan agar berjalan sesuai dengan nilai Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme ini akan membantu Perseroan untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai, serta memaksimalkan upaya peningkatan kinerja serta pengembangan budaya kerja dengan tetap menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap perundang undangan dan tetap mengutamakan kepentingan pemangku kepentingan.

Perseroan memiliki komitmen untuk mengedepankan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh regulator, serta terus meningkatkan kualitas keterbukaan baik terkait aktivitas operasional maupun laporan yang disampaikan oleh Perseroan kepada regulator dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. Perseroan memiliki keyakinan dengan mengimplementasikan GCG dengan baik akan membuat keberlanjutan pada bisnis yang dijalankan sehingga tetap berjalan dalam waktu yang lama, serta memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan GCG juga senantiasa dioptimalkan secara berkesinambungan melalui berbagai langkah strategis, antara lain:

- Melibatkan seluruh organ perusahaan dalam menegakkan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG;
- Memastikan aktivitas bisnis Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika bisnis; serta
- Meningkatkan efektivitas penerapan GCG untuk mencapai praktik GCG terbaik, serta diikuti dengan penyesuaian sistem dan prosedur yang diperlukan.

As a public company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI), implementing good corporate governance is an important key in shareholders' assessment of the Company's performance. Good Corporate Governance (GCG) is also a mechanism or system directing and controlling the Company to ensure it runs in accordance with the Company's values and applicable laws and regulations. The mechanism will help the Company to stipulate the goals it wants to achieve, while maximizing efforts to improve performance and develop work culture while still honoring integrity, responsibility and compliance with laws and regulations, taking the interests of stakeholders as a priority.

The Company is committed to prioritizing compliance with all laws and regulations issued by regulators, and continues improving the quality of transparency both regarding operational activities and reports submitted by the Company to regulators and other relevant stakeholders to provide sustainable added value. The Company believes that implementing GCG well will ensure sustainability in the business to ensure it continues to run for a long time, while providing adequate protection and fair treatment to all shareholders and other stakeholders.

The GCG implementation is also continuously optimized through multiple strategic steps, including:

- Involving all company organs in honoring and implementing GCG principles;
- Ensuring that the Company's business activities are in accordance with applicable laws, regulations and business ethics; also
- Increasing the effectiveness of GCG implementation to achieve best GCG practices, followed by adjustments to necessary systems and procedures.

Landasan Hukum Penerapan GCG Legal Basis of GCG Implementation

Praktik GCG di Perseroan merujuk pada landasan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang mengatur praktik GCG untuk perusahaan tercatat atau emiten, serta beberapa peraturan dan pedoman lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Surat Edaran No 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
8. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
9. SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Roadmap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.
11. Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
12. Anggaran Dasar Perseroan.

GCG practices in the Company refer to the basis of legal regulations in Indonesia, namely the Regulations of Financial Services Authority (POJK) and the Circular Letter of Financial Services Authority (SEOJK) which regulate GCG practices for listed companies or issuers, as well as several other regulations and guidelines, including:

1. Law No. 8 of 1995 of Capital Markets.
2. Law No. 40 of 2007 of Limited Liability Companies.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
4. POJK No. 34/POJK.04/2014 of Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies.
5. POJK No. 21/POJK.04/2015 of Implementation of Public Company Governance Manual.
6. POJK No. 8/POJK.04/2015 of Issuer or Public Company Websites.
7. Circular Letter No 32/SEOJK.04/2015 of Corporate Governance Manual.
8. POJK No. 29/POJK.04/2016 of Annual Reports of Issuers or Public Companies.
9. SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021 of the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.
10. Roadmap for Indonesian Corporate Governance Manuals issued by the OJK.
11. General Guidelines for Indonesian Good Corporate Governance (GCG) issued by the National Governance Policy Committee (KNKG).
12. Articles of Association of the Company.



Tujuan Penerapan GCG

GCG Implementation Objectives

Tujuan penerapan GCG pada Perseroan antara lain:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu mempertahankan kelangsungan usaha serta mencapai Visi, Misi, dan tujuan Perseroan;
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan;
3. Mendorong agar setiap organ Perseroan dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
4. Meningkatkan kesadaran Perseroan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap para pemangku kepentingan.

The objectives of GCG implementation in the Company include:

1. Optimizing corporate value leads the Company to be highly competitive, thus it is able to maintain business continuity and achieve the Company's Vision, Mission and goals;
2. Encouraging the Company's management in a professional, efficient and effective manner, also empowering the functions and improving the independence of the Company's organs;
3. Encouraging each organ of the Company to make decisions and act based on good moral values and compliance with the Code of Ethics, applicable laws and regulations; and
4. Improving the Company's awareness to fulfill social and environmental responsibilities towards stakeholders.

Prinsip-Prinsip GCG

GCG Principles

Kerangka kerja GCG Perseroan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip-prinsip dasar yang berlaku universal. Kelima prinsip ini memegang peran yang penting bagi Perseroan dalam memenuhi harapan para Pemangku Kepentingan, antara lain:

The Company's GCG framework is based on 5 (five) basic principles that apply universally. These five principles play an important role for the Company in meeting the expectations of Stakeholders, including:

Prinsip Principle	Deskripsi Description	Implementasi Implementation
Transparansi Transparency	Memastikan bahwa pemangku kepentingan menaruh kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dan proses bisnis perusahaan. Ensure that stakeholders are confident in the Company's decision making and business processes.	1. Perseroan menyajikan informasi-informasi umum yang bersifat material secara jelas, terbuka, dan akurat melalui situs web resmi PT Arkora Hydro Tbk, yaitu: https://www.arkora.com 2. Perseroan menyampaikan laporan keterbukaan informasi secara tepat waktu kepada regulator dan dipublikasikan pada web Bursa Efek Indonesia (BEI): https://www.idx.co.id/id dengan mengakses ticker code: "ARKO". 1. The Company presents general material information clearly, openly and accurately through the official website of PT Arkora Hydro Tbk: https://www.arkora.com 2. The Company submits information disclosure reports in a timely manner to regulators and publishes them on the Indonesia Stock Exchange (BEI) website: https://www.idx.co.id/id by accessing the ticker code: "ARKO".

Prinsip Principle	Deskripsi Description	Implementasi Implementation
Akuntabilitas Accountability	Menetapkan kejelasan struktur, sistem, dan pertanggungjawaban antar-organ Perseroan secara jelas sehingga pengelolaan bisnis dapat berjalan efektif dan efisien demi tercapainya kepentingan Perseroan, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Stipulate clear structure, systems and accountability between the Company's organs thus business management can run effectively and efficiently to achieve the Company's interests, while still considering the interests of Shareholders and other Stakeholders.	1. Masing-masing organ Perseroan dan setiap karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. 2. Menetapkan kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang terukur dengan indikator-indikator yang jelas. 3. Menetapkan tolak ukur penilaian kinerja untuk semua divisi berdasarkan ukuran yang disepakati. 4. Menjaga komitmen Perseroan terhadap nilai-nilai budaya Perseroan. 1. Each organ of the Company and each employee carries out different duties and responsibilities according to their abilities and competencies. 2. Establish measurable performance assessment criteria for the Board of Commissioners and the Board of Directors with clear indicators. 3. Establish performance assessment benchmarks for all divisions based on agreed measures. 4. Maintain the Company's commitment to the Company's cultural values.
Responsibilitas Responsibility	Memastikan terlaksananya kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait prinsip ini, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha yang bertanggung jawab dan peduli dengan aspek masyarakat, lingkungan, dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya. Ensure the implementation of business activities in accordance with applicable laws and regulations. Regarding this principle, the Company is committed to conduct responsible business activities and be attentive to society, the environment and all other stakeholders.	1. Menaruh perhatian penuh terhadap tingkat kesehatan dan keselamatan kerja seluruh karyawan. 2. Mencermati dampak operasi terhadap lingkungan sekitar dan keamanannya di wilayah operasional Perseroan. 3. Pemenuhan kewajiban terhadap regulator, salah satunya dengan memastikan ketaatan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. 4. Menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>/"CSR"). 1. Fully attentive to the occupational health and safety level of all employees. 2. Pay attention to the impact of operations on the surrounding environment and safety in the Company's operational areas. 3. Fulfilling obligations to regulators, one of which is by ensuring compliance with timely tax payments and reporting. 4. Carrying out Corporate Social Responsibility (CSR) activities.
Independensi Independence	Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan atau pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The management of the Company is carried out professionally without conflicts of interest and/or influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and healthy corporate principles.	1. Mengedepankan sikap saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing organ Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan. 3. Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa berupaya menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. 1. Prioritize mutual respect for the rights, obligations, duties, authority and responsibilities of each organ of the Company in accordance with the Articles of Association, applicable laws and regulations. 2. Shareholders and the Board of Commissioners do not intervene in the management of the Company. 3. The Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees always try to avoid conflicts of interest in the decision-making process.



Prinsip Principle	Deskripsi Description	Implementasi Implementation
Kewajaran dan Kesetaraan Fairness and Equality	Menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guarantee fair and equal treatment in meeting the rights of Stakeholders based on agreements and applicable laws and regulations.	1. Memberikan hak yang sama dan setara kepada semua pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menghadirkan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi inklusivitas dengan membuka kesempatan bekerja yang sama kepada siapapun untuk bergabung di Perseroan dalam proses penerimaan karyawan. 3. Mendukung pengembangan karier karyawan tanpa membedakan suku, agama, gender, dan kondisi fisik. 1. Provide equal rights to all shareholders to attend and vote at the GMS in accordance with applicable regulations. 2. Provide an inclusive work environment by opening equal work opportunities for anyone to join the Company in the employee recruitment process. 3. Support employee career development without differentiating ethnicity, religion, gender and physical condition.

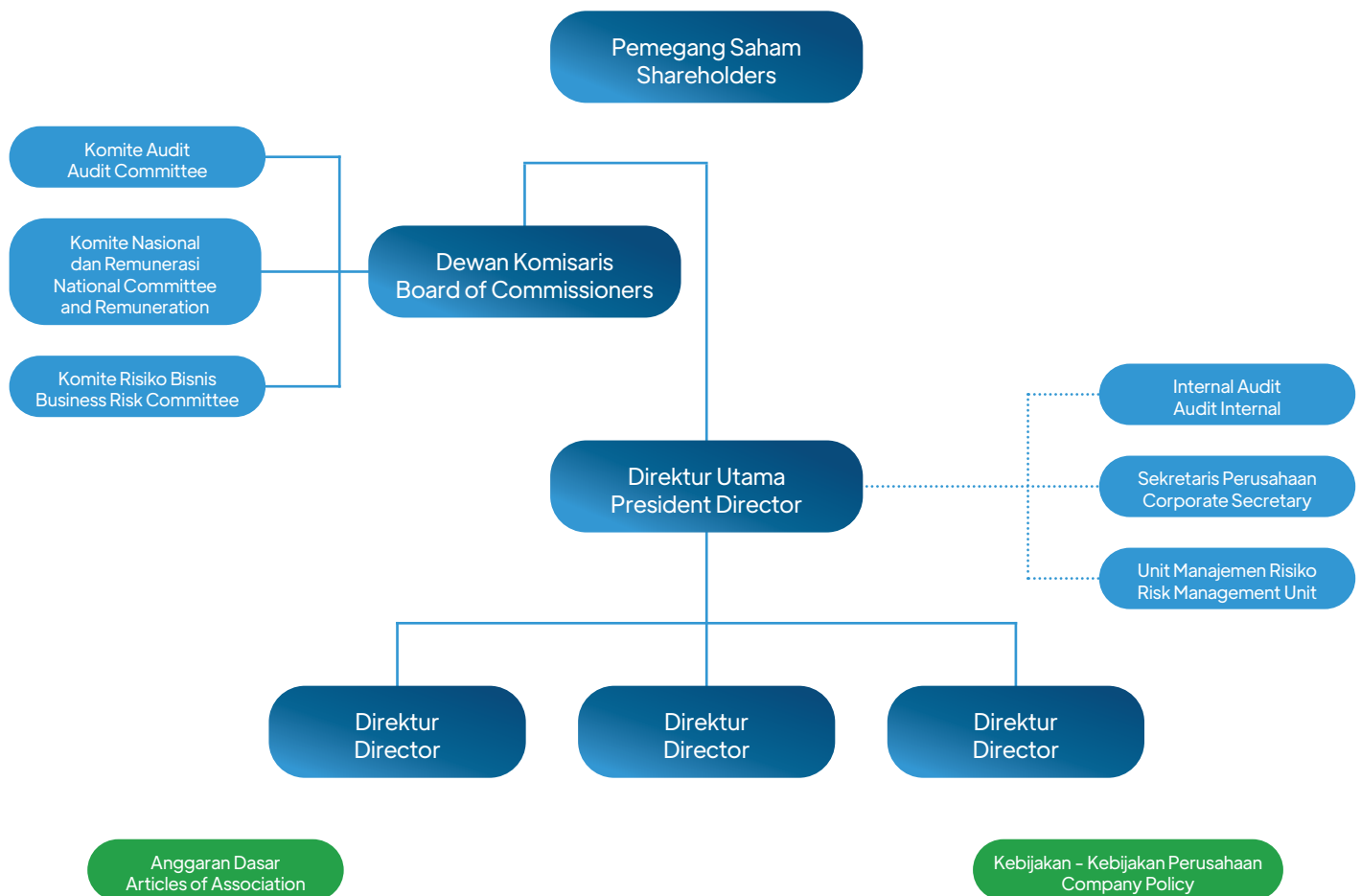
Struktur Penerapan Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Implementation Structure

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), terdapat tiga organ utama tata kelola Perseroan yaitu terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Sesuai ketentuan peraturan OJK, terdapat beberapa organ pendukung yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan terbuka yaitu Internal Audit, Sekretaris Perusahaan, serta komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan komite-komite di bawah Direksi.

Perseroan tidak memiliki kebijakan mengenai *Chairman of the Board* dan CEO, dikarenakan Perseroan dipimpin oleh CEO. [G-03]

In accordance with Law no. 40 of 2007 of Limited Liability Companies (UUPT), there are three main organs for corporate governance, consisting of the GMS, Board of Commissioners and the Board of Directors. In accordance with OJK regulations, there are several supporting organs that a public company shall have, namely Internal Audit, Corporate Secretary, also committees under the Board of Commissioners and committees under the Board of Directors.

The Company does not have a policy regarding *Chairman of the Board* and CEO because the Company is led by CEO. [G-03]





Sosialisasi dan Internalisasi GCG

GCG Socialization and Internalization

Untuk dapat memberikan pemahaman tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan internalisasi GCG selama tahun 2025, antara lain melalui sosialisasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan pada website Perusahaan yang dapat diakses oleh publik.

To provide an understanding of Good Corporate Governance implementation, the Company has carried out GCG socialization and internalization activities in 2025, including socialization of the Corporate Governance Manuals on the Company's website which can be publicly accessed.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi di Perseroan yang memiliki hak dan kewenangan yang tidak dapat diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, RUPS juga berfungsi sebagai forum utama bagi para pemegang saham untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait yang dimintakan dalam RUPS. Hal ini telah tercantum di dalam UUPT dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK15/2020").

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Company with the rights and authority that cannot be authorized to the Board of Directors and Board of Commissioners as regulated in the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations. Besides, the GMS also functions as the main forum for shareholders to participate in making related decisions requested at the GMS. This is stated in the Law of the Company and OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 of Planning and Implementation of Public Company GMS ("POJK15/2020").

Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham [G-08]

Fair Treatment of Shareholders [G-08]

Perseroan bertindak transparan dalam mengungkapkan informasi dan melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen ini tercermin dalam upaya Perseroan menjaga tata kelola yang baik dan memastikan terciptanya hubungan yang adil dengan seluruh pemegang saham.

The Company acts transparently in disclosing information and protecting shareholders' rights in accordance with applicable regulations. This commitment is reflected in the Company's efforts to uphold good corporate governance and ensure fair relations with all shareholders.

Salah satu upaya untuk memastikan pemegang saham mendapatkan perlakuan yang adil adalah dengan menjalankan praktik pencegahan transaksi orang dalam (*insider trading*). Transaksi orang dalam berasal dari informasi yang tergolong material atau penting yang dimiliki orang dalam dan belum tersedia untuk umum. Apabila karyawan memiliki informasi orang dalam, maka ia diwajibkan untuk tidak melakukan transaksi baik untuk diri sendiri maupun mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi serta tidak meneruskan atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain.

One way to ensure fair treatment of shareholders is by preventing insider trading practices. Insider trading refers to transactions conducted based on material or important information possessed by insiders that has not been made available to the public. Employees who possess inside information are required to refrain from conducting transactions for personal benefit, influencing others to conduct transactions, or disclosing or providing such information to any party.

Ketentuan mengenai *insider trading* telah diketahui oleh seluruh karyawan dan mereka diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan sesuai regulasi yang berlaku.

Provisions regarding insider trading are well understood by all employees, and they are required to comply with all applicable regulatory requirements.

Kewenangan RUPS GMS Authorities

1	Mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Appoint, dismiss and/or replace members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
2	Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris; Stipulate the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners;
3	Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar; Approving the Annual Report including ratification of the Financial Statement along with the supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with statutory regulations and/or the Articles of Association;
4	Memberikan persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan; Approving the stipulated use of the Company's net profit;
5	Menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit keuangan Perseroan; Approving the appointment of an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's finances;
6	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Approving the changes to the Company's Articles of Association, referencing the applicable laws and regulations; and
7	Menyetujui penambahan modal atau pengurangan modal Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Approving additional capital or reduction of the Company's capital by referring to applicable laws and regulations.

RUPS Perseroan terdiri dari:

1. RUPS Tahunan (RUPST)

Sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020, RUPST wajib diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Merujuk pada SE OJK Nomor 4/SEOJK.04/2022, pelaksanaan RUPST diberikan relaksasi sehingga wajib dilakukan paling lambat 1 bulan sejak batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPST atau pada tanggal 15 April 2025. Perseroan telah menyelenggarakan RUPST pada tanggal 15 April 2025 dengan salah satu agenda penyampaian kinerja Perseroan untuk tahun buku 2024 kepada para pemegang saham.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

RUPSLB dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan. Pada tahun 2025, Perseroan tidak menyelenggarakan RUPSLB.

The Company's GMS consists of:

1. Annual GMS (AGMS)

As regulated in POJK 15/2020, the AGMS must be held no later than 6 (six) months after the financial year ends. Referring to SEOJK Number 4/SEOJK.04/2022, the AGMS implementation is given relaxation, thus it must be carried out no later than 1 month from the deadline for the obligation to hold the AGMS or on April 15, 2025. The Company held the AGMS on April 15, 2025 with one of the agendas delivering the Company's performance for the fiscal year 2024 to shareholders.

2. Extraordinary GMS (EGMS)

An EGMS can be held at any time based on the Company's needs. In 2025, the Company has not hold an EGMS.



Pelaksanaan RUPS Tahun 2025 GMS Implementation In 2025

Perseroan telah melaksanakan RUPST pada tahun 2025 sesuai dengan prosedur dan tata cara penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan UUPT, POJK 15/2020, dan POJK 16/2020.

Untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang saham dipenuhi dalam setiap pelaksanaan RUPS, tata cara terkait proses pengambilan suara telah disusun dengan mempertimbangkan asas independensi dan dengan menjunjung tinggi hak pemegang saham.

Dalam RUPS Perseroan, Pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan cara menghitung manual bagi yang hadir fisik dan dengan menarik data elektronik yang telah diberikan oleh para Pemegang Saham melalui fasilitas e-RUPS (eASY.KSEI) dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) untuk mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Empat.

Rencana dan pelaksanaan RUPS Perseroan baik RUPST telah tertuang dalam surat Perseroan yang disampaikan kepada OJK dan diumumkan melalui situs web Perseroan dan BEI.

The Company has implemented a AGMS in 2025 in accordance with the procedures and procedures for holding a GMS in line with UUPT, POJK 15/2020, and POJK 16/2020.

To ensure that shareholder rights are fulfilled in every GMS, procedures related to the voting process have been prepared by considering the principle of independence and honoring the shareholder rights.

In the Company's GMS, decision making on the Meeting Agenda is carried out based on deliberation to reach consensus. If a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, the decision is taken through voting by manual counting for those physically present and by drawing on electronic data that has been provided by Shareholders through the e-GMS facility (eASY. KSEI) and approved by more than 1/2 (one half) for the First Agenda to the Fourth Agenda.

The plans and implementation of the Company's GMS, including the AGMS, have been stated in the Company's letter which was submitted to the OJK and announced on the Company's website and the IDX.

RUPS GMS	Pemberitahuan Agenda ke OJK Agenda Disclosure to OJK	Pengumuman Announcement	Pemanggilan Invitation	Ringkasan Risalah Minutes
RUPST 15 April 2025 AGMS April 15, 2025	27 Februari 2025 February 27, 2025	7 Maret 2025 March 7, 2025	24 Maret 2025 March 24, 2025	17 April 2024 April 17, 2024
	Surat Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPST kepada OJK dengan Surat Nomor 062/06/CS-AH/II/2025 Announcement for Plans to Hold an AGMS to OJK and IDX No062/06/CS-AH/II/2025	Pengumuman RUPST kepada Pemegang Saham Announcement of AGMS to shareholders	Penyampaian Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham. Submission of Announcement of AGMS to shareholders	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST kepada Pemegang Saham. Submission of Proof of AGMS Minutes to shareholders
		- Website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Situs web BEI; dan - Situs web Perseroan: https://www.arkora-hydro.com/ - Website of PT Indonesian Central Securities Depository - IDX website; and - Company website: https://www.arkora.com	- Website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Situs web BEI; dan - Situs web Perseroan: https://www.arkora-hydro.com/ - Website of PT Indonesian Central Securities Depository - IDX website; and - Company website: https://www.arkora.com	- Website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Situs web BEI; dan - Situs web Perseroan: https://www.arkora-hydro.com/ - Website of PT Indonesian Central Securities Depository - IDX website; and - Company website: https://www.arkora.com

Informasi RUPST 2025 Information of AGMS 2025

Tanggal Pelaksanaan Date	15 April 2024 April 15, 2024
Pukul Time	13.08 – 13.39 WIB
Lokasi Location	Premier Lounge, Prosperity Tower, Level 11, SCBD, District 8. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53, Senayan, Jakarta Selatan.
Kuorum Quorum	RUPS dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang Saham. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara virtual maupun fisik 2.318.111.493 (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga) saham atau 79,16% (tujuh puluh sembilan koma enam belas persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yakni sebanyak 2.928.495.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima) saham. The GMS was attended by shareholders and/or proxies of shareholders. Shareholders and/or proxy of Shareholders who attended virtually or physically 2.318.111.493 (two billion three hundred eighteen million one hundred eleven thousand four hundred ninety-three) shares or 79,16% (seventy-nine point sixteen percent) of the total number of shares with voting rights issued by the Company, namely 2.928.495.000 (two billion nine hundred twenty-eight million four hundred ninety-five thousand) shares.
Kehadiran Secara Fisik On Site Attendance	Dewan Komisaris Board of Commissioners - Iwan Hadiangoro (Komisaris / Commissioner) - Drs. Indarto S.H. (Komisaris Independen / Independent Commissioner) Direksi Board of Directors - Aldo Henry Artoko (Direktur Utama / President Director) - Ismu Nugroho (Direktur / Director) - Ricky Hartono (Direktur / Director) - Boy Gemino Kalauserang (Direktur / Director)
Perhitungan Suara Voting	Dilaksanakan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan dengan mekanisme pool dan divalidasi serta dihitung dihadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang menjalankan profesinya secara independen berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Conducted by PT Adimitra Jasa Korpora as the Share Registrar appointed by the Company using a pool mechanism, validated and calculated in front of Notary Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta who conducts his profession independently based on Law No. 30 of 2004 of Notary Positions as amended by Law No. 2 of 2014 of Amendments to Law Number 30 of 2004 of Notary Positions.



Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2025

Resolution and Realization of 2025 Annual GMS

Mata Acara 1

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2024, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Approval of the 2024 Annual Report, including the Ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report as well as the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024.

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Abstain Abstain: 1. 2.000 lembar saham mewakili 0,01% suara 2,000 shares represent 0.01% votes.	1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 19 Maret 2025, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Approved and accepted the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2024, including ratifying the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners, and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Fiscal Year 2024 audited by Liana Ramon Xenia & Rekan Public Accounting Firm, as contained in its report dated March 19, 2025, with a fair opinion in all material respects.	Telah selesai dan tidak memerlukan tindak lanjut. Finished, doesn't require follow up actions.
Tidak Setuju Disagree: 2. 0 lembar saham mewakili 0% suara 0% shares represent 0% votes.		
Setuju Agree: 3. 2.318.109.493 lembar suara mewakili 99,9% suara 2,318,109,493 shares represent 99.9% votes.	2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2024. With the approval of the Company's Annual Report and the ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries, to grant full release and discharge (<i>acquit et decharge</i>) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions, during the Fiscal Year 2024, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Fiscal Year 2024.	
Total Suara Setuju Total Affirmative Votes: 4. 2.318.111.493 lembar suara mewakili 100% suara 2,318,111,493 shares represent 100% votes.		

Mata Acara 2 Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Determination of the Utilization of the Company's Net Profits for the Financial Year 2024.

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Abstain Abstain: 1. 2.000 lembar saham mewakili 0,01% suara 2,000 shares represent 0.01% votes.	Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 41.800.671.219 (empat puluh satu milyar delapan ratus juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:	Telah selesai dan tidak memerlukan tindak lanjut. Finished, doesn't require follow up actions.
Tidak Setuju Disagree: 2. 0 lembar saham mewakili 0% suara 0% shares represent 0% votes.	1. Sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan; 2. Tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan; dan 3. Sisa laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 39.800.671.219 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) akan digunakan sebagai saldo laba untuk keperluan kelangsungan dan pengembangan usaha Perseroan.	
Setuju Agree: 3. 2.318.109.493 lembar suara mewakili 99,9% suara 2,318,109,493 shares represent 99.9% votes.	Approved the utilization of the Company's consolidated net profit for the financial year ended December 31, 2024 amounting to Rp 41,800,671,219 (forty-one billion eight hundred million six hundred seventy-one thousand two hundred nineteen Rupiah) with details as follows:	
Total Suara Setuju Total Affirmative Votes: 4. 2.318.111.493 lembar suara mewakili 100% suara 2,318,111,493 shares represent 100% votes.	1. Amounting to Rp 2,000,000,000 (two billion Rupiah) as the Company's reserve fund; 2. Not to distribute dividends to the Shareholders of the Company; and 3. The Company's remaining consolidated net profit for the financial year ended December 31, 2024 amounting to Rp 39,800,671,219 (thirty-nine billion eight hundred million six hundred seventy-one thousand two hundred nineteen Rupiah) will be used as retained earnings for the purposes of the Company's business continuity and development.	



Mata Acara 3 Agenda 3

Penetapan Remunerasi dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Remunerasi atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2025–2026.

Determination of Remuneration and Allowances of the Board of Directors of the Company and Remuneration or Honorarium and Allowances of the Board of Commissioners of the Company for the period of 2025–2026.

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Abstain Abstain: 1. 2.000 lembar saham mewakili 0,01% suara 2,000 shares represent 0.01% votes.	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan tahun 2025–2026, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.	Telah selesai dan tidak memerlukan tindak lanjut. Finished, doesn't require follow up actions.
Tidak Setuju Disagree: 2. 0 lembar saham mewakili 0% suara 0% shares represent 0% votes.	Granting authority to the Company's Board of Commissioners to design, determine, and enforce the salary and benefits system for the Company's Directors, as well as salaries or honoraria and benefits for the Company's Board of Commissioners for the 2025–2026 term of office, while taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.	
Setuju Agree: 3. 2.318.109.493 lembar suara mewakili 99,9% suara 2,318,109,493 shares represent 99.9% votes.		
Total Suara Setuju Total Affirmative Votes: 4. 2.318.111.493 lembar suara mewakili 100% suara 2,318,111,493 shares represent 100% votes.		

Mata Acara 4 Agenda 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Appointment of a Public Accountant Firm to Conduct the Audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025.

Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Abstain Abstain: 1. 2.000 lembar saham mewakili 0,01% suara 2,000 shares represent 0.01% votes.	1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Authorize the Board of Commissioners of the Company with the consideration of the Audit Committee of the Company to appoint an Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial year ending on 31 December 2025.	Telah selesai dan tidak memerlukan tindak lanjut. Finished, doesn't require follow up actions.
Tidak Setuju Disagree: 2. 0 lembar saham mewakili 0% suara 0% shares represent 0% votes.	2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Authorize the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accounting firm in accordance with applicable regulations.	
Setuju Agree: 3. 2.318.109.493 lembar suara mewakili 99,9% suara 2,318,109,493 shares represent 99.9% votes.		
Total Suara Setuju Total Affirmative Votes: 4. 2.318.111.493 lembar suara mewakili 100% suara 2,318,111,493 shares represent 100% votes.		



Pelaksanaan RUPST Tahun 2024 Implementation of AGMS 2024

Pada tahun 2024, Perseroan telah mengadakan RUPST pada tanggal 1 April 2024. Seluruh hasil keputusan RUPST 2024 sudah sepenuhnya dijalankan di tahun buku 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

In 2024, the Company held its AGMS on April 1, 2024. All resolutions of the 2024 AGMS have been fully implemented in 2024 with the following explanation:

Mata Acara 1 Point 1	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Approval of the Annual Report 2023, including Ratification of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners, along with Ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the Fiscal Year 2023.	- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Approved and accepted the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2023, including ratifying the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners, and ratifying the Consolidated Financial Report of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year 2023 which has been audited by the Imelda & Rekan Public Accounting Firm, as contained in its report, with a qualified opinion in all material respects. - Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2023. With the approval of the Company's Annual Report and ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and the Company's and Subsidiaries' Consolidated Financial Report, granting full repayment and release of responsibility (acquitt et decharge) to all members of the Company's Board of Directors for the management actions they have carried out and to all members of the Company's Board of Commissioners for the supervisory actions they have carried out, during the Fiscal Year 2023, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year 2023.	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Has been realized in 2024.

Mata Acara 2 Point 2	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Stipulation of the Use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2023.	- Menyetujui penggunaan sebagian laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.000.000.000 digunakan sebagai dana cadangan Perseroan. Approved the use of a portion of the Company's consolidated net profit for the financial year ending on December 31, 2023 amounting to Rp2,000,000,000 as the Company's reserve fund. - Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan. Approved not to distribute dividends to the Company's Shareholders. - Menyetujui penggunaan sisa laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp37.108.106.100 digunakan sebagai saldo laba untuk keperluan kelangsungan dan pengembangan usaha Perseroan. Approved the use of the Company's remaining consolidated net profit for the financial year ending on December 31, 2023 amounting to Rp37,108,106,100 will be used as retained earnings for the purposes of the Company's business continuity and development.	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Has been realized in 2024.

Mata Acara 3 Point 3	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Penetapan Remunerasi dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Remunerasi atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2024–2025. Determination of Remuneration and Allowances of the Board of Directors of the Company and Remuneration or Honorarium and Allowances of the Board of Commissioners of the Company for the period of 2024–2025.	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan tahun 2024–2025, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to design, determine, and enforce the salary and benefits system for the Company's Directors, as well as salaries or honoraria and benefits for the Company's Board of Commissioners for the 2024–2025 term of office, while taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Has been realized in 2024.



Mata Acara 4 Point 4	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Appointment of a Public Accountant Firm to Conduct the Audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024.	1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners based on the Company's Audit Committee's considerations to appoint an Accounting Firm that will audit the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the financial year ending on December 31, 2024. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Granted authority and power to the Company's Board of Directors to stipulate the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accounting firm in accordance with applicable regulations.	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Has been realized in 2024.
Mata Acara 5 Point 5	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I PT Arkora Hydro Tbk. Report of the Realization of the Use of Funds from Public Offering of Green Bond I of PT Arkora Hydro Tbk.	Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum pada setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan dan wajib menjadi salah satu mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersifat laporan sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham. Oleh karena itu, Rapat tidak membuka sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan untuk mata acara kelima. In accordance with Article 6 of the Financial Services Authority Regulation Number 30/ POJK.04/2015 regarding the Report on the Realization of the Use of Public Offering Proceeds, public companies are required to account for the realization of the use of public offering proceeds at each Annual General Meeting of Shareholders until all public offering proceeds have been realized and must be one of the agenda items at the Annual General Meeting of Shareholders which is a report, so it does not require shareholder approval. Therefore, the Meeting did not open a question and answer session and decision making session for the fifth agenda item.	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Has been realized in 2024.

Direksi Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan demi tercapainya maksud dan tujuan Perseroan, serta bertugas mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Direksi Manuals of the Board of Directors

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Electing and Dismissing the Board of Directors

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Direksi diserahkan sepenuhnya kepada RUPS dan harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. 1 periode masa jabatan Anggota Direksi paling lama 5 tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir periode masa jabatan tersebut.

Jumlah dan Komposisi Direksi Total and Composition of the Board of Directors

Masa jabatan anggota Direksi Perseroan adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya.

Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11, Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama atau lebih, dan seorang Direktur atau lebih.

The Board of Directors is an organ of the Company, fully responsible for the Company's management, to achieve the Company's aims and objectives, and is tasked with representing the Company both inside and outside the court in line with the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations.

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors is in line with the Company's Articles of Association, referring to Law No. 40 of 2007 of Limited Liability Companies and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Proposals for the appointment, dismissal and/or replacement of Directors are submitted entirely to the GMS and shall consider the recommendations from the Board of Commissioners. Members of the Board of Directors are appointed for a certain term of office and can be reappointed. One term of office for members of the Board of Directors is a maximum of 5 years or until the closing of the Annual GMS at the end of the term of office.

The term of office of members of the Company's Board of Directors is five years and can be reappointed in the following period.

Referring to the Company's Articles of Association Article 11, the Company is managed and led by a Board of Directors consisting of at least 2 (two) members of 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director or more, and a Director or more.



Berikut adalah susunan anggota Direksi per tanggal 31 Desember 2025:

Below is the composition of members of the Board of Directors as of December 31, 2025:

Nama Name	Jabatan Position	Periode dan Dasar Pengangkatan Period and Basis of Appointment
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama President Director	5 tahun, Akta No. 84 tanggal 22 September 2022 5 years, Deed No. 84, Dated September 22, 2022
Ricky Hartono	Direktur Director	5 tahun, Akta No. 84 tanggal 22 September 2022 5 years, Deed No. 84, Dated September 22, 2022
Ismu Nugroho	Direktur Director	5 tahun, Akta No. 84 tanggal 22 September 2022 5 years, Deed No. 84, Dated September 22, 2022
Boy Gemino Kalauserang	Direktur Director	5 tahun, Akta No. 84 tanggal 22 September 2022 5 years, Deed No. 84, Dated September 22, 2022

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Adapun ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
3. Memastikan jalannya aktivitas dan kebijakan Perseroan sudah mengacu dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku;
4. Merencanakan, melakukan, mengadakan, atau mengakhiri segala hubungan kemitraan strategis yang dapat berupa antara lain, usaha patungan atau perjanjian investasi, aliansi bisnis oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan;

Based on OJK Regulation No. 33/2014, these are the duties and responsibilities of the Board of Directors:

1. Conduct and be responsible for the management of the Issuer or Public Company for the interests of the Issuer or Public Company in line with the aims and objectives of the Issuer or Public Company as stipulated in the Articles of Association.
2. Organize the annual GMS and other GMS as regulated in the laws, regulations, and the articles of association.
3. Evaluate the committee's performance at the end of each financial year.

Below is the scope of duties and responsibilities of the Board of Directors:

1. Lead and manage the Company in line with the Company's aims and objectives, striving to improve the Company's efficiency and effectiveness;
2. Control, maintain and manage the Company's assets for the Company's interests;
3. Ensure that the Company's activities and policies refer and comply with applicable laws;
4. Plan, conduct, hold, or terminate all strategic partnership relationships which may include joint ventures or investment agreements, business alliances by the Company and/or the Company's Subsidiaries;

Bertanggung jawab secara tanggung renteng kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:

- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan maksud dan tujuan Perseroan;
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan dan kesinambungan pencapaian sasaran Perusahaan pada masa mendatang yang lebih sistematis efisien dan efektif, Perseroan telah menetapkan kebijakan pembagian tugas masing-masing Direksi. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, yakni sebagai berikut:

Jointly and severally responsible for the Company's losses caused by errors by the Board of Directors in conducting their duties. Members of the Board of Directors cannot be held responsible for the Company's losses if they can prove:

- The loss was not due to an error or negligence;
- Has conducted management in good faith, full responsibility and prudence for the interests, aims, and objectives of the Company;
- Have no conflict of interest, either directly or indirectly, regarding management actions that result in losses; and
- Have taken action to prevent the occurrence or continuation of such losses.

To ensure the implementation and continuity of achieving the Company's targets in the future in a more systematic, efficient and effective manner, the Company has established a policy for dividing the duties of each Director. The scope of duties and responsibilities of each Director are listed below:

Jabatan Position	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
Direktur Utama President Director	Menjadi pimpinan Perseroan serta bertanggung jawab merumuskan kebijakan strategi-strategi Perseroan, keputusan bisnis Perseroan, menentukan target-target jangka panjang Perseroan dengan berkoordinasi bersama Direktur lain. Become the leader of the Company and be responsible for formulating the Company's strategic policies, Company business decisions, stipulating the Company's long-term targets in coordination with other Directors.
Direktur Director	- Bertanggung jawab dalam bidang akuntansi dan keuangan serta bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan keputusan atas aspek keuangan dan pendanaan untuk operasional Perseroan. - Bertanggung jawab dalam operasional Perseroan untuk Pembangkit Listrik yang telah beroperasi, dan yang sedang dalam tahap pembangunan agar mencapai standar-standar yang telah ditetapkan oleh Perseroan. - Bertanggung jawab dalam aspek lingkungan dan berkelanjutan Perseroan, agar dapat mencapai standar-standar ESG yang diterapkan oleh Perseroan. - Responsible for the accounting and finance sector, also responsible for formulating policies and decisions regarding financial and funding aspects for the Company's operations. - Responsible for the Company's operations for Power Plants that have been operating, and those that are under construction, ensuring they reach the standards set by the Company. - Responsible for the environmental and sustainable aspects of the Company, ensuring to reach the ESG standards set by the Company.



Penanggung Jawab Penerapan Aspek Berkelanjutan [E.1] The Responsibility to Implement Sustainability Aspects [E.1]

Penerapan aspek keberlanjutan dalam operasional Perseroan menjadi tanggung jawab Direksi sepenuhnya. Direksi berperan dalam menentukan kebijakan keberlanjutan, melakukan koordinasi dan memimpin penerapan praktik keberlanjutan.

Dalam menerapkan aspek keberlanjutan di aktivitas operasional sehari-hari, Direksi dibantu oleh divisi-divisi terkait yaitu divisi ESG Specialist yang bertanggung jawab melaksanakan aspek keberlanjutan sesuai bidang tugas mereka. Direksi juga dibantu oleh Komite Audit untuk memantau dan mengevaluasi program keberlanjutan yang dimiliki oleh Perseroan.

The implementation of sustainability aspects in the Company's operations becomes the responsibility of the Board of Directors. The Board of Directors plays a key role in establishing sustainability policies, coordinating programs and activities, and leading the implementation of sustainability practices.

In carrying out sustainability aspects in daily operational activities, the Board of Directors is supported by the relevant division which is ESG Specialist division responsible to execute sustainability initiatives within their respective areas of expertise. Additionally, the Board of Directors is also assisted by the Audit Committee in monitoring and evaluating the Company's sustainability programs.

Pelaksanaan Tugas Direksi 2025 Implementation of the Duties of the Board of Directors In 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional Perseroan, penyusunan dan pelaksanaan strategi bisnis, serta pengambilan keputusan strategis guna mendukung pencapaian kinerja dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Dalam pelaksanaannya, Direksi fokus pada implementasi rencana kerja dan anggaran tahun 2025, penguatan kinerja operasional dan keuangan, serta upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha. Direksi juga secara aktif merespons dinamika industri dan kondisi perekonomian dengan langkah-langkah strategis yang terukur untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan Perseroan.

Selain itu, Direksi berkomitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten, termasuk pemenuhan aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Direksi juga menjalin koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Dewan Komisaris, serta menindaklanjuti arahan dan rekomendasi yang diberikan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang berkelanjutan.

In 2025, the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. The Board of Directors is responsible for managing the Company's operations, formulating and implementing business strategies, and making strategic decisions to support the achievement of the Company's performance and business sustainability.

In its implementation, the Board of Directors focused on the implementation of the 2025 work plan and budget, strengthening operational and financial performance, and efforts to improve the efficiency and effectiveness of business activities. The Board of Directors also actively responded to industry dynamics and economic conditions with measured strategic steps to maintain the Company's stability and growth.

In addition, the Board of Directors is committed to the consistent implementation of Good Corporate Governance, including compliance, internal control, and risk management. The Board of Directors also establishes effective coordination and communication with the Board of Commissioners and follows up on the directions and recommendations given as part of a continuous monitoring mechanism.

Ke depan, Direksi akan terus berupaya meningkatkan kinerja Perseroan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan keberlanjutan usaha.

Rapat Direksi Meetings of the Board of Directors

Kebijakan Rapat

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi secara rutin wajib menggelar rapat internal guna membahas evaluasi kinerja Perusahaan dengan fungsi terkait. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala untuk membahas strategi-strategi, permasalahan, risiko dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan operasional Perusahaan. Rapat Direksi juga dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan/atau Komite, untuk memberikan masukan atau menyampaikan nasihat mengenai permasalahan yang sedang dihadapi Perusahaan.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

Keputusan dan Tindak Lanjut Rapat

Seluruh keputusan hasil Rapat Direksi tertuang dalam Notulen Rapat. Hal yang perlu ditindaklanjuti harus dilaporkan kembali dalam rapat selanjutnya.

Going forward, the Board of Directors will continue to strive to improve the Company's performance and create added value for all stakeholders by promoting the principles of prudence, professionalism, and business sustainability.

Meeting Policy

Referring to the Company's Articles of Association, the Board of Directors is regularly required to hold internal meetings to discuss evaluation of the Company's performance with related functions. The Board of Directors is obliged to hold regular Board of Directors Meetings at least 1 (one) time every month.

Board of Directors meetings are held periodically to discuss strategies, problems, risks, and other important matters related to the Company's operations. Board of Directors meetings can also be attended by the Board of Commissioners and/or Committees, to provide input or advice regarding problems being faced by the Company.

A Board of Directors meeting is valid and has the right to make binding decisions if attended and/or represented by more than ½ (one half) of the number of members of the Board of Directors. Decisions at Board of Directors Meetings must be taken based on deliberation to reach consensus. If a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than ½ (one half) of the number of valid votes legally cast at the meeting. If the votes for and against are equal, then the Chairman of the Board of Directors Meeting will decide.

Meeting Decisions and Follow-Up

All decisions from the Board of Directors' Meeting are contained in the Minutes of Meeting. Matters needed to be followed up shall be reported back at the next meeting.



Rapat Internal Direksi Internal Meeting of the Board of Directors

Selama tahun 2025, Direksi telah menyelenggarakan sebanyak 12 kali rapat internal dengan uraian sebagai berikut:

In 2025, the Board of Directors held 12 internal meetings with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance (%)
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama President Director	12	12	100%
Ricky Hartono	Direktur Director	12	12	100%
Ismu Nugroho	Direktur Director	12	12	100%
Boy Gemino Kalauserang	Direktur Director	12	12	100%

Agenda yang didiskusikan dalam rapat internal Direksi tersebut di antaranya adalah terkait kebijakan strategis Perseroan, persetujuan Direksi, review kinerja Perseroan dan masing-masing proyek serta unit bisnis, kebijakan investasi Perseroan, dan hal-hal strategis lainnya.

The agenda discussed in the internal meeting of the Board of Directors include the Company's strategic policies, approval from the Board of Directors, performance review of the Company and each project and each business unit, the Company's investment policy, and other strategic matters.

Program Orientasi/Pengenalan Bagi Direksi Baru Tahun 2025 Orientation Program For New Board of Directors In 2025

Hingga akhir 2025, tidak terdapat program pengenalan induksi bagi Direksi baru dikarenakan tidak adanya perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Until the end of 2025, there are no orientation programs for new Directors since there are no changes to the composition of the Company's Board of Directors.

Penilaian Kinerja Terhadap Organ Pendukung Direksi Tahun 2025 Evaluation of Performance of Committees Beneath the Board of Directors in 2025

Direksi Perseroan memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Unit Manajemen Risiko yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan, tugas dan tanggung jawab Direksi. Penilaian kinerja senantiasa dilakukan setiap tahunnya. Untuk tahun 2025, Direksi menilai Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Unit Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan telah memberikan masukan dan rekomendasi yang sangat berguna terkait bidangnya masing-masing.

The Company's Board of Directors has a Corporate Secretary, an Internal Audit Unit and Risk Management Unit whose task is to assist in implementing the activities, duties and responsibilities of the Board of Directors. Performance assessments are always conducted each year. For 2025, the Board of Directors assesses that the Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Risk Management Unit have carried out their duties and responsibilities well and have provided very useful input and recommendations related to their respective fields.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi Selama Tahun 2025 [G-05] Competence Training and Development of the Board of Directors in 2025 [G-05]

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi Direksi.

In 2025, the Company did not conduct training and competency improvement programs for the Board of Directors.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah Organ utama Perseroan yang berperan menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, serta memastikan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip GCG. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Dewan Komisaris senantiasa menjaga independensi dan objektivitasnya dengan tidak melakukan intervensi dalam proses pengambilan keputusan operasional bisnis Perseroan.

The Board of Commissioners is the major organ of the Company whose role is to carry out supervisory functions and provide advice to the Board of Directors, along with ensuring the implementation of GCG principles. In conducting its roles and functions, the Board of Commissioners always maintains its independence and objectivity by not intervening in the Company's business operational decision making process.

Pedoman Dewan Komisaris Manuals of the Board of Commissioners

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners is in line with the Company's Articles of Association, referring to Law No. 40 of 2007 of Limited Liability Companies and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Penggantian Dewan Komisaris Appointment, Dismissal and/or Replacement of the Board of Commissioners

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Anggota Dewan Komisaris diserahkan sepenuhnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Proposals for the appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Commissioners are submitted entirely to the General Meeting of Shareholders (GMS).

Jumlah Dan Komposisi Dewan Komisaris Total and Composition Board of Commissioners

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya.

The term of office of members of the Company's Board of Commissioners is 5 (five) years and can be reappointed for the next period.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengatur jumlah komposisi Dewan Komisaris, yakni paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Anggota Komisaris dan 1 (satu) orang Komisaris Independen.

The Company's Articles of Association have regulated the composition of the Board of Commissioners, which consists of at least 3 (three) persons, consisting of 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Commissioner and 1 (one) Independent Commissioner.

Para anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sampai pada saat RUPS Tahunan yang ke-5 setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut ditutup.

The members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS, each for a period of time until the 5th Annual GMS after the closing of the GMS that appointed the members of the Board of Commissioners.



Sampai dengan 31 Desember 2025, susunan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya sehingga masih terdiri sebagai berikut:

Until December 31, 2025, the composition of the Company's Board of Commissioners has not changed from the previous year so that it still consists as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Periode dan Dasar Pengangkatan Period and Basis of Appointment
Arya Pradana Setiadharna	Komisaris Utama President Commissioner	5 tahun, Akta No. 84 tanggal 22 September 2022 5 years, Deed No. 84, Dated September 22, 2022
Iwan Hadiangoro	Komisaris Commissioner	5 tahun, Akta No. 84 tanggal 22 September 2022 5 years, Deed No. 84, Dated September 22, 2022
Drs. Indarto S.H.	Komisaris Independen Independent Commissioner	5 tahun, Akta No. 84 tanggal 22 September 2022 5 years, Deed No. 84, Dated September 22, 2022

Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

1. Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, jalannya pengurusan dan pengelolaan Perseroan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.	1. Supervise the implementation of policies, the course of administration and management of the Company in general, and provide advice to the Board of Directors.
2. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.	2. Approve the Company's annual work plan, no later than before the start of the next fiscal year.
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.	3. Conduct the specifically assigned tasks according to the Articles of Association, applicable laws and regulations and/or based on GMS decisions.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi, serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut.	4. Examine and review the Annual Report prepared by the Board of Directors, along with signing the Annual Report.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris 2025 Implementation of the Duties of the Board of Commissioners In 2025

1. Dewan Komisaris melaksanakan rapat gabungan dengan Direksi untuk memberikan pengarahan dan nasihat tentang kegiatan operasional Perseroan, beserta pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh Direksi.	1. The Board of Commissioners holds joint meetings with the Board of Directors to provide direction and advice regarding the Company's operational activities, along with decision making to be conducted by the Board of Directors.
2. Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, telah melakukan evaluasi rencana kerja tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk dengan rencana strategis untuk merealisasikannya.	2. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, has evaluated the Company's annual work plan for the fiscal year 2025, including the strategic plan to realize it.
3. Seluruh pelaksanaan tugas umum dan khusus Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada RUPS Tahunan pada tanggal 15 April 2025.	3. All implementations of the Board of Commissioners' general and specific duties have been disclosed in the Board of Commissioners' Supervision Report and submitted to the Annual GMS on April 15, 2025.

4. Dewan Komisaris telah menelaah dan bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Tahunan 2025 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rapat Dewan Komisaris Meetings of the Board of Commissioners

Kebijakan Rapat

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat internal secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (bulan). Dewan Komisaris dan Direksi juga diwajibkan mengadakan rapat gabungan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat gabungan diselenggarakan secara berkala untuk membahas sejumlah hal di antaranya terkait rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pengelolaan strategis Perusahaan ataupun persetujuan Dewan Komisaris lainnya, *review* kinerja perusahaan dan hal-hal strategis lainnya.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

Keputusan dan Tindak Lanjut Rapat

Seluruh keputusan hasil Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tertuang dalam Notulen Rapat. Hal yang perlu ditindaklanjuti harus dilaporkan kembali dalam rapat selanjutnya.

4. The Board of Commissioners has reviewed and is responsible for preparing the Annual Report 2025, which has been submitted to the Financial Services Authority (OJK).

Meeting Policy

Referring to the Company's Articles of Association, The Board of Commissioners is obligated to organize internal meetings regularly at least 1 (one) time in 2 (months). The Board of Commissioners and Board of Directors are obliged to hold regular joint meetings at least 1 (one) time every 4 (four) months. Joint meetings are held periodically to discuss several matters, which among others regarding recommendations from the Board of Commissioners on the strategic management of the Company or other Board of Commissioners approvals, *review* of company performance and other strategic matters.

A Board of Commissioners meeting is valid and has the right to make binding decisions if attended and/or represented by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of members of the Board of Commissioners. Decisions at Board of Commissioners Meetings must be taken based on deliberation to reach consensus. If a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of valid votes legally cast at the meeting. If the votes for and against are equal, then the Chairman of the Board of Commissioners Meeting will decide.

Meeting Decisions and Follow-Up

All decisions from the Board of Commissioners' Meeting and Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors are contained in the Minutes of Meeting. Matters needed to be followed up shall be reported back at the next meeting.



Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meeting of the Board of Commissioners

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan sebanyak 6 kali rapat internal dengan uraian sebagai berikut:

In 2025, the Board of Commissioners held 6 internal meetings with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance (%)
Arya Pradana Setiadharma	Komisaris Utama President Commissioner	6	100%
Iwan Hadiangoro	Komisaris Commissioner	6	100%
Drs. Indarto S.H.	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	100%

Agenda yang didiskusikan dalam rapat internal Dewan Komisaris tersebut di antaranya adalah terkait rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pengelolaan strategis Perusahaan ataupun persetujuan Dewan Komisaris lainnya, review kinerja perusahaan dan hal-hal strategis lainnya.

The agenda discussed in the internal meeting of the Board of Commissioners, among others include recommendations from the Board of Commissioners on the strategic management of the Company or other Board of Commissioners approvals, review of company performance and other strategic matters.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Selama tahun 2025, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah diselenggarakan sebanyak 6 kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

In 2025, joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors were held 6 times, with the following attendance levels:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance (%)
Arya Pradana Setiadharma	Komisaris Utama President Commissioner	6	100%
Iwan Hadiangoro	Komisaris Commissioner	6	100%
Drs. Indarto S.H.	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	100%
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama President Director	6	100%
Ricky Hartono	Direktur Director	6	100%
Ismu Nugroho	Direktur Director	6	100%
Boy Gemino Kalauserang	Direktur Director	6	100%

Agenda yang didiskusikan dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di antaranya adalah memberikan update mengenai hasil produksi listrik setiap PLTA yang telah beroperasi, serta perkembangan pembangunan PLTA yang sedang dijalankan. Selain itu, juga akan menyampaikan informasi terkini terkait proyek PLTA yang sedang dalam tahap konstruksi maupun proyek PLTA yang akan datang. Selanjutnya, akan memberikan update mengenai kondisi dan kinerja keuangan Perseroan.

Komisaris Independen Independent Commissioners

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan pemegang saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka bertindak independen.

Mengacu pada ketentuan POJK 33/2014, berikut ini adalah persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi agar dapat diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

The agenda discussed in the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors included providing updates on the electricity production of each operating hydropower plant, as well as the progress of hydropower plant construction currently underway. Furthermore, updates on the Company's financial condition and performance will be provided.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership and/or family relations with other members of the Board of Commissioners and/or with major shareholders or other relations with the Company, which could affect their ability to act independently.

Referring to the POJK 33/2014, below are the requirements or criteria that must be met in order to be appointed as an Independent Commissioner of the Company:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the next period;
2. Does not own shares, either directly or indirectly, in the Issuer or Public Company;
3. Has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Issuer or Public Company; and
4. Does not have any direct or indirect business relations related to the business activities of the Issuer or Public Company.



Pernyataan Independensi Komisaris Independen Statement of Independence of the Independent Commissioner

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners, originating from outside the Company and meeting the requirements as Independent Commissioners as intended in the Financial Services Authority Regulations.

Anggota yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan yakni **Drs. Indarto, S.H.**, telah menyatakan bahwa:

The member who serves as Independent Commissioner of the Company, named **Drs. Indarto, S.H.**, has stated that he:

1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali Perseroan;
3. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali Perseroan; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

1. Does not own shares either directly or indirectly in the Company;
2. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, Directors, or controlling shareholders of the Company;
3. Has no financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, Directors or controlling shareholders of the Company; and
4. Has no direct or indirect business relations to the Company's business activities.

Program Orientasi/Pengenalan Bagi Dewan Komisaris Baru Tahun 2025 Orientation Program for the New Board of Commissioners In 2025

Hingga akhir 2025, tidak terdapat program pengenalan induksi bagi Dewan Komisaris baru dikarenakan tidak adanya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Until the end of 2025, there is no orientation program for the new Board of Commissioners since there are no changes in the composition of the members of the Company's Board of Commissioners.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Selama Tahun 2025 [E.2] [G-05] Training and Competency Development of the Board of Commissioners in 2025 [E.2] [G-05]

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi Dewan Komisaris.

In 2025, the Company did not conduct training and competency improvement programs for the Board of Commissioners.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Performance Assessment of the Committees Under the Board of Commissioners and the Basis of its Assessment

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja secara berkala terhadap Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dasar penilaian secara *team work* adalah dengan mempertimbangkan kualitas data dan rekomendasi anggota Komite yang diserahkan kepada Dewan Komisaris dalam merespons topik-topik spesifik sesuai bidang tugasnya untuk didiskusikan dan disampaikan sebagai bahan pengawasan dan pemberian nasihat bagi Direksi dalam rapat-rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan dengan Direksi.

Sementara, penilaian kinerja individu tiap-tiap anggota Komite didasarkan pada capaian kinerja, kompetensi, dan kehadiran dalam rapat-rapat Komite, Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan. Secara umum Dewan Komisaris menilai kinerja komite di bawah Dewan Komisaris di tahun 2025 baik secara *team work* maupun individu adalah sangat baik. Seluruh Komite dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan telah memberikan masukan dan rekomendasi yang sangat berguna terkait bidangnya masing-masing.

Namun demikian, Dewan Komisaris tetap berpesan agar seluruh personalia Komite Dewan Komisaris senantiasa meningkatkan kompetensinya dan membekali diri dengan data dan pengetahuan terkini mengingat kondisi industri Perseroan di Indonesia yang masih berat dan semakin penuh tantangan.

The Board of Commissioners conducts regular performance assessments of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee whose task is to assist in implementing the activities, duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

The basis for team work assessment is to consider the quality of data and recommendations from Committee members, submitted to the Board of Commissioners in response to specific topics according to their field of duties, to be discussed and submitted as material for monitoring and providing advice to the Board of Directors in Board of Commissioners meetings and Joint Meetings with the Board of Directors.

Meanwhile, the assessment of the individual performance of each Committee member is based on performance achievements, competencies and attendance at Committee meetings, Board of Commissioners meetings and Joint Meetings. In general, the Board of Commissioners assesses that the performance of committees under the Board of Commissioners in 2024, both in team work and individually, is very good. All Committees are able to carry out their duties and responsibilities well and have provided very useful input and recommendations regarding their respective fields.

However, the Board of Commissioners still advises all personnel of the Board of Commissioners Committee to keep improving their competence and equip themselves with the latest data and knowledge considering the condition of the Company's industry in Indonesia is still difficult and increasingly full of challenges.



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi [G-04]

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors [G-04]

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara *self-assessment*.

Kriteria yang Digunakan

Kriteria yang digunakan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan di tahun berjalan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat [G-02]

Selain berdasarkan KPI, kinerja Dewan Komisaris dan Direksi juga dinilai berdasarkan kehadiran masing-masing anggota dalam rapat. Tingkat kehadiran masing-masing anggota telah disampaikan dalam pembahasan mengenai Rapat Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya, dan berikut disampaikan rekapitulasi kehadiran masing-masing anggota:

Procedures of Performance Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners and Directors is carried out through *self-assessment*.

Assessment Criteria

The criteria used are based on the *Key Performance Indicators* (KPI) set in the current year.

Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in Meeting [G-02]

In addition to KPI-based assessments, the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors is also evaluated based on each member's attendance in meetings. The attendance rate of each member has been presented in the previous discussion on the meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and the following is a recap of each member's attendance:

Uraian Description	Jumlah Rapat Number of Meetings	Rata-rata Persentase Kehadiran Direksi/Komisaris dalam Rapat Average Attendance Rate of the Board of Directors/Board of Commissioners in Meeting
Jumlah Kehadiran Direksi ke Rapat Attendance of the Board of Directors in Meeting	12	100%
Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris ke Rapat Attendance of the Board of Commissioners in Meeting	6	100%

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dan dinilai oleh RUPS, sedangkan penilaian kinerja Direksi dilaporkan dan dinilai oleh Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah baik karena sepanjang tahun 2025 Dewan Komisaris dan Direksi telah berhasil dalam memastikan pengerjaan proyek tetap berprogres dengan positif, serta adanya kontrak baru. Dewan Komisaris dan Direksi berhasil menunjukkan kepemimpinan yang solid dan kemampuan adaptasi yang baik dalam menghadapi dinamika industri.

Assessor

The performance assessment of the Board of Commissioners is reported and assessed by the GMS, while the performance assessment of the Board of Directors is reported and assessed by the Board of Commissioners.

Assessment Result

The result of the performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is good because in 2025, the Board of Commissioners and the Board of Directors have been successful in ensuring that the project continues to progress positively. The Board of Commissioners and Directors have demonstrated solid leadership and good adaptability in facing the dynamics of the industry.

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan wewenang pemegang saham yang dilakukan melalui mekanisme RUPS. Pemegang saham juga berwenang untuk mendelegasikan penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Setiap usulan penggantian dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK dan Anggaran Dasar, ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Direksi harus memiliki integritas, kompetensi, serta kepatuhan terhadap regulasi, termasuk batasan rangkap jabatan. Sementara itu, Dewan Komisaris wajib memiliki moralitas tinggi, pemahaman tata kelola, dan independensi jika diperlukan. Baik Direksi maupun Dewan Komisaris harus mematuhi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. [G-06]

Pemenuhan persyaratan tersebut dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Dewan Komisaris berhak menerima remunerasi tetap yang ditentukan dalam RUPS berdasarkan kajian dan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi. Remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan tugas,

The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners and Directors is within the authority of shareholders, carried out through the GMS mechanism. Shareholders are also authorized to delegate the stipulation of the remuneration amount for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners by considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

Nomination Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. Every proposal for replacement and/or dismissal of members of the Board of Commissioners and Directors to the GMS considers the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

The appointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners complies with the provisions of the OJK Regulations and the Articles of Association, the Company Law (UUPT), capital market regulations, and other laws and regulations related to the Company's business activities. Members of the Board of Directors must possess integrity, competence, and adherence to regulations, including restrictions on concurrent positions. Meanwhile, members of the Board of Commissioners are required to have high moral standards, a strong understanding of governance, and independence when necessary. Both the Board of Directors and the Board of Commissioners must comply with the principles of Good Corporate Governance (GCG) as well as OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 to ensure the Company's transparency and accountability. [G-06]

Fulfillment of these requirements is proven by a letter kept by the Company. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors after their term of office ends can be reappointed in line with the GMS resolution.

Procedure for Stipulating the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Board of Commissioners has the right to receive fixed remuneration stipulated at the GMS based on the review and proposals of the Nomination and Remuneration Committee. The remuneration of



tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perseroan dan standar gaji profesional di industri sejenis. Struktur remunerasi Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari honorarium dan tunjangan lainnya.

Direksi berhak memperoleh remunerasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Remunerasi disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS dengan memperhatikan kajian dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Besaran remunerasi masing-masing anggota Direksi ditentukan dengan mempertimbangkan kinerja dan pencapaian target individu, kinerja dan kondisi keuangan Perseroan, standar gaji profesional pada sektor industri dan/atau skala usaha sejenis, serta faktor-faktor lain yang relevan.
3. Penetapan remunerasi Direksi dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Struktur dan Besaran Remunerasi Direksi Dan Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris telah menerima sejumlah remunerasi. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan mencakup beberapa komponen, antara lain:

1. Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas
4. Insentif Kinerja

Perseroan tidak memberikan remunerasi dalam bentuk opsi saham kepada Dewan Komisaris maupun Direksi.

Mengacu pada ketentuan tersebut, remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris secara kolektif pada tahun 2025 adalah sebesar Rp367.409.308 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus delapan Rupiah) per tahun.

the Board of Commissioners is stipulated based on the duties, responsibilities and authority of the members of the Board of Commissioners considering the Company's financial capacity and professional salary standards in similar industries. The remuneration structure of the Company's Board of Commissioners consists of honorarium and other allowances.

The Board of Directors are entitled to receive remuneration with the following conditions:

1. Remuneration is approved by shareholders through the GMS by considering the review and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
2. The amount of remuneration for each member of the Board of Directors is determined by considering the performance and achievement of individual targets, the performance and financial condition of the Company, professional salary standards in the industrial sector and/or similar business scale, along with other relevant factors.
3. Stipulation of the remuneration of the Board of Directors can be delegated by the GMS to the Board of Commissioners while still considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Structure and Amount of Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

In 2025, the Board of Directors and Board of Commissioners have received a number of remunerations with details as follows:

1. Honorarium
2. Allowances
3. Facilities
4. Performance Incentive

The Company does not provide remuneration in the form of stock options to the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Referring to these provisions, the remuneration given to the Board of Commissioners collectively in 2025 amounted to Rp367,409,308 (three hundred sixty-seven million four hundred nine thousand three hundred eight Rupiah) per year.

Sementara itu, remunerasi yang diberikan kepada Direksi secara kolektif pada tahun 2025 adalah sebesar Rp5.191.200.000 (lima miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun.

Meanwhile, the remuneration given to the Board of Directors collectively in 2025 amounted to Rp5,191,200,000 (five billion one hundred ninety-one million two hundred thousand Rupiah) per year.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Disclosure of Affiliated Relationships Between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Informasi terkait hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi diungkapkan sebagai berikut:

Information related to the affiliate relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors is disclosed below:

Nama Name	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Major Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Major Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS												
Arya Pradana Setiadharma		✓		✓	✓			✓		✓		✓
Iwan Hadiangoro		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Drs. Indarto S.H		✓		✓		✓		✓		✓		✓
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS												
Aldo Henry Artoko		✓		✓	✓			✓		✓		✓
Ricky Hartono		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ismu Nugroho		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Boy Gemino Kalauserang		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Pencegahan Konflik Kepentingan [G-09] Prevention of Conflict of Interest [G-09]

Pengungkapan hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan untuk mencegah konflik kepentingan dalam tim manajemen yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi didorong untuk dapat bekerja secara independen dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi.

The disclosure of affiliated relationships among the Board of Commissioners and the Board of Directors is taken to prevent conflicts of interest within the management team, which holds significant influence over the Company's operations. Each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors is encouraged to work independently and to prioritize the interests of the Company above personal interests.



Salah satu perwujudan dari pencegahan terhadap konflik kepentingan adalah pelaporan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, terutama mengenai transaksi afiliasi, berikut juga dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Informasi mengenai hal ini telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Teraudit yang telah dipublikasikan pada Catatan No 29

A form of conflict-of-interest prevention is the presentation of financial statements in accordance with the applicable accounting standards in Indonesia, particularly with regard to affiliated transactions, as well as compliance with POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest Transactions. Information related to this matter has been disclosed in the published Audited Financial Statements under Note No 29

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Diversity in Composition of Board of Commissioners and Board of Directors

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah disesuaikan dengan kompleksitas Perseroan dengan tetap memperhatikan aktivitas dalam pengambilan keputusan.

The composition and total members of the Board of Commissioners and Directors have been adjusted to the complexity of the Company while still paying attention to activities in decision making.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki persyaratan dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam POJK 33/2014 yang juga telah dituangkan dalam Anggaran Dasar serta Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

All members of the Board of Commissioners and Directors have the requirements, experience and expertise needed to conduct their respective functions and duties in line with the requirements contained in POJK 33/2014, also outlined in the Articles of Association and Work Manuals for the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keberagaman dalam hal pendidikan dan pengalaman kerja. Hal ini dapat dilihat secara rinci pada profil Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

The composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is diverse in terms of education and work experience. This can be seen in detail in the profiles of the Board of Commissioners and Directors in this Annual Report.

Keberagaman Manajemen dan Independensi [G-01] Diversity of the Management and Independence [G-01]

Tipe Manajemen Management Type	Jumlah Anggota Number of Members	Pria Male	Wanita Female	Pihak Independen Independent Parties
Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	3	0	1
Direksi Board of Directors	4	4	0	0

Komite Audit Audit Committee

Komite Audit adalah organ pendukung yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris untuk membantu efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris secara khusus terkait keterbukaan pelaporan keuangan dan pengawasan internal.

The Audit Committee is a supporting organ established and directly responsible to the Board of Commissioners to assist the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners' supervisory functions specifically related to financial reporting disclosure and internal control.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit dan Anggaran Dasar Perseroan yang mengacu pada Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

The implementation of the duties and responsibilities of the Audit Committee is in accordance with the Audit Committee Charter and the Company's Articles of Association which refers to OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee.

Piagam Komite Audit Audit Committee Charter

Piagam Komite Audit telah disusun Perseroan dengan berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan acuan dalam memahami peraturan-peraturan terkait tata kerja Komite Audit, khususnya terkait pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan unit di bawahnya. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang berlaku sejak 4 Maret 2022, yang memuat:

The Audit Committee Charter has been prepared by the Company based on Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 of the Establishment and Work Manuals of the Audit Committee. The manuals are expected to be a reference in understanding regulations related to the work procedures of the Audit Committee, especially regarding supervision and providing advice to the Board of Directors and subordinate units. The Company has an Audit Committee Charter in place since March 4, 2022, containing:

1. Definisi
2. Visi dan Misi
3. Tujuan Penyusunan Piagam Komite Audit
4. Tugas dan Tanggung Jawab
5. Wewenang
6. Struktur, Komposisi, dan Keanggotaan
7. Persyaratan Keanggotaan
8. Tata Cara dan Prosedur Kerja.

1. Definition
2. Vision and Mission
3. Purpose of Preparing the Audit Committee Charter
4. Duties and Responsibilities
5. Authority
6. Structure, Composition and Membership
7. Membership Requirements
8. Work Procedures.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Duties and responsibilities of the Audit Committee in accordance with the Audit Committee Charter are as follows:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain Laporan Keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

1. Reviewing financial information to be released by the Company to the public and/or authorities, including Financial Reports, projections and other reports related to the Company's financial information.
2. Reviewing compliance with laws and regulations related to the Company's activities.



3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit Authority of Audit Committee

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Menjalinkan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit; dan
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

3. Providing independent opinions if there are differences of opinion between management and accountants regarding the provided services.
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners for the appointment of a public accountant based on independence, scope of assignment and costs.
5. Reviewing the implementation of audits by internal auditors and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors regarding the internal auditor's findings.
6. Reviewing risk management implementation activities carried out by the Board of Directors.
7. Reviewing complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes.
8. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company.
9. Maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.

In conducting its duties and responsibilities, the Audit Committee is authorized to:

1. Access required documents, data and information about employees, funds, assets and company resources;
2. Establish direct communication with employees, including the Board of Directors and parties conducting internal audit, risk management and accountant functions regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee; and
3. Involving independent parties outside the Audit Committee members as needed to assist in carrying out their duties (if necessary).

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan Composition of Members and Terms of office

Sesuai dengan POJK 55/2015, anggota Komite Audit terdiri dari setidaknya tiga anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan Publik yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit harus diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

In line with POJK 55/2015, members of the Audit Committee consist of at least three members from Independent Commissioners and parties from outside the Public Company, appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Audit Committee shall be chaired by an Independent Commissioner.

Pada tahun 2025, anggota Komite Audit Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang dan diketuai oleh Komisaris Independen.

In 2025, the Company's Audit Committee members consists of 3 (three) people and is chaired by an Independent Commissioner.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Rangkap Jabatan Concurrent Position	Periode Menjabat Period of Service
Drs. Indarto S.H.	Ketua Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris NO. 003/02/KOM-AH/III/2025 Decree of the Board of Commissioners NO. 003/02/KOM-AH/III/2025	Komisaris Independen Independent Commissioner	2025 - 2027
Anindita Wijaya Putri	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris NO. 003/02/KOM-AH/III/2025 Decree of the Board of Commissioners NO. 003/02/KOM-AH/III/2025	-	2025 - 2027
Dwithya Puteri Citrarhasmi, S.E., AK., CA	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris NO. 01/SK-KOM/AH/III/2022 Decree of the Board of Commissioners NO. 003/02/KOM-AH/III/2025	-	2025 - 2027

Profil Keanggotaan Komite Audit Profile of Audit Committee's Members

Profil lengkap Bapak Drs. Indarto S.H. selaku Ketua Komite Audit Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Dewan Komisaris.

The complete profile of Drs. Indarto S.H. as Chairman of the Company's Audit Committee can be seen in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile subchapter.

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Berikut ini adalah profil singkat dari masing-masing anggota:

All members of the Company's Audit Committee have Indonesian Citizen (WNI) status. The following is a brief profile of each member:



Nama Name	Usia Age	Kewarganegaraan Nationality	Domisili Domicile	Riwayat Pendidikan Education Background	Riwayat Karier Career Background	Rangkap Jabatan Concurrent Position
Anindita Wijaya Putri	38 Tahun 38 Years Old	Indonesia	Jakarta	S1 Bidang Akuntansi dari Macquarie University, Australia (2007) Bachelor's Degree in Accounting from Macquarie University, Australia (2007)	- Senior Consultant EY – PT Ernst & Young (2013 – 2016) - Internal Control & Audit Section Head PT Taisho Pharmaceutical Indonesia (2016 – 2020) - Internal Control Manager PT Suntory Garuda Beverage (SGB) (2020 – 2022).	Tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain No concurrent position in other Companies
Dwithya Puteri Citrarhasmi, S.E., AK., CA	39 Tahun 39 Years Old	Indonesia	Jakarta	S1 Ekonomi Universitas Indonesia (2004) Bachelor of Economics, University of Indonesia (2004)	- Auditor KAP Husni, Mucharam & Rasidi (2003 – 2004) - Senior Auditor Ernst & Young – Purwantono, Suherman & Surja (2004 – 2012) - Head of Finance Bank of America, N.A. Jakarta Branch (2012 – 2016).	Tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain No concurrent position in other Companies

Keanggotaan Komite Audit Perseroan tahun 2025 telah memenuhi persyaratan, komposisi dan independensi. Pernyataan Independensi Komite Audit Perusahaan disusun berdasarkan Pasal 7 dari Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 terkait Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Audit, serta Piagam Komite Audit.

Members of the Company's Audit Committee in 2025 have met the requirements, composition, and independence. The Statement of Independence of the Company's Audit Committee is prepared based on Article 7 of OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 regarding Requirements, Membership and Term of Service of the Audit Committee, also the Audit Committee Charter.

Pernyataan Independensi Komite Audit Statement of Independence of Audit Committee

No	Pernyataan Independensi Independence Statement	Drs. Indarto S.H.	Anindita Wijaya Putri	Dwithya Puteri Citrarhasmi, S.E., AK., CA
1	Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not an employee in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Services Firm or other party providing insurance services, noninsurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	✓	✓	✓
2	Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen). Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months (except Independent Commissioners).	✓	✓	✓
3	Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Perseroan. Does not have direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓
4	Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Perseroan. The person's family does not have direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓
5	Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or major shareholders of the Company.	✓	✓	✓
6	Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Has no direct or indirect business relationship with the Company.	✓	✓	✓
7	Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, dan/atau merupakan calon/penjabat sebagai kepala/wakil pemerintah daerah. Not serving as a political party administrator and/or legislative candidate/member, and/or being a candidate/ serving as head/ deputy of the regional government.	✓	✓	✓
8	Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan berhubungan dengan jabatan di Perseroan. Do not have other positions that could cause a conflict of interest related to positions in the Company.	✓	✓	✓

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Implementation of Audit Committee Duties

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menelaah Laporan Keuangan untuk periode tahunan maupun kuartal serta memberikan pendapat tentang kewajaran Laporan Keuangan kepada Dewan Komisaris, terutama untuk pencapaian target.

In 2025, the Audit Committee has performed the following duties:

1. Reviewing Financial Reports for annual and quarterly periods and providing opinions regarding the fairness of Financial Reports to the Board of Commissioners, especially for achieving targets.



2. Membahas pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku melalui rapat internal Komite Audit, serta rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan jasa audit atas informasi keuangan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2025 agar diyakini tidak ada <i>fraud</i> yang cukup material. 4. Merekomendasikan Kantor Akuntan Publik yang akuntabel dan memiliki reputasi baik, serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak termasuk dalam daftar hitam, yakni Kantor Akuntan Liana Ramon Xenia & Rekan. 5. Melaksanakan pertemuan dengan Audit Internal untuk memberikan rekomendasi, <i>coaching</i>, dan pengarahan dalam pelaksanaan audit. 6. Membahas rencana pengembangan Audit Internal di tahun 2026. 7. Membahas rencana pengembangan sistem manajemen risiko di tahun 2026 dan mengevaluasi efektivitasnya per semester. 8. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik untuk mengawasi dan mengevaluasi Laporan Keuangan tahun 2025. 9. Mengeluarkan laporan penelaahan atau usulan kepada Dewan Komisaris. 10. Pengelolaan seluruh dokumen, data, dan informasi tersimpan dalam sistem yang didukung dengan teknologi yang mumpuni.	2. Discussing the implementation of business activities in accordance with applicable laws and regulations through internal Audit Committee meetings, also joint meetings with the Board of Commissioners and Directors. 3. Evaluating the implementation of audit services on financial information by Public Accountants and Public Accounting Firms for the fiscal year 2025 to ensure that there is no material fraud. 4. Recommending a Public Accounting Firm that is accountable with good reputation, registered at the Financial Services Authority and not included in the blacklist, namely Liana Ramon Xenia and Partners Public Accounting Firm. 5. Conducting meetings with Internal Audit to provide recommendations, coaching and direction in carrying out audits; 6. Discussing Internal Audit development plans in 2026. 7. Discussing plans for developing a risk management system in 2026 and evaluating its effectiveness per semester. 8. Holding meetings with the Public Accounting Firm to monitor and evaluate the Fiscal Report 2025. 9. Issuing review reports or proposals to the Board of Commissioners. 10. Management of all documents, data and information stored in a system supported by capable technology.

Rapat Komite Audit Meeting of Audit Committee

Rapat Komite Audit wajib dilaksanakan setidaknya setiap satu bulan sekali sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasannya. Apabila diperlukan, maka rapat Komite Audit dapat diadakan setiap saat. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan audit tahun buku 2025, Komite Audit juga melakukan pertemuan dengan divisi terkait dan Akuntan Publik.

Audit Committee meetings must be held at least once a month as a form of their supervisory duties and responsibilities. If necessary, Audit Committee meetings can be held any time. In planning and implementing the audit for the fiscal year 2025, the Audit Committee also held meetings with related divisions and Public Accountants.

Selama tahun 2025, Perseroan telah mengadakan 4 (empat) kali rapat Komite Audit dengan uraian sebagai berikut:

In 2025, the Company has held 4 (four) Audit Committee meetings with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Drs. Indarto S.H.	Ketua Chairman	4	4	100%
Anindita Wijaya Putri	Anggota Member	4	4	100%
Dwithya Puteri Citrarhasmi, S.E., AK., CA	Anggota Member	4	4	100%

Penilaian Kinerja Komite Audit Performance Assessment of Audit Committee

Dasar penilaian Kinerja Komite Audit yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah melalui pemantauan dan evaluasi atas laporan kinerja Komite Audit dalam mencapai target program kerja yang telah ditetapkan. Pelaporan hasil kinerja Komite Audit oleh Ketua Komite Audit dilaksanakan dalam rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Komite Audit.

The basis for assessing the Audit Committee's performance carried out by the Board of Commissioners is through monitoring and evaluation of the Audit Committee's performance reports in achieving the work program targets. Reporting the performance results of the Audit Committee by the Audit Committee Chairman is carried out in joint meetings between the Board of Commissioners and the Audit Committee.

Dewan Komisaris secara periodik melakukan penilaian terhadap kinerja Komite Audit. Indikator-indikator penilaiannya mencakup: keaktifan Komite Audit dalam menjalankan tugasnya, kehadiran dalam rapat, proses dokumentasi, dan rekomendasi yang diberikan. Dengan mengacu dari hasil indikator-indikator tersebut, Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit cukup memuaskan di sepanjang 2025.

The Board of Commissioners periodically assesses the performance of the Audit Committee. The assessment indicators include: activeness of the Audit Committee in carrying out its duties, attendance at meetings, documentation process, and provided recommendations. By referring to the results of these indicators, the Board of Commissioners assesses that the Audit Committee's performance is quite satisfactory throughout 2025.

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit Tahun 2025 Competence Development of Audit Committee In 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan pengembangan kompetensi bagi Komite Audit.

In 2025, the Company did not conduct any competency development for the Audit Committee.



Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Charter

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sehubungan dengan pengawasan atas implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

The Nomination and Remuneration Committee is a committee formed by and directly responsible to the Board of Commissioners to assist the duties and responsibilities of the Board of Commissioners related to monitoring the implementation of the nomination and remuneration policies for the Company's Board of Commissioners and Directors.

Dasar Hukum

Legal Basis

1. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 34/2014);
 2. Anggaran Dasar Perseroan; dan
 3. Keputusan Dewan Komisaris No. 02/SK-KOM/AH/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.
1. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 of the Establishment and Work Manuals of the Nomination and Remuneration Committee for Issuers and Public Companies (POJK 34/2014);
 2. The Company's Articles of Association; and
 3. The Decree of the Board of Commissioners No. 02/SK-KOM/AH/III/2022 dated March 4, 2022 of the Establishment of the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Charter of the Nomination and Remuneration Committee

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Pasal 1 Peraturan OJK 34/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (POJK 34/2014).

The implementation of the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee is in line with the Nomination and Remuneration Committee Charter referring to Article 1 of OJK Regulation 34/2014 of the Establishment and Manuals for the Work of the Nomination and Remuneration Committee (POJK 34/2014).

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang berlaku sejak tanggal 4 Maret 2022, yang memuat:

The Company has a Nomination and Remuneration Committee Charter since March 4, 2022, containing:

1. Definisi.
 2. Visi dan Misi.
 3. Tujuan Penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja
 4. Komite Nominasi dan Remunerasi.
 5. Tugas dan Tanggung Jawab.
 6. Wewenang dan Kewajiban.
 7. Komposisi dan Struktur Keanggotaan.
1. Definition.
 2. Vision and Mission.
 3. Purpose of Preparing Work Guidelines and Rules
 4. Nomination and Remuneration Committee.
 5. Duties and Responsibilities.
 6. Authority and Obligations.
 7. Membership Composition and Structure.

8. Tata Cara dan Prosedur Kerja.	8. Work Procedures and Procedures.
9. Rapat Anggota.	9. Meetings of Members.
10. Kode Etik.	10. Code of Ethics.
11. Pelaporan.	11. Reporting.
12. Evaluasi Kinerja	12. Performance Evaluation
13. Pemberlakuan dan Penyempurnaan.	13. Implementation and Completion.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain sebagai berikut:

Based on the Nomination and Remuneration Committee Charter, the Nomination and Remuneration Committee is responsible to the Board of Commissioners and is obliged to act independently in conducting its duties. The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjadi bagian dari Laporan Dewan Komisaris untuk disampaikan dan ditetapkan lebih lanjut dalam RUPS;	1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the policy, amount and structure of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners to be a part of the Board of Commissioners' Report to be submitted and further determined at the GMS;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;	2. Assist the Board of Commissioners in assessing performance in line with the remuneration received by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;	3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, policies and criteria required in the nomination process for members of the Board of Directors and Board of Commissioners along with performance evaluation policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;	4. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners based on prepared benchmarks as evaluation material;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program peningkatan kompetensi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;	5. Provide recommendations to the Board of Commissioners for programs to improve the competency of members of the Board of Directors and Board of Commissioners;



6. Mengusulkan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris berdasarkan persyaratan yang relevan, untuk selanjutnya disampaikan dalam RUPS; dan
7. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan.

Masa Jabatan Terms of Office

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan saat ini berlaku efektif 04 Maret 2025 – 03 Maret 2027. Sesuai dengan POJK 34/2014, masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diangkat kembali.

Komposisi Keanggotaan Composition Of Members

Sesuai dengan Pasal 3 POJK 34/2014, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari setidaknya tiga anggota yang berasal dari Komisaris Independen, pihak dari luar Perusahaan Publik atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit harus diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

6. Propose candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners based on relevant requirements, to be submitted at the GMS; and
7. Carry out additional tasks assigned by the Board of Commissioners in line with their functions and duties anytime as needed.

The term of office of members of the Company's Nomination and Remuneration Committee is currently effective on March 04 2025 – March 03 2027. In line with POJK 34/2014, the term of office of the Nomination and Remuneration Committee may not exceed the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Company's Articles of Association and members of the Nomination Committee and Remuneration can be reappointed.

In accordance with Article 3 POJK 34/2014, members of the Nomination and Remuneration Committee consist of at least three members who are Independent Commissioners, parties from outside Public Companies or parties who hold managerial positions under the Directors in charge of human resources. The Nomination and Remuneration Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Audit Committee must be chaired by an Independent Commissioner.

Pada tahun 2025, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang dan diketuai oleh Komisaris Independen.

In 2025, the members of the Company's Nomination and Remuneration Committee consists of 3 (three) people and chaired by an Independent Commissioner.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Rangkap Jabatan Concurrent Position	Periode Menjabat Period of Service
Drs. Indarto S.H.	Ketua Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/02/KOM-AH/III/2025 Decree of the Board of Commissioners No. 001/02/KOM-AH/VI/2023	Komisaris Independen Independent Commissioner	04 Maret 2025 – 03 Maret 2027 March 04, 2025 – March 03, 2027
Arya Pradana Setiadharmas	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/02/KOM-AH/III/2025 Decree of the Board of Commissioners No. 002/02/KOM-AH/III/2025	-	04 Maret 2025 – 03 Maret 2027 March 04, 2025 – March 03, 2027
Iwan Hadiangoro	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/02/KOM-AH/ III/2025 Decree of the Board of Commissioners No. 002/02/KOM-AH/III/2025	-	04 Maret 2025 – 03 Maret 2027 March 04, 2025 – March 03, 2027

Profil Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Profile of Members of Nomination and Remuneration Committee

Profil lengkap Bapak Drs. Indarto S.H. selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Dewan Komisaris.

The complete profile of Mr. Drs. Indarto S.H. as Chairman of the Company's Nomination and Remuneration Committee can be seen in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile subchapter.

Profil lengkap Bapak Arya Pradana Setiadharmas dan Bapak Iwan Hadiangoro selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

The complete profile of Mr. Arya Pradana Setiadharmas and Mr. Iwan Hadiangoro as member of the Company's Nomination and Remuneration Committee can be seen in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile subchapter.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi Independence of Nomination and Remuneration Committee

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip GCG dengan bersikap objektif, profesional, dan independen. Komite Nominasi dan Remunerasi tidak akan mengambil keputusan di bawah tekanan dan intervensi dari pihak manapun dan menghindari setiap potensi benturan kepentingan. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun hubungan bisnis dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

In conducting their duties and responsibilities, all members of the Nomination and Remuneration Committee are committed to honor GCG principles by being objective, professional and independent. The Nomination and Remuneration Committee will not make decisions under pressure or intervention from any party and avoid any potential conflicts of interest. All members of the Nomination and Remuneration Committee have no affiliation, either familial or business, with members of the Board of Commissioners, Directors and Major and/or Controlling Shareholders.



Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Meetings of Nomination and Remuneration Committee

Sesuai POJK 34/2014 dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

In line with POJK 34/2014 and the Company's Nomination and Remuneration Committee Charter, the Nomination and Remuneration Committee is required to hold regular meetings at least 1 (once) in 4 (four) months.

Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 kali dengan uraian sebagai berikut:

In 2025, the Nomination and Remuneration Committee held 3 meetings with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Drs. Indarto S.H.	Ketua Chairman	3	3	100%
Arya Pradana Setiadharma	Anggota Member	3	3	100%
Iwan Hadiangoro	Anggota Member	3	3	100%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Report of Duties of Nomination and Remuneration Committee

Selama 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

In 2025, the Nomination and Remuneration Committee has conducted these activities in accordance with its duties and responsibilities:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - Composition of positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - Policies and criteria required in the nomination process; and
 - Assessment policy for the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
 - Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on prepared benchmarks as evaluation material;
 - Provide recommendations of capacity development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;

4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;	4. Prepare and provide recommendations of systems and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh OJK sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;	5. Provide proposals for candidates who meet the minimum requirements as stipulated by the OJK as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris;	6. Provide recommendations of independent parties who will become members of the Audit Committee or other Committees to the Board of Commissioners;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang;	7. Evaluate remuneration policies based on performance, risk, fairness with peer groups, long-term targets and strategies of the Company, fulfillment of reserves as regulated in statutory regulations and the Company's potential income in the future;
8. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;	8. Submit evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners for: a. Remuneration policy for the Board of Directors and Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and b. Remuneration policy for whole employees to be submitted to the Board of Directors;
9. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	9. Ensure that the remuneration policy is in accordance with applicable regulations;
10. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;	10. Conduct regular evaluations of the remuneration policies implementation;
11. Memberikan rekomendasi mengenai: a. Struktur remunerasi; b. Kebijakan atas remunerasi; dan c. Besaran atas remunerasi.	11. Provide recommendations regarding: a. Remuneration structure; b. Policies on remuneration; and c. Amount of remuneration.
12. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	12. Assist the Board of Commissioners in conducting performance assessments according to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.



Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025 Competence Development of Nomination and Remuneration Committee in 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan pengembangan kompetensi bagi Komite Nominasi dan Remunerasi.

In 2025, the Company did not conduct competency development for the Nomination and Remuneration Committee.

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan adalah organ pendukung Direksi yang memegang peran penting dalam menjaga citra positif Perseroan dengan menjalin komunikasi yang efektif dan intensif antara Perseroan dengan *stakeholders*, termasuk pihak regulator, mitra usaha, asosiasi usaha serta lembaga lain terkait aktivitas usaha Perseroan dalam tingkatan provinsi, nasional dan internasional.

The Corporate Secretary is a supporting organ for the Board of Directors who plays an important role in maintaining the Company's positive image by establishing effective and intensive communication between the Company and stakeholders, including regulators, business partners, business associations and other institutions related to the Company's business activities at provincial, national and international levels.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 ("POJK 35/2014") tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/02/DIR-AH/VII/2024, Perseroan telah menunjuk Bapak Ricky Hartono sebagai Sekretaris Perusahaan.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 ("POJK 35/2014") regarding the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, and based on the Decree of the Board of Directors No. 009/02/DIR-AH/VII/2024, the Company has appointed Mr. Ricky Hartono as Corporate Secretary.

Profil Sekretaris Perusahaan Profile of Corporate Secretary

Profil lengkap Bapak Ricky Hartono selaku Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Direksi.

The complete profile of Mr. Ricky Hartono as Corporate Secretary can be seen in the Company Profile Chapter, subchapter Directors' Profile.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 ("POJK 35/2014") tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/02/DIR-AH/VII/2024 adalah sebagai berikut:

Duties and responsibilities of Corporate Secretary in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 ("POJK 35/2014") regarding the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, and based on the Decree of the Board of Directors No. 009/02/DIR-AH/VII/2024 are as follows:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan terkait keterbukaan informasi kepada publik.

1. Following capital market developments, especially applicable laws and regulations in the capital market sector.
2. Assist the Board of Commissioners and Directors in implementing corporate governance related to information disclosure to the public.

3. Sebagai penghubung/<i>contact person</i> antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. 4. Mempersiapkan dan mengkoordinir penyelenggaraan RUPS dan paparan publik. 5. Mengurus administrasi perusahaan dalam kaitannya dengan kewajiban-kewajiban kepada pemerintah dan swasta. 6. Memberikan informasi tentang hal-hal Perseroan, sebagaimana yang tertulis dalam Profil Perseroan, kepada masyarakat yang memerlukan, terutama kepada calon investor dan Pemegang Saham.	3. As a liaison/<i>contact person</i> between the Company and the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange. 4. Prepare and coordinate the implementation of the GMS and public exposure. 5. Manage corporate administration related to obligations to the government and the private sector. 6. Providing information of the Company's matters, as written in the Company Profile, to the public who need it, especially to potential investors and Shareholders.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Implementation of Corporate Secretary Duties

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

In 2025, Corporate Secretary has performed the following duties:

1. Mengikuti perkembangan peraturan di bidang pasar modal melalui berbagai media. Sekretaris Perusahaan juga selalu memantau informasi mengenai pasar modal melalui situs web yang disediakan regulator atau lembaga lain yang kompeten di bidang pasar modal. 2. Menyampaikan laporan secara berkala dan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, termasuk laporan keterbukaan informasi kepada publik serta tanggapan atas permintaan penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. 3. Mengelola Daftar Pemegang Saham, Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan, serta laporan lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia. 4. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan paparan publik pada tanggal 15 April 2025. 5. Mengadministrasikan setiap notulen pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi, beserta dokumen Perseroan lainnya yang berada dalam kendali. 6. Menyelenggarakan paparan publik dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.	1. Following regulatory developments in the capital market sector through various media. The Corporate Secretary also always monitors information regarding the capital market through websites provided by regulators or other institutions competent in the capital market sector. 2. Submit periodic and incidental reports to the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange, including information disclosure reports to the public, also responses to requests for explanations from the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange. 3. Manage the Shareholder Register, quarterly and annual Financial Reports, and other reports to be submitted to the Board of Commissioners, Financial Services Authority, and the Indonesian Stock Exchange. 4. Holding an annual GMS and public expose on April 15, 2025. 5. Administer the minutes of every Board of Commissioners meeting and Board of Directors meeting, along with other controlled Company's documents. 6. Organize public expose and present the report to the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange.



Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2025 Competence Development of Corporate Secretary in 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, antara lain:

In 2025, the Corporate Secretary has participate in the competency development program, as follows

Seminar atau Pelatihan Seminar or Training	Tanggal Date	Tempat Location	Penyelenggara Organizer
Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka	31 Juli 2025 July 31, 2025	Zoom Meeting	Indonesia Corporate Secretary Associate
Pendalaman Peraturan Nomor I -A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat	12 Desember 2025 December 12, 2025	Zoom Meeting	Indonesia Corporate Secretary Associate
Sosialisasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham serta Laporan Aktivitas Menjamin Saham Secara Elektronik	19 Desember 2025 December 19, 2025	Zoom Meeting	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Keterbukaan Informasi dan Laporan Kepatuhan Information Transparency and Compliance Report

Sekretaris Perusahaan senantiasa berusaha memenuhi kewajiban penyampaian keterbukaan Informasi kepada publik dan laporan kepatuhan kepada regulator, baik kepada OJK maupun BEI. Selama tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan keterbukaan informasi dan laporan berkala kepada regulator.

The Corporate Secretary always strives to fulfill the obligation to provide information disclosure to the public and compliance reports to regulators, both to the OJK and IDX. In 2025, the Corporate Secretary has submitted information disclosure reports and periodic reports to the regulator.

Unit Audit Internal (UAI) Internal Audit Unit

Unit Audit Internal (UAI) merupakan organ pendukung Direksi yang bertugas dalam memberikan keyakinan dan konsultasi bersifat independen dan objektif. Audit Internal bertugas untuk meningkatkan nilai Perusahaan serta memperbaiki kinerja operasional melalui pengelolaan keuangan, proses data, pengelolaan aset, serta pelaksanaan kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap operasional Perseroan.

The Internal Audit Unit (UAI) is a supporting organ for the Board of Directors that shall provide confidence, and independent, objective consultation. Internal Audit is tasked with improving the value of the Company and operational performance through financial management, data processing, asset management, and implementing policies with significant influence on the Company's operations.

Pedoman Kerja UAI Work Manual of UAI

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UAI sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang mengacu pada Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah memiliki piagam kerja (*charter*) sebagai pedoman yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Arkora Hydro No. 03/SK-KOM/AH/II/2022 tentang Pengangkatan dan/ atau Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal, tanggal 4 Maret 2022.

Keberadaan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) memiliki tujuan agar Sistem Pengendalian Internal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai evaluator, katalisator, dan konsultan internal Perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan nilai tambah bagi kelangsungan usaha Perusahaan. Adapun Piagam Unit Audit Internal Perusahaan memuat:

1. Struktur dan Kedudukan.
2. Tugas dan Tanggung Jawab.
3. Wewenang.
4. Kode Etik.
5. Persyaratan Auditor Internal.
6. Pertanggungjawaban.

Implementation of Internal Audit duties and responsibilities is in accordance with the Company's Articles of Association referring to Regulation of OJK No. 56/POJK.04/2015 of the Establishment and Guidelines for Preparing the Internal Audit Unit Charter.

The Company has a charter acting as a work manual, regulating the implementation of the duties and functions of Internal Audit as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Arkora Hydro No. 03/SK-KOM/AH/II/2022 of Appointment and/ or Formation of the Internal Audit Unit and Internal Audit Charter, dated March 4, 2022.

The existence of an Internal Audit Charter aims to ensure that the Internal Control System in conducting its duties and functions as an evaluator, catalyst and internal consultant of the Company can run effectively, efficiently and be able to provide added value for the continuity of the Company's business. The Company's Internal Audit Unit Charter contains:

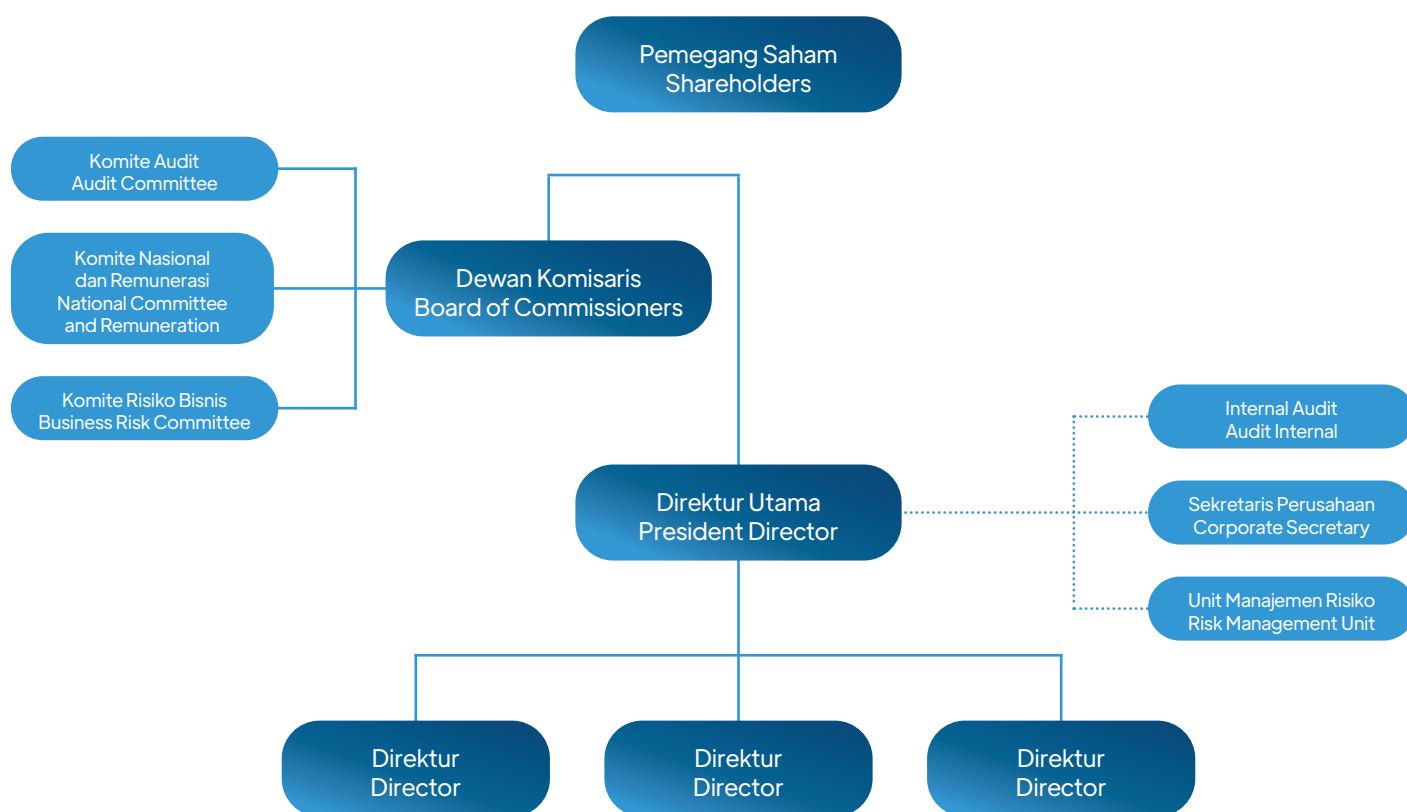
1. Structure and Position.
2. Duties and Responsibilities.
3. Authority.
4. Code of Ethics.
5. Internal Auditor Requirements.
6. Accountability.



Struktur dan Kedudukan UAI Structure and Position of UAI

Keberadaan UAI di Perseroan berada langsung di bawah Direktur Utama. UAI dipimpin oleh seorang Kepala, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Auditor Internal yang duduk dalam UAI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UAI. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala UAI, Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The existence of Internal Audit in the Company is directly under the President Director. The Internal Audit Unit is led by a Chairman, appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. Internal auditors positioned in the Internal Audit Unit report directly to the Chairman. In the event of the appointment, replacement or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit, the Company is obliged to provide notification to the Financial Services Authority (OJK).



Profil Kepala UAI Profile of UAI Chairman

Mohammad Bahrudin telah menjabat sebagai Kepala UAI sejak 2023, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.003/02/DIR-AH/VI/2023.

Mohammad Bahrudin has served as the Chairman of Internal Audit since 2023, appointed based on the Decree of the Board of Directors No.003/02/DIR-AH/VI/2023.



Mohammad Bahrudin

Kepala UAI | Chairman of UAI



Warga Negara : Indonesia
Nationality : Indonesian



Usia : 43 tahun
Age : 43 years old



Domisili : DKI Jakarta
Domicile : DKI Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Direksi No. 003/02/DIR-AH/VI/2023.

Decree of the Board of Directors of the Company No. 013/02/DIR-AH/VI/2023.

Riwayat Karier Employment History

1. *Coordinator Cost Accounting & Tax* PT. Kayaba Indonesia (2007–2018)
2. *Assistant Manager Accounting & Tax* PT. Penta Ocean Construction (2018–2020)
1. *Coordinator Cost Accounting & Tax* of PT. Kayaba Indonesia (2007–2018)
2. *Assistant Manager Accounting & Tax* of PT. Penta Ocean Construction (2018–2020)

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain.

He does not hold any concurrent positions in other companies.

Riwayat Pendidikan Educational Background

1. D3 – Universitas Brawijaya (2003)
2. S1–Universitas Persada Indonesia YAI (2008)
1. Diploma III from Brawijaya University (2003)
2. Bachelor's Degree from Persada Indonesia University (YAI) (2008)

Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Major Shareholders.



Tugas dan Tanggung Jawab UAI Duties and Responsibilities of UAI

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Unit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 ("POJK 56/2015") tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.003/02/DIR-AH/VI/2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan.

Duties and responsibilities of Internal Audit Unit in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 ("POJK 56/2015") regarding the Establishment and Guidelines for Drafting an Internal Audit Unit Charter, and based on the Decree of the Board of Directors No.003/02/DIR-AH/VI/2023 are as follows:

1. Prepare and implement an annual internal audit plan.
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with Company policy.
3. Conduct inspections and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.
4. Provide suggestions for improvements and objective information about the activities examined at all levels of management.
5. Prepare a report of audit results and submit it to the President Director and Board of Commissioners.
6. Monitor, analyze and report on the implementation of recommended follow-up actions.
7. Cooperate with the Audit Committee.
8. Develop a program to evaluate the quality of the conducted internal audit activities.
9. Conducting special inspection if needed.

Wewenang UAI UAI Authority

Agar pelaksanaan fungsi dapat maksimal, Audit Internal diberikan kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

To maximize the implementation of its functions, Internal Audit is authorized to:

1. Access all relevant information of the Company related to its duties and functions;
2. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;

3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; serta
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal.

3. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/ or Audit Committee; also
4. Coordinate their activities with the activities of external auditors.

Sertifikasi Profesi UAI Internal Audit Profession Certification

Audit Internal didorong untuk memiliki kompetensi teknis di bidang audit dan kompetensi umum yang dapat menunjang pelaksanaan tugas. Ketua beserta anggota Audit Internal merupakan orang yang terbaik, berpengalaman, dan berkompeten dalam bidang masing-masing. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses audit pada Perseroan dapat terlaksana dengan benar dan bertanggung jawab.

Internal Audit is encouraged to have competence in auditing and general competence that can support the implementation of its duties. The Chairman and members of Internal Audit are the best, experienced, and competent people in their respective fields. It is to ensure that the audit process at the Company can be carried out correctly and responsibly.

Pelaksanaan Tugas UAI Implementation of UAI Duties

Sepanjang tahun 2025, Unit Audit Internal telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

In 2025, Internal Audit Unit has performed the following duties:

1. Rencana kerja Audit Internal 2025 telah mendapatkan persetujuan Direktur Utama serta telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Audit Internal.
2. Sistem pengendalian internal senantiasa dievaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaannya setiap semester.
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan operasional pada masing-masing bidang, yaitu keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, operasional, pemasaran, serta teknologi informasi;
4. Melaksanakan *cash count* dan rekonsiliasi bank guna memastikan kas terkontrol dengan baik;
5. Meninjau *stock opname* terhadap persediaan, baik itu barang jadi, bahan baku, bahan pembantu, atau suku cadang;
6. Mengkaji efisiensi atas penggunaan jumlah bahan baku terhadap *output* produksi;
7. Memantau dan mengevaluasi bahan bakar minyak;
8. Memeriksa penjualan/distribusi dan piutang usaha;
9. Memeriksa pembelian dan utang usaha; dan
10. Memeriksa Laporan Keuangan.

1. The 2025 Internal Audit work plan has received approval from the President Director and has been fully implemented by Internal Audit.
2. The internal control system is constantly evaluated to measure the level of effectiveness of its implementation every semester.
3. Evaluate the implementation of operational activities in each field such as finance, accounting, human resources, operations, marketing and information technology;
4. Conduct cash counts and bank reconciliations to ensure cash is well controlled;
5. Review stock-taking of inventory, be it finished goods, raw materials, auxiliary materials, or spare parts;
6. Assess the efficiency of the raw materials use on production output;
7. Monitor and evaluate fuel oil;
8. Check sales/distribution and trade receivables;
9. Check purchases and accounts payable; and
10. Check Financial Reports.



11. Mengadakan pembahasan atas temuan dan rekomendasi perbaikan dengan masing-masing manajer Perseroan.
12. Laporan hasil audit telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
13. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan secara berkala kepada seluruh bidang di Perseroan.
14. Rapat dengan Komite Audit telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali untuk membahas hasil audit dan pengendalian internal.
15. Program untuk meningkatkan mutu kegiatan audit telah dilaksanakan di tahun 2025.
16. Tidak terdapat hal-hal yang memerlukan pemeriksaan khusus tahun 2025.

Rapat UAI UAI Meetings

Kebijakan Rapat

Audit Internal dapat mengadakan rapat secara berkala, baik internal maupun dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Kantor Akuntan Publik.

Pelaksanaan Rapat

Sepanjang tahun 2025, Audit Internal telah mengadakan rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit sebanyak 4 (empat) kali. Dalam rapat tersebut, tingkat kehadiran rata-rata seluruh anggota adalah sebesar 100%.

Pengembangan Kompetensi UAI UAI Competence Development

Sepanjang tahun 2025, Audit Internal tidak mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi.

11. Hold discussions on findings and recommendations for improvement with each Company manager.
12. The audit results report has been submitted to the President Director and Board of Commissioners through a coordination meeting with the Board of Commissioners and Board of Directors.
13. Monitor, analyze and report on the implementation of recommended follow-up actions on a regular basis to all Company's areas.
14. Meetings with the Audit Committee have been held 4 (empat) times to discuss audit results and internal controls.
15. A program to improve the quality of audit activities has been implemented in 2025.
16. There are no matters requiring special inspection in 2025.

Meeting Policy

Internal Audit is able to hold regular meetings, both internally and with the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and public accounting firm.

Implementation of Meetings

In 2025, Internal Audit has held meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee for 4 (Four) times. At the meeting, the average attendance rate for all members is 100%.

In 2025, the Internal Audit does not participate in any training and competency development.

Akuntan Publik Public Accountant

Pada April 2025, Dewan Komisaris selaku pemegang hak substitusi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan keputusan RUPS tanggal 15 April 2025, memilih dan memutuskan KAP Liana, Ramon, Xenia, dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Independensi

Audit Tim yang bertugas adalah independen sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) dan Peraturan Pasar Modal sehubungan dengan audit Perusahaan. Tidak terdapat hubungan personal, pemberian jasa profesional lain atau hubungan bisnis antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi independensi KAP Liana, Ramon, Xenia, dan Rekan sebagai auditor Perusahaan.

Biaya Akuntan Publik

Total biaya audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.576.500.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah).

Jasa Atestasi Lain yang Diberikan Selama 2025

Pada tahun 2025, KAP Liana, Ramon, Xenia, dan Rekan tidak memberikan jasa profesional lainnya kepada Perseroan, selain jasa audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan dan besarnya biaya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020–2024:

In April 2025, the Board of Commissioners as the substitution rights holder has to appoint a Public Accounting Firm (KAP) based on the GMS resolution on April 15, 2025, selected and decided to have Liana, Ramon, Xenia, and Partners KAP to carry out an audit of the Company's Financial Report ending on December 31, 2025.

Independence

The Audit Team on duty is independent in accordance with Public Accountant Examination Standards (SPAP) and Capital Market Regulations in relation to Company audits. There are no personal relationships, provision of other professional services or business relations between the Public Accounting Firm (KAP) and the Company that could affect the independence of Liana, Ramon, Xenia, and Partners KAP as the Company's auditors.

Cost of Public Accountant

The total cost of auditing the Company's financial statements for the year ending on December 31, 2025 is Rp1,576,500,000 (one billion five hundred seventy-six million five hundred thousand Rupiah).

Other Provided Attestation Services in 2025

In 2025, Liana, Ramon, Xenia, and Partners KAP has not provided other professional services to the Company, apart from audit services for the Financial Statement for the Fiscal Year ending on December 31, 2025.

The following is a list of Public Accounting Firms, Accountants, and the costs to audit the Company's financial statements for the 2020–2024 fiscal year:



Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office	Akuntan Publik Public Accountant	Biaya* Fee	Pendapat Opinion
2020	Imelda & Rekan Imelda & Partners	Theodorus Bambang	Rp395.000.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion
2021			Rp800.000.000	
2022		Muhammad Irfan	Rp1.070.000.000	
2023			Rp1.086.800.000	
2024	Liana, Ramon, Xenia, dan Rekan Liana, Ramon, Xenia, & Partners	Muhammad Irfan	Rp1.475.000.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion
2025	Liana, Ramon, Xenia, dan Rekan Liana, Ramon, Xenia, & Partners	Muhammad Irfan	Rp1.576.500.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion

*Tidak termasuk PPN | Exclude PPN

Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

Perseroan telah menjalankan sistem pengendalian internal (SPI) yang menyeluruh dan melibatkan seluruh unsur perusahaan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Implementasi SPI pada Perseroan bertujuan untuk membantu manajemen dalam memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan risiko, efektivitas dan efisiensi operasional, serta melindungi aset Perseroan.

Seluruh organ Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengimplementasikan SPI. Direksi beserta organ pendukung berperan dalam penyusunan dan penerapan SPI di seluruh tingkatan organisasi, dengan dukungan dari Audit Internal yang melakukan pengujian dan telaah sistem pengendalian internal. Sementara itu, Dewan Komisaris dan Komite Audit melaksanakan pengawasan intensif atas implementasi SPI di Perseroan.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Perseroan telah memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan nonkeuangan sesuai ketentuan yang berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web Perusahaan.

The Company has implemented a comprehensive internal control system (SPI) involving all corporate elements, including the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees. The implementation of SPI in the Company is intended to assist management in providing adequate confidence in the reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations, risk management, operational effectiveness and efficiency, along with protecting the Company's assets.

All Company organs have their respective duties and responsibilities in SPI implementation. The Board of Directors and supporting organs play a role in the preparation and implementation of SPI at all levels of the organization, with support from Internal Audit, conducting tests and reviews of the internal control system. Meanwhile, the Board of Commissioners and Audit Committee conduct intensive supervision over the SPI implementation in the Company.

Financial and Operational Control

The Company has met its obligations of transparency and publication of financial and non-financial conditions in accordance with applicable regulations, through the delivery and publication of information both through print media and the Company's website.

Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan

Selama tahun 2025, Perseroan senantiasa mematuhi segala bentuk perundang-undangan yang berlaku dan mengimplementasikan pada setiap kegiatan bisnis Perseroan.

Evaluasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2025

Dalam periode tahun buku 2025, kegiatan audit dilakukan untuk menguji kepatuhan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Perbaikan terhadap kebijakan dan standar operasional prosedur yang ada dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

Untuk memastikan bahwa rekomendasi yang disetujui telah ditindaklanjuti, Audit Internal melakukan pengawasan atas tindak lanjut tersebut dan melaporkan hasil pemantauan kepada Direksi.

Dalam kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan telah menyusun Prosedur Operasional Standar yang memuat prosedur-prosedur baku dalam menjalankan kegiatan operasional maupun finansial.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi menilai bahwa unit-unit kerja yang berada di bawah Direksi telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik dan memperoleh capaian kinerja yang efektif dan efisien. Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai unit pendukung kinerja Direksi dan telah membantu Direksi menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan Perseroan di sepanjang tahun 2025.

Compliance with Legislation

In 2025, the Company consistently complies with all forms of legislation in place and implements them in every business activity of the Company.

Evaluation of the Internal Control System Effectiveness in 2025

In the fiscal year 2025, audit activities are carried out to test the compliance and effectiveness of the internal control system. Improvements to existing policies and standard operational procedures are carried out to improve the effectiveness of internal control.

To ensure that approved recommendations have been followed up, Internal Audit supervises the follow-up and reports the monitoring results to the Board of Directors.

Related to the implementation of Good Corporate Governance, the Company has prepared Standard Operational Procedures, containing standard procedures for conducting operational and financial activities.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners Regarding the Internal Control System Adequacy

The Board of Directors assesses that the work units under the Board of Directors have carried out their functions and roles well, achieving effective and efficient performance achievements. The Corporate Secretary and Internal Audit Unit have carried out their duties well as support units for the performance of the Board of Directors and have assisted the Board of Directors in carrying out their responsibilities in managing and administering the Company throughout 2025.



Manajemen Risiko [E.3]

Risk Management [E.3]

Perseroan menyadari bahwa manajemen risiko memiliki peran penting dalam mengantisipasi kemungkinan Perseroan mengalami tekanan keuangan dan perlindungan terhadap kerugian serius. Setiap unit di Perseroan harus melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan atas risiko-risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya tujuan Perseroan. Oleh karena itu, bagi Perseroan pelaksanaan manajemen risiko semakin menjadi tuntutan, di mana keberhasilannya menjadi salah satu kunci kesuksesan dan pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

Penerapan manajemen risiko di lingkungan Perseroan mencakup risiko yang berkaitan dengan bisnis dan risiko yang berkaitan dengan keberlanjutan. Berbagai risiko tersebut ditangani melalui upaya pencegahan risiko, mitigasi risiko, ataupun pengalihan risiko.

Pihak yang menjalankan fungsi pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan adalah Divisi terkait yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sehingga Divisi terkait wajib berkoordinasi dengan Direktur Utama. Dalam penerapannya, Divisi terkait secara umum bertanggung jawab untuk menjalankan pengawasan serta memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko dapat berjalan dengan baik dan tepat, sehingga dapat menekan risiko-risiko dalam organisasi hingga ke level yang dapat diterima organisasi.

The Company realizes that risk management plays an important role in anticipating the possibility of the Company experiencing financial pressure, while also protecting against serious losses. Each unit in the Company must identify, measure, monitor and report risks potentially hindering the Company's objectives achievement. Therefore, for the Company, the implementation of risk management is increasingly becoming a demand, where its success is one of the keys to success and achievement of the Company's Vision and Mission.

The implementation of risk management within the Company accommodates both business-related risks and sustainability-related risks. These various risks are handled through risk prevention, risk mitigation or risk transfer efforts.

The party conducting the risk management function in the Company is the relevant Division directly responsible to the President Director, thus the relevant Division is obliged to coordinate with the President Director. In its implementation, the relevant division is generally responsible for supervising and ensuring that risk management activities can run well and appropriately to reduce risks in the organization to an acceptable level for the organization.

Profil Risiko Tahun 2025 Risk Profile in 2025

Jenis risiko dalam kegiatan bisnis Perusahaan dan pengelolaan atas risiko tersebut sepanjang 2025 adalah sebagai berikut:

The types of risks in the Company's business activities and the management of these risks in 2025 are:

Jenis Risiko Type of Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Risiko Operasional Operational Risk	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya peningkatan kualitas Perseroan. 2. Memastikan kerja sama sesuai dengan yang dipersyaratkan Perseroan. 3. Melakukan komunikasi secara terus menerus dengan <i>supplier</i> untuk mendapatkan harga dan kualitas yang baik.
Risiko Keuangan Financial Risk	1. Improving the quality of Human Resources to improve the quality of the Company. 2. Ensure cooperation is in line with the Company's requirements. 3. Continuously communicate with suppliers to acquire good prices and quality.
Risiko Lingkungan Environment Risk	1. Memastikan pelaksanaan kontrak dengan <i>supplier</i> agar tidak terjadi fluktuasi harga. 2. Memastikan piutang dagang dapat dikendalikan oleh Perseroan.
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	1. Ensure the implementation of contracts with suppliers to keep the price fluctuations from occurring. 2. Ensure that trade receivables can be controlled by the Company.
	Memastikan setiap kegiatan operasional tidak mencemari lingkungan di sekitar daerah operasional Perseroan. Ensure that every operational activity does not pollute the environment around the Company's operational areas.
	Manajemen risiko likuiditas dilaksanakan secara cermat dan hati-hati, serta melalui pengaturan kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Liquidity risk management is carried out carefully and prudently, and through the arrangement of sufficient cash and cash equivalents to support business activities in a timely manner.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Tahun 2025 Overview of Risk Management System Effectiveness in 2025

Perseroan secara berkala melaksanakan evaluasi dan efektivitas sistem manajemen risiko Perseroan dengan melaksanakan audit berbasis risiko yang dilakukan oleh audit internal dan *assessment* yang dilaksanakan oleh internal.

The Company periodically conducts evaluations and effectiveness of the Company's risk management system by carrying out risk-based audits by internal audit and assessments carried out internally.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit Atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee regarding the Risk Management System Adequacy

Direksi maupun Dewan Komisaris/Komite Audit meyakini bahwa sistem manajemen risiko Perseroan yang diterapkan saat ini sudah cukup efektif dalam mereduksi risiko-risiko usaha, operasional dan keuangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Begitu juga dengan potensi risiko-risiko baru yang mungkin akan timbul dan berdampak signifikan di masa mendatang.

The Board of Directors and the Board of Commissioners/Audit Committee believe that the Company's implemented risk management system is quite effective in reducing the business, operational and financial risks that have been previously identified. The same applies with the potential for new risks that may arise and have a significant impact in the future.



Litigasi dan Perkara Hukum Tahun 2025 Litigation and Legal Matters in 2025

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat litigasi dan perkara hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh Perseroan yang dapat merugikan Perusahaan. Tidak terdapat perkara hukum, baik perdata maupun pidana, yang dihadapi oleh anggota Komisaris maupun Direksi.

In 2025, there are no litigation or legal cases, both civil and criminal, faced by the Company that could harm the Company. There are no legal cases, either civil or criminal, faced by members of the Commissioners or Directors.

Sanksi Administratif Administrative Sanction

Sepanjang tahun 2025, baik Perseroan maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak dikenakan sanksi administratif oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya.

In 2025, neither the Company nor the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company were subject to administrative sanctions by the Capital Market Authority and other authorities.

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan Employees and/or Management Share Ownership Program Held by the Company

Hingga akhir 2025, Perseroan sudah tidak memiliki program kepemilikan saham oleh, karyawan dan/atau manajemen senior baik secara langsung maupun tidak langsung.

Until the end of 2025, the Company has no share ownership program by employees and/or senior management either directly or indirectly.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Long-Term Compensation Policy

Kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja kepada karyawan sudah dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023 berupa Program kepemilikan saham oleh karyawan. Sepanjang tahun 2025 Kebijakan kompensasi tersebut sudah terlaksana.

Policies related to providing long-term performance based incentives to management and employees have been implemented in 2022 and 2023 in the form of employee share ownership programs. In 2025, the compensation policy has been implemented.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Lainnya Shares Ownership of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Sebagai perusahaan publik, Perseroan wajib mematuhi ketentuan POJK No. 04 tahun 2024 ("POJK 04 /2024") tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka. Berdasarkan regulasi tersebut, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memberitahukan atau melaporkan kepemilikan saham dan/atau setiap perubahan kepemilikan saham yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung kepada Sekretaris Perusahaan untuk selanjutnya dapat dilaporkan oleh Perseroan kepada pihak Regulator.

Pelaksanaan Kebijakan Pengungkapan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan POJK 04 /2024, pada tahun 2024, Perseroan sudah menyampaikan laporan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada OJK melalui sistem pelaporan elektronik yaitu SPE IDX. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memberitahukan kepada Perseroan secara tertulis sesegera mungkin atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah tanggal transaksi saham Perseroan agar Perseroan dapat membuat pemberitahuan kepada pihak berwenang secara tepat waktu.

Akses Informasi dan Data Perusahaan Corporate Data and Information Access

Situs Web

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi terhadap prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Oleh sebab itu, Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, dan investor, untuk mengakses informasi terkait Perseroan, di antaranya informasi mengenai kinerja keuangan Perseroan selama lima tahun terakhir, siaran pers, tanggung jawab sosial perusahaan, laporan tahunan, laporan keuangan, produk dan aksi korporasi melalui situs Perseroan <https://www.arkora.com> yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Share Ownership of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners

As a public company, the Company is obliged to comply with the POJK No. 04 yearly 2024 ("POJK 04/2024") of Reports of Ownerships or Any Changes in Ownership of Public Company Shares. Based on these regulations, all members of the Board of Commissioners and Directors are required to notify, or report share ownership and/or any changes in share ownership either directly or indirectly to the Corporate Secretary, thus the Company can submit the report to the Regulator.

Implementation of Share Disclosure Policy for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners

In accordance with the POJK 04/2024, in 2024, the Company will submit a report of share ownership for members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the OJK via the SPEIDX reporting system. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners shall notify the Company in writing as soon as possible or no later than 3 working days after the date of the Company's share transaction to enable the Company to notify the authorities in a timely manner.

Website

The Company is highly committed to the principles of transparency and information disclosure. Therefore, the Company always makes it easy for stakeholders, the public and investors to access information related to the Company, including information regarding the Company's financial performance over the last five years, press releases, corporate social responsibility, annual reports, financial reports, products, and corporate action through the Company website at <https://www.arkora.com> which is presented in Indonesian and English.



Pelaporan Berkala ke Regulator

Perseroan juga secara berkala memperbarui situs tersebut untuk selalu memberikan informasi terbaru terkait Perseroan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, Perseroan juga selalu melakukan pelaporan Informasi secara akurat dan tepat waktu baik melalui media, surat tercatat maupun melalui *e-reporting* kepada OJK dan BEI.

Media Sosial

Perseroan memahami bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami perubahan yang begitu cepat. Oleh karenanya, Perseroan senantiasa memiliki komitmen untuk selalu menjadi yang terdepan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang terkini dan dapat menjangkau secara luas karena banyak digunakan oleh masyarakat dari seluruh lapisan. Adapun akun media sosial yang telah dimiliki oleh Perseroan, yaitu:

1. Instagram: @arkorahydro
2. Youtube: Arkora Hydro
3. LinkedIn: Arkora Hydro, PT

Melalui akun-akun tersebut, Perseroan menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Perseroan serta pengembangan usaha dan kegiatan Perseroan.

Media Cetak

Perseroan selalu memuat informasi penting yang perlu diketahui oleh publik sebagai bentuk transparansi bagi para pemangku kepentingan dalam surat kabar dengan siklus peredaran nasional.

Siaran Pers

Selain melalui situs Perseroan, keterbukaan informasi mengenai Perusahaan juga dilakukan melalui siaran pers. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan menerbitkan 4 (empat) siaran pers yang disampaikan kepada Media.

Periodic Reporting to Regulators

The Company also regularly updates the site to always provide the latest information regarding the Company to stakeholders. Apart from that, the Company also always reports information accurately and in a timely manner either through the media, registered letters or via *e-reporting* to the OJK and IDX.

Social Media

The Company understands that the development of information and communication technology is currently experiencing rapid changes. Therefore, the Company always has a commitment to always be at the forefront of adopting information and communication technology in the form of social media as the latest means of public communication and can reach widely because it is broadly used by people from all levels. The social media accounts owned by the Company are:

1. Instagram: @arkorahydro
2. YouTube: Arkora Hydro
3. LinkedIn: Arkora Hydro, PT

Through these accounts, the Company conveys information related to the Company, along with the development of the Company's business and activities.

Print Media

The Company always presents important information that the public needs to know as a form of transparency for stakeholders in newspapers with a national circulation cycle.

Press Conference

Besides the Company's website, information disclosure of the Company is also carried out through press releases. In 2024, the Company published 4 (four) press release delivered in the Annual Public Expose.

Informasi Langsung

Informasi lebih lengkap mengenai Perseroan juga dapat diperoleh secara lengkap dengan menghubungi kantor pusat Perseroan di alamat berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT Arkora Hydro Tbk

Treasury Tower Level 9 Unit G-H. District 8 SCBD
Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53. Jakarta 12190,
Indonesia.

Telp: (021) 50333144

Kode Etik [G-07] Code of Ethics [G-07]

Perseroan memiliki Prinsip Pedoman Bisnis dan Kebijakan Pedoman (bersama-sama disebut sebagai "Kode Etik") sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh jajaran Perseroan termasuk bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dalam melakukan interaksi dan hubungan dengan segenap pemangku kepentingan. Kode Etik merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk meningkatkan integritas seluruh jajaran Perseroan dalam menerapkan GCG. Kode Etik ini mendefinisikan kebijakan dan praktik Perseroan terkait dengan etika, nilai, dan kepatuhan.

Kode Etik memberikan panduan tentang interaksi Perseroan dengan lingkungannya, baik secara internal maupun eksternal, yang mencakup:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Hubungan dengan pemegang saham;
3. Hubungan dengan pelanggan;
4. Hubungan dengan mitra bisnis;
5. Kerahasiaan informasi;
6. Keberlanjutan Perseroan;
7. Kesehatan dan keselamatan kerja;
8. Integritas bisnis; dan
9. Perlakuan yang adil.

Live Information

More complete information of the Company can also be obtained by contacting the Company's head office at the following address:

Corporate Secretary

PT Arkora Hydro Tbk

Treasury Tower Level 9 Unit G-H. District 8 SCBD
Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53. Jakarta 12190,
Indonesia.

Telp: (021) 50333144

The Company has Business Manual Principles and Manual Policies (together referred to as the "Code of Ethics") as behavioral guidelines for all levels of the Company including members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the Company's Employees in interacting with all stakeholders. The Code of Ethics is a form of the Company's commitment to improve the integrity of all levels of the Company in implementing GCG. This Code of Ethics defines the Company's policies and practices related to ethics, values and compliance.

The Code of Ethics is a manual of the Company's interaction with its environment, both internally and externally, which includes:

1. Compliance with laws and regulations;
2. Relations with shareholders;
3. Relations with customers;
4. Relations with business partners;
5. Information Confidentiality;
6. Corporate Sustainability;
7. Occupational Health and Safety;
8. Business integrity; and
9. Fair treatment.



Kode Etik merupakan sistem nilai yang dijunjung tinggi oleh semua karyawan Perseroan. Pedoman tersebut mengatur perbuatan, perilaku dan hubungan antar pihak di dalam Perseroan, yang mencakup:

1. Kepatuhan terhadap kebijakan/aturan internal Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Lingkungan kerja yang kondusif dan budaya kerja yang positif;
3. Pelaksanaan kewenangan secara bertanggung jawab untuk kepentingan Perseroan;
4. Perlindungan informasi rahasia Perseroan;
5. Pendekatan yang bertanggung jawab terkait dengan hubungan atasan-bawahan di Perseroan; dan
6. Pendekatan yang bertanggung jawab terkait dengan hubungan di antara karyawan.

Sosialisasi Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik dilaksanakan secara berkesinambungan hingga menjangkau seluruh jajaran Perseroan termasuk anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan seluruh karyawan, serta manajemen, untuk dipahami dan dipatuhi. Kode Etik disosialisasikan dan harus dipelajari, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Perseroan. Perseroan juga menginformasikan Kode Etik Perusahaan kepada para mitra usaha/pihak eksternal yang memiliki hubungan kerja sama dengan Perseroan melalui situs web Perseroan dan/atau menyampaikannya dalam bentuk *softcopy* pada media komunikasi elektronik.

Penegakan Kode Etik

Seluruh insan Perseroan memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan melaporkan setiap tindakan karyawan lain yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dengan disertai fakta pendukung. Evaluasi pelaksanaan Kode Etik ini menjadi tanggung jawab seluruh organ Perseroan. Namun, peran supervisor atau atasan menjadi sangat penting dalam penegakan Kode Etik ini.

Penyampaian Pelaporan Kode Etik

Setiap dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan insan Perseroan dapat disampaikan langsung kepada atasan karyawan yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Jika dugaan tersebut terbukti benar, atasan tersebut harus menyampaikannya dan berkonsultasi dengan HRD untuk dicatat dan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran dan peraturan atau kebijakan yang berlaku. Namun, apabila atasan karyawan tersebut

The Code of Ethics is a system of values honored by all Company employees. These guidelines regulate actions, behavior and relationships between parties within the Company, including:

1. Compliance with the Company's internal policies/rules along with applicable laws and regulations;
2. Conducive work environment and positive work culture;
3. Implementation of accounted authority for the interests of the Company;
4. Protection of the Company's confidential information;
5. Responsible approach regarding superior subordinate relationships in the Company; and
6. Responsible approach related to relations between employees.

Socialization of the Code of Ethics

Socialization of the Code of Ethics is carried out continuously to reach all levels of the Company including members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and all employees, along with management, for understanding and compliance. The Code of Ethics is socialized and must be studied, understood and implemented by all levels of the Company. The Company also informs the Company's Code of Ethics to business partners/external parties in collaborative relations with the Company via the Company's website and/or convey it in *softcopy* form on electronic communication media.

Enforcement of the Code of Ethics

All Company's personnel have the responsibility to monitor and report any actions of other employees suspected of violating the Company's regulations, accompanied by supporting facts. Evaluation of the implementation of this Code of Ethics is the responsibility of all Company organs. However, the role of supervisors or superiors is very important in enforcing this Code of Ethics.

Submission of Code of Ethics Report

Any alleged violation of the Code of Ethics by the Company's personnel can be submitted directly to the employee's superior for clarification. If the allegation is proven to be true, the superior must convey it and consult with HRD to be recorded and given sanctions according to the type of violation and applicable regulations or policies. However, if the employee's superior does not provide a positive response, then the report can be submitted via

tidak memberikan respons yang positif, maka laporan dapat disampaikan melalui surat elektronik yang ditujukan kepada HRD, Unit Audit Internal, atau Sekretaris Perusahaan untuk ditindaklanjuti.

Laporan Pengaduan Kode Etik

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh insan Perseroan terhadap Kode Etik.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) merupakan sebuah sistem yang dibangun Perseroan untuk mengendalikan tindakan kecurangan, pelanggaran kebijakan perusahaan, pelanggaran kode etik, serta pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh karyawan. Sistem ini menjadi media terbuka bagi karyawan untuk melaporkan segala keluhan dan pengaduan.

Pihak yang Mengelola Laporan Pelanggaran

Dewan Komisaris akan menindaklanjuti setiap pengaduan pelanggaran yang diterima oleh Perusahaan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran.
2. Jika kebenaran dugaan terbukti, Direksi akan menetapkan sanksi kepada pelaku pelanggaran atas masukan dari kelompok pemeriksa yang ditetapkan sesuai ketentuan Perusahaan. Apabila pelanggaran oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris terbukti, melalui mekanisme RUPS, pemegang saham akan memutuskan sanksi.

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Perseroan menyediakan media pelaporan dugaan pelanggaran melalui website, e-mail, telepon, dan desk pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor, yaitu:

- Telepon : (021) 50333144
- Email : hydro@arkora.com
- Surat : hydro@arkora.com atau mengirimkan ke: Treasury Tower Level 9 Unit G-H. District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53. Jakarta 12190, Indonesia.

electronic mail addressed to HRD, Internal Audit Unit, or Company Secretary for follow-up.

Code of Ethics Complaint Report

In 2025, there are no violations committed by the Company's personnel against the Code of Ethics.

The Whistleblowing System (WBS) is a system built by the Company to control acts of fraud, violations of corporate policies, violations of the code of ethics, along with violations of the law committed by employees. This system is an open medium for employees to report all complaints.

Parties that Manage Violation Reports

The Board of Commissioners will follow up on every whistleblowing report received by the Company using the following procedures:

1. Checking to ensure correctness.
2. If the truth of the allegations is proven, the Board of Directors will determine sanctions against the perpetrators of the violation based on input from the inspection group determined in accordance with Company regulations. If violations by members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners are proven, through the GMS mechanism, shareholders will decide on sanctions.

Whistleblowing Report Submission

The Company provides media for reporting alleged whistleblowing report via website, e-mail, telephone and complaint desk that can be used by whistleblower:

- Phone : (021) 50333144
- Email : hydro@arkora.com
- Mail : hydro@arkora.com or send to: Treasury Tower Level 9 Unit G-H. District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53. Jakarta 12190, Indonesia.



Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor yang telah melakukan upaya pelaporan atas segala bentuk tindakan pelanggaran. Pemberian perlindungan tersebut berupa:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor;
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan;
3. Jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor; serta
4. Bagi pelapor internal, Perseroan memberikan jaminan perlindungan terkait tidak dikenai:
 - a. Pemecatan;
 - b. Penurunan jabatan atau pangkat;
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam bentuk apapun; dan
 - d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Laporan Pengaduan Pelanggaran

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan pelanggaran yang diterima.

Program Anti-Korupsi [G-07] Anti Corruption Program [G-07]

Perseroan menyadari bahwa korupsi yang dilakukan di lingkungan perusahaan dapat mempengaruhi seluruh aktivitas bisnis bahkan dapat menyebabkan kerugian material. Terkait hal ini, seluruh karyawan Perseroan diwajibkan mematuhi ketentuan terkait kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya, salah satunya mengenai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Protection for Whistleblowers

The Company provides guaranteed protection for whistleblowers who have made efforts to report all forms of violations. This protection is provided in the form of:

1. Guarantee of confidentiality of the whistleblower identity;
2. Guarantee of the confidentiality of the contents of the submitted report;
3. Guarantee for protection against possible threats, intimidation, punishment or other unpleasant actions from the reported party; also
4. For internal whistleblowers, the Company provides a guarantee of protection regarding not being subjected to:
 - a. Dismissal;
 - b. Demotion of position or rank;
 - c. Harassment or discrimination in any form; and
 - d. Adverse records in their personal data file (*personal file record*).

Whistleblowing Report

In 2025, no whistleblowing reports are received.

Program dan Prosedur yang Dilakukan untuk Mengatasi Praktik Korupsi pada Lingkup Perseroan

Sebagai bagian dari upaya menghindari terjadinya tindakan korupsi di lingkungan Perseroan, seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal diinformasikan tentang Kode Etik yang berlaku di Perseroan. Begitu juga dengan setiap ada pemutakhirannya selalu disosialisasikan, sehingga diharapkan mampu mencegah kemungkinan terjadinya praktik yang mengarah pada kegiatan korupsi.

Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi Anti-Korupsi Kepada Karyawan Perusahaan Selama Tahun 2025

Perseroan telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh karyawan Perseroan, termasuk Dewan Komisaris dan Organ Pendukungnya, serta Direksi. Berupa penyampaian materi Kode Etik secara berkala mengenai Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2025, tidak terdapat insiden korupsi yang terjadi di Perseroan.

Programs and Procedures Implemented to Overcome Corrupt Practices within the Company

As part of efforts to avoid acts of corruption within the Company, all stakeholders, both internal and external, are informed of the Code of Ethics that applies to the Company. Likewise, every time there is an update, it is always socialized, thus it is hoped that it will be able to prevent the possibility of practices that may lead to corrupt activities.

Anti-Corruption Training/Socialization Activities for the Company's Employees in 2025

The Company has conducted a socialization to all Company's employees, including the Board of Commissioners and its Supporting Organs, also the Board of Directors. In the form of periodic delivery of Code of Ethics material regarding compliance with laws and regulations, one of which is Law No. 31 of 1999 and Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes.

In 2025, there are no incidents of corruption in the Company.

Kebijakan Anti Persaingan Tidak Sehat Anti-Unfair Competition Policy

Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip persaingan usaha yang sehat melalui beberapa strategi berikut.

1. Melaksanakan usaha dengan memperhatikan kaidah-kaidah persaingan usaha yang sehat dan beretika, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengedepankan keunggulan produk dan layanan bermutu; serta
3. Menghindari monopoli usaha.

The Company always prioritizes the principles of healthy business competition through these strategies.

1. Conduct business by observing the rules of healthy and ethical business competition, in accordance with applicable laws and regulations;
2. Prioritize product excellence and quality services; also
3. Avoid business monopoly.

Kepatuhan Perpajakan Tax Compliance

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa patuh dan taat pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan semangat dan upaya Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

The Company is committed to always obeying and complying to the tax laws and regulations that applies and Government Regulations of the Republic of Indonesia. This is in line with the Government's spirit and efforts to increase tax revenue.



Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of Public Good Corporate Governance

Perseroan berupaya memenuhi rekomendasi-rekomendasi sesuai Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Dalam penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan pendekatan “*comply or explain*”.

Perseroan sebagai perusahaan terbuka telah berusaha patuh dalam melaksanakan seluruh peraturan yang dikeluarkan OJK, dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Setiap perusahaan terbuka diwajibkan menerapkan pedoman tersebut dan jika belum menerapkannya, wajib menjelaskan alasan belum/tidak diterapkannya pedoman tersebut. Pengungkapan penerapan atas rekomendasi dalam pedoman tersebut disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan terbuka. Penilaian terhadap penerapan GCG dilakukan setahun sekali.

The Company strives to meet the recommendations in accordance with OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 of Implementation of Public Company Governance Manual and Circular Letter no. 32/SEOJK.04/2015 of Public Company Governance Manual. In implementing 5 (five) aspects, 8 (eight) principles of Good Corporate Governance, also 25 (twenty five) recommendations for implementing aspects and principles of Good Corporate Governance based on the “*comply or explain*” approach.

The Company, as a public company, has tried to comply with all regulations issued by the OJK, and will continue to improve in creating added value for shareholders and stakeholders. Every public company is required to implement the manuals and if they have not implemented them, they are required to explain the reasons for not/not yet implementing the manuals. Disclosure of the implementation of the recommendations in the manuals is submitted in the annual report of the public company. Assessment of GCG implementation is carried out once a year.

No	Aspek Aspect	Prinsip Principal	Rekomendasi Recommendation	Kepatuhan Perseroan Corporate Compliance
1	Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. Relation of Public Company with Shareholders in Guaranteeing Shareholder Rights.	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Increasing the Value of Organizing the General Meeting of Shareholders (GMS).	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting), baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan Pemegang Saham. Public Companies have technical methods or procedures for collecting votes, both public and limited, prioritizing the independence and interests of Shareholders.	Patuh Complied Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan dengan cara voting. Prosedur voting dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pemimpin RUPS. Meetings are held by deliberation to reach a consensus, but if deliberation to reach a consensus is not reached then a voting is held. The voting procedure is carried out by raising hands in accordance with the instructions of each choice by the GMS lead.
			2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company attended the Annual GMS.	Patuh Complied Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan tanggal 15 April 2025. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are present at the Annual GMS on April 15, 2025.
			3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the GMS minutes is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.	Patuh Complied Tersedia dalam situs web Perseroan pada kanal informasi investor. Available on the Company's website in the investor information channel.
	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.		1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor. Public Companies have a communication policy with Shareholders or investors.	Patuh Complied Pemegang Saham dapat melakukan kontak langsung dengan Sekretaris Perusahaan melalui telepon atau email. Shareholders are able to directly contact the Corporate Secretary through phone or email.
			2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau investor dalam situs web. The Public Company discloses the Public Company's communication policy with Shareholders or investors on the website.	Patuh Complied Perseroan menyediakan informasi penting dalam situs web perusahaan di https://www.arkora.com . The Company presents important information on the Company's website https://www.arkora.com .



No	Aspek Aspect	Prinsip Principal	Rekomendasi Recommendation	Kepatuhan Perseroan Corporate Compliance
2	Fungsi dan Peran Dewan Komisaris. Function and Roles of the Board of Commissioners.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Improving the strength of the Membership and Composition of the Board of Commissioners.	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Stipulating the number of members of the Board of Commissioners while considering the conditions of the Public Company.	Patuh Complied Jumlah anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak lebih banyak dari jumlah Direksi. The total members of the Board of Commissioners, including Independent Commissioners, is in accordance with applicable regulations and is not more than the total members of the Board of Directors.
			2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Stipulating the composition of members of the Board of Commissioners by considering the diversity of skills, knowledge and experience required.	Patuh Complied Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha Perseroan. Diungkapkan dalam profil singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan. The composition of the members of the Board of Commissioners has met the aspects of diversity of expertise, knowledge and experience required according to the Company's business field. Disclosed in a brief profile of the Board of Commissioners in the Annual Report.
	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Improving the Quality of the Implementation of Duty and Responsibility of the Board of Commissioners.		1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	Patuh Complied Penilaian kinerja secara mandiri telah dilakukan oleh setiap anggota Dewan Komisaris untuk diungkapkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Independent performance assessments have been conducted by each member of the Board of Commissioners to be disclosed in the Board of Commissioners' Supervisory Report.
			2. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Patuh Complied Kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The Board of Commissioners' self-assessment policy is disclosed in the Annual Report.

No	Aspek Aspect	Prinsip Principal	Rekomendasi Recommendation	Kepatuhan Perseroan Corporate Compliance
			3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners in case they are involved in financial crimes.	Patuh Complied Dewan Komisaris memiliki kebijakan pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy of resignation if involved in financial crimes.
			4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee conducting the Nomination and Remuneration function prepares a succession policy in the Nomination process for members of the Board of Directors.	Patuh Complied Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi karena pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi masih dapat dijalankan oleh Dewan Komisaris. The Company does not form a Nomination and Remuneration Committee since the nomination and remuneration functions can still be conducted by the Board of Commissioners.
3	Fungsi dan Peran Direksi. Function and Roles of the Board of Directors.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Improving the strength of the Membership and Composition of the Board of Directors	1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Stipulating the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Public Company as well as the effectiveness in decision-making.	Patuh Complied Penentuan jumlah anggota Direksi berpedoman pada peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi sebagai Perusahaan Terbuka. Stipulating the number of members of the Board of Directors is based on applicable regulations and considers the conditions as a Public Company.
			2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Stipulating the composition of members of the Board of Directors considers the diversity of skills, knowledge and experience required.	Patuh Complied Komposisi anggota Direksi telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai bidang usaha Perseroan. Diungkapkan dalam profil singkat Direksi dalam Laporan Tahunan. The composition of the Board of Directors has fulfilled the aspects of diversity of expertise, knowledge, and experience required in accordance with the Company's business field. Disclosed in the brief profile of the Board of Directors in the Annual Report.



No	Aspek Aspect	Prinsip Principal	Rekomendasi Recommendation	Kepatuhan Perseroan Corporate Compliance
			3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors who oversee accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Patuh Complied Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait. Diungkapkan dalam profil singkat Direksi dalam Laporan Tahunan. Accounting/Finance Directors have expertise and/or knowledge in the field of accounting as proven by educational background, training certification and/or related work experience. Disclosed in the brief profile of the Board of Directors in the Annual Report.
	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Improving the Quality of the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors.		1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	Patuh Complied Penilaian kinerja secara mandiri telah dilakukan oleh setiap anggota Direksi untuk diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Direksi. Independent performance assessments have been conducted by each member of the Board of Directors to be disclosed in the Board of Directors' Accountability Report.
			2. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Patuh Complied Kebijakan penilaian sendiri Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The Board of Directors' self-assessment policy is disclosed in the Annual Report.
			3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors in case they are involved in financial crimes.	Patuh Complied Direksi memiliki kebijakan pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors have a resignation policy in case they are involved in financial crimes.

No	Aspek Aspect	Prinsip Principal	Rekomendasi Recommendation	Kepatuhan Perseroan Corporate Compliance
4	Partisipasi Pemangku Kepentingan. Participation of Stakeholders.	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Improving the Good Corporate Governance aspect through Participation of Stakeholders.	1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . Public Companies have policies to prevent insider trading.	Patuh Complied Kebijakan terkait pencegahan <i>insider trading</i> dilakukan dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia kepada publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi secara proporsional dan efisien. Policies related to preventing insider trading are carried out by strictly separating confidential data and/or information from the public, also dividing duties and responsibilities for managing information proportionally and efficiently.
			2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti-fraud</i> . Public Companies have anti-corruption and anti-fraud policies.	Patuh Complied Kebijakan anti-korupsi dan <i>anti-fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi mengatur agar karyawan tidak mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah. The anti-corruption and anti-fraud, bribery and/or gratification policies regulate that employees do not take personal benefits directly or indirectly from the Company's activities, other than legitimate income.
			3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public Companies have policies of the selection and improvement of supplier or vendor capabilities.	Patuh Complied Perseroan memiliki kebijakan seleksi pemasok atau vendor, serta evaluasi untuk meningkatkan kualitas <i>output</i> . The Company has a supplier or vendor selection policy, also evaluation to improve output quality.
			4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Companies have policies of fulfilling creditor rights.	Patuh Complied Perseroan selalu memperhatikan pemenuhan hak-hak kreditur dalam melakukan perjanjian, serta menindaklanjutinya secara konsisten. The Company is always attentive in fulfilling creditors' rights in entering into agreements and follows up consistently.
			5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . Public Companies have a whistleblowing system policy.	Patuh Complied Perseroan memiliki sistem pelaporan pelanggaran yang telah disusun dengan baik dan dapat memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perseroan. The Company has a whistleblowing system that has been well prepared and able to provide guaranteed protection to witnesses or whistleblowers for indications of violations committed by the Company's employees or management.



No	Aspek Aspect	Prinsip Principal	Rekomendasi Recommendation	Kepatuhan Perseroan Corporate Compliance
			6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Public Companies have a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.	Patuh Complied Perseroan memberikan insentif jangka panjang yang didasarkan atas pengabdian dan pencapaian kinerja jangka panjang kepada karyawan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 The Company provides long-term incentives based on dedication and long-term performance achievements to employees that have been implemented in 2024.
5	Keterbukaan Informasi. Disclosure of Information.	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan. Improving the Implementation of Information.	1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. Public Companies broader use of information technology apart from websites as a medium for information disclosure. 2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali. The Annual Report of a Public Company discloses the final beneficial owner in Public Company whose share ownership reaches at least 5%, besides the disclosure of the final beneficial owner in Public Company's share ownership through Major and Controlling Shareholders.	Patuh Complied Sarana dan media keterbukaan informasi tentang Perseroan dapat diakses melalui situs web Perseroan dan hasil pelaporan secara elektronik (IDXNet dan OJK Reporting). The means and media of information disclosure about the Company can be accessed through the Company's website and electronic reporting (IDXNet and OJK Reporting). Patuh Complied Perseroan telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan paling sedikit 5% (lima persen) dalam Laporan Tahunan. The Company has disclosed the final beneficial owner of the Company's share ownership of at least 5% (five percent) in the Annual Report.





06

Laporan Keberlanjutan Sustainability Report





Tentang Laporan Keberlanjutan

About This Sustainability Report

Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun buku 2025 menjadi laporan kelima yang kami susun dan publikasikan di dalam satu buku yang sama dengan Laporan Tahunan tahun buku 2025. Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik ("POJK 51/2017"), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada tahun buku 2025, Perseroan juga melengkapi pengungkapan Laporan Keberlanjutan dengan mengacu kepada Metrik ESG dalam sistem pelaporan IDX sesuai Formulir E020 di SPE-IDXnet. Pengungkapan ini dipercaya akan semakin meningkatkan transparansi Perseroan dan memperlihatkan komitmen kuat Perseroan dalam mengungkapkan kinerja keberlanjutan di usianya yang ke-15.

Semua data dan informasi dari pihak internal Perseroan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Direksi bersama ESG Specialist dan Sekretaris Perusahaan, sebagai penanggung jawab harian pembuatan Laporan Keberlanjutan ini, ikut terlibat dalam proses pembuatan laporan. [\[G.1\]](#)

Perseroan sudah mempublikasikan Laporan Keberlanjutan tahun buku 2024 pada bulan Maret 2025. Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak menerima tanggapan dari pihak eksternal terhadap Laporan Keberlanjutan tahun buku 2023. [\[G.3\]](#)

Periode pelaporan disesuaikan dengan periode tahun buku 2025 mulai dari 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Laporan Keberlanjutan ini mengungkapkan komitmen dan strategi keberlanjutan Perseroan dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang memperhatikan dampak positif dan negatif operasi sehari-hari terhadap aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau yang lebih dikenal dengan *Environment, Social, Governance* (ESG). Pada pembahasan Laporan Keberlanjutan dalam bab terpisah dari Laporan Tahunan, para pembaca dapat menemukan topik-topik pembahasan mengenai:

The Company's 2024 Sustainability Report is the fifth report we have prepared and published within the same book as the 2025 Annual Report. The preparation of this Sustainability Report follows the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies ("POJK 51/2017"), as well as the Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 on the Format and Content of the Annual Report for Issuers or Public Companies.

In the 2025 fiscal year, the Company also complemented its Sustainability Report disclosures by referring to the ESG Metrics within the IDX reporting system in accordance with Form E020 in SPE-IDXnet. This disclosure is expected to further strengthen the Company's transparency and demonstrate its strong commitment to presenting sustainability performance as it enters its 15th year.

All data and information presented from the Company's internal sources are credible and accountable. The Board of Directors along with the ESG Specialist and Corporate Secretary, as the daily responsible party for the preparation of this Sustainability Report, were involved in the reporting process. [\[G.1\]](#)

The Company published its 2024 Sustainability Report in March 2025. As of the end of 2025, the Company had not received any external feedback regarding the 2023 Sustainability Report. [\[G.3\]](#)

The reporting period aligns with the 2025 fiscal year, from January 1, 2025, to December 31, 2025. This Sustainability Report outlines the Company's commitment and sustainability strategy in achieving business growth while considering the positive and negative impacts of daily operations on Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects. In the Sustainability Report section, separate from the Annual Report, readers can find discussions on topics such as:

- Strategi Keberlanjutan
- Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
- Permasalahan Penerapan Praktik Keberlanjutan
- Pelatihan dan Pengembangan Karyawan
- Kinerja Ekonomi
- Kinerja Lingkungan Hidup
- Kinerja Sosial

- Sustainability Strategy
- Stakeholder Relations
- Challenges in Implementing Sustainability Practices
- Employee Training and Development
- Economic Performance
- Environmental Performance
- Social Performance

Pembahasan mengenai Laporan Keberlanjutan yang tidak terdapat di sini dapat ditemukan di Laporan Tahunan untuk menghindari duplikasi dalam penyajian.

Topics related to the Sustainability Report that are not included here can be found in the Annual Report to avoid duplication in presentation.

Komitmen Terhadap Net Zero Emission Commitment to Net Zero Emission

Dari 2017 hingga 2025, Perseroan Pangkas Emisi 277.241 ton CO₂eq. Penyelesaian lebih banyak proyek akan memperkuat komitmen Perseroan untuk menerangi Indonesia melalui energi bersih dan menjalankan bisnis secara berkelanjutan.

The completion of more projects will strengthen the Company's commitment to illuminating Indonesia with clean energy and operating its business sustainably. From 2017 to 2025, the Company Cuts 277.241 tons of CO₂eq emissions.

Penggunaan PLTA telah ada sejak abad ke-19. PLTA beroperasi dengan memanfaatkan prinsip sederhana: air mengalir melalui bendungan yang menggerakkan turbin, kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Arkora memilih untuk membangun PLTA aliran sungai langsung (*run-of-river hydropower*) karena sifat alamnya yang memanfaatkan ketinggian alami dan aliran sungai. Air dialihkan dari hulu, melalui saluran pengantar dan pipa *penstock*, menuju turbin di hilir untuk menghasilkan energi sebelum kembali ke aliran sungai. Aliran alami sungai tetap terjaga dan energi listrik yang dihasilkan memiliki dampak lingkungan yang minimal, tanpa menghasilkan emisi karbon (*zero emission*). Selain itu, PLTA aliran sungai langsung juga dapat membantu daerah-daerah terpencil yang mengalami kesulitan pasokan listrik akibat keterbatasan infrastruktur.

The use of hydropower plants (PLTA) has existed since the 19th century. Hydropower plants operate based on a simple principle: water flows through a dam, driving a turbine, which then powers a generator to produce electricity. Arkora has chosen to build run-of-river hydropower plants because of their natural characteristics, utilizing natural elevation and river flow. Water is diverted from upstream through conveyance channels and penstock pipes to turbines downstream to generate energy before returning to the river flow. The river's natural flow remains preserved, and the electricity generated has minimal environmental impact, producing zero emissions. Additionally, run-of-river hydropower plants can help remote areas that struggle with electricity supply due to infrastructure limitations.



Berdiri pada tahun 2010, memulai proyek Cikopo 2 pada tahun 2017, dan mulai menjalankan operasional Proyek Tomasa secara komersial (*Commercial Operation Date/COD*) pada tahun 2020, Perseroan berhasil mencatatkan reduksi emisi gas rumah kaca sebesar 235.950 ton CO₂eq sepanjang tahun 2017 hingga akhir tahun 2024. Dengan demikian, terdapat peningkatan reduksi emisi sebesar 33.336 ton CO₂eq pada 2024 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 202.614 ton CO₂eq dari rentang tahun 2017 hingga 2023.

Pada akhir tahun 2025, Perseroan memiliki total kapasitas terkontrak sebesar 42,8 MW dari tiga proyek yang telah beroperasi yakni Proyek Cikopo 2, Jawa Barat (7,4 MW), Proyek Koro Tomasa, Sulawesi Tengah (10 MW), Proyek Koro Yaentu, Sulawesi Tengah (10 MW). Selain itu, terdapat dua proyek dalam tahap konstruksi, yakni Proyek Kukusan 2, Lampung (5,4 MW) dan Proyek Tomoni, Sulawesi Selatan (10 MW). Target estimasi produksi listrik dari proyek yang telah beroperasi pada tahun 2025 adalah sebesar 164 GWh dari total *pipeline* proyek lebih besar dari 300 MW.

Kelima proyek pembangkit listrik tersebut memanfaatkan aliran sungai langsung (*run-of-river*) yang tergolong energi baru dan terbarukan (EBT) sehingga memberikan dampak lingkungan yang minim.

Dari keseluruhan proyek yang telah beroperasi dan sedang dalam tahap konstruksi, Perseroan memperkirakan mampu melakukan reduksi emisi gas rumah kaca sebesar ±99.937 ton CO₂eq per tahun. Kontribusi Perseroan dalam mereduksi emisi gas rumah kaca akan mendukung pemerintah mencapai target *Net Zero Emission* pada tahun 2060 dengan lebih cepat. Target ini juga merupakan target *Net Zero Emission* Perseroan yang telah dinyatakan dalam Misi “Untuk mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia yang akan mengurangi emisi karbon dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan” yang juga telah diungkapkan di situs web <https://www.arkora-hydro.com/id/about-our-team>. [E-06]

Pencapaian *Net Zero Emission* sangat erat kaitannya dengan komitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Perseroan tidak memiliki manajemen yang mengawasi pengendalian iklim, namun pengembangan proyek energi bersih melalui *run-of-river hydropower* menjadi bentuk nyata dari upaya Perseroan untuk mengurangi emisi GRK.

Established in 2010, commencing the Project Cikopo 2 in 2017, and beginning commercial operations for the Project Tomasa (*Commercial Operation Date/COD*) in 2020, the Company successfully recorded a total greenhouse gas emission reduction of 235,950 tons of CO₂eq from 2017 through the end of 2024. This reflects an increase of 33,336 tons of CO₂eq in emission reductions in 2024 compared with the previous period, which recorded 202,614 tons of CO₂eq from 2017 to 2023.

By the end of 2025, the Company already have a total contracted capacity of 42.8 MW from three operational projects, including the Project Cikopo 2 in West Java (7.4 MW), the Project Koro Tomasa in Central Sulawesi (10 MW), and the Project Koro Yaentu in Central Sulawesi (10 MW). In addition, two projects are currently under construction, namely the Project Kukusan 2 in Lampung (5.4 MW) and the Project Tomoni in South Sulawesi (10 MW). The estimated electricity production target from the operational projects in 2025 is 164 GWh, from a total project pipeline more than 300 MW.

All five power plant projects utilize run-of-river systems, which fall under the category of new and renewable energy (EBT/NRE), so that it has minimal environmental impact.

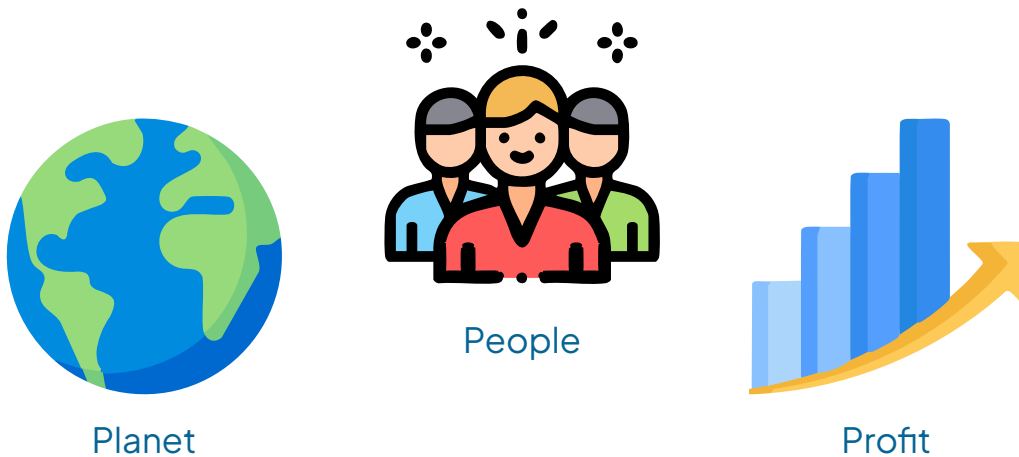
From all projects that are operational and under construction, the Company estimates that it will be able to reduce greenhouse gas emissions by approximately 99,937 tons of CO₂eq per year. The Company's contribution to reducing greenhouse gas emissions will help accelerate the government's efforts to achieve the *Net Zero Emission* target by 2060. This target is also the Company's *Net Zero Emission* target which has been stated in the Mission “To develop renewable energy potentials in Indonesia in which will reduce carbon emission and build a more sustainable future” and disclosed on the website on <https://www.arkora-hydro.com/id/about-our-team>. [E-06]

Achieving *Net Zero Emissions* is closely linked to the commitment to reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions. The Company does not have a management team overseeing climate control, but our clean energy run-of-river hydropower projects is a concrete manifestation of the Company's efforts to reduce GHG emissions.

Strategi Keberlanjutan Arkora [A.1] Arkora's Sustainability Strategy [A.1]

Tiga Pilar Keberlanjutan Arkora Hydro dan Keselarasannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Arkora Hydro's Three Pillars of Sustainability and their Alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs)



Strategi keberlanjutan Perseroan berpusat pada kemampuan teknis dan pengalaman untuk memanfaatkan PLTA aliran sungai langsung (*run-of-river hydropower*). Menyadari bahwa inti dari bisnis yang dilakukan sangat berkaitan erat dengan lingkungan dan interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, Perseroan beroperasi dengan memberdayakan masyarakat di sekitar proyek. Masyarakat setempat menjadi salah satu pemangku kepentingan utama yang selalu kami libatkan saat membangun proyek. Kami menyediakan lapangan pekerjaan dan pelatihan, membangun jalan dan sekolah, serta menyediakan pasokan listrik untuk pengembangan ekonomi lebih lanjut.

Melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab dengan melibatkan masyarakat sekitar (*people*), Perseroan mampu memastikan kinerja positif usahanya (*profit*) untuk berkontribusi lebih bagi masa depan dunia yang lebih baik (*planet*). Dengan demikian, fokus strategi keberlanjutan Perseroan yang berdasarkan pada tiga pilar utama yaitu *People, Profit, Planet* telah berhasil dijalankan dengan baik dan akan terus dioptimalkan seiring perkembangan proyek.

Dalam perjalanan bisnisnya, Perseroan juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kontribusi yang diberikan Perseroan adalah sebagai berikut:

The Company's sustainability strategy is centered on its technical capabilities and experience in utilizing run-of-river hydropower plants. Recognizing that the core of its business is closely linked to the environment and social interactions with surrounding communities, the Company operates by empowering the communities around its projects. Local communities are among our key stakeholders, and we actively involve them in project development. We provide employment opportunities and training, build roads and schools, and supply electricity to support further economic development.

Through the responsible use of natural resources while engaging local communities (*people*), the Company is able to ensure strong business performance (*profit*) and contribute to a better global future (*planet*). Accordingly, the Company's sustainability strategy which rooted in the three main pillars of *People, Profit, and Planet*, has been successfully implemented and will continue to be optimized as the projects progress.

Throughout its business journey, the Company has also contributed to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The Company's contributions are as follows:



Pilar Keberlanjutan Sustainability Pillars	Peran Perseroan The Company's Roles	Tujuan TPB SDGs Goals	
Pilar Pertama: Masyarakat dan Sumber Daya Manusia First Pillar: Community and Human Resources	1. Manajemen Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab 2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 3. Jaminan sosial ketenagakerjaan 4. Pelatihan bagi karyawan dan masyarakat sekitar 5. Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen untuk mengelola aspek sosial	01 Tanpa Kemiskinan 	03 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
	1. Responsible Human Resource Management 2. Occupational Health and Safety 3. Employment Social Security 4. Training for employees and local communities 5. Developing and Implementing a management system to address social aspects	05 Kesetaraan Gender 	08 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Pilar Kedua: Planet/ Lingkungan Second Pillar: Planet/ Environment	1. Meminimalkan emisi gas rumah kaca 2. Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen untuk mengelola lingkungan 3. Pengelolaan limbah yang baik 4. Melestarikan keanekaragaman hayati	06 Air Bersih dan Sanitasi Layak 	07 Energi Bersih dan Terjangkau
	1. Minimizing greenhouse gas emissions 2. Developing and implementing a management system to address environmental aspects 3. Proper waste management 4. Preserving biodiversity	13 Penanganan Perubahan Iklim 	
Pilar Ketiga: Membangun Kesejahteraan Third Pillar: Building Welfare	1. Kinerja ekonomi yang berkelanjutan 1. Memastikan produk/jasa berkualitas untuk pelanggan kami 2. Kepuasan pelanggan 3. Bertumbuh bersama masyarakat 4. Kolaborasi dan kontribusi sosial bagi masyarakat	03 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 	08 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
	1. Sustainable economic performance ensuring high-quality products/services for our customers 2. Customer satisfaction 3. Growing together with the community 4. Collaboration and social contribution to the community	12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab 	17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainable Performance Highlights

Pendapatan
Revenue

Rp343.321 juta | million

Pembiayaan TJSL
CSR Funding

Rp234,4 juta | million

Pengurangan Emisi GRK
GHG Emission Reduction

41.291 ton CO₂eq

Kinerja Ekonomi [B.1] Economic Performance [B.1]

Kinerja Ekonomi yang Berkaitan dengan Keberlanjutan
Economic Performance Related to Sustainability

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Pendapatan Revenue	Rp Juta Rp Million	343.321	238.914	178.790
Total Produksi Total Production	GWh/Tahun GWh/Year	151.8	94.448	97.611
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for The Year	Rp Juta Rp Million	63.893	41.800	39.108
Pembiayaan TJSL CSR Funding	Rp Juta Rp Million	234,4	415	104

Keterangan Terkait Produk Ramah Lingkungan, Pemasok, dan Pembiayaan TJSL Information Regarding Environmentally-Friendly Products, CSR Funding, and Suppliers

Pada Tabel Kinerja Ekonomi, informasi mengenai Total Produksi merupakan listrik yang dihasilkan oleh Perseroan sepanjang tahunnya. Hasil produksi listrik Perseroan tergolong sebagai produk ramah lingkungan karena berasal dari PLTA *run-of-river* dengan dampak lingkungan yang minimal, karena emisi karbon yang dihasilkan sangat minim. Dalam memproduksi listrik setiap tahunnya, Perseroan bekerjasama dengan pemasok, dan yang diutamakan adalah pemasok lokal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemasok yang bekerja sama dengan Perseroan termasuk golongan pemasok yang berkaitan dengan proses bisnis berkelanjutan.

In the Economic Performance Table, the information regarding Total Production refers to the electricity generated by the Company throughout the year. The Company's electricity production is classified as an eco-friendly product because it comes from run-of-river hydropower plants, which have minimal environmental impact due to insignificant carbon emissions. In producing electricity each year, the Company collaborates with suppliers and we prioritized local suppliers. Thus, it can be concluded that those suppliers who are working with the Company are categorized as suppliers of sustainable business process.



Informasi mengenai Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan total biaya secara konsolidasi (beserta anak usaha). Perseroan melakukan konsolidasi pembiayaan TJSL sejak tahun 2023.

The information regarding Social and Environmental Responsibility (CSR) Funding represents the total consolidated costs (including subsidiaries). The Company has been consolidating CSR funding since 2023.

Kinerja Lingkungan [B.2] Environmental Performance [B.2]

Penggunaan Energi Energy Consumption

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Penggunaan Listrik Electricity Consumption	kWh	32.196	30.711	25.791
	GJ	115,91	110,56	92,85
Penggunaan Solar Diesel Consumption	Liter	15.762	11.171	9.020
	GJ	344,64	213,42	196,26
Penggunaan Bensin Gasoline Consumption	Liter	11.535	13.418	12.335
	GJ	347,48	378,38	371,58
Total Penggunaan BBM Total Fuel Consumption	GJ	692,12	591,80	567,84
Total Penggunaan Energi (Listrik + BBM) Total Energy Consumption (Electricity + Fuel)	GJ	808,02	702,36	660,68

Emisi yang Dihasilkan Generated Emission

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Emisi GRK Cakupan 1 (BBM) Scope 1 GHG Emissions (Fuel)	ton CO ₂ eq	48,98	41,64	36,70
Emisi GRK Cakupan 2 (Listrik) Scope 2 GHG Emissions (Electricity)	ton CO ₂ eq	15,99	19,06	16,95
Total Emisi GRK Total GHG Emissions	ton CO ₂ eq	64,98	60,71	53,65

Emisi GRK yang Dihindari Avoided GHG Emission

2025	2024	2023
41.291,35 ton CO ₂ eq	33.335,62 ton CO ₂ eq	33.904,13 ton CO ₂ eq

Limbah yang Dihasilkan Generated Waste

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Limbah B3 Toxic and Hazardous Waste				
Oli Bekas Used Oil	Liter	1690	1000	283
Kain Majun Used Cloth	Kg	-	-	21
Accu Bekas Used Battery	Unit	4	2	3
Limbah Non B3 Non-Toxic and Hazardous Waste				
Limbah Non B3	m3	1.100	750	700

Penggunaan Air (dikembalikan ke sumber air) Water Consumption (returned to the water resource)

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Penggunaan Air Water Consumption	m ₃	273.569.090	158.692.132	153.416.712

Keanekaragaman Hayati Biodiversity

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Penanaman Pohon Tree Planting	Pohon Trees	46.200	-	68.970



Keterangan Terkait Penggunaan Air, Penambahan (Pengurangan) Emisi GRK dan Limbah dan Efluen, Serta Keanekaragaman Hayati Information Regarding Water Consumption, Addition (Reduction) of Generated GHG Emission and Waste and Effluent, and Biodiversity Preservation

Data penggunaan air bersumber dari pemanfaatan air sungai untuk kebutuhan pengoperasian proyek yang juga meliputi anak usaha. Perseroan hanya memanfaatkan energi kinetik air untuk menggerakkan turbin, sehingga tidak ada perubahan kuantitas maupun kualitas pada air yang dikembalikan ke sungai.

Perhitungan emisi dilakukan berdasarkan aktivitas operasional Perseroan, meliputi cakupan 1 dan cakupan 2. Perseroan tidak melaporkan emisi GRK cakupan 3 atau emisi tidak langsung lainnya seperti dari perjalanan dinas dengan pesawat terbang. Pada tahun 2025, Perseroan berhasil menghindari total emisi GRK sejumlah 41.291,35 ton CO₂eq dibandingkan emisi baseline sebanyak 41.356,32 ton CO₂eq yang merupakan emisi dalam kondisi *Business As Usual*.

Perhitungan limbah dan efluen dilakukan berdasarkan aktivitas operasional Perseroan yang terbagi menjadi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan non-B3. Mengingat perbedaan satuan antara masing-masing limbah, maka informasinya dapat dilihat pada masing-masing kolom pada Tabel Limbah yang Dihasilkan.

Penanaman pohon pada tahun 2023 dilakukan oleh entitas anak, PT Arkora Hydro Sulawesi. Pada tahun 2024, penanaman pohon belum terealisasi, dan pada tahun 2025, jumlah pohon yang ditanam berjumlah 46.200.

The water consumption data comes from the utilization of river water for the operation of the projects, which also include the data of our subsidiaries. The Company only uses the water's kinetic energy to drive the turbine, thus there is no change in either the quantity or quality of the water returned to the river.

Emission calculations are based on the Company's operational activities, covering scope 1 and scope 2. The Company does not report scope 3 GHG emissions or other indirect emissions, such as those from business travel by airplane. In 2025, the Company successfully avoided total GHG emissions by 41.291,35 ton CO₂eq compared to baseline emission of 41,356.32 tons CO₂eq which are emissions under Business As Usual conditions.

Waste and effluent calculations are based on the Company's operational activities, categorized into hazardous and toxic (B3) waste and non-B3 waste. Given the differences in measurement units for each type of waste, the information can be found in the respective columns of the Generated Waste Table.

Tree planting in 2023 was carried out by the subsidiary, PT Arkora Hydro Sulawesi. In 2024, tree planting was not realized, and in 2025, the total number of trees planted amounted to 46.200.

Kinerja Sosial [B.3] Social Performance [B.3]

Kinerja Ekonomi Sosial Social Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Jumlah Karyawan Total Employees	Orang People	72	75	83
Jumlah Dana CSR Total CSR Fund	Rp Juta Rp Million	234,4	415	104
Kecelakaan Kerja Work Accident	Kali Times	0	0	0
Kematian Akibat Kecelakaan Kerja Work Accident Fatalities	Kali Times	0	0	0

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan [E.4] Relationship with Stakeholders [E.4]

Perseroan beroperasi di industri yang dinamis dan menyadari bahwa peran dan kolaborasi para pemangku kepentingan merupakan hal yang penting. Para pemangku kepentingan dilibatkan secara proaktif melalui metode formal. Fokus pendekatan kami adalah untuk lebih memahami kebutuhan dan perhatian para pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa setiap hak dan kewajiban seluruh pihak dapat diperhatikan dan terlindungi.

Perseroan telah mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan terhadap aktivitas bisnis. Dalam berinteraksi dengan mereka, Perseroan mengutamakan pengungkapan informasi yang transparan berdasarkan realita bisnis pembangkit *run-of-river hydropower*. Terdapat berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, sementara kebutuhan para pemangku kepentingan juga terus berkembang. Mengantisipasi hal tersebut, Perseroan senantiasa mengevaluasi metode interaksi dengan pemangku kepentingan yang ditinjau secara berkesinambungan.

Berikut merupakan kelompok grup yang telah diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan Perseroan, beserta dengan pendekatan yang digunakan dalam melibatkan para pemangku kepentingan:

The Company operates in a dynamic industry and recognizes that the role and collaboration of stakeholders are essential. Stakeholders are proactively engaged through formal methods. Our approach focuses on gaining a deeper understanding of stakeholder needs and concerns, and ensuring that the rights and obligations of all parties are acknowledged and protected.

The Company has identified stakeholders as those who are involved in and have an interest in our business activities. In interacting with them, the Company prioritizes transparent information disclosure based on the realities of operating run-of-river hydropower plants. There are various complex and diverse challenges, while stakeholder needs continue to evolve. In anticipating this, the Company continuously evaluates its stakeholder engagement methods on an ongoing basis.

The following are the stakeholder groups identified by the Company, along with the approaches used to engage them:

Pemangku Kepentingan Arkora Hydro dan Metode Pelibatan Stakeholders of Arkora Hydro and Engagement Method

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Pendekatan Keterlibatan Engagement Approach	Frekuensi Pertemuan Meeting Frequency
Karyawan Employees	Pelatihan dan pendidikan, promosi dan peningkatan gaji sesuai dengan penilaian kinerja. Training and education, salary raise in line with performance appraisal.	Dilakukan secara rutin dan sesuai kebutuhan. Conducted regularly as needed.
Investor/Pemegang Saham Shareholders	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan paparan publik, termasuk informasi korporasi pada website. General Meeting of Shareholders (GMS) and public expose, including corporate information on website.	RUPS dan paparan publik diadakan secara berkala sesuai regulasi yang berlaku, minimal setahun sekali. Informasi pada website senantiasa diperbarui bila terdapat informasi terbaru mengenai Perseroan. GMS and public disclosures are held periodically in accordance with applicable regulations, at least once a year. Information on the website is continuously updated whenever there is new information regarding the Company.
Pihak Regulator dari Pemerintah Regulators from the Government	Pertemuan, kerja sama, dan penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan regulator. Meetings, cooperation, and reports submission as required by the regulators.	Secara rutin, berkala, dan sesuai kebutuhan. Regularly, periodically, and as needed.



Pemasok dan Mitra Bisnis Suppliers and Business Partners	Kontrak dan perjanjian kerja. Business contracts and agreements.	Dilakukan sesuai kebutuhan melalui rapat dan korespondensi melalui berbagai media daring dan luring. Conducted as needed through meetings and correspondence using online and offline media channels.
Pelanggan Customers	Pertemuan dan penyampaian laporan rutin. Meeting and routine reporting.	Dilakukan secara berkala melalui berbagai media daring dan luring. Conducted periodically using online and offline media channels.
Masyarakat Communities	Sarana pengaduan masyarakat, pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Public complaints facility, Social and Environmental Responsibility activities.	Dilakukan secara rutin dan sesuai kebutuhan. Conducted regularly as needed.
Kreditor Lender	Aktivitas komunikasi yang dilakukan berdasarkan dengan perjanjian yang telah disepakati. Communication activities based on the agreement.	Dilakukan sesuai kebutuhan melalui berbagai media daring dan luring, termasuk laporan, pertemuan, dan kunjungan ke lokasi Conducted as needed using online and offline media channels, such as report, meeting, and site visit.

Permasalahan Menerapkan Aspek Keberlanjutan dalam Operasional Usaha [E.5] Issues in Implementing Sustainability Aspect within Business Operations [E.5]

Arkora Hydro baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-15 di 2025 dan sangat memahami bahwa aktivitas usahanya sangat berkaitan dengan keberlanjutan. Basis operasi Perseroan yang memanfaatkan tenaga alami dari aliran sungai langsung untuk menghasilkan energi listrik, memungkinkan Arkora Hydro untuk tidak menghasilkan emisi (*zero emission*) dalam aktivitas operasionalnya. Hal ini dimungkinkan karena energi listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan jauh lebih besar dari energi fosil seperti listrik dan BBM yang digunakan untuk operasional (aktivitas pendukung pembangkit dan administrasi lainnya di kantor).

Secara garis besar, selama beroperasi 15 tahun lamanya, Arkora Hydro tidak memiliki masalah dalam menerapkan aspek keberlanjutan dalam operasional usaha. Perseroan memiliki tim internal khusus yaitu *Environmental Social Governance* (ESG) untuk menangani aspek keberlanjutan dalam operasional usaha. Fungsi ini bertanggung jawab memastikan bahwa Perseroan mematuhi standar ESG dalam seluruh operasional melalui integrasi prinsip-prinsip ESG ke dalam strategi bisnis serta memastikan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan perusahaan dikelola sesuai regulasi yang berlaku. Seluruh karyawan Perseroan telah memahami aspek keberlanjutan yang harus diperhatikan di Arkora Hydro dan menerapkannya dalam keseharian mereka saat bekerja.

Arkora Hydro has just celebrated its 15th anniversary in 2025 and fully understands that its business activities are closely linked to sustainability. The Company's operations, which harness natural energy from run-of-river hydropower to generate electricity, allow Arkora Hydro to operate with zero emissions. This is possible because the electricity generated from renewable energy sources is far greater than the fossil energy, such as electricity and fuel, used for operations (supporting power plant activities and other administrative functions at the office).

In general, during its operation in the past 15 years, Arkora Hydro does not face significant challenges in implementing sustainability aspects in its business operations. The Company has a dedicated internal team, *Environmental Social Governance* (ESG), responsible for managing sustainability aspects in its operations. This function ensures that the Company complies with ESG standards across all operations by integrating ESG principles into business strategies and managing the environmental and social impacts of corporate activities in accordance with applicable regulations. All employees of the Company understand the sustainability aspects that must be upheld at Arkora Hydro and apply them in their daily work.

Permasalahan yang dihadapi Perseroan saat ini masih berasal dari eksternal, yaitu ketersediaan mitra bisnis dan pihak eksternal lainnya dengan aksesibilitas yang terjangkau. Dalam membangun dan menjalankan proyek pembangkit *run-of-river hydropower*, Perseroan membutuhkan kerja sama pihak lain yang tidak sepenuhnya menjalankan praktik bisnis berkelanjutan. Perseroan telah mengantisipasi hal ini dengan terus melakukan komunikasi intensif agar mereka dapat mengikuti pengelolaan pembangkit secara berkelanjutan. Perseroan akan melakukan berbagai pendekatan yang edukatif yang konstruktif untuk mencapai pemahaman bersama agar dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Membangun Budaya Keberlanjutan [F.1] Building Sustainability Culture [F.1]

Budaya keberlanjutan Perseroan terlahir dari nilai-nilai Perseroan, yang diaktualisasikan dalam semua kegiatannya untuk memastikan tercapainya visi dan misi dengan cara yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen menjadikan keberlanjutan menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatannya. Berangkat dari komitmen tersebut, Perseroan selalu mengutamakan agar setiap karyawan menjadikan aspek keberlanjutan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam beroperasi dan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal.

Dalam memperkuat budaya keberlanjutan, Perseroan senantiasa melakukan komunikasi internal di berbagai kesempatan melalui pertemuan (*meeting*) secara daring dan luring. Perseroan juga terus melakukan sosialisasi ke seluruh pihak internal secara berkala melalui pertemuan daring atau tatap muka (*site visit*).

The issues the Company is currently facing still originate from external parties, such as the availability of business partners and other external stakeholders with affordable accessibility. In developing and operating *run-of-river hydropower* projects, the Company relies on the collaboration of other parties who may not fully implement sustainable business practices. The Company has anticipated this by maintaining intensive communication to encourage these parties to adopt sustainable power plant management practices. The Company will continue to pursue constructive and educational approaches to build mutual understanding and create positive long-term impacts.

The Company's sustainability culture is rooted in its core values, which are actualized in all activities to ensure the achievement of its vision and mission in a manner that considers sustainability aspects. Additionally, the Company is committed to making sustainability the foundation of its operations. Based on this commitment, the Company consistently prioritizes ensuring that every employee incorporates sustainability aspects into their decision-making when operating and collaborating with external parties.

To strengthen the sustainability culture, the Company continuously engages in internal communication on various occasions through both online and offline meetings. The Company also regularly conducts outreach to all internal stakeholders through online meeting or offline meeting (*site visit*).



Kinerja Lingkungan Hidup

Environmental Performance

Perseroan meyakini bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama yang berperan besar dalam menunjang keberlangsungan usaha Perseroan. Hal ini membuat Perseroan harus memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kepedulian Perseroan terhadap aspek lingkungan hidup sejalan dengan amanah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Komitmen untuk mengelola lingkungan hidup, yang kemudian dibuktikan dengan aksi nyata dalam aktivitas usaha sehari-hari membawa Perseroan melalui tahun 2025 tanpa menerima keluhan atau pengaduan terkait kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas operasional. [F.16]

Walaupun tidak terdapat pengaduan terkait aspek sosial dan lingkungan hidup, Perseroan tetap menyediakan sarana pengaduan isu sosial dan lingkungan hidup terutama di lokasi proyek, yaitu pelaporan secara lisan maupun tertulis kepada Kepala PLTM di masing-masing proyek.

Biaya Lingkungan Hidup [F.4]

Environmental Costs [F.4]

Perseroan berkomitmen kuat untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari aktivitas operasional. Hal ini juga sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan, dan bagi para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan hidup yaitu rehabilitasi DAS, penyediaan infrastruktur penyimpanan limbah B3, kerjasama pengelolaan limbah, dan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala yang menghabiskan biaya sejumlah Rp 406 juta. Informasi lebih lanjut mengenai aktivitas pelestarian lingkungan hidup akan diungkapkan pada pembahasan “Dampak dan Usaha Konservasi di Wilayah Operasional”.

Biaya lingkungan hidup yang diungkapkan di sini merupakan biaya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Biaya lainnya terkait kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk mencegah timbulnya kerusakan, seperti pencemaran air, pencemaran udara, serta kebisingan menjadi kesatuan dengan biaya operasional sebagai bagian dari aktivitas bisnis sehari-hari.

The Company believes that the environment is one of the key factors that play a significant role in supporting its business sustainability. This belief drives the Company to ensure that its business activities do not have a negative impact on the environment. The Company's concern for environmental aspects aligns with the mandate of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.

The commitment to environmental management, which is then demonstrated through concrete actions in daily business activities, has allowed the Company to go through 2025 without receiving any complaints or reports related to environmental damage caused by its operational activities. [F.16]

Although there have been no complaints regarding social and environmental aspects, the Company continues to provide a grievance mechanism for social and environmental issues, especially at project sites through verbal submission or in writing to the Head of PLTM in each project.

The Company is strongly committed to ensuring environmental sustainability by minimizing the potential negative impacts of its operational activities. This commitment also contributes positively to environmental conservation and benefits stakeholders.

In 2025, the Company carried out environmental conservation activities i.e. watershed rehabilitation, provision of hazardous waste storage infrastructure, waste management cooperation, and periodic environmental quality monitoring with a total expenditure of Rp 406 millions. Further details regarding environmental safeguarding activities will be disclosed in the discussion on “Impact and Conservation Efforts on Operational Areas”.

The environmental costs disclosed here refer to expenses related to conservation efforts. Other costs associated with environmental management and monitoring activities such as preventing water pollution, air pollution, and noise are integrated into operational expenses as part of the Company's daily business activities.

Penggunaan Material Ramah Lingkungan [F.5] Utilization of Eco-Friendly Materials [F.5]

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, basis operasional Perseroan adalah PLTA dengan skema pemanfaatan aliran air sungai (*run-of-river hydropower*). Dalam menghasilkan energi listrik, emisi yang dihasilkan perseroan sangat minim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perseroan telah menggunakan material ramah lingkungan untuk menghasilkan produknya.

As previously explained, the Company's operational foundation is hydropower plants (PLTA) utilizing a run-of-river hydropower scheme. In generating electricity, the emissions produced by the Company are insignificant. Therefore, it can be concluded that the Company has used eco-friendly materials to produce its products.

Penggunaan dan Pengelolaan Energi Energy Management and Consumption

Aktivitas pengoperasian proyek menggunakan energi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang termasuk kategori energi tidak terbarukan. Energi listrik digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik, pencahayaan, maupun pendingin ruangan. Namun, mayoritas listrik yang digunakan untuk aktivitas operasional bersumber dari listrik yang diproduksi di *powerhouse*. Sementara itu, BBM berjenis diesel dan bensin digunakan untuk mengoperasikan genset (hanya jika diperlukan) serta kendaraan operasional.

The operation of hydropower plants utilizes electricity and fuel (BBM), which are categorized as non-renewable energy. Electricity is used to operate electronic equipment, lighting, and air conditioning. However, the majority of the electricity used for operational activities comes from the electricity produced at the powerhouse. Meanwhile, diesel and gasoline fuels are used to operate generators (only when needed) and operational vehicles.

Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan [F.6] Total and Intensity of Energy Consumption [F.6]

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Penggunaan Listrik Electricity Consumption	kWh	32.196	30.711	25.791
	GJ	115,91	110,56	92,85
Penggunaan Solar Diesel Consumption	Liter	15.762	11.171	9.020
	GJ	344,64	213,42	196,26
Penggunaan Bensin Gasoline Consumption	Liter	11.535	13.418	12.335
	GJ	347,48	378,38	371,58
Total Penggunaan BBM Total Fuel Consumption	GJ	692,12	591,80	567,84
Total Penggunaan Energi (Listrik + BBM) Total Energy Consumption (Electricity + Fuel)	GJ	808,02	702,36	660,68
Jumlah Produksi Total Production	GWh	151,8	94,45	97,61
Intensitas Penggunaan Energi Intensity of Energy Consumption	GJ/GWh	5,3229	7,4363	6,7686

Catatan | Notes:

- Konversi satuan konsumsi energi ke Giga Joules (GJ) mengacu pada IPCC Guideline 2006.
- Konsolidasi dengan anak usaha Perseroan
- The conversion of energy consumption units to Giga Joules (GJ) refers to the 2006 IPCC Guidelines.
- Consolidation with the Company's subsidiaries.



Dari tabel “Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan” terlihat bahwa penggunaan listrik pada tahun 2025 hanya berasal dari konsumsi energi secara langsung dengan total mencapai 32.196 kWh atau 115,91 GJ. [E-03]

From the table “Total and Intensity of Energy Consumption” can be seen that electricity consumption in 2025 only comes from direct energy consumption of 32.196 kWh or 115,91 GJ. [E-03]

Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan [F.7] Energy Efficiency Efforts and Achievements and Renewable Energy Consumption [F.7]

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Perseroan memerlukan 2 (dua) jenis energi utama, yaitu listrik dan BBM. Kedua jenis energi ini dikonsumsi untuk operasional proyek.

In carrying out its operational activities, the Company requires 2 (two) main types of energy, namely electricity and fuel. These two types of energy are consumed for the operation of the projects.

Energi listrik yang digunakan di *powerhouse*, termasuk area kantor di dalamnya, dipasok dari hasil produksi listrik Perseroan. BBM yang digunakan untuk kendaraan operasional berasal dari PT Pertamina. Produksi listrik dan BBM yang digunakan Perseroan berasal dari sumber energi tak terbarukan berbahan baku fosil sehingga Perseroan berkomitmen untuk lebih cermat dalam mengonsumsi energi, terutama BBM.

The electricity used in the *powerhouse*, including the office areas within it, is supplied from the Company's own electricity production. The fuel used for operational vehicles is sourced from PT Pertamina. The electricity production and fuel used by the Company come from non-renewable energy sources with fossil raw materials, so the Company is committed to being more careful in energy consumption, especially fuel.

Upaya Perseroan dalam mengurangi penggunaan listrik dilakukan terutama dengan memasang lampu LED yang lebih hemat energi dibandingkan dengan lampu biasa. Lampu-lampu dan alat elektronik dipadamkan pada saat tidak digunakan. Perseroan juga menghimbau karyawan untuk tidak menyalakan lampu pada saat sinar matahari masih terang,

The Company's efforts to reduce electricity consumption are mainly done by installing energy-efficient LED lights compared to conventional lights. Lights and electronic devices are turned off when not in use. The Company also encourages employees to avoid turning on lights while natural daylight is still sufficient.

Perseroan juga melakukan digitalisasi terhadap proses bisnis. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pemakaian kertas dan mengutamakan *online meeting* jika memungkinkan. Dengan demikian, limbah penggunaan kertas akan ditekan seminimal mungkin dan pemakaian BBM untuk kendaraan operasional menjadi lebih efisien.

The Company has also implemented digitalization across its business processes. This initiative is carried out to reduce paper usage and prioritize online meetings whenever possible. As a result, paper waste can be minimized, and fuel consumption for operational vehicles becomes more efficient.

Penggunaan Air [F.8] Water Consumption [F.8]

Perseroan menggunakan air untuk mendukung kebutuhan operasional proyek. Data yang diungkapkan merupakan jumlah penggunaan air di *site*, tempat proyek beroperasi, termasuk anak usaha. Secara total, data penggunaan air diambil dari tiga proyek yang beroperasi.

The Company uses water to support the operational needs of its projects. The disclosed data represents the amount of water consumption at the sites where the project operates, including its subsidiaries. In total, water consumption data is collected from three operating projects.

Sumber air yang digunakan untuk aktivitas operasional di proyek adalah air permukaan yang berasal dari sungai. Sesuai prinsip operasional pembangkit *run-of-river*, air permukaan yang telah digunakan untuk kegiatan operasional tidak berubah menjadi air limbah karena hanya dimanfaatkan energinya secara fisik tanpa ada penambahan material kimia. Perseroan tidak mengungkapkan penggunaan air di kantor pusat yang tidak berhubungan langsung dengan pengoperasian PLTA.

The water source used for operational activities at the project is surface water from rivers. In accordance with the operational principles of run-of-river hydropower plants, the surface water used for operations does not turn into wastewater, as it is only utilized for its physical energy without any chemical additives. The Company does not disclose water usage at the head office, as it is not directly related to HPP operations.

Jumlah air yang digunakan dan dikembalikan ke sumbernya Total of water consumption and returned to the water resource

Uraian Description	Satuan Unit	2025 [E-04]	2024	2023
Penggunaan Air Water Consumption	m ₃	273.569.090	158.692.132	153.416.712

Dapat dilihat bahwa penggunaan air Perseroan untuk pengoperasian seluruh proyek pada tahun 2025 berjumlah 273.569.090 m³ yang lebih tinggi 72% dari tahun 2024. Hal ini terjadi karena terdapat peningkatan kegiatan produksi khususnya pada Proyek Yaentu dibandingkan tahun sebelumnya.

It can be seen that the Company's water consumption for all project operations in 2025 amounted to 273.569.090 m³, which is 72% higher than in 2024. This occurred due to there was an increase in production activities, especially at the Yaentu Project, compared to the previous year.

Dampak dan Usaha Konservasi di Wilayah Operasional [F.9, F.10] Impact and Conservation Efforts on Operational Areas [F.9, F.10]

Seluruh proyek yang telah beroperasi berada di wilayah desa yang terletak di sejumlah daerah berbeda, yaitu di Jawa Barat dan Sulawesi Tengah. Mengingat sifat proyek aliran sungai langsung (*run-of-river hydropower*) dengan sifat alaminya yang memanfaatkan ketinggian alami dan aliran sungai, maka pengoperasian proyek milik Perseroan harus dilakukan di lokasi yang memiliki aliran sungai. Hal ini tentu saja berdampak pada keanekaragaman hayati di sekitar area operasional.

All operational projects are located in rural areas across different regions, namely West Java and Central Sulawesi. Given the natural characteristics of run-of-river hydropower, which utilizes natural elevation and river flow, the operation of the Company's projects must be conducted in locations with river flow. This, of course, has an impact on biodiversity in the surrounding operational areas.

Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan izin membangun proyek yang terus beroperasi hingga saat ini. Pemenuhan izin tersebut juga mencakup lingkungan hidup, salah satunya perihal keseimbangan ekosistem.

The Company has met all the necessary requirements to obtain permits for constructing and continuously operating its projects. These permits also include environmental regulations, one of which concerns ecosystem balance.



Seluruh proyek yang beroperasi tidak berada di area konservasi. Walaupun demikian, Perseroan tetap melakukan upaya pengelolaan keanekaragaman hayati karena pada masa konstruksi, jumlah vegetasi berkurang dan terdapat potensi fragmentasi habitat satwa dari aktivitas pembebasan lahan. Perseroan telah menanggulangi dampak tersebut dengan cara melakukan perencanaan revegetasi lahan di area proyek dan rehabilitasi DAS dan melakukan edukasi secara lisan maupun tertulis kepada karyawan dan masyarakat sekitar.

Khusus pada tahun 2025, upaya pelestarian terhadap lingkungan yang telah dilakukan Perseroan melalui anak usaha yang mengoperasikan proyek adalah rehabilitasi DAS, penyediaan infrastruktur penyimpanan limbah B3, kerjasama pengelolaan limbah, dan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala.

Pengelolaan Emisi Emission Management

Pengelolaan emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi salah satu komitmen Perseroan dalam mendukung pengendalian dampak lingkungan. Pembangkit tenaga listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) yang dikelola Perseroan menjadi salah satu solusi yang diperlukan dunia saat ini untuk mengatasi emisi GRK.

Proyek yang dikelola Perseroan menghasilkan listrik dengan emisi yang sangat minim. Walaupun demikian, Perseroan berkomitmen untuk menekan tingkat emisi yang dihasilkan hingga seminimal mungkin.

Dalam Laporan Keberlanjutan ini, emisi yang dilaporkan adalah emisi GRK langsung (cakupan 1) yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar minyak berupa bensin dan diesel untuk kegiatan pendukung dan emisi GRK (cakupan 2) tidak langsung yang bersumber dari penggunaan listrik. Emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan berupa massa karbon dioksida ekuivalen (CO₂eq). Perseroan tidak menghasilkan emisi lain karena tidak ada proses pembakaran dalam proses produksi.

All operational projects are not located in conservation areas. However, the Company continues to implement biodiversity management efforts, as vegetation loss and potential habitat fragmentation may occur during the construction phase due to land acquisition activities. To mitigate these impacts, the Company has planned land revegetation in project areas, undertaken watershed rehabilitation, and provided both verbal and written education to employees and local communities.

Particularly in 2025, the environmental preservation activities carried out by the Company through its subsidiaries in charge of project operations were watershed rehabilitation, provision of hazardous waste storage infrastructure, waste management cooperation, and periodic environmental quality monitoring.

Management of Greenhouse Gas (GHG) emissions is one of the Company's commitment in supporting environmental impact control. The renewable energy-based power plants managed by the Company serve as one of the essential solutions needed today to address GHG emissions.

The project managed by the Company generates electricity with very minimal emissions. However, the Company remains committed to reducing emission levels as much as possible.

In this Sustainability Report, the emissions reported include direct GHG emissions (scope 1) resulting from the use of fuel such as gasoline and diesel for supporting activities, as well as indirect GHG emissions (scope 2) from electricity consumption. The GHG emissions produced from the Company's operational activities are in the form of mass carbon dioxide equivalent (CO₂eq). The Company does not generate other emissions since there is no combustion process in production.

Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan [F.11] Total and Intensity of Generated Emission [F.11]

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Energi Bahan Bakar (Cakupan 1) Fuel (Scope 1)				
Total Penggunaan BBM Total Fuel Consumption	GJ	692,1	591,8	567,84
Emisi GRK yang Dihasilkan Generated GHG Emissions	ton CO ₂ eq	48,98	41,64	36,70
Energi Listrik (Cakupan 2) Fuel (Scope 2)				
Penggunaan Listrik Electricity Consumption	kWh	32.196	30.711	25.791
Emisi GRK yang Dihasilkan Generated GHG Emissions	ton CO ₂ eq	15,99	19,06	16,95
Intensitas Emisi yang Dihasilkan Intensity of Generated Emission				
Total Emisi GRK Total GHG Emission	ton CO ₂ eq	64,98	60,71	53,65
Total Produksi Total Production	GWh	151,80	94,45	97,61
Intensitas Emisi Emission Intensity	ton CO ₂ eq/GW	0,43	0,64	0,55

Catatan | Notes:

- Angka total penggunaan BBM dan Listrik diambil dari tabel "Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan" yang telah disampaikan sebelumnya.
- Perhitungan emisi GRK (Cakupan 1) langsung menggunakan standar IPCC-2006.
- Perhitungan emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung menggunakan standar average grid emission factor yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2019.
- The total figures for fuel and electricity consumption are taken from the table "Total and Intensity of Energy Consumption" which has been previously provided.
- The calculation of direct GHG emissions (Scope 1) follows the IPCC-2006 standard.
- The calculation of indirect GHG emissions (Scope 2) follows the average grid emission factor standard issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).

Dari tabel "Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan", dapat dilihat bahwa total emisi GRK yang dihasilkan Perseroan pada tahun 2025 lebih tinggi dari tahun 2024. Namun intensitas emisi dari setiap energi listrik yang dihasilkan proyek Perseroan (dalam MW) tercatat lebih rendah pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Penurunan intensitas emisi ini terjadi karena meningkatnya total produksi pada Tahun 2025.

Proses bisnis perseroan secara otomatis telah menghindari emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan kondisi *baseline*, yang mana tahun 2025 jumlah emisi yang dihindari yaitu 41.291,35 ton CO₂eq. [F.12]

From the table "Total and Intensity of Generated Emissions", it can be seen that the total GHG emissions produced by the Company in 2025 were higher than in 2024. This also resulted in the emission intensity per unit of electricity generated by the Company's projects (in MW) being recorded as lower in 2025 compared to 2024. This decrease in emissions intensity occurred due to an increase in total production in 2025.

The Company's business processes have automatically avoided greenhouse gas emissions compared to the baseline condition, with the amount of avoided emissions in 2024 reaching 41.291,35 tons of CO₂eq. [F.12]



Pengungkapan Emisi Berdasarkan Metrik ESG [E-01] Emission Disclosure Based on ESG Metrics [E-01]

Perseroan mengungkapkan emisi GRK yang dihasilkan secara konsolidasi mencakup entitas anak, sesuai dengan entitas yang termasuk dalam konsolidasi Laporan Keuangan Perseroan. Walaupun demikian, tidak semua entitas anak diikutsertakan karena masih ada yang belum beroperasi (masih dalam tahap pembangunan proyek).

Sesuai dengan pengungkapan pada tabel “Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan” sebelumnya, emisi GRK yang dihasilkan Perseroan pada tahun 2025 hanya mencakup:

- Emisi langsung (cakupan 1) dengan total 48,98 ton CO₂eq yang terdiri dari:
 - Pembakaran stasioner (peralatan tetap seperti generator set yang hanya digunakan saat diperlukan): 6,78 ton CO₂eq;
 - Pembakaran bergerak (kendaraan bermotor): 42,49 ton CO₂eq
- Emisi tidak langsung dari konsumsi listrik yang dibeli: 15,99 ton CO₂eq.

Perseroan tidak menghasilkan emisi langsung (cakupan 1) dan tidak langsung (cakupan 2) dari sumber emisi lainnya. Selain itu, karena keterbatasan data, Perseroan juga tidak dapat mengungkapkan emisi tidak langsung (cakupan 3).

Dengan demikian, Total emisi GRK (cakupan 1 & 2) yang dihasilkan Perseroan adalah 64,98 ton CO₂eq. Intensitas emisi GRK yang dihasilkan Perseroan bila dibandingkan dengan pendapatan adalah 0,19 ton CO₂eq/Rp. [E-02]

Limbah dan Efluen Waste and Effluent

Limbah yang dihasilkan Perseroan terdiri dari limbah B3 dan non-B3 yang berasal dari aktivitas pengoperasian proyek dan aktivitas kantor.

The Company discloses its consolidated GHG emissions, including subsidiaries, in accordance with the entities included in the Company's consolidated Financial Statements. However, not all subsidiaries are included as some are not yet operational (currently in the project development stage).

In accordance with the disclosure in the previous table “Total and Intensity of Generated Emission”, the Company's GHG emissions in 2025 only include:

- Direct emissions (scope 1) amounted to 48,98 tons CO₂eq, consisting of:
 - Stationary combustion (fixed equipment such as generator which used only when needed): 6.78 tons CO₂eq;
 - Mobile combustion (motorized vehicles): 42.49 tons CO₂eq.
- Indirect emissions from consumption of purchased electricity: 15.99 tons CO₂eq.

The Company does not generate direct (scope 1) or indirect (scope 2) emissions from other sources of emission. Furthermore, due to data limitations, the Company is also unable to disclose indirect emissions (scope 3).

Thus, the Company's total GHG emissions (scope 1 & 2) are 64.98 tons CO₂eq. The Company's GHG emissions intensity compared to revenue is 0.19 tons CO₂eq/Rp. [E-02]

The waste generated by the Company consists of hazardous (B3) and non-hazardous (non-B3) waste, originating from project operations and office activities.

Limbah yang Dihasilkan [F.13] Generated Waste [F.13]

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Limbah B3 Toxic and Hazardous Waste				
Oli Bekas Used Oil	Liter	1,690	1.000	283
Kain Majun Used Cloth	Kg	-	-	21
Accu Bekas Used Battery	Unit	4	2	3
Limbah Non B3 Non-Toxic and Hazardous Waste				
Limbah Non B3	m ₃	1.100	750	700

Perseroan mengelola limbah yang dihasilkan secara bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pencemaran tanah, air, dan udara, yang dapat memengaruhi kesehatan manusia serta mendukung mitigasi perubahan iklim. Pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan menyediakan tempat penyimpanan sementara yang dilengkapi dengan izin. Limbah yang terkumpul kemudian diserahkan dan dikelola oleh pihak ketiga yang berizin. Perseroan juga menyediakan tempat sampah untuk limbah non-B3 sebelum kemudian dikumpulkan dan diserahkan ke pihak ketiga untuk dikelola. [F.14]

Perseroan selalu menjaga proses pengelolaan limbah hasil aktivitas operasional. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat tumpahan yang terjadi pada proses pengelolaan limbah. Sebagai bagian dari mitigasi, Perseroan juga telah memberikan pelatihan kepada karyawan yang bertanggung jawab untuk mengantisipasi kondisi darurat. [F.15]

The Company manages its waste in a responsible manner to minimize negative impacts on the environment, including soil, water, and air pollution, which may affect human health and support climate change mitigation. The B3 waste management is done by providing a temporary storage facility that has been licensed. The collected waste is then handed over and managed by a licensed third party. The Company also provides waste bins for non-B3 waste before it is collected and handed over to a third party for processing. [F.14]

The Company consistently ensures proper waste management from operational activities. Throughout 2025, there were no spills during the waste management process. As part of its mitigation efforts, the Company has also provided training to employees responsible for handling emergency situations. [F.15]



Kinerja Sosial Social Performance

Keberhasilan Perseroan dalam menjalankan operasional yang berkelanjutan tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap karyawan, masyarakat, dan pelanggan. Perseroan memastikan kinerja keberlanjutan yang berkesinambungan dengan mengadopsi pendekatan terintegrasi di berbagai bidang, mencakup pengelolaan sumber daya manusia, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pengembangan masyarakat, serta tanggung jawab terhadap produk dan layanan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, Perseroan berkomitmen untuk menciptakan nilai ekonomi dan memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, sejalan dengan tujuan keberlanjutan global.

The Company's success in carrying out sustainable operations is inseparable from its responsibilities toward employees, communities, and customers. The Company ensures continuous sustainability performance by adopting an integrated approach across various areas, including human resource management, occupational health and safety (OHS), community development, and responsibility for products and services. Through this integrated approach, the Company is committed to creating economic value and delivering positive impacts to the surrounding communities and environment, in line with global sustainability objectives.

Pengelolaan dan Perhatian Terhadap Karyawan Managing and Caring for Our Employees

Perseroan mengelola para karyawan dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam regulasi internal yang terdapat dalam Surat Keputusan (SK) Direksi terkait Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran Dasar, dan Peraturan Perseroan lainnya.

The Company manages its employees by referring to Law No. 11 of 2020 on Job Creation. This law is then translated into internal regulations outlined in the Board of Directors' Decree regarding the Human Resource (HR) Management Policy, the Articles of Association, and other Company regulations.

Kebijakan pengelolaan karyawan menjadi pedoman utama dalam mengelola sumber daya manusia. Kebijakan ini mendukung upaya Perseroan untuk memastikan keberhasilan usaha untuk mengelola karyawan mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, proses rekrutmen yang transparan dan berkeadilan, hingga pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan program peningkatan kapabilitas yang berkesinambungan.

The employee management policy serves as the main guideline in managing human resources. This policy supports the Company's efforts to ensure business success by managing employees from workforce planning and a transparent, fair recruitment process to competency development through training and continuous capability-building programs.

Perekrutan dan Perputaran Karyawan Employee Recruitment and Turnover

Perseroan menilai kebutuhan akan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja mencakup beragam faktor penting, antara lain ketersediaan anggaran, strategi bisnis dan pengembangan usaha. Sejumlah aspek tersebut membantu Perseroan melakukan perencanaan tenaga kerja dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan organisasi di masa mendatang.

The Company assesses the need for workforce capability and capacity by considering various important factors, including budget availability, business strategy, and the Company's business development. These aspects enable the Company to carry out workforce planning accurately and in alignment with the organization's future needs.

Dalam memenuhi kebutuhan karyawan, Perseroan menerapkan strategi rekrutmen yang mencakup *fresh graduate* maupun tenaga profesional berpengalaman. Perseroan juga memberikan perhatian pada pengembangan karier internal melalui mekanisme promosi dan mutasi.

To meet its manpower needs, the Company implements a recruitment strategy that targets both fresh graduates and experienced professionals. The Company also places strong emphasis on internal career development through promotion and job rotation mechanisms.

Dalam melakukan perekrutan, Perseroan memiliki kebijakan tegas untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur atau menerapkan praktik kerja paksa. Hal ini sesuai dengan hukum perburuan nasional dan tercantum dalam Kebijakan Perusahaan Terkait Dengan Aspek Sosial dan Lingkungan yang berlaku bagi Perseroan dan seluruh entitas anak. [\[F.19\]](#) [\[S-10\]](#)

Proses rekrutmen juga berkaitan dengan situasi perputaran (*turnover*) karyawan yang terjadi sepanjang tahun 2025. Perputaran karyawan terjadi karena berbagai alasan termasuk masuknya pensiun, pengunduran diri, maupun penambahan personil baru.

Pada tahun 2025, Perseroan tidak merekrut karyawan baru. Jumlah karyawan yang meninggalkan Perseroan selama tahun 2025 adalah 3 orang atau setara dengan 4% dari jumlah keseluruhan karyawan pada tahun 2025. [\[S-03\]](#)

When recruiting, the Company has a strict set of rules to not employ underage employees or even apply a practice of forced labor. This is in accordance with national labor laws and is stated in the Company Policy Related to Social and Environmental Aspects, which applies to the Company and all its subsidiaries. [\[F.19\]](#) [\[S-10\]](#)

The recruitment process also related to the employee turnover that occurred throughout 2025. Employee turnover occurred for various reasons, including retirements, resignations, and the addition of new personnel.

In 2025, the Company did not recruit new employee. Employees who left Company during 2025 amounted to 3 people or 4% of the total employees in 2025. [\[S-03\]](#)

Perputaran Karyawan Employee Turnover

Uraian Description	2025	2024
Karyawan Baru New Employees	0	1
Karyawan Keluar Departing Employees		
Pensiun Alami Retired	0	0
Meninggal Dunia Deceased	0	1
Mengundurkan Diri Resigned	3	5
Diberhentikan Terminated	0	0
Jumlah Total	3	6
Perputaran Karyawan Turnover Percentage	4%	8%
Alasan Mengundurkan Diri Reasons for Resignation		
Atas Permintaan Sendiri Voluntary	2	4
Tidak Berkinerja Baik Poor Performance	0	0
Kontrak Berakhir Contract Ended	1	1



Tingkat turnover karyawan selama tiga tahun terakhir dijabarkan dalam tabel berikut:

Employee turnover level during the past three years:

Tahun Year	Perputaran Karyawan Employee Turnover
2025	4%
2024	8%
2023	5%

Tingkat perputaran karyawan Perseroan selama tiga tahun terakhir (2023–2025) terbilang rendah karena selalu berada di bawah 10%. Pencapaian ini cukup membuktikan bahwa Perseroan adil dalam memperlakukan para karyawan, memberikan tingkat remunerasi yang kompetitif, dan menjaga keharmonisan dalam suasana kerja.

The employee turnover rate of the Company over the last three years (2023–2025) is considered low, always remaining below 10%. This achievement demonstrates that the Company treats employees fairly, offers competitive remuneration, and maintains harmony in the work environment.

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [F.18] Equal Working Opportunities [F.18]

Semua kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di Perseroan, karena persyaratannya terutama didasarkan pada kualifikasi profesional. Hal ini juga berlaku bagi para karyawan, terutama terkait promosi. Dalam melakukan penilaian, Perseroan memastikan prosesnya dilakukan secara obyektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, pengalaman dan profesionalisme individu.

All candidates have equal opportunities to work at the Company, as the requirements are primarily based on professional qualifications. This also applies to all employees, especially in terms of promotion. When making assessment, the Company ensures the process is carried out objectively and transparently based on individual's qualifications, competence, experience and professionalism.

Baik karyawan laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang setara, namun beberapa posisi di site mayoritas ditempati oleh karyawan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh sifat pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik dan kemauan bekerja pada lingkungan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Selain itu, minat bekerja di lapangan juga lebih banyak datang dari kandidat karyawan laki-laki.

Both male and female employees have the same opportunities, however, some positions in the site are mostly filled by male employees. This is due to the nature of the work which requires physical strength and a willingness to work in an environment with a high level of mobility. In addition, interest in working at site also comes more from male candidates.

Gambaran mengenai komposisi gender karyawan telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan.

The overview of the employees' gender composition has been presented in the Company Profile Chapter.

Komitmen terhadap kesetaraan kesempatan bekerja juga tercermin dalam keberpihakan Perseroan terhadap masyarakat lokal. Perseroan secara aktif memberikan peluang kerja bagi warga setempat yang tinggal di sekitar area operasional proyek. Upaya ini tidak hanya dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi Perseroan, antara lain efisiensi jarak tempuh, efektivitas waktu kerja, serta penguatan hubungan dengan komunitas sekitar.

The Company's commitment to equal employment opportunities is also reflected in its support for the local community. The Company actively provides job opportunities for local residents living around the project's operational area. This initiative is not only intended to support the economic growth of the local community but also offers strategic benefits for the Company, including reduced travel distance, improved work-time efficiency, and strengthened relationships with surrounding communities.

Remunerasi dan Manfaat Bagi Karyawan Remuneration and Benefits for Employees

Perseroan menyadari bahwa paket remunerasi, khususnya upah, merupakan elemen penting yang berdampak secara langsung terhadap kualitas kehidupan karyawan. Remunerasi yang memadai akan menjaga stabilitas ekonomi karyawan dan berkontribusi pada peningkatan motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas secara keseluruhan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh level karyawan, termasuk di jenjang *entry level* hingga *upper management level*.

Perseroan membayarkan upah bagi karyawan pada golongan terendah sesuai atau di atas Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Pada tahun 2025, standar upah untuk karyawan golongan terendah di kantor pusat (Jakarta) memiliki rasio 1:1 atau setara dengan UMP Jakarta pada periode tersebut. Konsistensi kebijakan ini juga diterapkan di seluruh entitas anak. Sebagai contoh, di anak usaha, PT Arkora Sulawesi Selatan, yang berlokasi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, karyawan golongan terendah menerima upah dengan rasio 1:1 sesuai dengan UMK Kabupaten Poso. Hal ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar karyawan secara merata di seluruh wilayah operasional. [F.20]

Selain upah pokok, Perseroan juga telah merancang paket remunerasi yang komprehensif sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan karyawan. Terdapat perbedaan paket (mencakup fasilitas) antara karyawan tetap dan kontrak. Perbedaan ini telah ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menjadi sarana bagi Perseroan untuk memberikan perhatian lebih bagi karyawan tetap dan memotivasi karyawan kontrak.

Informasi mengenai paket remunerasi yang berlaku untuk para karyawan di Perseroan adalah sebagai berikut:

The Company recognizes that the remuneration package, particularly wages, is an essential element that directly affects employees' quality of life. Fair remuneration package helps maintain employees' economic stability and contributes to higher motivation, job satisfaction, and overall productivity. This policy applies to all employee levels, from entry level to upper management.

The Company provides wages for the lowest employee grade that are equal to or above the Regional Minimum Wage (UMR) or District/City Minimum Wage (UMK) set by the respective local governments. In 2025, the minimum wage for the lowest employee grade at the head office (Jakarta) has a ratio 1:1 which is equal to the applicable Jakarta Minimum Wage for that period. This policy is consistently applied across all subsidiaries as well. For example, at the subsidiary, PT Arkora Sulawesi Selatan, located in Poso Regency, Central Sulawesi, the lowest employee grade received wages with a ratio of 1:1 in accordance with the Poso Regency Minimum Wage. This demonstrates the Company's commitment to ensuring the fulfilment of basic employee rights across all operational areas. [F.20]

In addition to basic wages, the Company has also designed a comprehensive remuneration package to support employee welfare. There are differences in the package (including facilities) provided to permanent and contract employees. These differences are determined in accordance with prevailing regulations and serve as a means for the Company to provide additional support to permanent employees while also motivating contract employees.

The information regarding the remuneration package applicable to employees of the Company is as follows:



Paket Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan Employee Remuneration and Welfare Package

Uraian Description	Tetap Permanent	Kontrak Contract
Perawatan Pengobatan Treatment	✓	✓
Akomodasi & Transportasi Accommodation & Transportation	✓	✓
Kematian & Perhelatan Deaths & Events	✓	✓
Pensiun/Pesangon Pensions/Severance	✓	x
Cuti Tahunan Annual leave	✓	✓
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Social Security Service (BPJS) Healthcare and Employment	✓	✓
Tunjangan Hari Raya (THR) Religious Holiday Allowance	✓	✓
Kontrak Berakhir Contract Ended	✓	✓

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman [F.21] Safe and Decent Working Environment [F.21]

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak, aman, dan mendukung produktivitas bagi seluruh karyawan. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan berbagai fasilitas pendukung, seperti toilet yang bersih dan terawat, ruang makan yang nyaman, tempat ibadah yang memadai untuk seluruh karyawan, serta area parkir yang aman.

Selain fasilitas umum, Perseroan juga menaruh perhatian khusus pada aspek keselamatan mengingat karakteristik usaha yang dijalankan. Penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi hal yang sangat krusial. Oleh karena itu, program K3 disusun secara komprehensif dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin keselamatan karyawan, terutama mereka yang bekerja langsung di fasilitas operasional di site. Hal ini sesuai dengan Kebijakan Perusahaan Terkait Dengan Aspek Sosial dan Lingkungan yang berlaku bagi Perseroan dan seluruh entitas anak. [S-11]

The Company remains committed to creating a proper, safe, and productivity-supporting work environment for all employees. This commitment is reflected in the provision of various supporting facilities, such as clean and well-maintained restrooms, comfortable dining areas, adequate prayer facilities for all employees, and secure parking areas.

In addition to general facilities, the Company is very concerned about safety due to the nature of its business operations. The implementation of Occupational Health and Safety (OHS) standards is therefore highly crucial. For this reason, OHS programs are designed comprehensively and carried out consistently to ensure the safety of employees, especially those working directly at operational facilities on site. This is in accordance with the Company Policy Related to Social and Environmental Aspects, which applies to the Company and all its subsidiaries. [S-11]

Pada tahun 2025, program K3 yang telah dilakukan Perseroan dan telah berjalan secara konsisten dari tahun-tahun sebelumnya adalah:

1. Melakukan identifikasi risiko K3;
2. Menyediakan sarana dan prasarana keselamatan kerja, terutama di PLTA;
3. Menyediakan alat pemadam api;
4. Melakukan inspeksi rutin terkait kondisi tempat kerja termasuk alat pelindung diri (APD);
5. Pertemuan (*meeting*) berkala antara *site* dengan kantor pusat;
6. Menyediakan asuransi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Hasil pelaksanaan program K3 sepanjang tahun 2025 adalah nihil kecelakaan kerja. [S-06]

Perseroan juga menjalankan sejumlah program secara konsisten untuk memastikan implementasi K3 berjalan efektif. Program-program tersebut mencakup pelatihan berbasis kompetensi, terutama bagi personil keamanan (*security*) dan personil yang memiliki tanggung jawab khusus di bidang K3.

Menegakkan HAM dan Melindungi Karyawan dari Diskriminasi Upholding Human Rights and Protecting Employees from Discrimination

Selain memastikan tempat kerja yang aman dan melindungi karyawan dari risiko inheren operasional proyek, Perseroan juga menegakkan HAM dan melindungi karyawan dari tindakan diskriminasi.

Selama tahun 2025, tidak ada laporan diskriminasi yang diterima, mencerminkan komitmen kuat Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan inklusif. Situasi yang kondusif mendukung karyawan dalam mengembangkan potensinya secara optimal. [S-07]

Perseroan berkomitmen untuk memberikan perlakuan yang adil bagi karyawan, menolak segala bentuk diskriminasi, serta menciptakan kondisi kerja yang aman. Hal ini tercantum dalam Kebijakan Perusahaan Terkait dengan Aspek Sosial dan Lingkungan. Kebijakan tersebut berlaku di Perseroan dan untuk seluruh entitas anak. [S-08]

In 2025, the OHS programs implemented by the Company, which have been consistently running from previous years, include:

1. Identifying OHS risks;
2. Providing work safety facilities, especially at the hydropower plants;
3. Providing fire extinguishers;
4. Conducting routine inspections of the workplace conditions, including personal protective equipment (PPE);
5. Holding regular meetings between the site and the head office;
6. Providing BPJS Health and Employment insurance.

As a result of the OHS program implementation throughout 2024, there were no work-related accidents. [S-06]

The Company also consistently runs several programs to ensure the effective implementation of OHS. These programs include competency-based training, especially for security personnel and those with specific responsibilities in the OHS field.

In addition to ensuring a safe workplace and protecting employees from operational risks inherent to the project, the Company also upholds human rights and protects employees from discriminatory practices.

Throughout 2025, no discrimination reports were received, reflecting the Company's strong commitment to creating a conducive and inclusive work environment. Such a positive environment supports employees in developing their potential optimally. [S-07]

The Company is committed to providing fair treatment for all employees, rejecting any form of discrimination, and creating safe working conditions. This commitment is stated in the Company Policy Related to Social and Environmental Aspects, which applies both to the Company and all its subsidiaries. [S-08]



Perseroan juga memiliki kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur mengenai penghormatan, penegakkan, dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini juga tercantum dalam Kebijakan Perusahaan Terkait Dengan Aspek Sosial dan Lingkungan yang berlaku di Perseroan dan untuk seluruh entitas anak. [S-09]

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan [F.22] Employee Training and Development [F.22]

Perseroan meyakini bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan usaha dan mempertahankan daya saing di industri. Oleh karena itu, strategi pengembangan kompetensi karyawan dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis.

Rata-rata jam pelatihan karyawan pada tahun 2025 mencapai 17 jam yang diselenggarakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur ("Persero") sebagai lembaga pembiayaan proyek Perseroan. Terdapat 2 karyawan yang berpartisipasi atau 3% dari total keseluruhan karyawan yang dimiliki Perseroan tahun 2025. [S-05]

The Company also has a Human Rights (HAM) policy that regulates the respect, enforcement, and protection of human rights. This is likewise outlined in the Company Policy Related to Social and Environmental Aspects, applicable to the Company and all its subsidiaries. [S-09]

The Company believes that improving the quality of its human resources is one of the key factors in ensuring business sustainability and maintaining competitiveness in the industry. Therefore, the employee competency development strategy is designed to align with the business needs.

In average, the employee training hour in 2025 reached 17 hour, organized by PT Sarana Multi Infrastruktur ("Persero") as the Company's project financing institution. There were 2 employees participated or 3% from the total employees the Company had in 2025. [S-05]

Program Pelatihan dan Pengembangan Karyawan Employee Training and Development Programs

Tanggal Date	Program Pelatihan Training Program	Jumlah Peserta Total Participants	Penyelenggara Organizers
12 Juni 2025	Capacity Building Pengelolaan Temuan Benda Tak Terduga Berupa Warisan Budaya	1	PT Sarana Multi Infrastruktur ("Persero")
30 Juni - 1 Juli 2025	Workshop Inventarisasi dan Peluang Monetisasi Reduksi Emisi GRK	1	PT Sarana Multi Infrastruktur ("Persero")

Pengembangan Masyarakat Community Development

Aktivitas operasional dan akses jalan menuju proyek berada di wilayah yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, sehingga keberadaan Perseroan memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sekitar.

Perseroan berupaya untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan masyarakat dengan memberikan dampak positif yang luas melalui penerapan strategi pengembangan masyarakat. Upaya berkelanjutan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan yang kuat sekaligus menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Melalui pendekatan ini, Perseroan berupaya membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan yang inklusif dan berjangka panjang, serta memberikan kontribusi langsung bagi komunitas di sekitar wilayah operasional.

The operational activities and access roads to the hydropower plant are located near residential areas, which makes the Company aware of its close connection to the surrounding communities.

The Company strives to support communities in achieving sustainable growth by delivering broad positive impacts through the implementation of community development strategies. Continuous efforts are made to drive robust development while generating direct benefits for the community, in alignment with the values of the Sustainable Development Goals (SDGs). Through this approach, the Company seeks to establish a solid foundation for inclusive and long-term growth, contributing directly to the well-being of communities surrounding the operational areas.

Dalam praktiknya, Perseroan merancang strategi untuk memitigasi dampak potensial maupun aktual aspek sosial yang timbul dari kegiatan operasionalnya. Perseroan juga secara aktif terlibat dengan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengembangkan program-program sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dampak Operasional Bagi Masyarakat [F.23] Operational Impact on the Community [F.23]

Perseroan berupaya untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial. Program-program ini mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, pelestarian budaya, hingga perlindungan lingkungan, yang keseluruhannya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Perseroan telah melaksanakan program-program sosial tersebut secara berkelanjutan sejak beroperasi hingga akhir tahun pelaporan di 2025. Dampak positif yang dihasilkan Perseroan selama beroperasi, termasuk di tahun 2025, melalui aktivitas operasional bertanggung jawab dan program-program sosial dan lingkungan mampu melindungi Perseroan terhadap risiko sosial dari masyarakat sekitar. Khususnya selama tahun 2025, tidak terdapat keluhan dari operasional PLTA yang berasal dari masyarakat. [F.24]

Secara khusus, terkait perkembangan ekonomi lokal, Perseroan merekrut tenaga kerja lokal untuk mendukung operasional proyek. Upaya ini sukses membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal secara jangka panjang.

Di sisi lingkungan, pada tahun-tahun sebelumnya Perseroan melaksanakan kegiatan penanaman pohon, pembersihan area sekitar sungai, serta edukasi lingkungan untuk membuat masyarakat memahami kehadiran proyek di area tempat tinggal mereka. Lebih jauh, kehadiran energi listrik yang dihasilkan Perseroan memberikan manfaat penting bagi masyarakat. Sebagai energi yang tergolong nihil emisi (*zero emission*), listrik yang dihasilkan mendorong penyediaan energi bersih dan berkontribusi positif terhadap upaya pengurangan emisi karbon dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. [F.28]

In practice, the Company designs strategies to mitigate both potential and actual social impacts arising from its operations. The Company also actively engages with local communities in identifying and developing social programs that align with their needs.

The Company strives to build harmonious relationships with the community through various social initiatives. These programs cover education, health, local economic development, cultural preservation, and environmental protection, all of which are aimed at improving the quality of life of the surrounding communities.

The Company has implemented these social programs consistently from the start of its operations up to the end of the reporting year in 2025. The positive impacts generated throughout its operations, including in 2025, through responsible operational practices and social and environmental programs, have helped protected the Company from potential social risks originating from nearby communities. Particularly throughout 2025, there were no complaints from the community related to the hydropower plant's operations. [F.24]

Specifically, regarding local economic development, the Company employs local workers to support project operations. This effort has successfully contributed to improving community welfare and strengthening long-term local economic resilience.

On the environmental side, in previous years, the Company has carried out activities such as tree planting, riverbank clean-ups, and environmental education to help the community better understand the presence of the project in their area. Furthermore, the electricity generated by the Company provides substantial benefits to the community. As a zero-emission energy source, the electricity supports the provision of clean energy and contributes positively in carbon emission reduction and improvements in environmental quality. [F.28]



Kegiatan Tanggung Jawab Sosial [F.25] [S-12] Social Responsibility Activities [F.25] [S-12]

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan berbagai program sosial terutama untuk masyarakat sekitar wilayah operasional proyek. Secara total, program-program tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp 234.400.000

Throughout 2025, the Company has conducted various social programs, particularly for the communities around the hydropower plant operational areas. In total, for these programs, the Company spent Rp 234,400.000

Program Sosial Tahun 2025 Social Programs in 2025

Uraian Description	Biaya (Rp) Cost
Peningkatan infrastruktur lokal	154.500.000
Dukungan peringatan hari besar nasional dan keagamaan	67.500.000
Dukungan kegiatan komunitas dan festival lokal	8.400.000
Penyaluran bantuan tanggap darurat bencana	4.000.000

Tanggung Jawab Terhadap Produk dan Layanan Responsibility for Products and Services

Secara prinsip, pelanggan Perseroan adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau "PLN". Walaupun demikian, listrik yang dihasilkan Perseroan dari proyek menjangkau masyarakat luas dan menjadikan mereka sebagai bagian dari pelanggan Perseroan secara tidak langsung.

In principle, the Company's customer is PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) or "PLN". However, the electricity generated by the Company's projects ultimately reaches the wider community, making them indirect beneficiaries of the Company's services.

PLN merupakan pelanggan yang tergolong sebagai salah satu pemangku kepentingan utama. Keberadaan mereka sangat menentukan perkembangan dan keberlangsungan Perseroan. Oleh karena posisi pelanggan yang sedemikian penting, Perseroan berupaya secara maksimal untuk memberikan layanan produk dan jasa terbaik sesuai kontrak untuk memastikan kepuasan pelanggan.

PLN is considered key stakeholders. Their presence significantly influences the Company's growth and sustainability. Given the importance of these customers, the Company strives to provide the best possible products and services in as agreed in the contract to ensure customer satisfaction.

Komitmen Memberikan Layanan yang Setara [F.17] Commitment to Provide Equal Services [F.17]

Perseroan menjunjung tinggi prinsip pelayanan terbaik dalam melayani PLN dan memastikan PLN mendapatkan informasi penuh secara transparan, sesuai dengan perjanjian kerja dalam kontrak. Listrik yang dihasilkan dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar kualitas PLN.

The Company upholds the principle of providing the best service to PLN and ensures that PLN receives complete and transparent information in accordance with the work agreement stated in the contract. The electricity produced is designed to meet the diverse needs of the community and comply with PLN's quality standards.

Perseroan telah memenuhi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang diwajibkan bagi *Independent Power Producer* (IPP), dan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam operasional pembangkit. Sertifikasi tersebut selalu diperbarui dan memberikan kepastian bahwa listrik yang dihasilkan telah memenuhi standar dan senantiasa dikelola dengan baik.

The Company has fulfilled the required Certification of Competence in Electrical Engineering for Independent Power Producers (IPP), including for personnel directly involved in power plant operations. This certification is regularly renewed, providing assurance that the generated electricity meets the applicable standard and is consistently managed with proper oversight.

Kualitas dan Keamanan Pengoperasian Proyek The Quality and Safety of HPP Operation

Inovasi dan pengembangan operasional proyek milik Perseroan tergolong produk yang sesuai dengan aspek keberlanjutan. Fokus utama Perseroan adalah untuk memastikan proyek berjalan dengan baik, secara optimal memenuhi kontrak yang telah terjamin dengan PLN, untuk menghasilkan tenaga listrik yang dapat didistribusikan ke masyarakat. [F.26]

The innovation and operational development of the Company's projects are considered products that align with sustainability aspects. The Company's main focus is to ensure that the projects operate effectively, optimally fulfilling the contracts with PLN, to generate electricity that can be distributed to the public. [F.26]

Perseroan memiliki tanggung jawab untuk mengoperasikan proyek secara aman. Pengoperasian proyek senantiasa dimonitor sesuai dengan standar yang berlaku dan sudah diakui oleh PLN. Kemampuan Perseroan sehingga mampu mendapatkan kontrak dari PLN memperlihatkan salah satu bukti dari keamanan proyek yang dimiliki Perseroan. [F.27]

The Company is responsible for operating the hydropower plants safely. The operation of the hydropower plant is continuously monitored according to applicable standards, which have been recognized by PLN. The Company's ability to secure contracts with PLN demonstrates one of the proofs of the safety of its hydropower plants. [F.27]

Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dengan PLN dan selama kontrak berjalan hingga akhir tahun 2025 tidak terdapat permasalahan yang menyebabkan kontrak harus terputus. Selain itu, mengingat pelanggan utama Perseroan hanyalah PLN, maka tidak dilakukan survei tingkat kepuasan pelanggan. Perseroan senantiasa berkomunikasi secara rutin dengan PLN untuk memastikan pasokan listrik lancar, tanpa kendala. [F.29, F.30]

The Company has long-term contracts with PLN, and throughout the contract period until the end of 2025, there were no issues that would cause the contract to be terminated. Furthermore, since the Company's main customer is PLN, customer satisfaction surveys are not conducted. The Company regularly communicates with PLN to ensure the smooth supply of electricity without any issues. [F.29, F.30]



Lembar Umpan Balik [G.2] Feedback Form [G.2]

Kami memohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk mengisi lembar umpan balik berikut untuk peningkatan Laporan Keberlanjutan ke depannya.

We request the willingness of stakeholders to fill in this feedback form for future improvement of this Sustainability Report.

Pertanyaan Question	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree
Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi. This report has provided useful information regarding economic performance.		
Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang. The data and information disclosed are easy to understand, complete, transparent, and balanced.		
Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan. The data and information presented are useful in decision making.		
Laporan ini menarik dan mudah dibaca. The report is interesting and easy to read.		

* Berikan centang pada pernyataan yang Anda anggap paling tepat untuk setiap pertanyaan.
* Check the statement that you consider most appropriate for each question.

Mohon berikan nilai mengenai aspek yang terdapat dalam Laporan Keberlanjutan ini:

- 1: paling penting
- 2: penting
- 3: tidak penting
- 4: sangat tidak penting

Please provide a rating for the aspects in this Sustainability Report:

- 1: most important
- 2: important
- 3: not important
- 4: very unimportant

Kinerja Ekonomi Economic Performance	[]	Kode Etik Code of Conduct	[]
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health & Safety	[]	Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction	[]
Produk dan Layanan Products & Services	[]	Ketenagakerjaan Employment	[]
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social & Community Development	[]	Penggunaan Energi Energy Usage	[]

Mohon berikan komentar/saran/usulan bagi Laporan Keberlanjutan ini.
Please provide comments/suggestions for this Sustainability Report.

Profil Profile

Nama (bila berkenan)
Name (if inclined)

Institusi/Perusahaan
Institution/Company

Surel
E-mail

Telepon/HP
Phone/Mobile

Golongan Pemangku Kepentingan (berikan tanda ✓)
Category of Stakeholders (put ✓ in the box)

☐ Pemerintah
Government

☐ Pekerja
Employee

☐ Perusahaan
Company

☐ Pemegang Saham
Shareholders

☐ Penyedia Barang dan Jasa
Goods and Services Provider

☐ Masyarakat Sekitar
Local Community

☐ Lembaga Pendidikan
Educational Institution

☐ Industri
Industry

☐ Media
Media

☐ Lembaga Swadaya Masyarakat
Non-Governmental Organization

☐ Lain-Lain, yaitu:
Others, specifically:

Mohon kirimkan kembali Lembar Umpan Balik ini kepada:
Please send this Feedback Form to:

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Ricky Hartono

Treasury Tower Level 9 Unit G-H

District 8 SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Phone +62 (021) 50333144

E-mail: corporate.secretary@arkora.com



Indeks Isi POJK No.51/OJK.03/2017 [G.4]

POJK No.51/OJK.03/2017 Content Index [G.4]

Indikator Indicator	Penjelasan Description	Halaman Page
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Explanation on Sustainability Strategy	209
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Highlights		
B.1	Aspek Ekonomi Economic Aspect	211
B.2	Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspect	212
B.3	Aspek Sosial Social Aspect	214
Profil Perusahaan Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission, and Value of Sustainability	54,55
C.2	Alamat Perusahaan Company Address	48
C.3	Skala Perusahaan Business Scale	49
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services and Business Activities	56
C.5	Keanggotaan Pada Asosiasi Member of Association	63
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan Significant Changes in the Issuer and Public Company	63
Penjelasan Direksi Directors Statement		
D.1	Penjelasan Direksi Statement from the Board of Directors	34
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Parties Responsible for the Implementation of Sustainable Finance	146
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Competency Development on Sustainable Finance	154
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment on Sustainable Finance Implementation	186
E.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	215
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Issues of Sustainable Financial Implementation	216

Indikator Indicator	Penjelasan Description	Halaman Page
Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Building a Culture of Sustainability	217
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Performance Targets and Production, Portfolios, Financial Targets, or Investment, Revenue and Profit and Loss	116
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing/Investment Targets in Financial Instruments or Projects in Line with the Implementation of Sustainable Finance	116
Kinerja Lingkungan Environmental Performance		
Aspek Umum General		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Costs	218
Aspek Material Material Aspects		
F.5	Penggunaan Material Yang Ramah Lingkungan The Use of Environmentally Friendly Materials	219
Aspek Energi Energy Aspects		
F.6	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan The Use of Environmentally Friendly Materials	219
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan The Efforts and Achievements of Energy Efficiency Including the Use of Renewable Energy Sources	220
Aspek Air Water Aspects		
F.8	Penggunaan Air Water Usage	220
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspects		
F.9	Dampak Dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impacts of Operational Areas Located Near or Within Conservation Areas or Areas with Biodiversity Value	221
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Efforts	221



Indikator Indicator	Penjelasan Description	Halaman Page
Aspek Emisi Emission Aspects		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya The Number and Intensity of Emissions Produced by Type	223
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan The Efforts and Achievement of Emission Reductions Undertaken	223
Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluents Aspect		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis The Amount of Waste and Effluent Generated by Type	225
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management Mechanism	225
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada) Spill that Occurred (if any)	225
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Environmental Complaint Aspect		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima Dan Diselesaikan The Number and Material Environmental Complaints Received and Resolved	218
Kinerja Sosial Social Performance		
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment to Providing Equal Level of Products and/or Services to Consumers	234
Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspects		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equality of Employment Opportunities	228
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	227
F.20	Upah Minimum Regional The Minimum Wage	229
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Safe and Decent Working Environment	230
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Training and Competency Development for Employees	232
Aspek Masyarakat Community Aspects		
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Operational Impacts to Local Communities	233
F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaints	233
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Social and Environmental Responsibility Activities	234

Indikator Indicator	Penjelasan Description	Halaman Page
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility on the development of Sustainable Finance products and/or services		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Innovation and development of Sustainable Finance products and/or services	235
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan Products/Services Whose Safety for Customers have Been Evaluated	235
F.28	Dampak Produk/Jasa Impact of Products/Services	233
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali The Number of Products Recalled	235
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey on Sustainable Finance Products and/or Services	235
Lain-lain Others		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) Written Verification from an Independent Party (if any)	206
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Form	236
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Response to the Previous Year's Sustainability Report's Feedback	206
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 List of Disclosures in Accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017	238



Keselarasan Laporan Keberlanjutan Dengan Metrik ESG

Alignment of the Sustainability Report with ESG Metrics

Kinerja Performance	Kode Code	Nama Metrik Matrix Name	Halaman Page
Lingkungan Environment	E-01	Laporan Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emissions Report	224
	E-02	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emission Intensity	224
	E-03	Konsumsi Energi Listrik Electricity Consumption	220
	E-04	Konsumsi Air Water Consumption	221
	E-05	Limbah yang Dihasilkan Generated Waste	213
	E-06	Komitmen Perusahaan untuk Mencapai Target Net Zero Emission Company Commitment to Achieving Net Zero Emission Target	207
	E-07	Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Company Commitment to Reducing Greenhouse Gas Emissions	222
Sosial Social	S-01	Kesetaraan Gender Gender Equality	228
	S-02	Pegawai Berdasarkan Gender dan Kelompok Umur Employees by Gender and Age Group	74
	S-03	Tingkat Pergantian Pegawai Employee Turnover Rate	226
	S-04	Jumlah Pegawai Sementara Number of Temporary Employees	75
	S-05	Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Employee Training and Development	232
	S-06	Jumlah Kecelakaan Kerja Number of Workplace Accidents	231
	S-07	Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Incidents of Human Rights Violations	231
	S-08	Kebijakan Pelecehan Seksual dan/atau Non-diskriminasi Sexual Harassment and/or Non-Discrimination Policy	231
	S-09	Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia Human Rights Policy	231
	S-10	Kebijakan Pekerja Anak dan/atau Pekerja Paksa Child Labor and/or Forced Labor Policy	226
	S-11	Kebijakan Mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Kerja yang Aman dan Layak diberikan Kepada Seluruh Karyawan Policy on Occupational Health and Safety and Providing a Safe and Proper Work Environment for All Employees	230
	S-12	Corporate Social Responsibility	234

Kinerja Performance	Kode Code	Nama Metrik Matrix Name	Halaman Page
Tata Kelola Governance	G-01	Keberagaman Manajemen dan Independensi Management Diversity and Independence	160
	G-02	Total Kehadiran Direksi dan Komisaris ke Rapat Dewan Total Attendance of Directors and Commissioners at Board Meetings	156
	G-03	Kebijakan Pemisahan Chairman of the Board dan CEO Policy on Separation of Chairman of the Board and CEO	131
	G-04	Kebijakan Penilaian Dewan Direksi dan Komisaris Board of Directors and Commissioners Assessment Policy	156
	G-05	Kebijakan Pelatihan Dewan Direksi dan Komisaris Board of Directors and Commissioners Training Policy	148
	G-06	Kriteria Khusus Pemilihan Dewan Specific Criteria for Board Selection	157
	G-07	Kode Etik dan/atau Anti-Korupsi Code of Ethics and/or Anti-Corruption Policy	191
	G-08	Kebijakan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham Fair Treatment Policy for Shareholders	132
	G-09	Pencegahan Konflik Kepentingan Conflict of Interest Prevention	159



Pendapat Ahli Lingkungan Terhadap Kerangka Kerja Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*)

Environmental Experts' Opinions On The Green Bond Framework



Depok, 02 Maret 2026

No : 15/00192/EKS/SDGs Hub/LST FMIPA/UI/III/2026
Perihal : *External Review* Laporan Tahun 2025 *Green Bond* Tahun 2023

Kepada Yth,

Manajemen PT Arkora Hydro Tbk.

Treasury Tower Level 9 Unit G–H District 8 SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53, Jakarta 12190

Dengan hormat,

Menindaklanjuti penunjukan PT Arkora Hydro Tbk. kepada SDGs Hub Universitas Indonesia sebagai *Reviewer Eksternal*, bersama surat ini kami sampaikan *Reviu Eksternal (External Review)* atas Laporan Tahun 2025 *Green Bond* Tahun 2023 PT Arkora Hydro Tbk., yang akan dilampirkan dalam Laporan Tahunan PT Arkora Hydro Tbk. Tahun 2025.

Reviu ini dilakukan oleh SDGs Hub Universitas Indonesia dengan mengacu pada *Green Bond Framework* PT Arkora Hydro Tbk. serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, yang berlaku pada saat penerbitan *Green Bond* dimaksud. Bersama dengan surat ini, kami juga melampirkan *curriculum vitae (CV)* para tenaga ahli yang terlibat dalam proses reviu tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar dokumen *CV* dimaksud disampaikan secara terpisah dan tidak digabungkan dengan dokumen reviu pada saat publikasi Laporan Tahunan maupun media publikasi lainnya.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



SDGs HUB UI
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS HUB
UNIVERSITY OF INDONESIA

Dr. Triarko Nurlambang, MA.

Koordinator SDGs Hub UI

LAPORAN REVIU AHLI LINGKUNGAN

Review Report by Environmental Expert

SDGs Hub Universitas Indonesia, selaku Eksternal Reviu yang dipilih untuk melakukan reviu Laporan Tahun 2025 dari Obligasi Ramah Lingkungan Berkelanjutan (Green Bond) 2023 PT Arkora Hydro. Eksternal Reviu memiliki kompetensi, pengalaman dan berijazah yang relevan dalam kegiatan keberlanjutan (Lampiran 1).

SDGs Hub Universitas Indonesia, as the External Reviewer selected to conduct the 2025 Report review of PT Arkora Hydro's 2023 Sustainable Environmentally Friendly Bond (Green Bond). The External Reviewer has relevant experience and diploma competencies in Sustainability activities (Attachment 1).

Tanggung Jawab Manajemen PT Arkora Hydro

Tanggung jawab manajemen PT Arkora Hydro atas penyusunan dan penyajian Green Bond Report 2025 tersebut sesuai dengan Green Bond Framework PT Arkora Hydro dan POJK No. 60 Tahun 2017.

Management Responsibilities

PT Arkora Hydro's management is responsible for preparing and presenting the 2025 Green Bond Report in accordance with PT Arkora Hydro's Green Bond Framework and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 60 of 2017.

Tanggung Jawab Ahli Lingkungan

Tanggung jawab Ahli Lingkungan adalah untuk melakukan reviu Green Bond Report dan beberapa dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan POJK No. 60 Tahun 2017. Reviu yang dilakukan mencakup kesesuaian implementasi pemilihan proyek Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan ("KUBL") sebagaimana tertera di dalam Green Bond Framework dan pada POJK 60 Tahun 2017. Meskipun telah terbit POJK No. 18 Tahun 2023 sebagai pengganti POJK 60 Tahun 2017, tetapi Emiten yang telah melakukan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebelum POJK 18 Tahun 2023 berlaku, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Penyaluran dana hasil penerbitan Green Bond 2023 ke proyek KUBL terpilih sesuai Green Bond Framework. PT Arkora Hydro telah melakukan penyaluran 100% atas dana penerbitan Green Bond 2023 berdasarkan POJK No. 60/2017. Adapun penyaluran yang sesuai dengan PT Arkora Hydro Green Bond Framework adalah sebesar 100%. Ahli Lingkungan melakukan reviu terhadap dampak lingkungan yang tertuang dalam Green Bond Report 2025 dan menyesuaikan dengan data yang tersedia.

Responsibilities of Environmental Experts

The responsibility of the Environmental Expert is to review the Green Bond Report and several other supporting documents following the provisions of POJK No. 60 of 2017. The review assesses the suitability of the selection of Environmentally Conscious Business Activities ("KUBL") projects as set out in the Green Bond Framework and POJK 60 of 2017. Although POJK No. 18 of 2023 has been issued, replacing POJK 60 of 2017, Issuers who have issued Environmentally Conscious Debt Securities before POJK 18 of 2023 comes into effect, still follow the provisions as stipulated in POJK No. 60/POJK.04/2017 concerning the Issuance and Requirements of Environmentally Conscious Debt Securities (Green Bonds). Distribution of funds from the issuance of the 2023 Green Bond to selected KUBL projects, in accordance with the Green Bond Framework. PT ARKORA HYDRO has disbursed 100% of the 2023 Green Bond issuance funds based on POJK No. 60/2017. The disbursement in accordance with the PT Arkora Hydro Green Bond Framework is 100%. Environmental experts reviewed the environmental impacts in the 2025 Green Bond Report and adjusted them based on available data.

Hasil Reviu

Hasil reviu atas Green Bond Report 2025 terhadap penyaluran alokasi kegiatan yang didanai oleh hasil penerbitan Green Bond 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pemilihan proyek pada sektor KUBL dalam penyaluran dana hasil penerbitan Green Bond 2025 telah sesuai dengan Green Bond Framework yaitu energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam, penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan pencegahan serta pengendalian polusi.

2) Tidak ada perubahan realisasi alokasi dana hasil penerbitan Green Bond 2023 untuk membiayai tiga sektor KUBL yang telah disetujui. Tiga sektor tersebut adalah energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan pencegahan dan pengendalian polusi (halaman 6-9 dalam Laporan Tahunan).

3) Dana green bond ini telah dialokasikan 100% untuk kegiatan yang termasuk dalam kategori KUBL (POJK No. 60/2017). Adapun, penyaluran dana sesuai KUBL PT Arkora Hydro Green Bond Framework adalah sebesar 100%, dengan rincian yaitu Energi Terbarukan sebesar 99,92%, Penggunaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Tanah yang Berkelanjutan 0,08%, dan Pencegahan dan Pengendalian Polusi 0,04% (Data Laporan Dampak Tahunan Halaman 6-9).

4) Pelaporan dampak dari 3 KUBL yaitu:

a) Untuk KUBL energi terbarukan yang terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Cikopo, yang menggunakan aliran sungai yang terletak di Garut, Jawa Barat, dengan total kapasitas produksi 7,4 MW dan realisasi energi yang dihasilkan sebesar 49.129 MWh; PLTM Tomasa yang terletak di Kota Poso, Sulawesi Tengah, dengan kapasitas produksi 10 MW dan energi yang dihasilkan pada tahun 2025 adalah 60.273 MWh; PLTM Yaentu yang terletak di Poso, Sulawesi Tengah, dengan total kapasitas produksi 10 MW dan energi yang dihasilkan pada tahun 2025 adalah 42.400 MWh. Jumlah penduduk lokal yang diperkerjakan untuk PLTM Cikopo, Tomasa, dan Yaentu tidak dicantumkan di laporan dampak tahunan.

Review Results

The results of the review of the 2025 Green Bond Report on the distribution of activity allocations funded by the proceeds of the 2023 Green Bond are as follows:

1) The selection of projects in the KUBL sector in the distribution of funds from the 2025 Green Bond issuance follows the Green Bond Framework, namely renewable energy, sustainable management of natural resources and land use, and prevention and control of pollution.

2) There is no change in the realization of the allocation of funds from the 2023 Green Bond issuance to finance the three approved KUBL sectors. The three sectors are renewable energy, sustainable management of natural resources and land use, and pollution prevention and control (pages 6-9 in the Annual Report).

3) The green bond funds have been allocated 100% to activities included in the KUBL (POJK No. 60/2017). The disbursement of funds in accordance with the KUBL PT Arkora Hydro Green Bond Framework is 100%, comprising Renewable Energy at 99.92%, Sustainable Use of Natural Resources and Land at 0.08%, and Pollution Prevention and Control at 0.04% (Annual Impact Report Data, Pages 6-9).

4) Reporting the impact of 3 KUBLs, namely:

a) For renewable energy KUBL consisting of Cikopo Hydroelectric Power Plant which uses River Flow located in Garut, West Java with a total production capacity of 7.4 MW with the realization of energy produced 49,129 MWh; Tomasa Hydroelectric Power Plant located in Poso City, Central Sulawesi, with a production capacity of 10 MW with energy produced in 2025 is 60,273 MWh; Yaentu Hydroelectric Power Plant located in Poso, Central Sulawesi, with a total production capacity of 10 MW with energy produced in 2025 is 42,400 MWh, the number of local residents employed for Cikopo, Tomasa, and Yaentu Hydroelectric Power Plants is not included in the annual impact

PLTM Kukusan 2 terletak di Kukusan, Kabupaten Tanggamus, Lampung, dengan kapasitas produksi 5,4 MW dan mempekerjakan 44 tenaga kerja, dengan komposisi 80% tenaga kerja lokal dan 20% dari kota atau kabupaten lain. Estimasi dampak emisi gas rumah kaca berdasarkan realisasi produksi yang berhasil dihindari pada tahun 2025 untuk PLTM Cikopo (39.269 ton CO₂e), Tomasa (1.190 ton CO₂e), dan Yaentu (833 ton CO₂e).

report; Kukusan 2 Hydroelectric Power Plant is located in Kukusan, Tanggamus Regency, Lampung, with a production capacity of 5.4 MW with 44 workers with a composition of 80% local workers and 20% from other cities or districts. Estimated impact of Greenhouse Gas Emissions based on the realization of production that was successfully avoided in 2025 for the Cikopo PLTM (39,269 tons CO₂eq), Tomasa (1,190 tons CO₂eq), and Yaentu (833 tons CO₂eq).

b) Untuk KUBL Penggunaan Sumber Daya Alam & Penggunaan Tanah yang Berkelanjutan yaitu 40 hektar lahan ditanami di sepanjang sungai sebanyak 46.200 pohon (Laporan Dampak Tahunan Halaman 8).

b) For KUBL Natural Resource Use & Sustainable Land Use, namely 40 hectares of land planted along the river with 46,200 trees (Annual Impact Report Page 8).

c) Untuk KUBL Pencegahan & Pengendalian Polusi, yaitu penyediaan infrastruktur penyimpanan limbah B3, kerjasama dengan pihak pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah lebih lanjut, dan pengujian berkala kualitas udara dan air sungai di seluruh proyek yang sedang dalam tahap konstruksi dan operasi. Jumlah limbah B3, seperti berapa liter oli bekas yang disimpan setiap tahunnya atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tidak disebutkan (Laporan Dampak Tahunan halaman 9).

c) For KUBL Pollution Prevention & Control, namely the provision of B3 waste storage infrastructure, cooperation with local governments for further waste management, and periodic testing of air and river water quality in all projects currently under construction and operation. The amount of B3 waste, such as how many liters of used oil are stored annually, is not mentioned (Annual Impact Report, Page 9).

Berdasarkan capaian proyek-proyek dari tiga (3) sektor KUBL tersebut, juga membantu mendukung pencapaian SDGs Indonesia, yaitu SDG 7, 8, 12, 13, dan 15.

Based on the achievements of the projects across the three (3) KUBL sectors, this also supports the achievement of Indonesia's SDGs, namely SDGs 7, 8, 12, 13, and 15.

Indikator pada KUBL yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PT Arkora Hydro telah sesuai. Perhitungan dampak yang dilakukan telah konsisten dan sesuai dengan best practice yang ada. Dalam perhitungan dampak lingkungan, kesesuaian penggunaan faktor emisi untuk estimasi dampak sangat penting diperhatikan apakah sudah 100% beroperasi atau tahap konstruksi (2025) (halaman 6-9 dalam Laporan Tahunan).

The indicators in the KUBL previously determined by PT Arkora Hydro are appropriate. The impact calculations carried out have been consistent and in accordance with existing best practices. In calculating environmental impacts, it is important to note whether emission factors are appropriate for impact estimation, depending on whether the facility is 100% operational or in the construction stage (2025) (pages 6-9 in the Annual Report).

Agar dapat diketahui lebih pasti dampak yang ditimbulkan, untuk berikutnya dapat digunakan jumlah kepala keluarga yang dapat memanfaatkan energi bersih dari tiap proyek dari KUBL.

To better understand the impacts, the number of heads of households who can use clean energy from each KUBL project can be used next time.

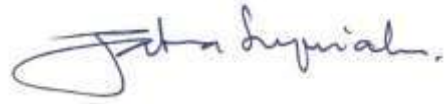
Jakarta, 02 Maret 2025

Jakarta, 2nd March 2025



SDGs HUB UI
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS HUB
UNIVERSITY OF INDONESIA

Dr. Triarko Nurlambang, MA.



Prof. Dr. Jatna Supriatna, M.Sc

Lampiran 1. Credentials Tenaga Ahli

1. Prof. Jatna Supriatna, M.Sc., Ph.D

<i>Name</i>	<i>Jatna Supriatna</i>
<i>Contact Details</i>	<i>Mobile : 0811154243</i> <i>E-mail : j.supriatna@sci.ui.ac.id</i> <i>Address: Komplek Perumahan Depok Mulya 1, Blok H./2, Depok 16424, Indonesia</i>
<i>Education</i>	<i>(1991) Ph.D in Biological Anthropology, University of New Mexico, USA (1986) M.Sc in Biological Anthropology, University of New Mexico, USA (1979) Drs. in Biology, Universitas Nasional Jakarta, Indonesia</i> <i>(1976) Bachelor of Science in Biology, Universitas Nasional Jakarta, Indonesia</i>
<i>Other Training</i>	<i>(2012) Understanding on China Economy and Management, Tsing Hua University, China</i> <i>(2012) Senior Leadership and Management Training (10 months) at Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.</i> <i>(2004-2008) Received yearly Project management and Fundraising training at Conservation International, Washington DC.</i> <i>(1999) Training and Seminar on Biodiversity Conservation at East West Center, University of Hawaii, USA</i> <i>(1990-1991) and (1993-1994) Pre-and Post-Doctoral Research at CERC (Center for Environmental Research on Conservation) Columbia University, New York.</i> <i>(1999) Environment Leader training (CERC-Columbia University, New York), USA (1981) Environmental Science and Management (BIOTROP)</i>
<i>Office and Affiliates</i>	<i>Professor, Dept of Biology, FMIPA and Graduate School on Environmental Science, Universitas Indonesia.</i> <i>Chairman, Institute for Sustainable Earth and Resources, Faculty of Mathematics and Sciences, Universitas Indonesia.</i> <i>Senior Researcher, Research Center for Climate Change, Universitas Indonesia Kampus UI, Depok 16424.</i> <i>Co-Chair, UN Sustainable Development Solution Network (SDSN) for Indonesia Member, Indonesian Academy of Science (member)</i> <i>Executive Director, Indonesian Science Fund (under Indonesian Academy of Science)</i>
<i>Memberships of International and Professional organizations</i>	<i>Indonesia Environmental Scholar Association (PERWAKU), Chairman 2018-2023. IUCN (CNPPA-Commision on National Park and protected Area), Member IUCN (SSC-CBSG-Captive Breeding Specialist Group), Member IUCN (SSC-PSG-Primate Specialist Group), Co-chairman for Southeast Asia IUCN-PSG-Specialist Great Apes, Deputy Vice Chairs Society for Conservation Biology, member International Primatological Society (Conservation Committee represent Southeast Asia Region)</i>

Professional Experiences	a. Position: Team Member Client: PT IIF Year: February 2026 Description of service: Review Annual Report of IIF's Perpetual Note 2025 b. Position: Team Member Client: PT Bank Mandiri Year: January 2026 Description of service: Review Annual Report of Bank Mandiri's Green Bond 2025 c. Position: Team Member Client: PT Titan Infra Sejahtera Group Year: July-September 2025 Description of service: ESG Performance Report TIS Group 2025 d. Position: Team Member Client: PT Pupuk Indonesia Tbk Year: May-July 2025 Description of service: ESG and Sustainability Capacity Building e. Position: Team Member Client: PT BNI Year: June 2025 Description of service: Review Annual Report of Bank BNI's Green Bond f. Position: Team Member Client: PT Indonesia Infrastructure Finance Year: Mei 2025 Description of service: Review Annual Report of PT IIF's Green Perpetual Note. g. Position: Team Member Client: PT TBS Energi Utama Tbk Year: March 2024 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT TBS's Green Bond b. Offering argument on the substance of the PT TBS's Green Bond c. Establishing expert opinion on the PT TBS's Green Bond h. Position: Team Member Client: PT SPINDO Tbk Year: March 2024 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT SPINDO Sustainability Link Bond b. Offering argument on the substance of the PT SPINDO's SLB c. Establishing expert opinion on the PT Spindo Sustainability Link Bond i. Position: Team Member Client: PT BRI Year: February 2024 Description of service: a. Review Annual Report of BRI's Green Bond b. Review Annual Report of BRI's Medium Term Note c. Review Annual Report of BRI's Obligasi Sub Ordinasi j. Position: Team Member Client: PT BSI Year: December 2023 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT BSI Sustainability Sukuk. b. Offering argument on the substance of the PT BSI Sustainability Sukuk.

	c. <i>Establishing expert opinion on the BSI Sustainability Sukuk</i> k. Position: Team Member Client: PT Bank Mandiri Tbk Year: December 2023 Description of service: Review Annual Report of Mandiri's Green Bond, l. Position: Team Member Client: PT IIF Year: October 2023 Description of service: a. <i>Analyzing and identifying key findings on the PT IIF Green Perpetual Notes.</i> b. <i>Offering argument on the substance of the PT IIF Green Perpetual Notes.</i> c. <i>Establishing an environmental expert opinion on the PT IIF Green Perpetual Notes</i> m. Position: Team Member Client: PT Arkora Hydro Year: August 2023 Description of service: a. <i>Analyzing and identifying key findings on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework</i> b. <i>Offering argument on the substance of the PT Arkora Hydro Green Bond Framework</i> c. <i>Establishing an environmental expert opinion on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework</i> n. Position: Experts Client: PT Bank Mandiri Tbk Year: March 2023 Description of service: a. <i>Analyzing and identifying key findings on the Bank Mandiri Green Bond Framework</i> b. <i>Offering argument on the substance of the Bank Mandiri Green Bond Framework</i> c. <i>Establishing an environmental expert opinion on the Bank Mandiri Green Bond Framework.</i> o. Position: Team Member Client: PT BRI Tbk Year: February 2023 Description of service: Review Annual Report of BRI's Green Bond p. Position: Team Member Client: PT Pegadaian, Tbk Year: August 2022 Description of service: a. <i>Prepare an initial draft of the Pegadaian Green Bond framework.</i> b. <i>Collect all information and data that has been done by the Experts in the framework.</i> q. Position: Team Member Client: PT BRI, Tbk Year: April 2022 Description of service: a. <i>Analyzing and identifying key findings on the BRI Green Bond Framework</i> b. <i>Offering argument on the substance of the BRI Green Bond Framework</i> c. <i>Establishing an environmental expert opinion on the BRI Green Bond Framework</i> Consultancy <i>Carrying Capacity Komodo Tourism, NTT Local Government (2022) Environment, Social Panel, PLN-Upper Cisokan Hydropower (2022) Carbon Market, Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (2022) Global Environment Facility, World Bank for Indonesia (2017-2021) Tourism Development, Sustainable Management Group (2019)</i>

2. Dr. Triarko Nurlambang, MA

<i>Name</i>	<i>Triarko Nurlambang</i>
<i>Contact Details</i>	<i>Mobile: +628129478287 Email : triarko@gmail.com</i>
<i>Education</i>	<i>(2013) PhD in Public Policy, Social and Political Sciences Faculty, University of Indonesia (1994) Master of Arts in Social Sciences (Geography) in The Flinders University of South Australia, Adelaide, Australia (1992) Graduate Diploma in Geography in The Australian National University Graduate Diploma in Geography (1987) Bachelor in Geography, Mathematic and Natural Sciences Faculty, University of Indonesia</i>
<i>Other Training</i>	<i>(2007/8) One year Course on Soft Skills (U-Theory), Non-degree in Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA</i>
<i>Main Position</i>	<i>Lecturer and researcher, University of Indonesia (1988 – now)</i> • <i>Lecturer on bachelor program in Geography (FMIPA UI)</i> • <i>Lecturer on master program in Geography (FMIPA UI), Disaster Management (SIL-UI), Environmental Science (SIL), and Oceanic Science (FMIPA UI)</i>
<i>Other Job Position</i>	<i>(2015 – 2020) Independent Director (Komisaris Independen) PT (Persero) Pengembangannya Pariwisata Indonesia (ITDC) (2016 - now) Member of Research Center for Disaster Risk and Response UI (2018 – now) Coordinator of SDGs Hub UI (2018 – now) Member of ISER (Institute for Sustainable Earth and Resources) (2015 – now) Vice President of Indonesian Experts on Disaster Association Consultant/ researcher/ trainer</i>
<i>Membership in Professional Societies</i>	<i>(2014 - 2021) Vice Director and treasury affairs. Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) – Indonesian Forum of Disaster Expert (2024-now) Advisory - Indonesia Experts on Public Policy (2020 - now) Vice division head for cooperation. Ikatan Geografer Indonesia (Indonesia Geographer Association) (2016 - now) Member of Local and Regional Development Forum. International Geography Union</i>

Employment Record (especially for Disaster/Hazard Management and SEA/Strategic Environmental Assessment and SDGs, especially Sustainable Finance)

<i>Dates of employment</i>	<i>Name of employing organization</i>	<i>Positions held</i>
2026	<i>SDGs Hub UI and Bank mandiri, BSI, PT Arkora Hydro, dan PT Spindo Tbk</i>	<i>Expert s in the Making of SPO (Secondary Party Opinion) for Green Bond Annual Report</i>
2025	<i>SDGs HUB UI and BRI, Mandiri, IIF, BNI, Bank Jabar, PT Spindo, PT Titan, Mandiri, BTN.</i>	<i>Expert s in the Making of SPO (Secondary Party Opinion) for Green Bond Framework, Sustainable Bond, Sustainable Linked Bond and Annual Report</i>
2024	<i>SDGs Hub UI and PT TBS, PT Spindo, BSI, PT Pollux, BRI, BNI, BJB</i>	<i>Expert s in the Making of SPO (Secondary Party Opinion) for Green Bond Framework, Sustainable Bond, Sustainable Linked Bond and Annual Report</i>

2023	SDGs Hub UI and PT Arkora, PT Indonesia Infrastructure Finance, BRI (Green Bond Annual Report 2023)	Expert s in the Making of SPO (Secondary Party Opinion) for Green Bond Framework and Annual Report
2022	SDGs Hub UI and Pegadaian	Experts in Assisting the Establishment of the Green Bond Framework Pegadaian
2022	SDGs Hub UI and Bank Mandiri	Experts in Assisting the Establishment of the Green Bond Framework Bank Mandiri
2022	SDGs Hub UI and BRI	Experts for the Environmental Expert Opinion on BRI Green Bond Framework
2022	SDGs Hub UI and DKI Jakarta Local Government	SEA for the Integration of Jakarta Spatial Planning and Sea and Coastal Planning
2021/2022	Asian Development Bank/UCLG	National Consultant for SDGs Snapshot at Sub-National Government
2021-2024	BNPB-BMKG-World Bank	Member of Technical Advisor Commission for IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiative Project)
2021	National Standard Agency (BSN)	Member Technical Commission for Disaster Management
2021	National Board for Geospatial Information (BIG)	Consultant (National Roadmap for Geospatial Information Industry)
2021/2022	Palladium (Australia)-BNPB	Consultant (Disaster Risk Assessment in Bangli District, Bali Province)
2013/4 and 2014/5	BNPB	Researcher on Weather Extreme and Disaster Management in Indonesia
2012	UNDP-RCCC (Research Center for Climate Change) UI	Researcher on Climate Change and public health in DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali and Kalimantan Tengah.
2009	The World Bank	Expert member for Climate Resilience Cities Program
2006	Bappenas and UNDP	Team Leader and Regional Development Sp. (Aceh Tsunami Disaster Recovery)

Publications (selected)

No	Publications
1	Nurlambang, Triarko, Hafid Setiadi, dan Nurul, 2008. <i>Assessing Role and Function of Local Coordinator Board on Spatial Planning, The GTZ and Ministry of Home Affairs.</i>
2	Nurlambang, Triarko, and Jeffrey Neilson, 2010. <i>Multi-scalar environmental governance and the emergence of spatial approaches to natural resource management in Indonesia? presented at SEAGA International Conference in Hanoi, Vietnam</i>
3	Nurlambang, Triarko, 2018/19. <i>Geographic And Institution Matters In Achieving Sustainable Development In Indonesia, a book chapter of Dilemmas of regional and local development, Jerzy Bański (editor), Routledge publisher</i>
4	Nurlambang, Triarko and Rudi P. Tambunan, 2021. <i>Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam Metode dan Kajian Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, editor Prof Dr. Jatna Supriatna (2021)</i>
5	Nurlambang, Triarko dan David Makes, 2021. <i>Kajian Pariwisata Berkelanjutan, dalam Metode dan Kajian Sumber Daya Hayati dan Lingkungan, editor Prof Dr Jatna Supriatna (2021)</i>

3. Dr. Sri Mariati

<i>Name</i>	<i>Sri Mariati</i>
<i>Contact Details</i>	<i>Mobile Phone: +628127567765</i> <i>Email: cici.srimariati@gmail.com</i>
<i>Education</i>	<i>(Sep 2011-Dec 2013) Doctor on Environmental Studies, Universitas Indonesia, Depok.</i> <i>(Sep 2001- Mar 2004) MSc on Environmental Studies, Universitas Andalas (Padang)</i> <i>(Sep 1991-May 1996) BSc on Marine Science, Universitas Riau, Pekanbaru</i>
<i>Professional Experiences</i>	<i>As an Environmental and Sustainability Expert</i> a. <i>Position:</i> Team Leader <i>Client:</i> PT SPINDO Tbk <i>Year:</i> February 2026 <i>Description of service:</i> Review Annual Report of Sustainability-Linked Bond's Green Bond 2025 b. <i>Position:</i> Team Leader <i>Client:</i> PT Arkora Hydro <i>Year:</i> February 2026 <i>Description of service:</i> Review Annual Report of PT Arkora Hydro's Green Bond 2025 c. <i>Position:</i> Team Leader <i>Client:</i> PT BSI <i>Year:</i> January 2026 <i>Description of service:</i> Review Annual Report of BSI's Sustainability Sukuk 2025 d. <i>Position:</i> Team Leader <i>Client:</i> PT Bank Mandiri <i>Year:</i> January 2026 <i>Description of service:</i> Review Annual Report of Bank Mandiri's Green Bond 2025 e. <i>Position:</i> Team Leader <i>Client:</i> PT BTN Tbk <i>Year:</i> November 2025 <i>Description of service:</i> Review Social Bond Policy Framework of Bank BTN Tbk. f. <i>Position:</i> Team Leader <i>Client:</i> PT SPINDO Tbk <i>Year:</i> October 2025 <i>Description of service:</i> Review Annual Report of PT SPINDO's Sustainability Link Bond g. <i>Position:</i> Team Leader <i>Client:</i> PT Bank Mandiri <i>Year:</i> September 2025 <i>Description of service:</i> Review Sustainability Bond Policy Framework of Bank Mandiri h. <i>Position:</i> Team Leader <i>Client:</i> PT Titan Infra Sejahtera Group <i>Year:</i> July-September 2025 <i>Description of service:</i> ESG Performance Report TIS Group 2025

	i. Position: Team Leader Client: PT Pupuk Indonesia Tbk Year: May-July 2025 Description of service: ESG and Sustainability Capacity Building j. Position: Team Leader Client: PT BNI Year: June 2025 Description of service: Review Annual Report of Bank BNI's Green Bond k. Position: Team Leader Client: PT Indonesia Infrastructure Finance Year: Mei 2025 Description of service: Review Annual Report of PT IIF's Green Perpetual Note. l. Position: Team Leader Client: PT BSI Year: April 2025 Description of service: Review Annual Report of Bank BSI's Sukuk Keberlanjutan. m. Position: Team Leader Client: PT Bank Mandiri Year: January 2025 Description of service: Review Annual Report of Bank mandiri's Green Bond n. Position: Team Leader Client: PT Bank BRI Year: January 2025 Description of service: Review Annual Report of Bank BRI's Green Bond Phase 1,2,3, MTN Annual Report 2024, and Sub Ordinary Annual Report 2024. o. Position: Team Leader Client: PT Arkora Hydro Tbk Year: Desember 2024 Description of service: Review Annual Report of Arkora Hydro's Green Bond. p. Position: Team Leader Client: bank bjb Year: June 2024 Description of service: - Analyzing and identifying key findings on the bank bjb's Sustainability Bond. - Offering argument on the substance of the bank bjb's Sustainability Bond. - Establishing expert opinion on the bank bjb's Sustainability Bond. q. Position: Team Leader Client: PT Pollux Hotels Group Year: Juni 2024 Description of service: - Analyzing and identifying key findings on the PT PHG Sustainability Link Bond. - Offering argument on the substance of the PT PHG's SLB. - Establishing expert opinion on the PT PHG Sustainability-Link Bond. r. Position: Team Leader

	Client: PT Bank BNI Tbk Year: Juni 2024 Description of service: Review Annual Report of BNI's Green Bond,
s.	Position: Team Leader Client: PT TBS Energi Utama Tbk Year: March 2024 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT TBS's Green Bond b. Offering argument on the substance of the PT TBS's Green Bond c. Establishing expert opinion on the PT TBS's Green Bond
t.	Position: Team Leader Client: PT SPINDO Tbk Year: March 2024 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT SPINDO Sustainability Link Bond. b. Offering argument on the substance of the PT SPINDO's SLB. c. Establishing expert opinion on the PT Spindo Sustainability-Link Bond
u.	Position: Team Leader Client: PT BRI Year: February 2024 Description of service: 1) Review Annual Report of BRI's Green Bond 2) Review Annual Report of BRI's Medium Term Note 3) Review Annual Report of BRI's Obligasi Sub Ordinasasi
v.	Position: Team Leader Client: PT BSI Year: December 2023 Description of service: 1) Analyzing and identifying key findings on the PT BSI Sustainability Sukuk. 2) Offering argument on the substance of the PT BSI Sustainability Sukuk. 3) Establishing expert opinion on the BSI Sustainability Sukuk.
w.	Position: Team Leader Client: PT Bank Mandiri Tbk Year: December 2023 Description of service: Review Annual Report of Mandiri's Green Bond,
x.	Position: Team Leader Client: Technopolis Year: November 2023 Description of service: Evaluation of AFD's contribution to the SDGs in Indonesia especially private sectors assignment, improve collective urban services, and strengthen the effectiveness of public finances
z.	Position: Team Leader Client: PT IIF Year: October 2023 Description of service: 1) Analyzing and identifying key findings on the PT IIF Green Perpetual Notes. 2) Offering argument on the substance of the PT IIF Green Perpetual Notes. 3) Establishing an environmental expert opinion on the PT IIF Green

	<i>Perpetual Notes</i> <i>aa. Position: Team Leader</i> Client: PT Arkora Hydro Year: August 2023 Description of service: 1) Analyzing and identifying key findings on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework. 2) Offering argument on the substance of the PT Arkora Hydro Green Bond Framework. 3) Establishing an environmental expert opinion on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework. <i>bb. Position: Team Member</i> Client: PT Bank Mandiri Tbk Year: March 2023 Description of service: 1) Analyzing and identifying key findings on the Bank Mandiri's Green Bond Framework. 2) Offering argument on the substance of the Bank Mandiri's Green Bond Framework. 3) Establishing an environmental expert opinion on the Bank Mandiri's Green Bond Framework. <i>cc. Position: Team Leader</i> Client: PT BRI Tbk Year: February 2023 Description of service: Review Annual Report of BRI's Green Bond <i>dd. Position: Team leader</i> Client: PT Pegadaian, Tbk Year: August 2022 Description of service: 1) Prepare an initial draft of the Pegadaian Green Bond framework. 2) Collect all information and data that has been done by the Experts in the framework. <i>ee. Position: Team Leader</i> Client: PT BRI Year: April 2022 Description of service: 1) Analyzing and identifying key findings on the BRI Green Bond Framework. 2) Offering argument on the substance of the BRI Green Bond Framework. 3) Establishing an environmental expert opinion on the BRI Green Bond Framework Professional Staff <i>i. Position: Commissioner</i> Institution: PT Emisi Bersih Dunia/World Net Emisions Year: Oct 2023-Now <i>ii. Position: Sustainability Expert and Advisor</i> Institution: CEO PT Agra Resources Year: Sept 2021-Now <i>iii. Position: Team leader</i>

	Institution: Sustainable Investment and Sectoral initiative of Tropical Forest Alliance South East Asia Year: October 2021-October 2023
	iv. Position: Executive Director Institution: Belantara Foundation, Jakarta Year: August 2017 – August 2021 Description: Fundraising & Communications a. Oversee day to day grant making to ensure efficient and effective management of the landscape conservation programme; b. Oversee fund raising activities and create fundraising plans targeted at major environmental foundations national governments, corporations and multilateral institutions. c. Project Delivery d. Utilize landscape approach modeling for the Foundation; e. Play a significant role in implementing the landscape conservation programme monitoring framework, including performing data collection entry and analysis; f. Prepare materials related to monitoring and landscape conservation result, including annual monitoring reports, reporting guidelines, training materials and communications materials; g. Engage with grantees and donors to ensure accurate reporting of project impacts.
	v. Position: Terrestrial Program Director Institution: Conservation International Indonesia, Jakarta Year: September 2016 - July 2017 Description: Oversee the Conservation programs in the terrestrial included forest and its landscape in Indonesia which included activities on conservation science, policies, planning and implementation of the terrestrial programs in Indonesia; overseeing national policy works related to climate change mitigation and adaptation in the landscape, biodiversity conservation management and developing and executing strategies such as Sustainable landscape partnership program (SLP); liaising closely with CI Indonesia Vice President, and Advisors, CI-I Program Managers, CI-I Jakarta team, CI Asia-Pacific Field Division and CI-Headquarter.
	vi. Position: Head of Sustainability Institution: PT Royal Lestaro Utama (Joint Venture Michelin and Barito Pasific Year: 2014-2016 Description: Ensure the company operates sustainably. They develop and implement sustainability strategies, ensure regulatory compliance, and communicate sustainability initiatives to stakeholders.
	vii. Position: Senior Manager Institution: PT Bukit Baiduri Energi Year: 2012-2014 Description: Ensure the company operates sustainably. They develop and implement sustainability strategies, ensure regulatory compliance, and communicate sustainability initiatives to stakeholders.
	viii. Position: Sustainable Financing Coordinator Institution: Sumatra Initiative of WWF Indonesia Year: 2009 - 2010 Description:

	<i>To coordinate activities of WWF Indonesia - Conservation Program in Sumatra to achieve Sustainable financing programs.</i> ix. Position: Expansion Protected Area Module Leader Institution: WWF Indonesia Year: 2007 - 2009 Description: <i>To facilitate development of a new conservation area and extension of conservation area in Riau Province. Activities including forest policy aspects, design project proposal and lobbying key stakeholders such as Head of Forest Services Districts, Bupati/Head of District, Governor till Director Jenderal of Ministry of Forestry to obtain recommendation and degree of Minister of Forestry for a new conservation area in Riau Province.</i> x. Position: Senior Conservation Officer Institution : WWF Indonesia Riau Elephant Conservation Program Year: 2004 - 2006 Description: <i>Ascertaining facilitation of effective management of Tesso Nilo National Park (Phase I), lobby and advocacy to the related government to reduce encroachment and illegal logging in Tesso Nilo forest area in Riau Province.</i>



Laporan Keuangan Financial Statements

**PT ARKORA HYDRO Tbk
DAN ENTITAS ANAK/
*AND ITS SUBSIDIARIES***

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025/
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – For the year ended December 31, 2025
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statement of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	Consolidated Statement of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	Consolidated Statement of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	Notes to Consolidated Financial Statements

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT ARKORA HYDRO TBK DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR ENDED
PT ARKORA HYDRO TBK AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama	Aldo Henry Artoko
Alamat kantor	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H Distric 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nomor Telepon Jabatan	021-50333144 Direktur Utama
2. Nama	Ricky Hartono
Alamat kantor	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H Distric 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nomor Telepon Jabatan	021-50333144 Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

1. Name	Aldo Henry Artoko
Office address	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Phone Number Position	021-50333144 President Director
2. Name	Ricky Hartono
Office address	Treasury Tower Lt. 9 Unit G-H District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Phone Number Position	021-50333144 Director

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and Its Subsidiaries;
2. The consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and Its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All Information in the consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and Its Subsidiaries has been completely and corrected disclosed;
b. The consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and Its Subsidiaries do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts;
4. We are responsible for the internal control system of PT Arkora Hydro Tbk and Its Subsidiaries.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 5 Maret 2026/ March 5, 2026



Aldo Henry Artoko
Direktur Utama/President Director

Ricky Hartono
Direktur/Director

Laporan Auditor Independen

No. 00037/2.1460/AU.1/02/0565-4/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Arkora Hydro Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

No. 00037/2.1460/AU.1/02/0565-4/1/III/2026

The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Arkora Hydro Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Liana Ramon Xenia & Rekan ("LRX") is a member (as such term is used in Regulation of the Ministry of Finance Number 186/PMK.01/2021 and Regulation of the Financial Services Authority Number 9 of 2023 (the "Relevant Law")) of Deloitte Southeast Asia Limited ("DSEAL"). DSEAL is the registered Foreign Audit Organisation ("Organisasi Audit Asing" or "OAA") to LRX for the purposes of the Relevant Law.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengakuan pendapatan jasa konstruksi dari perjanjian jasa konsesi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, pendapatan dari jasa konstruksi berjumlah Rp 284.638.322.715, yang merupakan sekitar 83% dari jumlah pendapatan Grup.

Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi sepanjang waktu sesuai dengan PSAK 115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dengan mengacu pada persentase kemajuan konstruksi. Persentase kemajuan konstruksi diukur dengan mengacu pada proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan sampai saat ini secara relatif terhadap estimasi jumlah biaya kontrak.

Pendapatan dari jasa konstruksi dianggap sebagai hal audit utama karena pertimbangan yang signifikan dan asumsi utama yang diterapkan oleh manajemen untuk mengestimasi jumlah biaya kontrak pada saat penyelesaian. Ketidakpastian dan subjektivitas yang digunakan dalam penentuan jumlah biaya kontrak pada saat penyelesaian dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan yang diakui selama tahun berjalan.

Pertimbangan akuntansi penting dan sumber utama estimasi ketidakpastian pengakuan atas pendapatan jasa konstruksi telah diungkapkan pada Catatan 4 dan kebijakan akuntansi diungkapkan pada Catatan 3o.

Bagaimana hal ini ditangani dalam audit

Kami telah melakukan prosedur berikut:

- Melakukan pemahaman dan mengevaluasi desain dan implementasi serta menguji efektivitas operasi pengendalian yang relevan sehubungan dengan proses manajemen dalam pengakuan pendapatan;

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Revenue recognition of construction services under a service concession arrangement

For the year ended December 31, 2025, revenue from construction services amounted to Rp 284,638,322,715, which accounted for approximately 83% of the Group's total revenues.

The Group recognises revenue from construction service over time in accordance with PSAK 115 Revenue from Contracts with Customers by reference to the percentage of construction progress. The percentage of construction progress is measured by reference to the proportion of contract costs incurred for the work performed to date relative to the estimated total contract costs.

Revenue from construction services is considered as a key audit matter due to significant judgement and key assumptions applied by management to estimate the total contract costs on completion. The uncertainty and subjectivity involved in determining the total contract costs on completion may result in a significant impact to the revenue recognised during the year.

The critical accounting judgements and key source of estimation uncertainty on revenue recognition of construction services is disclosed in Note 4 and the accounting policy is disclosed in Note 3o.

How the matter was addressed in the audit

We have performed the following procedures:

- Obtained an understanding and evaluated the design and implementation and tested the operating effectiveness of the relevant controls in respect of management's processes in revenue recognition;

Liana Ramon Xenia & Rekan

- Melakukan pengujian substantif rinci secara sampling untuk biaya yang dikeluarkan selama tahun berjalan dan biaya yang dikeluarkan tersebut dicatat dalam periode akuntansi yang benar;
- Memperoleh estimasi jumlah biaya pada saat penyelesaian dan menilai kewajaran estimasi yang digunakan oleh manajemen, berdasarkan sampling, mencocokkan estimasi tersebut dengan dokumen-dokumen pendukung dan melakukan review retrospektif dengan membandingkan jumlah biaya kontrak aktual yang dikeluarkan saat penyelesaian dengan jumlah estimasi jumlah kontrak biaya, untuk menilai kewajaran estimasi yang digunakan oleh manajemen;
- Diskusi dengan manajemen tentang kemungkinan adanya potensi keterlambatan proyek dan menilai kelebihan biaya;
- Menghitung kembali persentase kemajuan kontrak untuk menguji keakuratan pendapatan yang diakui sepanjang tahun tersebut; dan
- Menilai ketepatan pengungkapan terkait yang diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.
- Performed substantive tests of details on a sampling basis for the costs incurred during the year and such costs incurred were recorded in the correct accounting period;
- Obtained the estimated total costs on completion and assessed the reasonableness of the estimates used by management, on a sampling basis, agreed the estimates to supporting documents and performed retrospective review by comparing total actual contract costs incurred at completion against the total estimated total contract costs to assess the reasonableness of the estimates used by the management;
- Discussed with management on any potential project delays and assessed for cost overruns;
- Re-computed the percentage of progress of the contracts to test the accuracy of the revenue recognised during the year; and
- Assessed the appropriateness of the related disclosures made in the consolidated financial statements.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak akan menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidak konsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Liana Ramon Xenia & Rekan

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

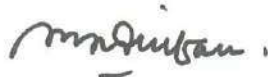
Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

LIANA RAMON XENIA & REKAN



Muhammad Irfan, CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0565

5 Maret 2026/March 5, 2026



00037

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6	99.328.536.129	37.303.720.622	Cash and cash equivalents
Piutang usaha pihak ketiga	7	17.665.607.887	15.879.455.725	Trade accounts receivable third party
Piutang lain-lain				Other accounts receivable
Pihak berelasi	29	-	2.671.988	Related party
Pihak ketiga		21.191.564.306	802.648.838	Third parties
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	8	1.932.260.777	2.253.857.060	Advances and prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	26a	1.827.847.361	2.986.827.921	Prepaid taxes
Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo dalam satu tahun	10	139.641.378.222	102.425.474.126	Financial assets from concession project - current
Jumlah Aset Lancar		281.587.194.682	161.654.656.280	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Uang muka pembelian aset tetap		14.734.966.276	2.675.750.815	Advances for purchase property, plant and equipment
Aset tetap	9	205.844.287.282	208.430.481.129	Property, plant and equipment
Aset hak guna sewa		178.903.536	536.710.656	Right-of-use assets
Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo lebih dari satu tahun	10	1.081.106.285.383	842.077.527.197	Financial assets from concession project - non-current
Aset pajak tangguhan	26c	14.641.972.083	7.767.301.947	Deferred tax assets
Aset tak berwujud	11	48.944.630.319	41.871.661.923	Intangible assets
Goodwill		275.000.000	275.000.000	Goodwill
Aset lain-lain	12	49.230.574.361	54.065.568.990	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.414.956.619.240	1.157.700.002.657	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		1.696.543.813.922	1.319.354.658.937	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Cerukan bank	13	23.950.149.122	15.492.118.620	Bank overdraft
Utang usaha dan lainnya	14			Trade and others accounts payable
Pihak berelasi	29	5.966.315.254	12.500.189.783	Related parties
Pihak ketiga		16.976.412.006	9.018.505.043	Third parties
Utang pajak	26b	4.515.065.036	1.747.742.173	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	17	1.614.285.719	1.614.285.720	Bank loans
Utang lainnya		5.078.004.000	5.078.004.000	Other payable
Utang obligasi	18	318.060.000.000	-	Bonds payable
Pinjaman berjangka	16	16.943.704.084	15.413.555.706	Term loans
Pinjaman dari pihak berelasi	29	13.054.491.230	3.764.240.381	Loan from related parties
Biaya masih harus dibayar	15	11.282.919.402	13.944.036.578	Accrued expenses
Utang retensi	29	10.475.579.635	8.333.271.086	Retention payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		427.916.925.488	86.905.949.090	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	17	5.111.904.756	6.726.190.460	Bank loans
Utang lainnya		5.077.984.000	10.155.988.000	Other payable
Utang obligasi	18	16.302.925.715	332.502.209.993	Bonds payable
Pinjaman berjangka	16	430.723.234.813	272.976.325.411	Term loans
Pinjaman dari pihak berelasi	29	211.055.312.024	76.223.182.056	Loan from related parties
Liabilitas pajak tangguhan	26c	74.036.800.853	73.107.397.699	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	27	10.118.422.888	9.130.696.201	Employee benefits obligations
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		752.426.585.049	780.821.989.820	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		1.180.343.510.537	867.727.938.910	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 25 per saham pada tanggal 31 Desember 2025 Modal dasar - 9.278.400.000 saham pada tanggal 31 Desember 2025 (31 Desember 2024: 9.278.400.000 saham)				Capital stock - Rp 25 par value per share at December 31, 2025 Authorized - 9,278,400,000 shares at December 31, 2025 (December 31, 2024: 9,278,400,000 shares)
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.928.495.000 saham pada tanggal 31 Desember 2025 (31 Desember 2024: 2.928.495.000 saham)	19	73.212.375.000	73.212.375.000	Subscribed and paid-up - 2,928,495,000 shares at December 31, 2025 (December 31, 2024: 2,928,495,000 shares)
Tambahan modal disetor	20	225.900.774.933	225.900.774.933	Additional paid - in capital
Penghasilan komprehensif lain	27	2.443.385.889	1.763.121.613	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
Dicadangkan	21	4.000.000.000	2.000.000.000	Appropriated
Belum dicadangkan		209.507.648.300	147.604.192.497	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		515.064.184.122	450.480.464.043	Equity attributable to Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		1.136.119.263	1.146.255.984	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		516.200.303.385	451.626.720.027	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.696.543.813.922	1.319.354.658.937	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2025 Rp	2024 Rp	
PENDAPATAN	22	343.321.381.981	238.914.421.879	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	23,29	(253.608.620.917)	(180.343.009.777)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		89.712.761.064	58.571.412.102	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban umum dan administrasi	24	(72.246.197.414)	(57.297.289.789)	General and administrative expenses
Beban keuangan	25	(78.525.798.093)	(64.022.275.785)	Finance costs
Penghasilan keuangan	10	98.236.254.546	83.415.953.971	Finance income
Keuntungan atas selisih kurs - bersih		8.071.810	150.706.178	Gain on foreign exchange - net
Keuntungan lain-lain - bersih		22.777.009.760	305.794.049	Other gains - net
LABA SEBELUM PAJAK		59.962.101.673	21.124.300.726	PROFIT BEFORE TAX
MANFAAT PAJAK	26c	3.931.217.828	20.676.370.493	TAX BENEFITS
LABA TAHUN BERJALAN		63.893.319.501	41.800.671.219	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) NET OF TAX
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not reclassified subsequently to profit or loss:
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja pasti	27	872.133.150	(362.467.631)	Actuarial gain (loss) of defined benefit plan
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	26c	(191.869.293)	79.742.879	Tax of actuarial gain (loss)
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak		680.263.857	(282.724.752)	Total other comprehensive income (loss) for the year - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		64.573.583.358	41.517.946.467	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		63.903.455.804	41.799.739.448	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		(10.136.302)	931.771	Non-controlling interests
JUMLAH		63.893.319.502	41.800.671.219	TOTAL
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		64.583.720.080	41.517.025.840	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		(10.136.722)	920.627	Non-controlling interests
JUMLAH		64.573.583.358	41.517.946.467	TOTAL
LABA PER SAHAM	28	22	14	EARNINGS PER SHARE

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Modal disetor/ <i>Paid-up capital stock</i> Rp	Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis entitas sepengendali/ <i>Equity in subsidiary resulting from business combination under common control</i> Rp	Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i> Rp	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i> Rp	Saldo laba/ <i>Retained Earnings</i>		Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk/ <i>Total equity attributable to Owners of the Company</i> Rp	Kepentingan nonpengendali/ <i>Non-controlling interests</i> Rp	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i> Rp	
					<i>Dicadangkan/ Appropriate</i> Rp	<i>Belum dicadangkan/ Unappropriated</i> Rp				
Saldo per 1 Januari 2024	73.212.375.000	16.182.444.756	253.708.206.359	2.045.835.221	2.000.000.000	105.804.453.049	452.953.314.385	1.145.335.357	454.098.649.742	Balance as of January 1, 2024
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	41.799.739.448	41.799.739.448	931.771	41.800.671.219	Profit for the year
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali (Catatan 20)	-	(16.182.444.756)	(27.807.431.426)	-	-	-	(43.989.876.182)	-	(43.989.876.182)	Difference in value of business combination transaction among entities under common control (Note 20)
Kerugian aktuarial atas program imbalan kerja pasti	-	-	-	(282.713.608)	-	-	(282.713.608)	(11.144)	(282.724.752)	Actuarial losses on defined benefit obligation
Saldo per 31 Desember 2024	73.212.375.000	-	225.900.774.933	1.763.121.613	2.000.000.000	147.604.192.497	450.480.464.043	1.146.255.984	451.626.720.027	Balance as of December 31, 2024
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	63.903.455.803	63.903.455.803	(10.136.302)	63.893.319.501	Profit for the year
Kerugian aktuarial atas program imbalan kerja pasti	-	-	-	680.264.276	-	-	680.264.276	(419)	680.263.857	Actuarial losses on defined benefit obligation
Transaksi diakui langsung pada ekuitas Cadangan umum (Catatan 21)	-	-	-	-	2.000.000.000	(2.000.000.000)	-	-	-	Transaction recognized directly in equity Appropriation for general reserve (Note 21)
Saldo per 31 Desember 2025	<u>73.212.375.000</u>	<u>-</u>	<u>225.900.774.933</u>	<u>2.443.385.889</u>	<u>4.000.000.000</u>	<u>209.507.648.300</u>	<u>515.064.184.122</u>	<u>1.136.119.263</u>	<u>516.200.303.385</u>	Balance as of December 31, 2025

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2025 Rp	2024 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		154.241.265.487	155.346.648.062	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada:				Cash paid to:
Pemasok		(264.036.544.828)	(216.658.200.175)	Suppliers
Komisaris, direksi dan karyawan		(31.686.453.755)	(30.611.603.146)	Commissioners, directors, and employees
Kas digunakan untuk operasi		(141.481.733.096)	(91.923.155.259)	Cash used for operations
Pembayaran pajak penghasilan	26	(1.253.675.971)	(2.866.439.375)	Income tax paid
Penerimaan dari klaim pengembalian pajak	26	1.277.467.372	-	Cash received from claim for tax refund
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasional		(141.457.941.695)	(94.789.594.634)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	9	(14.348.016.124)	(3.326.704.668)	Acquisition of property, plant and equipment
Penerimaan dari pendapatan bunga		2.212.588.200	1.049.444.216	Cash received from interest income
Uang muka perolehan aset tetap		-	(2.675.750.818)	Advance for purchase property, plant and equipment
Perolehan aset lainnya		-	(24.229.615.585)	Addition of other assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(12.135.427.924)	(29.182.626.855)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman berjangka	16	160.325.854.910	144.132.117.174	Proceeds from term loans
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	29	150.000.000.000	25.000.000.000	Proceeds loan from related parties
Akuisisi entitas sepengendali	20	-	(31.600.000.000)	Acquisition of entity under common control
Pembayaran bunga obligasi		(38.631.731.565)	(23.553.056.625)	Payment of interest bonds
Pembayaran pinjaman berjangka	16	(17.339.226.501)	(11.702.233.678)	Payment of term loans
Pembayaran bunga pinjaman berjangka		(23.600.311.622)	(11.397.739.788)	Payment of interests term loans
Pembayaran bunga pinjaman dari pihak berelasi		(13.394.561.556)	(7.177.210.037)	Payment of interest loan from related parties
Pembayaran pinjaman dari pihak berelasi	29	(7.299.954.666)	(3.328.584.320)	Payment of loan from related parties
Pembayaran utang bank		(1.614.285.708)	(1.614.285.717)	Payment of bank loans
Pembayaran bunga utang bank		(1.285.628.668)	(709.613.714)	Payment of interest bank loans
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		207.160.154.624	78.049.393.295	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		53.566.785.005	(45.922.828.194)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN TANPA CERUKAN BANK	6	21.811.602.002	67.734.430.196	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR WITHOUT BANK OVERDRAFT
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN TANPA CERUKAN BANK	6	75.378.387.007	21.811.602.002	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR WITHOUT BANK OVERDRAFT
CERUKAN BANK	13	23.950.149.122	15.492.118.620	BANK OVERDRAFT
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		99.328.536.129	37.303.720.622	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Arkora Hydro Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Agustus 2010 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-40544.A.01.01. Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28601 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 13 September 2011. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 58 tanggal 16 September 2022 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui Penawaran Umum. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0184868.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 16 September 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan melakukan penyertaan modal pada entitas lain. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Treasury Tower Lantai 9 Unit G-H District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Entitas induk terakhir dan pemegang saham Perusahaan oleh PT Arkora Bakti Indonesia.

Susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2025 dan 2024/
December 31, 2025 and 2024

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

Arya Pradana Setiadharmas
Iwan Hadiangoro
Drs. Indarto S.H.

Direksi
Direktur Utama
Direktur

Aldo Henry Artoko
Ismu Nugroho
Ricky Hartono
Boy Gemino Kalauserang

Komite Audit
Ketua
Anggota

Drs. Indarto S.H.
Anindita Wijaya Putri
Dwitya Putri Citrarhasmi

Sekretaris Perusahaan

Ricky Hartono

Internal Audit

Mohammad Bahrudin

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Arkora Hydro Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 15 dated August 5, 2010 of Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta. The Notarial Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-40544.AH.01.01.Year 2010 dated August 18, 2010 and was published in State Gazette No. 73, Supplement No. 28601 dated September 13, 2011. The articles of association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 58 dated September 16, 2022 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta relates to increase the Company's issued and fully paid capital through Initial Public Offering. This change was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia through Decision Letter No. AHU-0184868.AH.01.11 Tahun 2022 dated September 16, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the purpose and objective of the Company's activities are in power plant and into capital participation in other entities. The Company started its commercial operations in 2017.

The Company started its commercial operations in 2017.

The Company's head office is located at Treasury Building 9th Floor Unit G-H District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta.

Ultimate shareholder and parent company of the Company is PT Arkora Bakti Indonesia.

The Company's management consists of the following:

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioners
Independent Commissioners

Directors
President Director
Directors

Audit Committee
Chairman
Members

Corporate Secretary

Internal Audit

PT ARKORA HYDRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT ARKORA HYDRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan dan entitas anak memiliki 253 karyawan (tidak diaudit) (31 Desember 2024: 179 karyawan (tidak diaudit)).

As of December 31, 2025, the Company and subsidiaries had 253 employees (unaudited), (December 31, 2024: 179 employees (unaudited)).

b. Entitas Anak

Rincian entitas anak pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

b. Consolidated Subsidiaries

Details of the subsidiaries at the end of the reporting period are as follows:

Nama Entitas Anak/ Name of Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha/ Business activities	Persentase Kepemilikan Efektif/ Effective ownership percentage		Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Jumlah Aset/Total Assets Sebelum eliminasi/Before elimination	
			2025	2024		31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
						Rp	Rp
Entitas anak yang dimiliki langsung / Directly owned subsidiaries							
PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,98%	99,98%	Maret/March 2020	296.183.212.011	310.373.667.315
PT Nosu Hydro (NH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	83.269.613.839	2.696.469.276
PT Sulawesi Hidro Mandiri (SHM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	59.566.410.036	59.305.580.800
PT Arkora Guna Nergi (AGN)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,94%	99,94%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	32.159.636.414	32.166.117.034
PT Arkora Hidro Pasifik (AHP)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,84%	99,84%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	29.144.947.961	29.155.041.013
PT Arkora Tenaga Matahari (ATM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	100,00%	100,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	20.723.504.105	20.371.007.738
PT Arkora Energi Merah Putih (AEMP) (Sebelumnya/previously PT Arkora Luwu Timur Mandiri ("ALTM"))	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	6.903.585.345	1.905.978.733
PT Hydra Sulawesi (HS)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	4.485.004.986	1.986.398.375
PT Arkora Tomoni Hydro (ATH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	2.919.039.221	2.319.432.610
PT Arkora Hidro Tenggara (AHT)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,20%	99,20%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	2.518.676.701	2.519.080.230
PT Arkora Pembangkitan Hijau (APH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.987.858.684	1.987.885.367
PT Arjuna Hidro (Arjuna)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.909.980.198	1.888.272.633
PT Tirta Energi Lestari (TEL)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,60%	99,60%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	575.723.162	576.140.662
Entitas anak yang dimiliki secara tidak langsung / Indirectly owned subsidiaries							
PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	2024	551.341.190.245	508.262.078.472
PT Arkora Energi Baru (AEB)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,93%	99,93%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	275.924.187.452	185.552.720.238
PT Arkora Hydro Malili (AHM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	272.961.096.043	100.919.939.626
PT Arkora Ekon Indonesia (AEKON)	Jakarta	Jasa konstruksi/ Construction	99,83%	99,83%	2024	45.052.497.483	35.646.615.845
PT Global Metal Raya (GMR)	Jakarta	Real estate and Aktivitas profesional/ Real estate and service	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	18.880.000.000	18.880.000.000
PT Arkora Kalimantan Energi Hijau (AKEH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,16%	99,16%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	7.475.296.584	6.599.954.884
PT Arkora Energi Tanggamus (AET)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,93%	99,93%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	5.546.543.766	5.546.947.658
PT Arkora Hydro Kalimantan (AHK)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	5.454.394.493	3.672.815.771

PT ARKORA HYDRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT ARKORA HYDRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

Nama Entitas Anak/ Name of Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha/ Business activities	Persentase Kepemilikan Efektif/ Effective ownership percentage		Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Jumlah Aset/Total Assets Sebelum eliminasi/Before elimination	
			2025	2024		31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
						Rp	Rp
<u>Entitas anak yang dimiliki secara tidak langsung/Indirectly owned subsidiaries</u>							
PT Arkora Energi Mandiri (AEM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	2.506.893.903	2.508.577.514
PT Arkora Energi Indonesia (AEI)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	-	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	2.504.375.000	-
PT Arkora Hydro Pamulihan (AHPL)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,93%	99,93%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	2.501.190.000	2.501.602.500
PT Pembangunan Hydro Indonesia (PHI)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	-	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	2.500.000.000	-
PT Arkora Merah Putih (AMP)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	-	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	2.500.000.000	-
PT Arkora Padalembara Terbarukan (APT)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	2.349.099.356	2.378.682.249
PT Tenggara Hidro (TH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	98,01%	98,01%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.901.873.327	1.902.236.713
PT Arkora Sulawesi Tenggara (AST)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.885.479.818	1.885.856.270
PT Arkora Atlantik (AA)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.857.262.391	2.275.923.891
PT Arkora Hidronesia (AH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,20%	99,20%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.498.657.272	1.499.033.727
PT Granif Konsultan (GK)	Jakarta	Jasa konstruksi/ Construction	99,71%	99,71%	2011	951.486.035	851.274.640

Pada tanggal 17 Juni 2025, PT Arkora Energi Merah Putih dan PT Arjuna Hidro (entitas anak) telah mendirikan dua entitas anak baru dengan nama PT Pembangunan Hydro Indonesia ("PHI") dan PT Arkora Merah Putih ("AMP"). Pendirian tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Pendirian masing-masing dengan No. 20 dan 21 tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0048808.AH.01.01.Tahun 2025 dan AHU-0048809.AH.01.01. Tahun 2025 dengan tanggal 17 Juni 2025. Dalam anggaran dasar dua entitas anak ini disebutkan bahwa kegiatan usahanya adalah pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi dan/atau bertegangan ekstra tinggi dan/atau bertegangan ultra tinggi termasuk gardu-gardu induknya. Susunan pemegang saham dari PHI dan AMP terdiri dari PT Arkora Energi Merah Putih dan PT Arjuna Hidro dengan persentase kepemilikan masing-masing 2.499 lembar (99,96%) dan 1 lembar (0,04%) dengan jumlah saham sebanyak 2.500 lembar dan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000.

On June 17, 2025, PT Arkora Energi Merah Putih and PT Arjuna Hidro (subsidiaries) has established new subsidiaries Company named PT Pembangunan Hydro Indonesia ("PHI") dan PT Arkora Merah Putih ("AMP"). The establishment of the both entities has been stated through the Deed of Establishment No. 20 and 21 dated February 17, 2025 made by Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notary in Jakarta, respectively and has been ratified by the Minister of Law of Republic of Indonesia No. AHU-0048808.AH.01.01.Tahun 2025 and AHU-0048809.AH.01.01. Tahun 2025 dated June 17, 2025, respectively. In Article of the both entities, it is stated that the business activities are power generation and power transmission from generation to distribution network through high voltage and/or extra high voltage and/or ultra high voltage power network including substations. The composition of shareholder from PHI dan AMP consists of PT Arkora Energi Merah Putih dan PT Arjuna Hidro with percentage of ownership amounted to 2,499 shares (99.96%) and 1 share (0.04%), respectively with total 2,500 shares an nominal value of the shares amounting Rp 1,000,000.

Pada tanggal 18 Februari 2025, PT Hydra Sulawesi dan PT Arjuna Hidro (entitas anak) telah mendirikan entitas anak baru dengan nama PT Arkora Energi Indonesia ("AEI"). Pendirian tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Pendirian No. 26 tanggal 18 Februari 2025 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0013295.AH.01.01.Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025. Dalam anggaran dasar AEI disebutkan bahwa kegiatan usaha dari AEI adalah pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi dan/atau bertegangan ekstra tinggi dan/atau bertegangan ultra tinggi termasuk gardu-gardu induknya. Susunan pemegang saham dari AEI terdiri dari PT Hydra Sulawesi dan PT Arjuna Hidro dengan persentase kepemilikan masing-masing 2.499 lembar (99,96%) dan 1 lembar (0,04%) dengan jumlah saham sebanyak 2.500 lembar dan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000.

Pada tanggal 18 Februari 2025, berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham PT Arkora Luwu Timur Mandiri ("ALTM") (entitas anak) menyetujui perubahan pasal 1 ayat 1 nama ALTM dalam anggaran dasar ALTM semula PT Arkora Luwu Timur Mandiri menjadi PT Arkora Energi Merah Putih. Perubahan tersebut telah dituangkan ke dalam Akta No. 27 tanggal 18 Februari 2025 oleh Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0011155.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025.

Pada tanggal 13 Februari 2024, APH dan Arjuna (entitas anak) telah mendirikan entitas anak baru dengan nama PT Arkora Energi Mandiri ("AEM"). Pendirian AEM tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Pendirian No. 23 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0012060.AH.01.01 tahun 2024 tanggal 13 Februari 2024. Dalam anggaran dasar AEM disebutkan bahwa kegiatan usaha dari AEM adalah pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru terbarukan yang berasal dari aliran air (PLTA). Susunan pemegang saham dari AEM terdiri dari APH dan Arjuna dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 99,96% dan 0,04% dengan jumlah saham sebanyak 2.500 lembar dan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000.

On February 18, 2025, PT Hydra Sulawesi dan PT Arjuna Hidro (subsidiaries) has established a new subsidiary Company named PT Arkora Energi Indonesia ("AEI"). The establishment of AEI has been stated through the Deed of Establishment No. 26 dated February 18, 2025 made by Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notary in Jakarta and has been ratified by the Minister of Law of Republic of Indonesia No. AHU-0013295.AH.01.01.Year2025 dated February 18, 2025. In Article of the AEI, it is stated that the business activities of AEI are power generation and power transmission from generation to distribution network through high voltage and/or extra high voltage and/or ultra high voltage power network including substations. The composition of shareholder from AEI consists of PT Hydra Sulawesi dan PT Arjuna Hidro with percentage of ownership amounted to 2,499 shares (99.96%) and 1 share (0.04%), respectively with total 2,500 shares an nominal value of the shares amounting Rp 1,000,000.

On February 18, 2025, based on a circular resolution of the shareholders of PT Arkora Luwu Timur Mandiri ("ALTM") (a subsidiary) approved the amendment of article 1 paragraph 1 of the ALTM's name in the ALTM's articles of association from PT Arkora Luwu Timur Mandiri to PT Arkora Energi Merah Putih. The amendment has been set forth in Deed No. 27 dated 18 February 2025 by Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notary in Jakarta, and has been approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-0011155.AH.01.02. Tahun 2025 dated February 18, 2025.

On February 13, 2024, APH and Arjuna (subsidiaries) has established a new subsidiary Company named PT Arkora Energi Mandiri ("AEM"). The establishment of AEM has been stated through the Deed of Establishment No. 23 dated 13 February 2024 made by Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notary in Jakarta and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0012060.AH.01.01 year 2024 dated February 13, 2024. In Article of the AEM mentioned the activities of AEM is generation of electric power through new and renewable energy sources originating from running water (Hydro power plants). The composition of shareholder from AEM consist of APH and Arjuna with percentage of ownership amounted to 99.96% and 0.04%, respectively, with total 2,500 shares an nominal value of the shares amounting Rp 1,000,000.

Pada tanggal 27 Maret 2024, AHP dan Arjuna (entitas anak) telah mendirikan entitas anak baru dengan nama PT Arkora Ekon Indonesia ("AEKON"). Pendirian AEKON tersebut telah dituangkan ke dalam akta Pendirian No. 59 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0023719.AH.01.01.tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024. Dalam anggaran dasar AEKON disebutkan bahwa kegiatan usaha dari AEKON adalah konstruksi bangunan dan infrastruktur untuk membantu pihak berelasi dalam pembangunan pembangkitan tenaga listrik pada pelanggan. Susunan pemegang saham dari AEKON terdiri dari APH dan Arjuna dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 99,99% dan 0,01% dengan jumlah saham sebanyak 10.000 lembar dan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000.

Pada tanggal 24 Mei 2024, PT Arkora Indonesia ("AI") dan PT Arkora Ekon Indonesia ("AEKON") menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Unit Usaha Jasa Konstruksi dimana AI sebagai pemilik unit usaha yang dialihkan mengadakan penjualan dan pengalihan unit usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh AI kepada AEKON dengan nilai transaksi sebesar Rp31.600.000.000. Tujuan dilakukan transaksi ini adalah mengalihkan unit usaha yang terdiri dari aktiva tetap yang dipergunakan untuk kegiatan operasional. Transaksi ini dijelaskan secara mendetail pada Catatan 20.

c. Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO") Perusahaan

Dalam rangka IPO Perusahaan, pada tanggal 30 Juni 2022, Perusahaan memperoleh pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam suratnya No. S-117/D.04/2022 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 608.895.000 saham (20,79% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham) dengan harga penawaran Rp 300 per saham. Pada tanggal 8 Juli 2022, Perusahaan mendapatkan persetujuan pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dari Direksi BEI.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Amandemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan amandemen-amandemen PSAK berikut yang efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan tersebut tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

On March 27, 2024, AHP and Arjuna (subsidiaries) has established a new subsidiary Company named PT Arkora Ekon Indonesia ("AEKON"). The establishment of AEKON has been stated through the Deed of Establishment No. 59 dated March 27, 2024 made by Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0023719.AH.01.01. Year 2024 dated March 27, 2024. In the articles of association of AEKON, it is stated that the business activity of AEKON is the construction of buildings and infrastructure to assist related parties in the construction of power generation at customers. The composition of shareholder from AEKON consist of APH and Arjuna with percentage of ownership amounted to 99.99% and 0.01%, respectively, with total 10,000 shares an nominal value of the shares amounting Rp 1,000,000.

On May 24, 2024, PT Arkora Indonesia ("AI") and PT Arkora Ekon Indonesia ("AEKON") entered into a Sale and Purchase and Business Unit Transfer Agreement whereby AI as the owner of the transferred construction service business unit enter into a sale and transfer of the construction service business unit conducted by AI to AEKON with a transaction value of Rp31,600,000,000. The purpose of this transaction is to transfer the business unit which consists of fixed assets used for operational activities. This transaction explanation in detail on Note 20.

c. The Company's Initial Public Offering of Shares ("IPO")

In relation to the IPO of the Company's shares, on June 30, 2022, the Company received the effective statement from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK") in its Letter No. S-117/D.04/2022 to conduct an Initial Public Offering of 608,895,000 shares (20.79% of total shares issued and fully paid-up after initial public offering) with exercise price of Rp 300 per share. On July 8, 2022, the Company received approval for the listing of its shares on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") from the Board of Directors of the IDX.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATION OF PSAK ("ISAK")

a. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Group has applied the following amendments to PSAK, which are mandatorily effective for reporting period beginning on or after January 1, 2025. The adoptions have not had any material impact on the disclosures or on the amounts reported in these consolidated financial statements.

PSAK 221 (amendemen) Kekurangan Ketertukaran

Grup telah mengadopsi amendemen PSAK 221 untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amendemen tersebut menjelaskan bagaimana menilai apakah mata uang dapat dipertukarkan, dan bagaimana menentukan nilai tukar jika tidak dapat dipertukarkan.

PSAK 117 (amendemen) Kontrak Asuransi

Grup telah menerapkan amendemen PSAK 117 dan amendemen terkait untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. PSAK 117 menetapkan prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kontrak asuransi dan menggantikan PSAK 104 Kontrak Asuransi, PSAK 328 Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian, dan PSAK 336 Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa.

PSAK 117 menjelaskan model umum, yang dimodifikasi untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, yang dideskripsikan sebagai pendekatan biaya variabel. Model umum disederhanakan jika kriteria tertentu terpenuhi dengan mengukur kewajiban untuk pertanggungan yang tersisa menggunakan pendekatan alokasi premi. Model umum menggunakan asumsi saat ini untuk memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan dan secara eksplisit mengukur biaya ketidakpastian tersebut. Ini memperhitungkan suku bunga pasar dan dampak dari pendapat dan jaminan pemegang polis.

Grup tidak memiliki kontrak yang memenuhi definisi kontrak asuransi berdasarkan PSAK 117.

b. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

- Amendemen PSAK 338 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
- Amendemen PSAK 109 Instrumen Keuangan dan Amendemen PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

PSAK 221 (amendment) Lack of Exchangeability

The Group has adopted the amendments to PSAK 221 for the first time in the current year. The amendments specify how to assess whether a currency is exchangeable, and how to determine the exchange rate when it is not.

PSAK 117 (amendment) Insurance Contracts

The Group has adopted PSAK 117 and the related amendments for the first time in the current year. PSAK 117 establishes the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of insurance contracts and supersedes PSAK 104 Insurance Contracts, PSAK 328 Accounting for Loss Insurance Contracts, and PSAK 336 Accounting for Life Insurance Contracts.

PSAK 117 outlines a general model, which is modified for insurance contracts with direct participation features, described as the variable fee approach. The general model is simplified if certain criteria are met by measuring the liability for remaining coverage using the premium allocation approach. The general model uses current assumptions to estimate the amount, timing and uncertainty of future cash flows and it explicitly measures the cost of that uncertainty. It takes into account market interest rates and the impact of policy holders' options and guarantees.

The Group does not have any contracts that meet the definition of an insurance contract under PSAK 117.

b. Standard and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAKs relevant to the Group were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2026

- Amendment to PSAK 338 *Business Combination Under Common Control*
- Amendment to PSAK 109 *Financial Instruments* Keuangan dan Amendment to PSAK 107 *Financial Instruments : Disclosures on Classification and Measurement of Financial Instruments*

- Amandemen PSAK 109 *Instrumen Keuangan* dan Amandemen PSAK 107 *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam*

- Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

- PSAK 118 *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*
- PSAK 119 *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan*

Manajemen tidak memperkirakan bahwa penerapan amandemen dan standar baru yang tercantum di atas akan berdampak material pada laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode mendatang, kecuali seperti yang dijelaskan di bawah ini.

PSAK 118 *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*

PSAK 118 menggantikan PSAK 201, dengan banyak persyaratan dalam PSAK 201 yang tidak berubah dan dilanjutkan serta melengkapinya dengan persyaratan-persyaratan baru. Selain itu, beberapa paragraf dari PSAK 201 telah dipindahkan ke PSAK 208 dan PSAK 107. Serta, terdapat perubahan minor pada PSAK 207 dan PSAK 233 Laba per Saham.

PSAK 118 memperkenalkan persyaratan baru untuk:

- menyajikan kategori-kategori tertentu dan subtotal yang ditentukan dalam laporan laba rugi
- memberikan pengungkapan tentang ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM) dalam catatan laporan keuangan
- perbaikan agregasi and disagregasi.

Entitas diwajibkan untuk menerapkan PSAK 118 untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diizinkan. Amandemen PSAK 207 dan PSAK 233, serta amandemen PSAK 208 dan PSAK 107, berlaku ketika entitas menerapkan PSAK 118. PSAK 118 memerlukan penerapan retrospektif dengan ketentuan transisi.

Manajemen mengantisipasi bahwa penerapan amandemen ini dapat berdampak pada laporan keuangan konsolidasi Grup pada periode mendatang.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Manajemen masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar, amandemen dan penyesuaian tahunan tersebut pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

- Amendment to PSAK 109 *Financial Instruments Keuangan* dan Amendment to PSAK 107 *Financial Instruments: Disclosures on Contracts Referencing Nature-dependent Electricity*

- Annual Improvement 2024 SAK Indonesia

Effective for periods beginning on or after January 1, 2027

- PSAK 118 *Presentation and Disclosures in Financial Statements*
- PSAK 119 *Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures*

Management does not expect that the adoption of the amendments and new standards listed above will have a material impact on the consolidated financial statements of the Group in future periods, except if indicated below.

PSAK 118 *Presentation and Disclosures in Financial Statements*

PSAK 118 replaces PSAK 201, carrying forward many of the requirements in PSAK 201 unchanged and complementing them with new requirements. In addition, some paragraphs from PSAK 201 have been moved to PSAK 208 and PSAK 107. Furthermore, there are minor amendments to PSAK 207 and PSAK 233 Earnings per Share.

PSAK 118 introduces new requirements to:

- present specified categories and defined subtotals in the statement of profit or loss
- provide disclosures on management-defined performance measures (MPMs) in the notes to the financial statements
- improve aggregation and disaggregation.

An entity is required to apply PSAK 118 for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2027, with earlier application permitted. The amendments to PSAK 207 and PSAK 233, as well as the revised PSAK 208 and PSAK 107, become effective when an entity applies PSAK 118. PSAK 118 requires retrospective application with specific transition provisions.

Management anticipates that the application of these amendments may have an impact on the Group's consolidated financial statements in future periods.

As of the issuance date of the consolidated financial statements, Management still evaluating the potential impact of these standards, amendments and annual improvements to the Group's consolidated financial statements.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas, Grup memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian ditentukan atas dasar tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan konsolidasian, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Grup memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and capital market regulation namely Regulation No. VIII.G.7 about Presentation and Disclosure of Listed or Public Company Financial Statement.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these consolidated financial statements is determined on such a basis.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The directors have, at the time of approving the consolidated financial statements, a reasonable expectation that the Group has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the consolidated financial statements.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola pemilikan suara dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Kepentingan nonpengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham nonpengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

The Company reassesses whether or not it controls an *investee* if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an *investee*, it has power over the *investee* when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the *investee* unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an *investee* are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous stockholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali. Jumlah penghasilan komprehensif entitas anak diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi dihitung sebagai /perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dikurangi liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan / diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk perlakuan akuntansi berikutnya dalam PSAK 109 *Instrumen Keuangan* (PSAK 109), ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interests. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Changes in the Group's ownership interest in subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Group loses control of a subsidiary, the gain or loss recognized in profit or loss is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), less liabilities of the subsidiary and any non-controlling interests. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/ permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 109 *Financial Instruments* (PSAK 109), when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate.

d. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar, kecuali untuk:

- aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pengaturan imbalan kerja diakui dan diukur masing-masing berdasarkan PSAK 212 *Pajak Penghasilan* (PSAK 212) dan PSAK 219 *Imbalan Kerja* (PSAK 219);
- instrumen liabilitas atau ekuitas yang berkaitan dengan perjanjian pembayaran berbasis saham dari pihak yang diakuisisi atau pengaturan pembayaran berbasis saham Grup yang dibuat untuk menggantikan pengaturan pembayaran berbasis saham dari pihak yang mengakuisisi diukur berdasarkan PSAK 102 pada tanggal akuisisi; dan

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih tersebut diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis mencakup pengaturan imbalan kontingen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontingen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontingen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired, and the liabilities assumed are recognized at their fair value, except that:

- deferred tax assets or liabilities and assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with PSAK 212 *Income Taxes* (PSAK 212) and PSAK 219 *Employee Benefits* (PSAK 219), respectively;
- liabilities or equity instruments related to share-based payment arrangements of the acquiree, or share-based payment arrangements of the Group entered into to replace share-based payment arrangements of the acquirer are measured in accordance with PSAK 102 at the acquisition date; and

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a gain from bargain purchase.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi lain diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui diakui di laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup (termasuk operasi bersama) atas pihak diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut seperti jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran (lihat di atas), pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

e. Transaksi dan Saldo Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan entitas Grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi lain diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui diakui di laba rugi.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interests (including joint operations) in the acquired entity are remeasured to their acquisition-date fair value and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if those interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period (see above), or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Foreign Currency Transactions and Translation

The individual financial statements of each entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Company are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of Group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Selisih kurs diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

f. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Exchange differences are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
 - viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Perjanjian Jasa Konsesi

ISAK 112, *Perjanjian Konsesi Jasa*, memberikan panduan atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta jika: (a) pemberi konsesi mengendalikan atau meregulasi jasa apa yang harus diberikan oleh operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harganya dan (b) pemberi konsesi mengendalikan melalui kepemilikan, hak manfaat, atau bentuk lain atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

ISAK 112 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 112 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 229 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa yang memenuhi kriteria ISAK 112 sebagai model aset keuangan dan aset takberwujud.

Grup mengakui aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa ketika Grup memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas dari atau atas diskresi pemberi konsesi dan hak untuk menerima kas. Aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada aset keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

g. Service Concession Arrangements

ISAK 112, *Service Concession Arrangement*, applies to public-to-private service concession arrangements if: (a) the grantor controls or regulates what services the operator must provide with the infrastructure, to whom it must provide them, and at what price and (b) the grantor controls through ownership, beneficial entitlement or otherwise any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.

ISAK 112 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 112 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 229 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement that fulfill the criteria ISAK 112 as a financial asset and intangible asset model.

The Group recognized a financial asset arising from a service concession arrangement when it has unconditional contractual right to receive cash from or at the direction of the grantor for the construction and the right to receive cash. Such financial assets are measured at fair value on initial recognition and classified as financial assets measured at amortized cost.

The Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial asset has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial asset at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Grup mengakui aset takberwujud yang timbul dari perjanjian konsesi jasa ketika Grup memiliki hak untuk membebaskan pengguna jasa atas penggunaan infrastruktur. Aset takberwujud yang diterima sebagai imbalan untuk menyediakan jasa konstruksi dalam perjanjian konsesi jasa diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima pada saat pengakuan awal. Selanjutnya setelah pengakuan awal, aset takberwujud diukur sebesar biaya perolehan, yang meliputi biaya pinjaman modal dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Estimasi masa manfaat aset takberwujud adalah periode sejak Grup dapat menagih pengguna atas penggunaan infrastruktur hingga akhir periode konsesi.

Jika Grup dibayar untuk jasa konstruksi sebagian dengan aset keuangan dan sebagian dengan aset takberwujud, maka setiap komponen imbalan dicatat secara terpisah dan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

h. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Aset keuangan

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

The Group recognized an intangible asset arising from a service concession arrangement when it has right to charge for the use of the infrastructure. An intangible asset received as consideration for providing construction services in a service concession arrangement is measured at fair value of the benefit received or to be received on initial recognition. Subsequent to initial recognition, the intangible assets is measured at cost, which includes capital borrowing cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. The estimated useful life of the intangible assets is the period from when the Group is able to charge the user for the use of the infrastructure to the end of the concession period.

If the Group is paid for the construction services partly by a financial asset and partly by an intangible asset, then each component of the consideration is accounted for separately and is initially recognized at the fair value of the consideration received or to be received.

h. Financial Instrument

Financial assets and financial liabilities are recognized on the consolidated statement of financial position when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Financial assets

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk saldo lancar ketika dampak diskonto tidak material.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos "Penghasilan keuangan".

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost, except for short-term balances when the effect of discounting is immaterial.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "Interest income" line item.

Impairment of financial assets

The Group recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on trade and other accounts receivable and contract assets. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

Grup selalu mengakui ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

The Group always recognizes lifetime ECL for trade accounts receivable. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

For all other financial instruments, the Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's core operations.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

- penurunan yang signifikan pada peringkat kredit eksternal instrumen keuangan (jika ada) atau peringkat kredit internal, baik secara aktual maupun yang diperkirakan;
- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;
- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi peminjam, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi;
- peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan lainnya dari peminjam yang sama;
- perubahan signifikan yang tidak menguntungkan baik secara aktual atau yang diperkirakan dalam lingkungan peraturan, ekonomik, atau lingkungan teknologi peminjam yang mengakibatkan perubahan signifikan atas kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Grup membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 60 hari, kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Grup mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah jika i) instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah, ii) debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat dan iii) memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- significant deterioration in the financial instrument's external (if available) or internal credit rating;
- existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations;
- an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor;
- significant increases in credit risk on other financial instruments of the same debtor;
- an actual or expected significant adverse change in the regulatory, economic, or technological environment of the debtor that results in a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations.

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Group presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 60 days past due, unless the Group has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

The Group assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if i) the financial instrument has a low risk of default, ii) the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and iii) adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

Grup menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal '*investment grade*' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal '*performing*'. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

Grup secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan didukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam
- pelanggaran kontrak, seperti kejadian gagal bayar atau tunggakan
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- telah memberikan kepada peminjam suatu konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu karena kesulitan keuangan atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

The Group considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of '*investment grade*' in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of '*performing*'. *Performing* means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower
- a breach of contract, such as a default or past due event
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties ;or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Kebijakan penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihanyang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan; untuk kontrak jaminan keuangan, eksposur mencakup jumlah yang ditarik pada tanggal pelaporan, ditambah dengan jumlah yang diperkirakan akan ditarik di masa depan sebelum tanggal gagal bayar yang ditentukan berdasarkan tren historis, pemahaman Grup mengenai kebutuhan pembiayaan masa depan yang spesifik dari debiturnya, dan informasi perkiraan masa depan lainnya yang relevan.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Grup, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Untuk piutang sewa, arus kas yang digunakan untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian konsisten dengan arus kas yang digunakan dalam mengukur piutang sewa berdasarkan PSAK 116.

Apabila kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur diukur secara kolektif untuk kasus dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen individual tidak tersedia, instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- Sifat instrumen keuangan (yaitu piutang usaha, piutang lain-lain, piutang sewa pembiayaan dan jumlah tagihan kepada pelanggan masing-masing dinilai sebagai grup terpisah. Piutang pihak berelasi yang dinilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas dasar individual);
- Status jatuh tempo;
- Sifat, besaran dan jenis industri debitur;
- Sifat jaminan untuk piutang sewa pembiayaan; dan
- Peringkat risiko kredit jika tersedia.

Write-off policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date; for financial guarantee contracts, the exposure includes the amount drawn down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by default date determined based on historical trend, the Group's understanding of the specific future financing needs of the debtors, and other relevant forward-looking information.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at the original effective interest rate. For a lease receivable, the cash flows used for determining the expected credit losses is consistent with the cash flows used in measuring the lease receivable in accordance with PSAK 116.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are grouped on the following basis:

- Nature of financial instruments (i.e. The Group's trade and other receivables, finance lease receivables and amounts due from customers are each assessed as a separate group. Loans to related parties are assessed for expected credit losses on an individual basis);
- Past-due status;
- Nature, size and industry of debtors;
- Nature of collaterals for finance lease receivables; and
- External credit ratings where available.

Pengelompokan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Jika Grup telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan pada jumlah yang sama dengan ECL sepanjang umur pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan ini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umur tidak lagi terpenuhi, Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan ini.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan menyesuaikan jumlah tercatat melalui akun penyisihan kerugian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

The grouping is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each group continue to share similar credit risk characteristics.

If the Group has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Group measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date.

The Group recognise an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Ketika Grup bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap fee (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

When the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10% different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

i. Kas dan Setara Kas

Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Untuk keperluan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas dan setara kas sebagaimana didefinisikan di atas, dikurangi cerukan bank yang terutang yang dapat ditagih sesuai permintaan (*repayable on demand*) dan merupakan bagian integral dari manajemen kas grup. Cerukan tersebut disajikan sebagai cerukan bank dalam laporan posisi keuangan.

j. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Kendaraan	4-8	12,5%-25%	Vehicles
Peralatan	2-8	12,5%-50%	Equipment
Renovasi bangunan	3-30	3,33%-33,33%	Building improvement
Jaringan tegangan menengah	4-15	6,67%-25%	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	20-30	3,33%-5%	Project building
Turbine	4-15	6,67%-25%	Turbine

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

i. Cash and cash equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

For the purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash and cash equivalents as defined above, net of outstanding bank overdrafts which are repayable on demand and form an integral part of the Group's cash management. Such overdrafts are presented as bank overdraft in the statement of financial position.

j. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at costs, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

The estimated useful lives, residual value and depreciation method is reviewed at each year-end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at cost and is not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset yang telah disusutkan sepenuhnya yang masih digunakan tetap termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan – kecuali *Goodwill*

Pada akhir setiap periode pelaporan konsolidasian, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dengan estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.

Fully depreciated assets still in use are retained in the consolidated financial statements.

Construction in-progress is stated at cost and transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

k. Impairment of Non-Financial Asset – except for *Goodwill*

At the end of each consolidated reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

The recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

I. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, dialokasikan sejak tanggal akuisisi ke masing-masing unit penghasil kas milik Grup yang diharapkan dapat memperoleh manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan ke unit-unit tersebut.

Unit penghasil kas yang *goodwill*-nya telah dialokasikan diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan bila ada indikasi bahwa unit penghasil kas mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ditentukan untuk *goodwill* dengan menilai jumlah yang dapat dipulihkan dari masing-masing unit penghasil kas dimana *goodwill* dilekatkan. Apabila jumlah yang dapat dipulihkan dari unit penghasil kas kurang dari nilai tercatat, kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui untuk *goodwill* tidak dibalik pada periode berikutnya.

Apabila *goodwill* merupakan bagian dari unit penghasil kas dan bagian dari operasi di dalam unit penghasil kas tersebut dihentikan, *goodwill* dengan operasi yang dihentikan dimasukkan dalam jumlah tercatat operasi saat menentukan keuntungan atau kerugian dari penghentian operasi. *Goodwill* yang dihentikan dalam keadaan ini diukur berdasarkan nilai wajar relatif dari operasi yang dihentikan dan porsi unit penghasil kas yang dipertahankan.

m. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Ketika pinjaman dengan suku bunga variabel digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan dilindungi nilai dengan lindung nilai arus kas yang efektif dari risiko suku bunga, bagian efektif dari derivatif tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi ke laba rugi ketika aset kualifikasian berdampak pada laba rugi. Ketika suku bunga pinjaman tetap digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan nilai wajarnya dilindungi nilai secara efektif dari risiko suku bunga, biaya pinjaman yang dikapitalisasi mencerminkan tingkat bunga yang dilindungi nilai.

I. Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated impairment losses, if any.

For the purpose of impairment testing, goodwill from business combination is allocated to each of the Group's cash-generating unit expected to benefit from the synergies of the combination, excluded if the other assets or liabilities from acquiree placed in those units.

A cash generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually and if there is an indication that the unit may be impaired. Impairment determined for goodwill by assessing recoverable amounts from each of cash generating unit where the goodwill is pledged. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is recognized in profit and loss. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

If the goodwill is part of cash generating unit and part of discontinued operation inside those cash generating unit, the goodwill with discontinued operation recorded under operation book value when determine gain or loss from discontinued operation. Disposal goodwill in this situation measured at fair value from discontinued operation and operating cash generating unit portion.

m. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

To the extent that variable rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective cash flow hedge of interest rate risk, the effective portion of the derivative is recognized in other comprehensive income and reclassified to profit or loss when the qualifying asset impacts profit or loss. To the extent that fixed-rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective fair value hedge of interest rate risk, the capitalized borrowing costs reflect the hedged interest rate.

Biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

n. Sewa

n. Leases

Grup sebagai penyewa

The Group as lessee

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Grup merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

The Group assesses whether a contract is, or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses its incremental borrowing rate.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;
- the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan).
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Grup tidak melakukan penyesuaian tersebut selama periode yang disajikan.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used).
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The Group did not make any such adjustments during the periods presented.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 237. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position.

Grup menerapkan PSAK 236 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sebagai cara praktis, PSAK 116 mengizinkan penyewa untuk tidak memisahkan komponen nonsewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Grup tidak menggunakan cara praktis ini.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan untuk penjualan listrik diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Grup dalam pertukaran barang tersebut. Grup secara umum menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah yang utama dalam pengaturan pendapatannya. Pemenuhan kewajiban pelaksanaan diukur dengan menggunakan metode *output* berdasarkan unit yang diproduksi dan dikirim dalam bulan produksi. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meteran pengukuran listrik di titik pengiriman.

Pendapatan yang berkaitan dengan jasa konstruksi berdasarkan perjanjian konsesi jasa diakui sepanjang waktu ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Grup mencatat pendapatan tersebut dengan mengukur progres penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan hingga saat ini secara relatif terhadap perkiraan jumlah biaya kontrak. Metode pengukuran penyelesaian melibatkan penggunaan pertimbangan dan estimasi yang signifikan, termasuk estimasi jumlah biaya kontrak.

Karena Grup menyediakan lebih dari satu jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa, imbalan yang diterima dialokasikan dengan mengacu pada harga jual berdiri sendiri dari jasa yang diserahkan.

Terkait pendapatan dari perjanjian jasa konsesi, Grup mengalokasikan pembayaran yang diterima untuk setiap kWh listrik yang ditransfer ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") menjadi pelunasan pokok dan bunga aset keuangan dari proyek konsesi dan operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik yang disajikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Grup menggunakan metode nilai sisa untuk mengalokasikan jumlah pembayaran yang diterima dari PLN antara pendapatan untuk aktivitas pembiayaan dan operasi dan pemeliharaan. Penghasilan pembiayaan diakui berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik yang konstan atas saldo aset keuangan dari proyek konsesi.

The Group applies PSAK 236 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

As a practical expedient, PSAK 116 permits a lessee not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement. The Group has not used this practical expedient.

o. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with the customers for sale of electricity is recognized when electricity is delivered to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those electricity. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements. Progress towards satisfaction of the performance obligation is measured using an output method based on units produced and delivered within the production month. Quantities delivered are determined through electrical measurement meters at the delivery point.

Revenue relating to construction services under a service concession arrangement is recognised over time when the performance obligations are satisfied. The Group accounted for such revenue by measuring progress towards completion of the performance obligations based on the proportion of contract costs incurred for work performed to date relative to the estimated total contract costs. The measuring progress method involves the use of significant judgements and estimates of total contract costs.

Since the Group provides more than one service in a service concession arrangement, the consideration received is allocated with reference to the relative stand-alone selling prices of the services delivered.

For revenue from service concession arrangement, the Group allocates the consideration that it receives for each kWh of electricity delivered to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") into: repayment of principal and interest of financial assets from concession project and operation and maintenance of the power plant. The Group uses the residual value method to allocate the total consideration received from PLN between revenue for the construction service and operation and maintenance activities. Finance income is recognized based on a pattern reflecting constant period rate of return on the Group's outstanding financial assets from concession project.

Pendapatan yang berkaitan dengan jasa operasi dan pemeliharaan diakui sepanjang waktu sesuai dengan penyerahan jasa operasi dan pemeliharaan.

Beban

Beban diakui berdasarkan saat terjadi. Beban yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak meliputi beban langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak. Beban diakui pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Revenue relating to the operation and maintenance services is recognized over time based on the delivery of the operation and maintenance services.

Expenses

Expense are recognized when incurred. Expenses incurred in the execution of the contract include direct and indirect expenses associated with contract performance. Expenses are recognised in the relevant year (*accrual basis*).

p. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Current tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities.

Deferred tax

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

q. Liabilitas Imbalan Kerja

Grup memberikan imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 6/2023 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Grup sehubungan dengan imbalan paska kerja ini.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

q. Employee Benefits Obligation

The Group provides post-employment benefits as required under Law No. 6/2023 and Government Regulation No. 35/2021. No funding has been made by the Group to the defined benefit plans.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Pengukuran kembali diakui dalam sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas tidak direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup.

Imbalan kerja jangka panjang lain

Liabilitas yang diakui sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang lain diukur pada nilai kini estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan akan dilakukan oleh Grup sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh karyawan hingga tanggal pelaporan.

r. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement comprising actuarial gains and losses is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur.

Remeasurement recognised in other comprehensive income as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognised in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognised in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans.

Other long-term employee benefits

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Group in respect of services provided by employees up to the reporting date.

r. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by "the chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);

- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap proyek.

s. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3 manajemen Grup diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari yang melibatkan estimasi yang telah dibuat direksi dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Penentuan perjanjian kontraktual terhadap ruang lingkup ISAK 112, Perjanjian Konsesi Jasa

Perusahaan dan entitas anak, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS), PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), PT Arkora Energi Baru (AEB) dan PT Arkora Hydro Malili (AHM) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dimana Perusahaan, ASS, AHS, AEB dan AHM akan membangun pembangkit listrik tenaga mini hydro, seperti yang ditentukan dalam kontrak. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD) untuk Perusahaan dan ASS dan 25 tahun dari COD untuk AHS, AEB dan AHM.

- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c) for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each project.

s. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the Group's management are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations that the directors have made in the process of applying the Group's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Determining whether the contractual arrangements is within the scope of ISAK 112, Service Concession Arrangement

The Company and its subsidiaries, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS), PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), PT Arkora Energi Baru (AEB) dan PT Arkora Hydro Malili (AHM), have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), whereby the Company, ASS, AHS, AEB and AHM shall construct a mini hydro power plant as specified in the contract. The agreement is valid for 15 years from Commercial Operating Date (COD) for the Company and ASS and 25 years from COD for AHS, AEB and AHM.

Dalam melakukan evaluasi apakah PPA dengan PLN termasuk dalam ruang lingkup ISAK 112, Perjanjian Konsesi jasa, manajemen mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepemilikan atas infrastruktur pada saat akhir masa PPA;
2. Masa berlakunya PPA dibandingkan dengan umur ekonomis infrastruktur; dan
3. Pengendalian atas kepentingan residu atas infrastruktur setelah masa PPA berakhir.

Manajemen telah mengevaluasi bahwa PPA antara Perusahaan dan PLN tidak termasuk dalam ruang lingkup ISAK 112 "Perjanjian Konsesi Jasa" dan PPA antara ASS, AHS, AEB dan AHM dengan PLN termasuk dalam ruang lingkup ISAK 112 "Perjanjian Konsesi Jasa".

Penilaian manajemen berdasarkan fakta dan kondisi sesuai tanggal perjanjian dan pelaporan; penilaian kembali dapat dilakukan jika ada informasi baru yang tersedia.

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam keuangan tahun depan dijelaskan dibawah ini:

Pengakuan pendapatan terkait dengan jasa konstruksi berdasarkan perjanjian konsesi jasa

Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi sepanjang waktu sesuai dengan PSAK 115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dengan mengacu pada persentase kemajuan konstruksi Grup. Persentase kemajuan konstruksi diukur dengan mengacu pada proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan sampai saat ini secara relatif terhadap perkiraan jumlah biaya kontrak. Estimasi pendapatan jasa konstruksi ditentukan dengan mengacu pada jumlah biaya kontrak pada saat penyelesaian yang membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Biaya kontrak, yang terutama terdiri dari biaya subkontrak dan biaya material, diestimasi oleh manajemen berdasarkan penawaran sepanjang waktu yang diberikan oleh subkontraktor atau pemasok utama yang terlibat dan berdasarkan pengalaman manajemen. Sekalipun manajemen mereview dan merevisi estimasi biaya kontrak untuk kontrak konstruksi selama kontrak berlangsung, hasil aktual dari kontrak dalam hal jumlah biaya mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari estimasi dan hal ini akan mempengaruhi pendapatan dan laba yang diakui selama periode konstruksi. Manajemen yakin bahwa estimasi tersebut adalah wajar pada akhir periode pelaporan.

In their assessment to determine whether the PPA with PLN is within the scope of ISAK 112, Service Concession Arrangement, management considered the following:

1. The ownership of the infrastructure at the end of PPA;
2. PPA period compared to the infrastructure's useful life; and
3. Control over the residual interest of the infrastructure after the PPA.

Management has assessed that the PPA between the Company and PLN did not qualify within the scope of ISAK 112 "Service Concession Arrangements" while the PPA between ASS, AHS, AEB and AHM with PLN qualified within the scope of ISAK 112 "Service Concession Arrangements".

Management's assessments are based on facts and conditions available to management as of the date of agreement and at reporting date; reassessment may be made in the future when additional information is available.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

Revenue recognition related to construction services under a service concession arrangement

The Group recognises revenue from construction service over time in accordance with PSAK 115 Revenue from Contracts with Customers by reference to the Group's percentage of construction progress. The percentage of construction progress is measured by reference to the proportion of contract costs incurred for the work performed to date relative to the estimated total contract costs. Estimated construction service revenue is determined with reference to the estimate total contract costs on completion which requires significant judgement. Contract costs, which mainly comprise subcontracting charges and costs of materials, are estimated by the management on the basis of quotations from time to time provided by the major subcontractors or suppliers involved and the experience of the management. Notwithstanding that management reviews and revises the estimates of contract costs for the construction contract as the contract progresses, the actual outcome of the contract in terms of its total costs may be higher or lower than the estimates and this will affect the revenue and profit recognised during the course of construction. Management is satisfied that the estimates are reasonable as at the end of the reporting period.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai tercatat aset kontrak dan pendapatan jasa konstruksi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa diungkapkan masing-masing pada Catatan 10 dan 22 pada laporan keuangan konsolidasian.

Manfaat karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Grup.

5. PERJANJIAN KONSESI JASA

ASS, AHS, AEB dan AHM, entitas anak telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dimana ASS, AHS, AEB dan AHM akan membangun pembangkit listrik tenaga minihidro, seperti yang ditentukan dalam kontrak.

Pekerjaan konstruksi ASS dimulai pada tahun 2017 dan pada tanggal 10 Maret 2020, ASS mendapatkan *Commercial Operation Date* (COD) dari PLN dan memulai kegiatan komersialnya sejak saat itu. Berdasarkan PPA, periode konsesi yang berlaku adalah 15 tahun sejak COD.

Pekerjaan konstruksi AHS dimulai pada bulan Februari 2021 dan tanggal 16 Oktober 2024 AHS mendapatkan COD dari PLN dan memulai kegiatan komersialnya sejak saat itu. Berdasarkan PPA, periode konsesi yang berlaku adalah 25 tahun sejak COD.

Pekerjaan konstruksi AEB dimulai pada bulan September 2023 dan tanggal COD direncanakan akan tercapai pada Februari 2026. Berdasarkan PPA, periode konsesi yang berlaku adalah 25 tahun sejak COD.

Pekerjaan konstruksi AHM dimulai pada bulan Mei 2024 dan tanggal COD direncanakan akan tercapai pada Juli 2026. Berdasarkan PPA, periode konsesi yang berlaku adalah 25 tahun sejak COD.

Terkait dengan perjanjian jasa konsesi, Grup mencatat pendapatan jasa konstruksi (Catatan 22) dan beban konstruksi (Catatan 23).

As at December 31, 2025 and 2024, the carrying amounts of contract assets and construction service revenue arising from service concession arrangement are disclosed in Notes 10 and 22 to the consolidated financial statements respectively.

Employee Benefits

The determination of provision for employment benefits is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions recognized as other comprehensive income and affect the recognized expense and recorded provision. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's provision for employment benefit.

5. SERVICE CONCESSION ARRANGEMENTS

ASS, AHS, AEB and AHM, subsidiaries, have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), whereby ASS, AHS, AEB and AHM shall construct a mini hydro power plant as specified in the contract.

Construction works of ASS were started in 2017 and on March 10, 2020, ASS obtained Commercial Operation Date (COD) from PLN and started its commercial operation since then. Under the PPA, the valid concession period is 15 years from COD.

Construction works of AHS were started in February 2021 and on October 16, 2024, AHS obtained COD from PLN and started its commercial operation since then. Under the PPA, the valid concession period is 25 years from COD.

Construction works of AEB were started in September 2023 and the COD is planned to be achieved in February 2026. Under the PPA, the valid concession period is 25 years from COD.

Construction works of AHM were started in May 2024 and the COD is planned to be achieved in July 2026. Under the PPA, the valid concession period is 25 years from COD.

Related to service concession arrangement, the Group recorded construction service revenue (Note 22) and construction cost (Note 23).

6. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Kas - Rupiah	3.115.804.124	571.073.202
Kas di bank - Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Permata Tbk	64.375.781.169	105.206.873
PT Bank Central Asia Tbk	9.631.438.374	11.687.648.610
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.773.027.625	789.688.209
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	89.451.267	39.727.177
PT Bank OCBC NISP Tbk	83.617.861	9.039.371.223
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	48.746.767	48.746.767
PT Bank Bukopin Tbk	17.239.124	41.042.485
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16.705.455	5.113.146
PT Bank Mega Tbk	-	41.605.736
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Permata Tbk	172.151.131	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	102.308.030	6.143.822
PT Bank Central Asia Tbk	4.449.448	30.554.123
Euro		
PT Bank OCBC NISP Tbk	115.754	99.249
Deposito berjangka - Pihak ketiga		
Rupiah dengan tingkat bunga rata-rata per tahun 4,00% - 4,50% (2024: 3,75% - 4,75%)		
PT Bank Central Asia Tbk	14.897.700.000	14.897.700.000
PT Bank Permata Tbk	5.000.000.000	-
Jumlah	99.328.536.129	37.303.720.622
Cerukan bank (Catatan 13)	(23.950.149.122)	(15.492.118.620)
Kas dan setara kas dikurangi cerukan bank	75.378.387.007	21.811.602.002

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang tidak dapat digunakan oleh Grup maupun kas dan setara kas yang dijaminkan. Grup menentukan bahwa kas dan setara kas memiliki kerugian kredit yang minimal atau tidak material.

7. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA

Piutang usaha merupakan piutang usaha pihak ketiga dalam mata uang Rupiah dari PLN. Tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang usaha.

Pada tanggal 1 Januari 2024, piutang usaha dari kontrak dengan pelanggan sebesar Rp 8.827.977.244 (setelah dikurangi cadangan kerugian kredit sebesar nihil).

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Cash on hand - Rupiah		
Cash in banks - Third parties		
Rupiah		
PT Bank Permata Tbk		
PT Bank Central Asia Tbk		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
PT Bank OCBC NISP Tbk		
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		
PT Bank Bukopin Tbk		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
PT Bank Mega Tbk		
U.S. Dollar		
PT Bank Permata Tbk		
PT Bank OCBC NISP Tbk		
PT Bank Central Asia Tbk		
Euro		
PT Bank OCBC NISP Tbk		
Time deposit - Third parties		
Rupiah, average interest rates per annum at 4.00% - 4.50% (2024: 3.75% - 4.75%)		
PT Bank Central Asia Tbk		
PT Bank Permata Tbk		
Total		
Bank overdraft (Note 13)		
Cash and cash equivalents less bank overdraft		

As of December 31, 2025 and 2024, there were no cash and cash equivalents that are not available for use by the Group nor pledged as collateral. The Group determines whether the cash and cash equivalents are subject to minimal or immaterial credit loss.

7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE THIRD PARTY

Trade accounts receivable represents trade receivable from third party in Rupiah from PLN. No interest is charged on trade receivables.

As at January 1, 2024, trade accounts receivable from contracts with customer amounted to Rp 8,827,977,244 (net of loss allowance for credit losses of nil).

Cadangan kerugian kredit untuk piutang usaha telah diukur sejumlah ECL sepanjang umur. ECL pada piutang usaha diestimasi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur, kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi. Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

Seluruh nilai piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 belum jatuh tempo dan oleh karena itu, Grup menentukan bahwa piutang usaha memiliki kerugian kredit yang minimal atau tidak material.

Piutang usaha dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman berjangka untuk AHS dan AEB (Catatan 16).

Allowance for credit losses for trade accounts receivable has been measured at an amount equal to lifetime ECL. The ECL on trade accounts receivable is estimated by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the debtor's current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions of the industry in which the debtors operate. There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

All balance of trade accounts receivable as of December 31, 2025 and 2024 are not yet due and thus, the Group determines the trade accounts receivable are subject to minimal or immaterial credit loss.

Trade accounts receivable are pledged as collateral for term loan for AHS and AEB (Note 16).

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	
Asuransi	1.932.260.777	1.552.281.332	Insurance
Uang muka pembelian	-	701.575.728	Advances
Jumlah	1.932.260.777	2.253.857.060	Total

8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

9. ASET TETAP

	1 Januari/ January 1, 2025	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2025	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya perolehan						At cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	5.168.126.760	-	-	-	5.168.126.760	Land
Peralatan	9.400.887.808	7.081.554.389	-	-	16.482.442.197	Equipment
Renovasi bangunan	51.819.653.740	-	-	-	51.819.653.740	Building improvement
Kendaraan	3.754.744.267	2.188.457.735	-	-	5.943.202.002	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	15.632.374.311	-	-	-	15.632.374.311	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	143.224.195.245	-	-	-	143.224.195.245	Project building
Turbin	51.398.907.285	-	-	-	51.398.907.285	Turbine
Aset dalam penyelesaian						Construction in progress
Perlengkapan	-	2.047.950.000	-	-	2.047.950.000	Equipment
Jumlah	280.398.889.416	11.317.962.124	-	-	291.716.851.540	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Peralatan	4.050.744.404	1.686.241.522	-	-	5.736.985.926	Equipment
Renovasi bangunan	2.147.339.798	1.195.722.381	-	-	3.343.062.179	Building improvement
Kendaraan	2.003.630.531	549.461.339	-	-	2.553.091.870	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	7.135.099.781	1.207.135.383	-	-	8.342.235.164	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	30.344.619.992	5.325.556.029	-	-	35.670.176.021	Project building
Turbin	26.286.973.781	3.940.039.317	-	-	30.227.013.098	Turbine
Jumlah	71.968.408.287	13.904.155.971	-	-	85.872.564.258	Total
Jumlah Tercatat	208.430.481.129				205.844.287.282	Net Carrying Value

PT ARKORA HYDRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT ARKORA HYDRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

	1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya perolehan					At cost
Pemilikan langsung					Direct acquisitions
Tanah	5.168.126.760	-	-	5.168.126.760	Land
Peralatan	7.684.207.266	1.716.680.542	-	9.400.887.808	Equipment
Renovasi bangunan	51.773.190.580	46.463.160	-	51.819.653.740	Building improvement
Kendaraan	3.476.618.727	278.125.540	-	3.754.744.267	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	15.632.374.311	-	-	15.632.374.311	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	113.765.924.003	29.458.271.242	-	143.224.195.245	Project building
Turbin	51.398.907.285	-	-	51.398.907.285	Turbine
Jumlah	248.899.348.932	31.499.540.484	-	280.398.889.416	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Pemilikan langsung					Direct acquisitions
Peralatan	3.264.605.592	786.138.812	-	4.050.744.404	Equipment
Renovasi bangunan	850.875.753	1.296.464.045	-	2.147.339.798	Building improvement
Kendaraan	1.619.723.172	383.907.359	-	2.003.630.531	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	5.976.236.540	1.158.863.241	-	7.135.099.781	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	25.856.262.412	4.488.357.580	-	30.344.619.992	Project building
Turbin	22.346.934.465	3.940.039.316	-	26.286.973.781	Turbine
Jumlah	59.914.637.934	12.053.770.353	-	71.968.408.287	Total
Jumlah Tercatat	188.984.710.998			208.430.481.129	Net Carrying Value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2025	2024	
	Rp	Rp	
Beban pokok pendapatan (Catatan 23)	9.473.446.516	9.012.058.885	Cost of revenues (Note 23)
Beban umum dan administrasi (Catatan 24)	4.430.709.455	3.041.711.468	General and administrative expenses (Note 24)
Jumlah	13.904.155.971	12.053.770.353	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Asuransi FPG Indonesia dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 622.469.874.816 (31 Desember 2024: Rp 616.276.640.256) terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

On December 31, 2025, property, plant and equipment except land are insured with PT Asuransi FPG Indonesia with total sum insured amounting to Rp 622,469,874,816 (December 31, 2024: Rp 616,276,640,256) against fire, theft and other possible risks. Management believes that the insurance coverages are adequate to cover possible losses on related assets insured.

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset tetap tertentu dengan nilai buku bersih sebesar Rp 180.379.409.989 (31 Desember 2024: Rp 155.596.529.524) dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman berjangka (Catatan 16).

On December 31, 2025, certain property, plant and equipment with net book value of Rp 180,379,409,989 (December 31, 2024: Rp 155,596,529,524) is pledged as collateral for term loan (Note 16).

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.520.758.217 (31 Desember 2024: Rp 2.122.529.731).

Total acquisition costs of property, plant and equipment which were fully depreciated and still used by the Group at December 31, 2025 amounted to Rp 2,520,758,217 (December 31, 2024: Rp 2,122,529,731).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

At December 31, 2025 and 2024, there is no temporary idle property, plant and equipment and retired from active use and not classified as held for sale.

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat keadaan yang menunjukkan indikasi terjadinya penurunan nilai aset tetap.

Management believes that as at December 31, 2025 and 2024 there were no circumstances indicating impairment of property, plant and equipment.

10. ASET KEUANGAN DARI PROYEK KONSESI

10. FINANCIAL ASSETS FROM CONCESSION PROJECT

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Penerimaan kapasitas minimum masa depan:			Future minimum capacity receipts:
Kurang dari satu tahun	139.641.378.221	102.425.474.126	Not later than one year
Lebih dari satu tahun tapi kurang dari lima tahun	860.525.938.295	832.587.608.201	Later than one year but not later than five years
Lebih dari lima tahun	<u>1.893.330.817.760</u>	<u>2.054.964.373.739</u>	Later than five years
Jumlah	2.893.498.134.276	2.989.977.456.066	Total
Dikurangi:			Less:
Pendapatan keuangan yang belum diterima	(1.510.567.386.911)	(1.676.876.879.828)	Unearned financial revenue
Jumlah yang belum ditagihkan	<u>(162.183.083.760)</u>	<u>(368.597.574.915)</u>	Amounts not yet due
Nilai kini penerimaan kapasitas masa depan	1.220.747.663.605	944.503.001.323	Present value of future capacity receipts
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(139.641.378.222)</u>	<u>(102.425.474.126)</u>	Less current maturity
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>1.081.106.285.383</u>	<u>842.077.527.197</u>	Long-term portion

Pada tanggal 1 Januari 2024, aset keuangan sebesar Rp 772.706.182.780 (setelah dikurangi cadangan kerugian kredit sebesar nihil).

As at January 1, 2024, contract asset amounted to Rp 772,706,182,780 (net of loss allowance for credit losses of nil).

Grup mencatat aset kontrak sebagai bagian dari aset keuangan dari proyek konsesi untuk setiap pekerjaan konstruksi yang dilakukan. Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah aset kontrak yang berkaitan dengan kontrak konstruksi adalah sebesar Rp 491.748.781.698 (31 Desember 2024: Rp 211.441.075.375).

The Group recorded contract assets as part of financial assets from concession project for any work performed. As of December 31, 2025, contract assets balance related to construction contracts amounted to Rp 491,748,781,698 (December 31, 2024: Rp 211,441,075,375).

Manajemen mengharapkan harga transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum selesai pada tanggal 31 Desember 2025 akan diakui sebagai pendapatan pada periode pelaporan berikutnya sebesar Rp 162.183.083.760 (31 Desember 2024: Rp 368.597.574.915).

Management expects the transaction price allocated to the unsatisfied contracts as of December 31, 2025 will be recognized as revenue during the next reporting period amounting to Rp 162,183,083,760 (December 31, 2024: Rp 368,597,574,915).

Grup mencatat penghasilan keuangan dari aset keuangan sebagai berikut:

The Group recorded financial income from the financial assets as follows:

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Penghasilan keuangan	<u>96.023.666.346</u>	<u>82.366.509.755</u>	Finance income

Manajemen mengestimasi cadangan kerugian aset keuangan dari proyek konsesi sejumlah ECL sepanjang umur, dengan mempertimbangkan pengalaman gagal bayar historis dan prospek masa depan industri pelanggan. Manajemen berpendapat bahwa aset keuangan dari proyek konsesi memiliki kerugian kredit yang minimal atau tidak material pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Management estimates the loss allowance on financial assets from concession project at an amount equal to lifetime ECL, taking into account the historical default experience and the future prospects of the customer's industry. Management assessed that financial assets from concession project are subject to minimal or immaterial credit loss as of December 31, 2025 and 2024.

11. ASET TAK BERWUJUD

	1 Januari/ January 1, 2025	Penambahan/ Additions	Penyesuaian/ (Adjustment)	31 Desember/ December 31, 2025	
	Rp	Rp		Rp	
Biaya perolehan	41.871.661.923	7.072.968.396	-	48.944.630.319	Cost
Akumulasi amortisasi	-	-	-	-	Accumulated amortization
Bersih	<u>41.871.661.923</u>	<u>7.072.968.396</u>	<u>-</u>	<u>48.944.630.319</u>	Net
	1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Penyesuaian/ (Adjustment)	31 Desember/ December 31, 2024	
	Rp	Rp		Rp	
Biaya perolehan	46.681.903.754	5.409.556.891	(10.219.798.722)	41.871.661.923	Cost
Akumulasi amortisasi	-	-	-	-	Accumulated amortization
Bersih	<u>46.681.903.754</u>	<u>5.409.556.891</u>	<u>(10.219.798.722)</u>	<u>41.871.661.923</u>	Net

Aset tak berwujud merupakan hak konsesi yang timbul dari Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara AHS dan AEB, entitas anak dengan PLN yang memenuhi kriteria dari perjanjian konsesi jasa (Catatan 5).

Aset tak berwujud akan diamortisasi pada periode tahap 2 sesuai Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara AHS dan AEB dengan PLN (Catatan 30) yang dimulai dari tahun ke-21 sejak tanggal operasi komersial sampai dengan akhir periode konsesi.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Intangible asset represents concession right arising from Power Purchase Agreement between AHS and AEB, subsidiaries with PLN that meets the criteria of a service concession arrangement (Note 5).

Intangible asset will be amortized at phase 2 as stated in Power Purchase Agreement between AHS and AEB with PLN (Note 30) which is started from year 21st from commercial operation date until the end of the concession period.

Management believes that there is no impairment on intangible assets as of December 31, 2025 and 2024.

12. ASET LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	
Beban ditangguhkan	41.713.971.990	43.221.156.618	Deferred charges
Bank garansi	7.513.502.371	7.513.502.372	Bank guarantee
Lain-lain	<u>3.100.000</u>	<u>3.330.910.000</u>	Others
Jumlah	<u>49.230.574.361</u>	<u>54.065.568.990</u>	Total

Beban ditangguhkan sebagian besar merupakan beban terkait dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga *Mini Hydro* (PLTMH).

Deferred charges mostly represent costs incurred for the Mini Hydro Power Plant (MHPP).

13. CERUKAN BANK

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	
Fasilitas cerukan: PT Bank Central Asia Tbk	<u>23.950.149.122</u>	<u>15.492.118.620</u>	Overdraft facility: PT Bank Central Asia Tbk

11. INTANGIBLE ASSET

12. OTHER ASSETS

13. BANK OVERDRAFT

Pada tanggal 18 Desember 2024, terdapat perubahan dan pernyataan kembali atas Perjanjian Kredit Awal yang disajikan pada Catatan 17. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit tambahan berupa fasilitas cerukan dengan jumlah maksimal Rp 25.000.000.000, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal penandatanganan perubahan dan pernyataan kembali dan berakhir pada tanggal yang sama 12 bulan kemudian dan dikenakan bunga 8,5% per tahun. Fasilitas kredit ini digunakan untuk *bridging loan* untuk membiayai operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga *mini-hydro* (PLTMH) yang sudah beroperasi maupun untuk biaya pra operasional dan belanja modal PLTMH anak usaha yang masih dalam proses pengembangan dan terkonsolidasi dengan Grup namun belum mendapatkan pembiayaan dari bank/lembaga keuangan maupun untuk fasilitas cerukan.

On December 18, 2024, there was an amendment and restatement of the Initial Credit Agreement as presented in Note 17. The Company obtained an additional credit facility in the form of a overdraft facility with a maximum amount of Rp 25,000,000,000, with a period commencing from the date of signing of the amendment and restatement and ending on the same date 12 months later and charged with interest rate 8.5% annually. This credit facility is used as a bridging loan to finance the operation and maintenance of mini hydro power plant (MHPP) that are already in operation as well as for pre-operational costs and capital expenditures of MHPP of subsidiaries that are still in the process of development and consolidated with Group but have not received financing from banks/financial institutions as well as for overdraft facilities.

14. UTANG USAHA DAN LAINNYA

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp
Pihak berelasi (Catatan 29)	5.966.315.254
Pihak ketiga	16.976.412.006
Jumlah	22.942.727.260

Semua utang usaha dan lainnya dalam mata uang Rupiah dan dari pemasok dalam negeri.

Periode kredit pembelian adalah 30 hari. Bunga tidak dibebankan atas utang usaha dan lainnya.

14. TRADE AND OTHERS ACCOUNTS PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Related parties (Note 29)	12.500.189.783
Third parties	9.018.505.043
Total	21.518.694.826

All trade and other accounts payable in Rupiah and from local suppliers.

The average credit period on purchases is 30 days. No interest charge on the trade and other accounts payable.

15. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp
Bunga pinjaman	5.460.550.838
Biaya konstruksi	2.484.654.302
Jasa profesional	566.750.000
Lain-lain	2.770.964.262
Jumlah	11.282.919.402

15. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Interest from loan	5.269.321.639
Construction fees	6.450.882.367
Professional fees	1.035.000.000
Others	1.188.832.572
Total	13.944.036.578

16. PINJAMAN BERJANGKA

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp
PT Indonesia Infrastructure Finance	318.421.337.095
PT Sarana Manufacture Indonesia	133.065.457.223
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	<u>(3.819.855.421)</u>
Jumlah	447.666.938.897
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(16.943.704.084)</u>
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>430.723.234.813</u>

AHS

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 28 Desember 2021, AHS memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") dengan jumlah maksimal Rp 194.500.000.000 termasuk *Non-Cash Loan* dengan jumlah maksimal Rp 28.500.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 17 tahun setelah COD. Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan PLTM Koro Yaentu 2x5 MW di Sulawesi tengah.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5,5%. Pada tanggal 24 September 2025, AHS mengajukan permohonan penurunan suku bunga atas perjanjian fasilitas kepada IIF. Pada tanggal 3 Oktober 2025, IIF menyetujui permohonan penurunan suku bunga atas perjanjian fasilitas dari JIBOR ditambah margin sebesar 5,5% per tahun menjadi:

- Suku bunga tetap 8% per tahun sejak 27 Oktober 2025 hingga 26 Desember 2030;
- Suku bunga mengambang IndONIA 90 hari ditambah 3% per tahun sejak 27 Desember 2030 hingga 28 Desember 2040.

Jumlah saldo fasilitas pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 156.470.016.536 (31 Desember 2024: Rp 170.434.747.313) dan fasilitas *Non-Cash Loan* sebesar Rp 16.233.586.186 (31 Desember 2024: Rp 17.682.411.115).

Pada tanggal 27 April 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka telah memberikan persetujuan pelepasan jaminan atas gadai saham Perusahaan tanpa syarat apapun.

Pada tanggal 25 Mei 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka telah memberikan persetujuan penghapusan pembatasan pembayaran dividen ASS dan AHS.

16. TERM LOANS

	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
PT Indonesia Infrastructure Finance	253.646.139.221	PT Indonesia Infrastructure Finance
PT Sarana Manufacture Indonesia	36.803.040.476	PT Sarana Manufacture Indonesia
Unamortized transaction cost	<u>(2.059.298.580)</u>	
Total	288.389.881.117	
Less current maturities	<u>(15.413.555.706)</u>	
Long-term term loan net of current maturities	<u>272.976.325.411</u>	

AHS

Based on the Senior Note Credit Facility dated December 28, 2021, AHS obtained long-term credit facility from PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") with maximum loan facility amounting to Rp 194,500,000,000 including Non-Cash Loan with maximum amount Rp 28,500,000,000 with period maximum of 17 years after COD. This loan facility is used to finance the construction of PLTM Koro Yaentu 2x5 MW in Central Sulawesi province.

Annual interest rate is JIBOR plus margin 5.5%. On September 24, 2025, AHS submitted a request to reduce the interest rate under the facility agreement to IIF. On October 3, 2025, IIF approved the request to reduce the interest rate under the facility agreement from JIBOR plus margin 5.5% per year to:

- Fixed interest rate of 8% per annum effective since 27 October 2025 until 26 December 2030;
- Floating interest rate of 90-day IndONIA plus 3% per annum effective since 27 December 2030 until 28 December 2040.

Total financing facility balances as of December 31, 2025 amounted to Rp 156,470,016,536 (December 31, 2024: Rp 170,434,747,313) and Non-Cash Loan facility amounted to Rp 16,233,586,186 (December 31, 2024: Rp 17,682,411,115).

On April 27, 2022, IFF as lender of term loan has approved to release the collateral for the pledge of the Company's share without any condition.

On May 25, 2022, IIF as lender of term loan has approved the removal of restriction on the ASS and AHS' dividend payment.

Pinjaman Perusahaan dan AHS tersebut dijamin dengan:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Perusahaan dan AHS ("Proyek").
- Jaminan fidusia atas peralatan dan aset bergerak terkait dengan proyek Perusahaan dan AHS.
- Jaminan fidusia atas hasil pembayaran asuransi yang berkaitan dengan proyek Perusahaan dan AHS proyek.
- Jaminan gadai atas rekening bank Perusahaan dan AHS terkait Proyek.
- Jaminan fidusia atas Piutang sehubungan dengan proyek Perusahaan dan AHS.
- Jaminan perusahaan dari PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., dan untuk fasilitas pinjaman kepada AHS, termasuk jaminan perusahaan dari Perusahaan.
- Dokumen Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan.
- Jaminan gadai atas saham setiap pemegang saham penerima pinjaman.
- Surat kesanggupan dari PT Arkora Bakti Indonesia dan ACEI Singapore Holding Private Ltd. untuk menanggung seluruh *cash deficiency* dan *cost overrun* sehubungan dengan Proyek dengan cara memberikan pinjaman dan/atau meningkatkan modal.

Berdasarkan fasilitas pinjaman ini, Perusahaan dan AHS harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IIF untuk beberapa hal, termasuk di antaranya perubahan struktur permodalan dan kepemilikan.

Perusahaan dan AHS juga harus memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagai berikut:

- rasio *Debt to Equity* maksimal 3,0 di mana perhitungan *Debt* tidak termasuk pinjaman kepada ACEI;
- rasio *Debt Service Coverage* minimal 1,20.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan dan AHS telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh perjanjian fasilitas pinjaman ini.

AEB

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 25 Mei 2023, AEB memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari IIF dengan jumlah maksimal Rp 145.713.502.372 termasuk *Non-Cash Loan* dengan jumlah maksimal Rp 7.513.502.372, dengan jangka waktu maksimal selama 36 bulan atau sampai dengan tanggal COD. Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan PLTM Kukusan 2x2,7 MW di Provinsi Lampung.

These loan facilities of the Company and AHS are secured by:

- Mortgage of land and building related to the Company and AHS' Mini Hydro Power Plant projects ("Projects").
- Fiduciary security over equipment and moveable assets related to the Company and AHS' Projects.
- Fiduciary security over insurance proceeds related to the Company and AHS' Projects.
- Fiduciary security over bank statements related to the Company and AHS' Projects.
- Fiduciary security over receivables related to the Company and AHS' Projects.
- Corporate guarantee from PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., and for loan facility to AHS, including corporate guarantee from the Company.
- All material contracts related to the Projects.
- Collateral of the shares for each shareholder of the recipient of the loans.
- Letter of Understanding (LoU) from PT Arkora Bakti Indonesia and ACEI Singapore Holding Private Ltd. to fund and finance cash deficiency and cost overrun related to the Projects by giving additional loan and/or capital injection.

Based on these credit facilities, the Company and AHS must obtain written approval from IIF for several matters, including changes in capital structure and ownership, changes in business activities and dividend payment.

The credit facilities above require the Company and AHS to maintain certain financial ratios as follows:

- Debt to Equity ratio maximum 3.0 times, which the debt is not included loan from ACEI;
- Debt Service Coverage Ratio minimum 1.20.

As of December 31, 2025 and 2024, Company and AHS meet the financial ratio as required by the loan facilities.

AEB

Based on the Senior Note Credit Facility dated May 25, 2023, AHS obtained long-term credit facility from IIF with maximum loan facility amounting to Rp 145,713,502,372 including Non-Cash Loan with maximum amount Rp 7,513,502,372 with period maximum of 36 months or until the COD date. This loan facility is used to finance the construction of PLTM Kukusan 2x2.7 MW in Lampung Province.

Tingkat bunga per tahun sampai dengan tahun ketiga setelah tanggal perjanjian ini sebesar 11%, untuk periode sejak berakhirnya periode suku bunga pertama hingga proyek telah mencapai faktor kapasitas mencapai 65% selama 12 periode bulan terakhir sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5,75%. Untuk periode sejak proyek telah mencapai tahap operasional stabil proyek dikenakan bunga sebesar JIBOR ditambah dengan margin 5,00%.

Jumlah saldo fasilitas pembiayaan termasuk *Non-Cash Loan* pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 145.717.734.372 (31 Desember 2024: Rp 65.528.980.793).

Pinjaman AEB tersebut dijamin dengan:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro AEB ("Proyek").
- Jaminan fidusia atas peralatan dan aset bergerak terkait dengan proyek AEB.
- Jaminan fidusia atas hasil pembayaran asuransi yang berkaitan dengan proyek AEB.
- Jaminan gadai atas rekening bank AEB terkait Proyek.
- Jaminan fidusia atas Piutang sehubungan dengan proyek AEB proyek.
- Jaminan perusahaan dari PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., PT Arkora Hydro Tbk, PT Arkora Sulawesi Selatan, PT Arkora Hydro Sulawesi untuk fasilitas pinjaman kepada AEB, termasuk jaminan perusahaan dari Perusahaan.
- Dokumen Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan.
- Jaminan gadai atas saham setiap pemegang saham penerima pinjaman.
- Surat kesanggupan dari PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., PT Arkora Hydro Tbk, PT Arkora Sulawesi Selatan, PT Arkora Hydro Sulawesi untuk menanggung seluruh *cash deficiency* dan *cost overrun* sehubungan dengan Proyek dengan cara memberikan pinjaman dan/atau meningkatkan modal.

Berdasarkan fasilitas pinjaman ini, AEB harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IIF untuk beberapa hal, termasuk di antaranya perubahan struktur permodalan dan kepemilikan.

AEB juga harus memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagai berikut:

- rasio *Debt to Equity* maksimal 3,0;
- rasio *Debt Service Coverage* minimal 1,20.

The interest rate per year up to the third year after the date of this agreement is 11%, for the period from the end of the first-interest rate period until the project has reached a capacity factor of 65% for the last 12 months of JIBOR plus a margin of 5.75%. For the period since the project has reached the stable operating stage, the project is subject for interest of JIBOR plus a margin of 5.00%.

Total financing facility balance includes Non-Cash Loan as of December 31, 2025 amounted to Rp 145,717,734,372 (December 31, 2024: Rp 65,528,980,793).

These loan facilities of the AEB are secured by:

- Mortgage of land and building related to AEB' Mini Hydro Power Plant projects ("Projects").
- Fiduciary security over equipment and moveable assets related to AEB' Projects.
- Fiduciary security over insurance proceeds related to AEB' Projects.
- Fiduciary security over bank statements related to AEB' Projects.
- Fiduciary security over receivables related to AEB' Projects.
- Corporate guarantee from PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., PT Arkora Hydro Tbk, PT Arkora Sulawesi Selatan, PT Arkora Hydro Sulawesi for loan facility to AEB, including corporate guarantee from the Company.
- All material contracts related to the Projects.
- Collateral of the shares for each shareholder of the recipient of the loans.
- Letter of Understanding (LoU) from PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., PT Arkora Hydro Tbk, PT Arkora Sulawesi Selatan, PT Arkora Hydro Sulawesi to fund and finance cash deficiency and cost overrun related to the Projects by giving additional loan and/or capital injection.

Based on these credit facilities, AEB must obtain written approval from IIF for several matters, including changes in capital structure and ownership, changes in business activities and dividend payment.

The credit facilities above require AEB to maintain certain financial ratios as follows:

- Debt to Equity ratio maximum 3.0 times;
- Debt Service Coverage Ratio minimum 1.20.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, persyaratan *financial covenant* belum berlaku bagi AEB, karena AEB belum mencapai tanggal COD. Persyaratan *financial covenant* tersebut akan mulai berlaku satu tahun setelah COD.

AHM

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tanggal 15 Agustus 2024, AHM memperoleh fasilitas pinjaman jangka Panjang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") dengan jumlah maksimal Rp 223.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah maksimal Rp 198.000.000.000 dari biaya proyek yang diterima oleh Kreditur, mana lebih kecil.
- Fasilitas *Interest During Construction* (IDC) dengan jumlah maksimal Rp 25.000.000.000 atau 75% dari kebutuhan IDC yang diterima Kreditur, mana lebih kecil.

Jumlah saldo fasilitas kredit investasi termasuk fasilitas IDC pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 133.065.457.223 (31 Desember 2024: Rp 36.803.040.476).

Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek pembangkit listrik tenaga air mini hidro (PLTM) Tomoni dengan kapasitas sebesar 2x5 MW di Provinsi Sulawesi Selatan. Jangka waktu fasilitas pembiayaan adalah 180 bulan terhitung dari penandatanganan Perjanjian Pembiayaan termasuk Masa Tenggang.

Pinjaman AHM tersebut dijamin dengan:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan proyek;
- Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan proyek;
- Jaminan fidusia atas tagihan pihak ketiga dan pendapatan proyek termasuk kompensasi hasil pangkahan;
- Jaminan fidusia atas klaim asuransi proyek;
- Gadai saham;
- Gadai rekening;
- Perjanjian pengalihan hak bersyarat atas PPA;
- *Letter of undertaking*; yang menyatakan bahwa: Perusahaan sepakat dan setuju untuk memastikan kelangsungan penyelesaian proyek dengan melakukan setoran uang dalam hal terjadi *cost overrun* dan/atau *cash deficiency* untuk membiayai beban operasional dan pemenuhan kewajiban jatuh tempo atas pinjaman AHM kepada SMI termasuk diantaranya kewajiban pemenuhan *financial covenant* dan kewajiban pemenuhan dana dalam *Debt Service Reserve Account* dapat dipenuhi sampai dengan fasilitas pembiayaan lunas.

As of December 31, 2025 and 2024, the financial covenant requirements were not yet effective for AEB, as AEB had not reached the COD. The financial covenant requirements will become effective one year after COD.

AHM

Based on the Financing Agreement dated August 15, 2024, AHM obtained a long-term loan facility from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") with maximum amount Rp 223,000,000,000 with details as follows:

- Investment Credit Facility with a maximum amount of Rp 198,000,000,000 of the project cost received by the Creditor, whichever is smaller.
- Interest During Construction (IDC) facility with a maximum amount of Rp 25,000,000,000 or 75% of the IDC requirement received by the Creditor, whichever is less.

Total investment credit facility balance includes IDC facility as of December 31, 2025 amounted to Rp 133,065,457,223 (December 31, 2024: Rp 36,803,040,476).

This loan is used to finance the Tomoni mini hydro power plant (PLTM) which has a capacity of 2x5 MW in South Sulawesi Province. The term of the financing facility is 180 months starting from the signing of the Financing Agreement including the grace period.

These loan facilities of AHM are secured by:

- Mortgage of project land and building;
- Fiduciary security over project machinery and equipment;
- Fiduciary security over third party bills and project revenues including compensation for termination proceeds;
- Fiduciary security over project insurance claims;
- Pledge of shares;
- Pledge of accounts;
- Conditional title transfer agreement on PPA;
- Letter of undertaking; which states that the Company agrees to ensure the continuity of project completion by depositing money in the event of cost overrun and/or cash deficiency to finance operational expenses and fulfilment of due obligations on AHM's loan to SMI including the obligation to fulfil financial covenants and the obligation to fulfil funds in the Debt Service Reserve Account can be fulfilled until the financing facility is paid off.

AHM juga harus memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagai berikut:

- rasio *Debt to Equity* maksimal 3,0;
- rasio *Debt Service Coverage* minimal 1,20.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, persyaratan *financial covenant* belum berlaku bagi AHM, karena AHM belum mencapai tanggal COD. Persyaratan *financial covenant* tersebut akan mulai berlaku satu tahun setelah COD.

The credit facilities above require AHM to maintain certain financial ratios as follows:

- Debt to Equity ratio maximum 3.0 times;
- Debt Service Coverage Ratio minimum 1.20.

As of December 31, 2025 and 2024, the financial covenant requirements were not yet effective for AHM, as AHM had not reached the COD. The financial covenant requirements will become effective one year after COD.

17. UTANG BANK

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp
PT Bank Central Asia Tbk	6.726.190.475
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(1.614.285.719)</u>
Bagian utang bank jangka panjang	<u>5.111.904.756</u>

Pada tanggal 28 Februari 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan jumlah maksimal Rp 11.300.000.000, dengan jangka waktu maksimal yang akan jatuh tempo pada Februari 2025. Bunga dibayarkan pada setiap bulan yang sesuai dengan penarikan pinjaman. Suku bunga per tahun sebesar 7,7% selama 2 tahun pertama dan suku bunga *floating* yang berlaku di BCA yang akan ditinjau sewaktu-waktu mengikuti perkembangan moneter. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembelian 1 (satu) unit *office space* yang dibukukan sebagai renovasi bangunan dan merupakan jaminan dari utang bank.

Fasilitas pinjaman dengan BCA mencakup persyaratan tertentu yaitu membatasi hak Grup untuk mengubah anggaran dasar dan susunan direksi dan komisaris, serta menyerahkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah di audit setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya 6 bulan setelah akhir tahun buku. Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan keuangan apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas seperti:

- mempertahankan perbandingan antara laba usaha sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (EBITDA) dengan kewajiban pokok + kewajiban bunga pada periode laporan keuangan minimal 1 kali atau lebih dan;
- *Debt to equity* rasio tidak melebihi 3 kali yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian.

Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

17. BANK LOAN

	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
PT Bank Central Asia Tbk	8.340.476.180	PT Bank Central Asia Tbk
	<u>(1.614.285.720)</u>	Current maturities
	<u>6.726.190.460</u>	Long-term maturities of long-term bank loans

On February 28, 2023, the Company obtained long term credit facility from PT Bank Central Asia (BCA) with maximum amount Rp 11,300,000,000, and maximum period in February 2025. The interest payment within the same month with withdrawal, based on an interest rate per annum of 7.7% for the first 2 years and floating interest rate applicable where BCA will review with following the monetary changes. This loan is used to purchase of 1 (one) office space unit which recorded as building improvement and represent as collateral for bank loan.

The above loan facilities with BCA contain certain covenants such as, restrict the Group to amend its articles of association, change the composition of the boards of commissioners and directors, including submission of annual audited consolidated financial statements at least 6 months after year end. The agreements also include financial covenants if there is top up request for facilities as follow:

- maintain a ratio between earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) and principal liability plus interest liability at least 1 time or more and;
- Debt to equity ratio not exceeding 3 times calculated based on consolidated financial statements.

The Group is in compliance with the terms and conditions of the loans.

18. UTANG OBLIGASI

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	
Pokok pinjaman	339.895.000.000	339.895.000.000	Loan principal
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(5.532.074.285)	(7.392.790.007)	Unamortised transaction costs
	334.362.925.715	332.502.209.993	
Bagian jangka pendek	(318.060.000.000)	-	Current portion
Bagian jangka panjang	16.302.925.715	332.502.209.993	Non-current portion

18. BONDS PAYABLE

Tanggal penerbitan/ Issuance date	Obligasi/ Bonds	Peringkat/ Rating	Jumlah/ Total	Suku bunga/ Interest rate	Wali amanat/ Trustee	Jadwal pembayaran/ Repayment schedule
Obligasi berwawasan lingkungan I/Greenbond I Arkora Hydro						
8 Agustus/August 2023	Seri/Series A	idA	318.060	9,5%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8 Agustus/August 2026
8 Agustus/August 2023	Seri/Series B	idA	21.835	10%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8 Agustus/August 2028

Pada tanggal 8 Agustus 2023, Perusahaan menerbitkan obligasi sebesar Rp 339.895.000.000 dengan bunga yang dibayar setiap tiga bulan. Obligasi seri A dan B berjangka waktu masing-masing tiga dan lima tahun dan akan jatuh tempo pada Agustus 2026 dan Agustus 2028. Tingkat bunga obligasi seri A dan B masing-masing adalah 9,5% dan 10% per tahun hingga tanggal jatuh tempo. Seluruh obligasi dijual pada nilai nominal dan tercatat di BEI dengan PT Bank Negara Indonesia bertindak sebagai wali amanat.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh Pefindo tanggal 4 Maret 2025, peringkat obligasi adalah A (Single A; Partial Guarantee).

Utang obligasi tersebut ditujukan untuk pembiayaan kembali pinjaman berjangka dan modal kerja dalam rangka pembiayaan operasional.

Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, antara lain untuk memperoleh persetujuan sebelum melakukan transaksi tertentu seperti mengadakan penggabungan usaha, pengambilalihan, dan menjaminkan aset atau pendapatannya dengan pengecualian secara khusus dan pembatasan dalam mengubah aktivitas utama.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan dalam perjanjian penerbitan obligasi tertentu.

Obligasi ini akan dijamin dengan jaminan Perusahaan dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan jumlah 75% dari seluruh kewajiban pembayaran bunga obligasi terutang, pokok obligasi serta denda (jika ada) berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas penanggungan yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan IIF pada tanggal 20 Juli 2023.

On August 8, 2023, the Company issued bonds amounted to Rp 339,895,000,000 with interest payment every three months. Series A and B bonds have a term of three and five years until August 2026 and August 2028, respectively. Interest rate for series A and B are 9.5% and 10% per annum, respectively, until the end of maturity date. All of the bonds were sold at nominal value and are listed on the IDX, with PT Bank Negara Indonesia as trustee.

Based on the rating issued by Pefindo dated March 4, 2025, the bonds are rated as A (Single A; Partial Guarantee).

The bonds are intended for refinancing of term loan and working capital for operational funding.

The Company is required to comply with certain covenants, such as to obtain approval before entering into certain transactions such as mergers, takeovers and collateralizing assets or revenues with certain exceptions and restrictions on change in core business activities.

As at December 31, 2025 and 2024, the Company is in compliance with the covenants required in all of these bonds.

This obligation will collateralize with Company guarantee from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) with a maximum underwriting amount of 75% of all obligations to pay outstanding bond interest, bond principal and fines (if any) based on the agreement providing underwriting facilities which was signed by the Company and IIF on July 20, 2023.

19. MODAL SAHAM

Nama pemegang saham/ Name of shareholders	31 Desember 2025/ December 31, 2025		
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total Rp
PT Arkora Bakti Indonesia	1.226.692.775	41,89%	30.667.319.375
PT Energia Prima Nusantara	777.487.893	26,55%	19.437.197.325
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	133.970.882	4,58%	3.349.272.050
Aldo Henry Artoko (Direktur Utama/President Director)	4.820.600	0,16%	120.515.000
Arya Pradana Setiadharma (Komisaris Utama/President Commissioner)	1.725.000	0,06%	43.125.000
Masyarakat/Public (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%/ less than 5% ownership for each stockholder)	783.797.850	26,76%	19.594.946.250
Jumlah/Total	2.928.495.000	100,00%	73.212.375.000

Nama pemegang saham/ Name of shareholders	31 Desember 2024/ December 31, 2024		
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total Rp
PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	47,52%	34.794.000.000
PT Energia Prima Nusantara	777.487.893	26,55%	19.437.197.325
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	295.038.107	10,07%	7.375.952.675
Aldo Henry Artoko (Direktur Utama/President Director)	3.130.000	0,11%	78.250.000
Arya Pradana Setiadharma (Komisaris Utama/President Commissioner)	1.725.000	0,06%	43.125.000
Masyarakat/Public (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%/ less than 5% ownership for each stockholder)	459.354.000	15,69%	11.483.850.000
Jumlah/Total	2.928.495.000	100,00%	73.212.375.000

Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah saham biasa yang memberikan hak kepada pemilik untuk satu suara per saham.

The shares issued and fully paid are ordinary shares which entitle the holder to carry one vote per share.

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

31 Desember 2025 dan 2024/December 31, 2025 and 2024					
	Agio saham/ <i>Premium on capital stock</i>	Biaya emisi saham/ <i>Share issuance cost</i>	Selisih nilai kombinasi bisnis entitas pengendali/ <i>Difference in value of business combination of entities under common control</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Selisih antara modal disetor dengan modal dasar saham pada saat pendirian	92.685.000.000	-	-	92.685.000.000	The difference between paid-up capital and the authorized share capital at the time of establishment
Penerbitan 608.895.000 lembar saham melalui penawaran umum saham perdana pada 8 Juli 2022	167.446.125.000	(6.422.918.641)	-	161.023.206.359	Issuance of 608,895,000 shares through initial public offering on July 8, 2022
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	-	(27.807.431.426)	(27.807.431.426)	Difference in value of business combination transaction among entities under common control
Saldo akhir tahun	260.131.125.000	(6.422.918.641)	(27.807.431.426)	225.900.774.933	Balance at the year end

Dalam rangka penawaran umum perdana saham yang telah mendapat persetujuan pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2022, Perusahaan menerbitkan 608.895.000 saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham dan harga penawaran Rp 300 per saham.

Pada tahun 2024, Perusahaan membeli segmen usaha PT Arkora Indonesia. Akuisisi yang dilakukan adalah kombinasi bisnis entitas sepengendali yang dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Selisih antara harga pengalihan dan nilai buku aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 27.807.431.426 disajikan sebagai "tambahan modal disetor".

In relation to the initial public offering of shares in which the approval for listing of its shares on the Indonesian Stock Exchange on July 8, 2022, the Company issued 608,895,000 shares with par value of Rp 25 per share and offer price of Rp 300 per share.

In 2024, the Company acquired business segment owned by PT Arkora Indonesia. The acquisition was a business combination transaction between entities under common control which was accounted for under the pooling of interest method.

The difference between the transfer price and the book value of net assets acquired amounting to Rp 27,807,431,426 was presented as an item of "additional paid-in capital".

21. SALDO LABA

Saldo laba yang ditentukan penggunaannya

Pemegang saham menyepakati untuk mencadangkan dari saldo laba sebesar Rp 2.000.000.000 sebagai Cadangan modal berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan Akta No. 24 tanggal 15 April 2025 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E, Notaris di Jakarta.

21. RETAINED EARNINGS

Appropriated retained earnings

The stockholders agreed to appropriate from retained earnings amounting to Rp 2,000,000,000 as additional capital reserve based on the Annual General Stockholders' Meeting Deed No. 24 dated April 15, 2025 of Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta.

22. PENDAPATAN

	2025 Rp
Jasa konstruksi (Catatan 5)	284.638.322.715
Penjualan listrik	44.045.012.799
Jasa lainnya	14.638.046.467
Jumlah	<u>343.321.381.981</u>

Seluruh pendapatan Grup dilakukan dengan PLN di wilayah Indonesia. Pendapatan jasa konstruksi dan jasa lainnya diakui sepanjang waktu sedangkan penjualan listrik diakui pada waktu tertentu.

Rincian pelanggan pihak ketiga dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian pada periode yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

	2025 Rp
PT Perusahaan Listrik Negara	<u>328.683.335.514</u>

22. REVENUES

	2024 Rp	
Jasa konstruksi (Catatan 5)	183.420.009.325	Construction services (Note 5)
Penjualan listrik	44.418.264.000	Sale of electricity
Jasa lainnya	11.076.148.554	Other services
Jumlah	<u>238.914.421.879</u>	Total

All of the Group's revenue are conducted with PLN in Indonesia. Construction services revenue and other services are recognized overtime while sale of electricity are recognized at point in time.

Revenue to the following third party customer represented more than 10% of the total consolidated revenues of the respective period:

	2024 Rp	
PT Perusahaan Listrik Negara	<u>238.328.015.479</u>	PT Perusahaan Listrik Negara

23. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2025
	Rp
Beban konstruksi	225.738.244.222
Beban operasi dan pemeliharaan	10.532.657.666
Penyusutan (Catatan 9)	9.473.446.516
Beban proyek	5.452.299.940
Asuransi	1.762.126.171
Lain-lain	649.846.402
Jumlah	<u>253.608.620.917</u>

23. COST OF REVENUES

	2024	
	Rp	
Construction cost	157.961.387.902	
Operation and maintenance expenses	7.519.800.354	
Depreciation (Note 9)	9.012.058.885	
Project site expense	4.637.342.628	
Insurance	786.689.807	
Others	425.730.201	
Total	<u>180.343.009.777</u>	

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2025
	Rp
Gaji, tunjangan dan imbalan kerja	27.705.035.060
Beban pajak	12.380.808.611
Jasa profesional	4.972.926.184
Penyusutan (Catatan 9)	4.430.709.455
Administrasi proyek	4.407.637.764
Amortisasi	3.716.088.213
Perjalanan dinas	2.283.745.497
Utilitas	1.258.695.138
Sewa jangka pendek dan aset nilai rendah	1.202.208.051
Perbaikan dan pemeliharaan	1.095.574.056
Sumbangan	548.371.639
Perlengkapan kantor	424.677.050
Penyusutan aset hak guna	357.807.120
Pencarian dan survei lokasi	208.600.500
Lain-lain	7.253.313.076
Jumlah	<u>72.246.197.414</u>

24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2024	
	Rp	
Salaries, allowances and employee benefits	22.427.854.138	
Tax expense	14.042.338.952	
Professional fee	4.243.091.244	
Depreciation (Note 9)	3.041.711.468	
Project administration	847.414.593	
Amortization	1.780.897.782	
Business trip	2.270.309.079	
Utilities	1.276.899.784	
Short-term lease and low value assets	347.439.575	
Repair and maintenance	647.166.656	
Donation	781.057.500	
Office supplies	373.199.162	
Depreciation right-of-use assets	357.807.120	
Search dan survey location	240.340.001	
Others	4.619.762.735	
Total	<u>57.297.289.789</u>	

25. BEBAN KEUANGAN

	2025
	Rp
Bunga atas pinjaman dari utang obligasi	38.596.348.008
Bunga atas pinjaman berjangka	23.824.635.286
Bunga atas pinjaman dari pihak berelasi	14.816.897.039
Bunga atas utang bank	1.287.917.760
Jumlah	<u>78.525.798.093</u>

25. FINANCE COSTS

	2024	
	Rp	
Interest loans from bonds payable	41.107.412.775	
Interest from term loans	14.837.316.534	
Interest loans from related party	7.345.008.954	
Interest from bank loan	732.537.522	
Total	<u>64.022.275.785</u>	

26. PAJAK PENGHASILAN

a. Pajak dibayar di muka

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	
Lebih bayar pajak penghasilan badan			Overpayment of corporate income tax
Perusahaan	14.600.000	1.122.990.564	The Company
Entitas anak	499.075.543	157.732.994	Subsidiary
Pajak pertambahan nilai	1.314.171.818	1.706.104.363	Value added tax
Jumlah	1.827.847.361	2.986.827.921	Total

b. Utang pajak

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	
Pajak penghasilan			Income tax
Pajak kini	1.601.898.009	54.669.284	Current tax
Pasal 4(2)	676.558.983	426.084.149	Article 4(2)
Pasal 21	128.205	220.164.514	Article 21
Pasal 23	1.207.580.423	693.234.969	Article 23
Pajak pertambahan nilai	1.028.899.416	353.589.257	Value added tax
Jumlah	4.515.065.036	1.747.742.173	Total

c. Pajak penghasilan

Beban pajak Grup terdiri yang diakui di laba rugi terdiri dari:

Income tax expenses of the Group recognized in the profit or loss consists of the following:

	2025	2024	
	Rp	Rp	
Pajak kini			Current tax
Entitas anak	2.287.229.153	631.664.773	Subsidiary
Penyesuaian tahun lalu	(81.310.706)	-	Prior year adjustment
Pajak tangguhan			Deferred tax
Perusahaan	(7.067.160.427)	(12.413.920.178)	The Company
Entitas anak	930.024.152	(8.894.115.088)	Subsidiaries
Subjumlah pajak tangguhan	(6.137.136.275)	(21.308.035.266)	Subtotal deferred tax
Jumlah	(3.931.217.828)	(20.676.370.493)	Total

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba fiskal sebagai berikut:

	2025 Rp	2024 Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	59.962.101.673	21.124.300.726
Laba sebelum pajak entitas anak	(95.183.436.295)	(45.427.833.993)
Penyesuaian eliminasi konsolidasi	<u>11.382.795.682</u>	<u>(62.199.443)</u>
Rugi sebelum pajak Perusahaan	<u>(23.838.538.940)</u>	<u>(24.365.732.710)</u>
Perbedaan temporer:		
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(10.927.891.032)	2.708.825.185
Beban imbalan kerja	<u>1.102.040.666</u>	<u>1.021.679.909</u>
Subjumlah	<u>(9.825.850.366)</u>	<u>3.730.505.094</u>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(1.139.863.752)	(260.264.689)
Beban bunga	-	27.974.137.457
Lain-lain	<u>2.176.411.653</u>	<u>2.715.141.425</u>
Subjumlah	<u>1.036.547.901</u>	<u>30.429.014.193</u>
(Rugi) laba kena pajak	<u>(32.627.841.405)</u>	<u>9.793.786.577</u>
Akumulasi rugi fiskal yang telah disesuaikan dengan Surat Ketetapan Pajak		
2019	-	(8.013.965.038)
2020	(7.464.212.410)	(7.464.212.410)
2021	(11.187.870.582)	(11.187.870.582)
2022	(53.768.859.290)	(53.768.859.290)
2023	(46.785.205.921)	(2.202.575.192)
2024	<u>(25.822.783.791)</u>	<u>-</u>
Jumlah rugi fiskal	(177.656.773.399)	(72.843.695.935)
Rugi fiskal yang tidak dapat diutilisasi	<u>7.464.212.410</u>	<u>-</u>
Akumulasi rugi fiskal - bersih	<u>(170.192.560.989)</u>	<u>(72.843.695.935)</u>

Sesuai peraturan perpajakan, kerugian fiskal tersebut dapat ditangguhkan ke tahun berikutnya dan dikompensasikan kepada penghasilan kena pajak yang terjadi selama lima tahun sesudah kerugian fiskal tersebut.

Perhitungan pajak penghasilan ("PPh") badan Perusahaan adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak.

Current tax

The reconciliation between profit before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable profit is as follows:

Profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Profit before tax of subsidiaries
Elimination adjustments
Loss before tax of the Company
Temporary differences:
Difference between commercial and fiscal depreciation
Employee benefits
Subtotal
Non-deductible expenses (non-taxable income):
Interest income
subject to final tax
Finance cost
Others
Subtotal
Taxable (loss) income
Accumulated fiscal losses adjusted based on Tax Assessment Letters
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Total fiscal losses
Unutilized fiscal losses
Accumulated fiscal losses - net

According to tax regulation, such losses may be carried forward and applied against taxable income in any of the five years following the year in which the fiscal loss was incurred.

The Company's corporate income tax ("CIT") calculation is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company files its annual corporate income tax return.

Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

Tahun pajak 2024

Perusahaan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan dengan posisi lebih bayar pajak sebesar Rp 673.573.960. Perbedaan antara jumlah yang dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan badan dan pembukuan Perusahaan sebesar Rp 108.900.026 diakui sebagai manfaat pajak sebagai penyesuaian tahun sebelumnya.

Pada bulan November 2025, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak (SKPLB) atas pajak penghasilan badan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 673.573.960. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam SPT badan, akan tetapi terdapat koreksi atas rugi fiskal dari yang dilaporkan sebelumnya sebagai laba kena pajak Rp 9.793.786.577 menjadi rugi fiskal Rp 25.822.783.791. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini. Pada tanggal 10 Desember 2025, Perusahaan menerima pengembalian sebesar Rp 621.016.020 setelah dikurangi dengan utang pajak sebesar Rp 52.557.940.

Tahun Pajak 2023

Pada bulan Juli 2025, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak (SKPLB) atas pajak penghasilan badan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp 656.451.352. Perbedaan antara jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam surat pemberitahuan pajak badan sebesar Rp 27.589.320 diakui sebagai beban pajak sebagai penyesuaian tahun lalu, serta terdapat koreksi atas rugi fiskal dari yang dilaporkan sebelumnya sebagai laba kena pajak Rp 2.202.575.192 menjadi rugi fiskal Rp 46.785.205.921. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini. Pada tanggal 13 Agustus 2025, Perusahaan menerima pengembalian sebesar Rp 656.451.352.

Tahun pajak 2022

Pada bulan Maret 2024, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak (SKPLB) atas pajak penghasilan badan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp 885.710.232. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam surat pemberitahuan pajak badan, akan tetapi terdapat koreksi atas rugi fiskal dari yang dilaporkan sebelumnya Rp 57.248.259.290 menjadi Rp 53.768.859.290. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini.

Tax Assessment Letter

The Company

Fiscal year 2024

The Company reported its Annual Corporate Income Tax Return (SPT) with an overpayment of tax amounting to Rp 673,573,960. The difference between the amount reported in the SPT of Corporate Income Tax and the Company's records amounting to Rp 108,900,026 was recognized as a tax benefit as a prior year adjustment.

In November 2025, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) of corporate income tax fiscal year 2024 amounted to Rp 673,573,960. There is no difference in overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its SPT of corporate income tax, but there is a correction on fiscal loss from previously reported as taxable income Rp 9,793,786,577 into fiscal loss Rp 25,822,783,791. The Company agrees with the tax assessment result. On December 10, 2025, the Company received the refund of Rp 621,016,020 after deducted with tax payable of Rp 52,557,940.

Fiscal year 2023

In July 2025, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) of corporate income tax fiscal year 2023 amounted to Rp 656,451,352. The difference on overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its annual corporate income tax return amounted to Rp 27,589,320 was recognized as a tax expense as a prior year adjustment, also there is a correction on fiscal loss from previously reported as taxable income Rp 2,202,575,192 into fiscal loss Rp 46,785,205,921. The Company agrees with the tax assessment result. On August 13, 2025, the Company received the refund of Rp 656,451,352.

Fiscal year 2022

In March 2024, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) of corporate income tax fiscal year 2022 amounted to Rp 885,710,232. There is no difference on overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its annual corporate income tax return, but there is a correction on fiscal loss from Rp 57,248,259,290 as reported previously to Rp 53,768,859,290. The Company agrees with the tax assessment result.

Entitas anak

Pada bulan Januari 2026, AHS (entitas anak) menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun buku 2024 sebesar Rp 124.308.661. Terdapat perbedaan sebesar Rp 107.466.165 antara jumlah lebih bayar pajak badan dengan jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam surat pemberitahuan pajak badan dan koreksi atas rugi fiskal dari yang dilaporkan sebelumnya Rp 6.715.138.391 menjadi Rp 20.152.722.588. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini.

Pajak tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2024 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to income for the year Rp	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to income for the year Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income Rp	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	
Perusahaan								The Company
Aset tetap	(10.703.979.903)	595.941.540	-	(10.108.038.363)	(2.404.136.027)	-	(12.512.174.390)	Property and
Liabilitas imbalan								equipment
kerja	1.563.916.943	222.569.580	63.240.681	1.849.727.204	242.448.947	(192.490.291)	1.899.685.860	obligations
Rugi fiskal	4.430.204.048	11.595.409.058	-	16.025.613.106	9.228.847.507	-	25.254.460.613	Fiscal losses
Sub-jumlah	(4.709.858.912)	12.413.920.178	63.240.681	7.767.301.947	7.067.160.427	(192.490.291)	14.641.972.083	Sub-total
Entitas Anak								Subsidiaries
Rugi fiskal	6.797.926.785	1.640.006.432	-	8.437.933.217	2.528.261.451	-	10.966.194.668	Fiscal losses
Penyesuaian jasa								Concession service
konsesi	(88.978.032.552)	7.512.724.323	-	(81.465.308.229)	(3.347.239.297)	-	(84.812.547.526)	adjustment
Aset tetap	-	(262.427.743)	-	(262.427.743)	(100.407.251)	-	(362.834.994)	Property and
Liabilitas imbalan								equipment
kerja	162.090.782	3.812.076	16.502.198	182.405.056	(10.639.055)	620.998	172.386.999	Employee benefits
Sub-jumlah	(82.018.014.985)	8.894.115.088	16.502.198	(73.107.397.699)	(930.024.152)	620.998	(74.036.800.853)	obligations
Liabilitas pajak								Deferred tax
tangguhan	(86.727.873.897)	21.308.035.266	79.742.879	(65.340.095.752)	6.137.136.275	(191.869.293)	(59.394.828.770)	liabilities

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Manajemen berpendapat bahwa akumulasi kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan laba fiskal masa mendatang dan oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2025 aset pajak tangguhan diakui atas rugi fiskal sebesar Rp 25.254.460.613 (31 Desember 2024: Rp 16.025.613.106).

Subsidiary

In January 2026, AHS (subsidiary) received tax assessment confirming overpayment of corporate income tax fiscal year 2024 amounted to Rp 124,308,661. There is difference amounted Rp 107,466,165 on overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its annual corporate income tax return and correction of fiscal loss from Rp 6,715,138,391 as reported previously to Rp 20,152,722,588. The Company agrees with the tax assessment result.

Deferred tax

The details of the Group's deferred tax assets (liabilities) are as follows:

The fiscal loss can be utilized against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred. Management believes that probable future taxable profits will be available to utilize accumulated fiscal losses, hence, as of December 31, 2025, deferred tax of Rp 25,254,460,613 (December 31, 2024: Rp 16,025,613,106), were recognized on such fiscal losses.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to loss before tax is as follows:

	2025	2024	
	Rp	Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	59.962.101.673	21.124.300.726	Profit before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	(95.183.436.295)	(45.427.833.993)	Profit before tax of subsidiaries
Penyesuaian eliminasi konsolidasi	11.382.795.682	(62.199.443)	Elimination adjustments
Rugi sebelum pajak Perusahaan	(23.838.538.940)	(24.365.732.710)	Loss before tax of the Company
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif 22%	(5.244.478.567)	(5.360.461.196)	Income tax at effective tax rate of 22%
Pengaruh pajak atas (beban) manfaat yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Tax effect of non-deductible expenses (non-taxable income):
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(250.770.026)	(57.258.232)	Interest income subject to final tax
Beban bunga	-	6.154.310.241	Finance cost
Lain - lain	478.810.564	597.331.114	Others
Penyesuaian yang diakui di tahun berjalan atas pajak penghasilan tahun sebelumnya	(81.310.706)	-	Adjustment recognized in the current year relating to current tax of prior years
Penyesuaian yang diakui di tahun berjalan atas pajak tangguhan tahun berjalan	-	2.200.000	Adjustment recognized in the current year relating to deferred tax of current year
Rugi fiskal yang diutilisasi	-	(2.154.633.047)	Utilized fiscal loss
Rugi fiskal yang diakui	(2.050.722.398)	(11.595.409.058)	Recognized fiscal loss
Manfaat pajak penghasilan - Perusahaan	(7.148.471.133)	(12.413.920.178)	Income tax benefit - Company
Beban (manfaat) pajak penghasilan - Entitas anak	3.217.253.305	(8.262.450.315)	Income tax expense (benefit) - Subsidiaries
Jumlah manfaat pajak - bersih	(3.931.217.828)	(20.676.370.493)	Total tax benefit - net

Grup telah menerapkan pengecualian sementara dari akuntansi untuk pajak tangguhan yang timbul dari peraturan perpajakan Pilar Dua, sebagaimana diatur dalam PSAK 212. Oleh karena itu, Grup tidak mengakui atau mengungkapkan informasi tentang aset dan kewajiban pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua.

The Group has applied the temporary exception from accounting for deferred taxes arising from Pillar Two model rules, as provided in the PSAK 212. Accordingly, the Group neither recognizes nor discloses information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes.

Pada Desember 2024, pemerintah Indonesia, tempat Perusahaan didirikan, mengesahkan peraturan pajak penghasilan Pilar Dua yang berlaku mulai 1 Januari 2025 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2024 ("PMK-136").

In December 2024, the government of Indonesia, where the Company is incorporated, enacted the Pillar Two income taxes legislation effective from January 1, 2025 by issuing Ministry of Finance ("MOF") Regulation No. 136 Year 2024 ("PMK-136").

Grup tidak berekspektasi terdapat eksposur material terhadap pajak penghasilan Pilar Dua atas laporan keuangan konsolidasian ini.

Group does not expect a material exposure to Pillar Two income taxes to these consolidated financial statements.

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA

27. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	
Imbalan pasca kerja (PEB)	9.063.403.854	8.225.388.406	Post-employment benefits (PEB)
Imbalan kerja jangka panjang lainnya (OLTEB)	1.055.019.034	905.307.795	Other long-term employee benefit (OLTEB)
Jumlah	10.118.422.888	9.130.696.201	Total

Grup menghitung dan mencatat estimasi imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 6/2023, Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan Peraturan Perusahaan terbaru.

Program kewajiban imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Perhitungan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dihitung Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Rekan. Asumsi utama aktuaris yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Tingkat diskonto	PEB: 6,5% per tahun/per year OLTEB: 6,25% per tahun/per year	PEB: 7% per tahun/per year OLTEB: 7% per tahun/per year	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	3% per tahun/per year	5% per tahun/per year	Salary increment rate
Tingkat kematian	100% TMI2019/100% TMI2019	100% TMI2019/100% TMI2019	Mortality rate
Tingkat cacat	10% dari TMI2019/10% of TMI2019	10% dari TMI2019/10% of TMI2019	Disability rate
Tingkat pensiun normal	57 tahun/57 years	57 tahun/57 years	Normal retirement rate

Beban imbalan pasti yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah:

The Group calculates and records estimated employment benefits as required Law No. 6/2023, Government Regulation No. 35/2021 and the latest Company Regulation.

The defined benefit plan typically expose the Group to actuarial risk such as interest risk and salary risk.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The cost of providing employee benefits as at December 31, 2025 and December 31, 2024 were calculated by Actuarial Consulting Office I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Partner. The actuarial valuation used by the Group was carried out using the following key assumptions:

	2025 Rp	2024 Rp	
Biaya jasa:			Service cost:
Biaya jasa kini	1.465.903.336	638.831.251	Current service cost
Biaya bunga neto	478.771.177	387.324.933	Net interest cost
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	(78.364.519)	(93.417.283)	Remeasurement for other long-term benefits
Komponen beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laba rugi	1.866.309.994	932.738.901	Components of post-employment benefit cost recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto			Remeasurement on the net defined benefit liability:
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(920.716.065)	(135.490.808)	Actuarial gains arising from changes in financial assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	48.582.915	497.958.439	Actuarial losses arising from experience adjustments
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(872.133.150)	362.467.631	Components of defined benefit costs recognized in other comprehensive income
Jumlah	994.176.844	1.295.206.532	Total

Jumlah liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan yang timbul dari liabilitas Grup sehubungan dengan imbalan kerja adalah nilai kini dari liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statement of financial position arising from the Group's obligations in respect of these employee benefit obligation are as follows:

	2025	2024	
	Rp	Rp	
Saldo awal nilai kini liabilitas	9.130.696.201	7.845.489.669	Opening defined benefit obligation
Biaya jasa kini	1.465.903.336	638.831.251	Current service cost
Biaya bunga	478.771.177	387.324.933	Interest cost
Pembayaran imbalan dari pemberi kerja	(6.450.157)	(10.000.000)	Benefit payments from employer
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	(78.364.519)	(93.417.283)	Remeasurement of other long-term benefits
Pengukuran kembali liabilitas	(872.133.150)	362.467.631	Remeasurement on the net defined
Saldo akhir nilai kini liabilitas	10.118.422.888	9.130.696.201	Closing defined benefit obligation

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	31 Desember/ December 31, 2025		31 Desember/ December 31, 2024		
	+1%	-1%	+1%	-1%	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Tingkat diskonto	(534.180.581)	615.000.064	(554.342.359)	643.986.842	Discount Rate
Tingkat kenaikan gaji	682.674.885	(595.853.796)	697.921.113	(540.557.869)	Salary Increment Rate

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognized in the statement of consolidated financial position.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan sebesar 9,12 tahun per 31 Desember 2025 (31 Desember 2024: 7,7 tahun).

The average duration of the benefit obligation is 9.12 years at December 31, 2025 (December 31, 2024: 7.7 years).

28. LABA PER LEMBAR SAHAM

	2024 Rp
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	63.903.455.804
Rata-rata tertimbang jumlah saham	2.928.495.000
Laba bersih per saham dasar	22

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan nilai saham dari sebelumnya sebesar Rp 50 per lembar saham menjadi sebesar Rp 25 per lembar saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif.

28. EARNINGS PER SHARE

2024 Rp
41.799.739.448
2.928.495.000
14

Net profit for the year attributable to the owners of the Company

Weighted average number shares

Basic earnings per share

The weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share has been adjusted to reflect the effect of stock split from the previous amount of Rp 50 per share to Rp 25 per share and the Increase of Company's issued and fully paid capital in relation to the Initial Public Offering of Shares.

For the year ended December 31, 2025 and 2024, the Company does not have dilutive potential ordinary shares.

29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Arkora Bakti Indonesia (ABI)
ACEI Singapore Holdings Private Ltd (ACEI)
PT Arkora Indonesia
PT United Tractors Tbk
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan/ <i>Board of Commissioner and Directors</i>

Sifat hubungan dengan pihak berelasi/
Relationship with the related parties

Entitas induk terakhir dan pemegang saham Perusahaan/ <i>Ultimate shareholder and parent of the Company</i>
Pemegang saham Perusahaan/ <i>Shareholder of the Company</i>
Pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia/ <i>Shareholder of PT Arkora Bakti Indonesia</i>
Pemegang saham PT Energia Prima Nusantara/ <i>Shareholder of PT Energia Prima Nusantara</i>
Personil manajemen kunci Grup/ <i>Group's key management personnel</i>

Transaksi yang signifikan
Significant transactions

-
-
Kontraktor pembangkit listrik tenaga mini hydro di AHS dan ASS, entitas anak/ <i>Contractor of mini hydro power plant at AHS and ASS, subsidiaries</i>
Pemberi pinjaman/ <i>loan</i>
-

Transaksi Pihak Berelasi

- a. Grup menyediakan manfaat pada komisaris dan direktur Grup sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp
Imbalan kerja jangka pendek Komisaris	278.684.855
Direktur	6.548.313.300
Jumlah	6.826.998.155

Persentase terhadap beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi

2,10%

Transaction with Related Parties

- a. The Group provides benefits to the Commissioners and Directors of the Group as follows:

31 Desember/ December 31, 2024 Rp
326.751.906
4.680.000.000
5.006.751.906

Short-term employee benefits
Commissioners
Directors

Total

Percentage to total cost of revenue and general administrative expenses

2,11%

b. Piutang lain-lain

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	
Piutang lain-lain			Other accounts receivable
Lainnya	-	2.671.988	Others
Jumlah	-	2.671.988	Total
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,00%	0,00%	Percentage to total consolidated asset

b. Other accounts receivables

c. Pinjaman dari pihak berelasi

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	
Pokok pinjaman			Principal loan
UT	222.687.467.772	79.819.623.519	UT
Akrua bunga			Accrued interest
UT	1.422.335.482	167.798.918	UT
Jumlah	224.109.803.254	79.987.422.437	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(13.054.491.230)	(3.764.240.381)	Less current maturity
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	211.055.312.024	76.223.182.056	Long-term loan net of current maturities
Persentase terhadap jumlah liabilitas konsolidasian	18,99%	9,22%	Percentage to total consolidated liabilities

c. Loan from related parties

PT United Tractors Tbk

Pada tanggal 27 Maret 2023, Perusahaan dan PT United Tractors Tbk (UT) telah menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham sebesar Rp 125.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,5% per tahun dan jatuh tempo pinjaman adalah 7 tahun sejak tanggal penarikan dengan metode pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) atas pinjaman dari pemegang saham debitur yaitu ACEI Singapore Holdings Private Ltd dan keperluan investasi serta modal kerja (*working capital*) khususnya pengembangan kegiatan usaha dalam pelaksanaan proyek pengambilalihan/akuisisi yang akan dilakukan oleh Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman kepada UT untuk fasilitas ini sebesar Rp 76.223.182.057 dengan beban bunga sebesar Rp 5.722.786.109 dan beban bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp 184.668.005 (31 Desember 2024: Rp 79.819.623.519 dengan beban bunga sebesar Rp 7.345.008.954 dan beban bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp 167.798.918).

PT United Tractors Tbk

On March 27, 2023, the Company and PT United Tractors Tbk (UT) signed shareholder loan agreement amounted to Rp 125,000,000,000 with interest rate 9.5% per annum and maturity of loan is 7 years from the date of withdrawal with payment method agreed by both parties. This loan will be utilized for the refinancing of loans from the debtor's shareholder is ACEI Singapore Holdings Private Ltd and for investment and working capital purposes, particularly for the development of business activities in connection with the implementation of the acquisition project to be undertaken by the Company. As of December 31, 2025, the loan balance to UT for this facility amounted to Rp 76,223,182,057 with interest expense amounted to Rp 5,722,786,109 and accrual interest amounted Rp 184,668,005 (December 31, 2024: Rp 79,819,623,519 with interest expense amounted to Rp 7,345,008,954 with accrual interest amounted Rp 167,798,918).

Pada tanggal 28 Juni 2024, Perusahaan dan PT United Tractors Tbk (UT) telah menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham sebesar Rp 150.000.000.000 dengan tingkat suku bunga JIBOR tiga bulan ditambah 2,3% per tahun dan jatuh tempo pinjaman adalah 7 tahun sejak tanggal penarikan dengan metode pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pinjaman ini digunakan untuk pendanaan pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga air di Pongbembe di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman kepada UT untuk fasilitas ini sebesar Rp 146.464.285.715 dengan beban bunga sebesar Rp 9.094.110.930 dan beban bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.237.667.477 (31 Desember 2024: Rp Nil).

PT Arkora Indonesia

Pada tanggal 7 Desember 2020, PT Arkora Indonesia (AI) dan AHS, entitas anak menandatangani perjanjian *Civil and Metal Works* PLTMH Koro Yaentu Mini Hydro, dengan nilai kontrak sebesar Rp 158.412.292.000. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 16 Oktober 2024.

Pada tanggal 15 September 2022, PT Arkora Indonesia dan AEB, entitas anak, menandatangani Perjanjian *Civil and Metal Works* PLTMH Kukusan dengan nilai kontrak sebesar Rp 111.768.607.000.

Biaya konstruksi terkait dengan perjanjian - perjanjian ini dicatat sebagai beban pokok pendapatan sebagai berikut:

	2025	2024	
	Rp	Rp	
Biaya konstruksi	-	14.649.875.663	Construction cost
Persentase terhadap beban pokok pendapatan konsolidasian	-	8,12%	Percentage to consolidated cost of revenue

Jumlah akrual serta utang usaha dan lainnya kepada PT Arkora Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Nil (31 Desember 2024: Rp 1.377.101.396).

Persentase akrual serta utang usaha dan lainnya terhadap jumlah liabilitas konsolidasian masing-masing sebesar Nil pada tanggal 31 Desember 2025 (31 Desember 2024: 0,16%).

Utang retensi kepada PT Arkora Indonesia adalah sebesar Rp 7.920.614.575 pada tanggal 31 Desember 2025 (31 Desember 2024: Rp 7.920.614.575).

Persentase utang retensi terhadap jumlah liabilitas konsolidasian sebesar 0,67% pada tanggal 31 Desember 2025 (31 Desember 2024: 0,91%)

On June 28, 2024, the Company and PT United Tractors Tbk (UT) signed shareholder loan agreement amounted to Rp 150,000,000,000 with interest rate JIBOR 3 months rate plus 2.3% per annum and maturity of loan is 7 years from the date of withdrawal with payment method agreed by both parties. This loan will be used to finance the implementation of the mini hydro power plant project in Pongbembe, South Sulawesi. As of December 31, 2025, the loan balance to UT for this facility amounted to Rp 146,464,285,715 with interest expense amounted to Rp 9,094,110,930 and with accrual interest amounted to Rp 1,237,667,477 (December 31, 2024: Nil).

PT Arkora Indonesia

On December 7, 2020, PT Arkora Indonesia (AI) and AHS, a subsidiary have signed Civil and Metal Works agreement of PLTMH Koro Yaentu Mini Hydro with contract amount of Rp 158,412,292,000. This agreement is valid until October 16, 2024.

On September 15, 2022, PT Arkora Indonesia, and AEB, a subsidiary, have signed Civil and Metal Works Agreement of PLTMH Kukusan with contract amount of Rp 111,768,607,000.

The construction costs related to this agreements were recorded at cost of revenue as follows:

Total amount accrual and trade and other accounts payable to PT Arkora Indonesia as of December 31, 2025 amounting to nil (December 31, 2024: to Rp 1,377,101,396).

Percentage of accrual and trade and other accounts payable to total consolidated liabilities as of December 31, 2025 is nil (December 31, 2024: 0.16%).

Retention payable to PT Arkora Indonesia amounting to Rp 7,920,614,575 as of December 31, 2025 (December 31, 2024: Rp 7,920,614,575).

Percentage of retention payable to total consolidated liabilities is 0.67% as of December 31, 2025 (December 31, 2024: 0.91%).

Utang usaha dan lainnya pihak berelasi (selain dari PT Arkora Indonesia), merupakan *back charge* atas penggunaan fasilitas atau material pihak berelasi oleh Perusahaan. Nilai tersebut tidak dikenakan beban bunga, tanpa jaminan dan dapat ditagih sewaktu-waktu.

Trade and other accounts payable for related parties (outside from PT Arkora Indonesia), represent back charge on use of related parties facilities and materials by the Company. These amount are interest - free, unsecured and payable on demand.

30. IKATAN

- a. Pada tanggal 19 Juli 2012, Perusahaan dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 39.492.278 kWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 70% di Garut, Jawa Barat. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD). Pada tanggal 23 Oktober 2014, perjanjian ini diadendum dengan mengubah ketersediaan tenaga listrik rata-rata menjadi sebesar 47.400.992 kWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 74,02%.

Pada tanggal 28 September 2016, perjanjian ini diadendum dengan mengubah harga beli tenaga listrik menjadi Rp 1.100 per kWh untuk tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 8 dari COD, dan Rp 850 per kWh untuk tahun ke 9 sampai dengan tahun ke 15.

- b. Pada tanggal 30 September 2014, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS), entitas anak dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 61.424 GWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 70,2% di Sulawesi Tengah. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD).
- c. Pada tanggal 21 Oktober 2020, PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), entitas anak dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan kapasitas 10MW. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD).
- d. Pada tanggal 24 Maret 2022, PT Arkora Energi Baru (AEB), entitas anak, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan kapasitas 2 x 2,7 MW. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun sejak *Commercial Operating Date* (COD).
- e. Pada tanggal 20 Januari 2023, Perusahaan dan PT Sumbercipta Griyautama menandatangani perjanjian kontrak pembelian *office space* di Jakarta Selatan dengan nilai pembelian sebesar Rp 25.440.000.000. Pembayaran atas pembelian ini dilakukan secara bertahap selama 60 bulan atau sampai dengan 20 Desember 2027.

30. COMMITMENTS

- a. On July 19, 2012, the Company and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with average availability for electric power of 39,492,278 kWh/ year or equal with capacity factor amounted to 70% at Garut, West Java. The agreement is valid for 15 years from Commercial Operating Date (COD). On October 23, 2014, the agreement was amended by changing the average availability for electric power to 47,400,992 kWh/year or equal with capacity factor amounted to 74.02%.

On September 28, 2016, the agreement was amended by changing the power purchase price to Rp 1,100 per kWh for the year 1 to year 8 from COD, and Rp 850 per kWh for the year 9 to year 15.

- b. On September 30, 2014, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS), a subsidiary and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with average availability for electric power of 61,424 GWh/ year or equal with capacity factor amounted to 70.2% at Central Sulawesi. The agreement is valid for 15 years from Commercial Operating Date (COD).
- c. On October 21, 2020, PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), a subsidiary and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with capacity of 10MW. The agreement is valid for 25 years from Commercial Operating Date (COD).
- d. On March 24, 2022, PT Arkora Energi Baru (AEB), a subsidiary, and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with with capacity of 2 x 2.7 MW. The agreement is valid for 25 years from Commercial Operating Date (COD).
- e. On January 20, 2023, Company and PT Sumbercipta Griyautama entered into purchase contract agreement for office space, located on South Jakarta with total purchase amounted Rp 25,440,000,000. The payment is made with installment basis in 60 months or until December 20, 2027.

- Jumlah utang lainnya kepada PT Sumbercipta Griyautama pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 10.155.988.000 (31 Desember 2024: Rp 15.233.992.000).
- f. Pada tanggal 18 Desember 2023, AEB dan Voith Hydro Private Limited, India menandatangani perjanjian kontrak *onshore* untuk penyediaan, transportasi dan layanan pemasangan dan komisioning peralatan elektro-mekanikal untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Kukusan dengan nilai kontrak sebesar US\$ 1.840.000.
- g. Pada tanggal 21 Desember 2023, PT Arkora Hydro Malili, entitas anak, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan kapasitas 2 x 5 MW. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun sejak Commercial Operating Date (COD).
- h. Pada tanggal 19 Maret 2024, PT Arkora Hydro Malili, entitas anak, dan Flovel Energy Private Limited telah menandatangani perjanjian Penyediaan dan layanan peralatan elektromekanis dengan nilai kontrak sebesar US\$ 2.250.000.
- i. Pada tanggal 12 September 2024, PT Arkora Hydro Malili, entitas anak, dan PT Sulindo Putra Mandiri telah menandatangani perjanjian pembangunan terowongan dengan nilai kontrak sebesar Rp 58.033.372.630.
- j. Pada tanggal 30 Agustus 2024, PT Arkora Hydro Malili, entitas anak, dan PT Indokoei International telah menandatangani perjanjian layanan jasa konsultan penasihat teknik independen dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.663.636.000. Perjanjian ini berlaku 23 bulan dari tanggal kontrak.
- k. Pada tanggal 10 September 2025, PT Nosu Hydro (NH), entitas anak, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan kapasitas 20 MW. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak *Commercial Operating Date* (COD).
- Total other payable to PT Sumbercipta Griyautama as of December 31, 2025 amounting to Rp 10,155,988,000 (December 31, 2024: Rp 15,233,992,000).
- f. On December 18, 2023, AEB entered into contract agreement with Voith Hydro Private Limited, India for onshore supply, inland transportation and service for erection and commissioning of electro-mechanical equipment of Yaentu Hydro Power Plant project with total contract amounting to US\$ 1,840,000.
- g. On December 22, 2023, PT Arkora Hydro Malili, a subsidiary, and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with with capacity of 2 x 5 MW. The agreement is valid for 25 years from Commercial Operating Date (COD).
- h. On March 19, 2024, PT Arkora Hydro Malili, a subsidiary, and Flovel Energy Private Limited executed an agreement concerning the supply and services of electro-mechanical equipment. The contract carries a total value of US\$ 2,250,000.
- i. On September 12, 2024, PT Arkora Hydro Malili, a subsidiary, and PT Sulindo Putra Mandiri entered into an agreement for the construction of tunnels, with a contract value of Rp 58,033,372,630.
- j. On August 30, 2024, PT Arkora Hydro Malili, a subsidiary, and PT Indokoei International entered into an agreement for independent technical advisory consulting services, with a contract value of Rp 3,663,636,000. This agreement is valid for 23 months from the date of the contract.
- k. On September 10, 2025, PT Nosu Hydro (NH), a subsidiary, and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with with capacity of 20 MW. The agreement is valid for 30 years from Commercial Operating Date (COD).

31. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Grup memiliki aset moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

		31 Desember/Desember 31, 2025	
		Mata uang asing/ Foreign Currencies	Ekuivalen/ Equivalent in Rp
Aset			
Kas dan setara kas	EUR	6	115.754
	US\$	16.620	278.908.609
Jumlah Aset			279.024.363

31. MONETARY ASSET AND LIABILITY DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY

The Group had monetary assets in foreign currencies, as follows:

		31 Desember/Desember 31, 2024	
		Mata uang asing/ Foreign Currencies	Ekuivalen/ Equivalent in Rp
Assets			
Cash in banks and cash equivalent		6	99.249
		2.271	36.697.945
Total Assets			36.797.194

Kurs konversi yang digunakan Grup adalah sebagai berikut:

The conversion rates used by the Group are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	Foreign currencies
Mata uang			
1 US\$	16.782	16.162	US\$ 1
1 EURO	19.753	16.851	EUR 1

32. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS

32. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON-CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES

	2025 Rp	2024 Rp	
Penambahan pinjaman berjangka melalui penambahan akrual bunga	16.290.429.371	2.597.884.995	Additional in term loans through additional accrued interest
Penambahan pinjaman dari pihak berelasi melalui penambahan akrual bunga	1.422.335.483	167.798.917	Additional in loan from related party through additional accrued interest
Penambahan aset tetap melalui utang lainnya	2.047.950.000	-	Additional in property, plant and equipment through other accounts payable
Penambahan aset tetap melalui uang muka dibayar dimuka	-	29.458.271.242	Additional in property, plant and equipment from advance payment

33. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

33. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

Tabel berikut ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The following table explains changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	1 Januari/ January 1, 2025 Rp	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ financing cash flow Rp	Perubahan transaksi non kas/ non-cash change Rp	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	
Cerukan bank	15.492.118.620	8.458.030.502	-	23.950.149.122	Bank overdraft
Pinjaman berjangka	288.389.881.117	142.986.628.409	16.290.429.371	447.666.938.897	Term loans
Utang bank	8.340.476.183	(1.614.285.717)	-	6.726.190.475	Bank loans
Utang obligasi	332.502.209.993	-	1.860.715.722	334.362.925.715	Bonds payable
Pinjaman dari pihak berelasi	79.987.422.437	142.700.045.334	1.422.335.483	224.109.803.254	Loan from related parties
Jumlah	724.712.108.350	292.530.418.537	19.573.480.576	1.036.816.007.463	Total

	1 Januari/ January 1, 2024 Rp	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ financing cash flow Rp	Perubahan transaksi non kas/ non-cash change Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Cerukan bank	-	15.492.118.620	-	15.492.118.620	Bank overdraft
Pinjaman berjangka	152.583.567.129	132.429.883.496	3.376.430.492	288.389.881.117	Term loans
Utang bank	9.954.761.900	(1.614.285.717)	-	8.340.476.183	Bank loans
Utang obligasi	328.055.298.564	-	4.446.911.429	332.502.209.993	Bonds payable
Pinjaman dari pihak berelasi	58.148.207.840	21.671.415.680	167.798.917	79.987.422.437	Loan from related parties
Jumlah	548.741.835.433	167.979.132.079	7.991.140.838	724.712.108.350	Total

34. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN			34. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS	
	Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assest at amortized cost</i>	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized</i>		
	Rp	Rp		
31 Desember 2025			December 31, 2025	
<u>Aset keuangan</u>			<u>Financial assets</u>	
Kas di bank dan setara kas	96.212.732.005	-	Cash in banks and cash equivalent	
Piutang usaha - pihak ketiga	17.665.607.887	-	Trade accounts receivable - third party	
Piutang lain-lain			Other accounts receivable	
Pihak ketiga	21.191.564.306	-	Third parties	
Aset keuangan dari proyek konsesi	1.220.747.663.605	-	Financial assets from concession project	
Aset lain-lain	7.516.602.372	-	Other assets	
Jumlah	1.363.334.170.175	-	Total	
<u>Liabilitas keuangan</u>			<u>Financial liabilities</u>	
Cerukan bank	-	23.950.149.122	Bank overdraft	
Utang usaha dan lainnya			Trade and other accounts payable	
Pihak berelasi	-	5.966.315.254	Related parties	
Pihak ketiga	-	16.976.412.006	Third parties	
Utang bank	-	6.726.190.475	Bank loan	
Utang lainnya	-	10.155.988.000	Other payable	
Utang obligasi	-	334.362.925.715	Bonds payable	
Pinjaman berjangka	-	447.666.938.897	Term loans	
Pinjaman dari pihak berelasi	-	224.109.803.254	Loan from related parties	
Biaya masih harus dibayar	-	11.282.919.402	Accrued expenses	
Utang retensi	-	10.475.579.634	Retention payable	
Jumlah	-	1.091.673.221.759	Total	
	Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assest at amortized cost</i>	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized</i>		
	Rp	Rp		
31 Desember 2024			December 31, 2024	
<u>Aset keuangan</u>			<u>Financial assets</u>	
Kas di bank dan setara kas	36.732.647.420	-	Cash in banks and cash equivalent	
Piutang usaha - pihak ketiga	15.879.455.725	-	Trade accounts receivable - third party	
Piutang lain-lain			Other accounts receivable	
Pihak berelasi	2.671.988	-	Related parties	
Pihak ketiga	802.648.838	-	Third parties	
Aset keuangan dari proyek konsesi	944.503.001.323	-	Financial assets from concession project	
Aset lain-lain	8.143.152.372	-	Other assets	
Jumlah	1.006.063.577.666	-	Total	
<u>Liabilitas keuangan</u>			<u>Financial liabilities</u>	
Cerukan bank	-	15.492.118.620	Bank overdraft	
Utang usaha dan lainnya			Trade and other accounts payable	
Pihak berelasi	-	12.500.189.783	Related parties	
Pihak ketiga	-	9.018.505.043	Third parties	
Utang bank	-	8.340.476.180	Bank loan	
Utang lainnya	-	15.233.992.000	Other payable	
Utang obligasi	-	332.502.209.993	Bonds payable	
Pinjaman berjangka	-	288.389.881.117	Term loans	
Pinjaman dari pihak berelasi	-	79.987.422.437	Loan from related parties	
Biaya masih harus dibayar	-	13.944.036.578	Accrued expenses	
Utang retensi	-	8.333.271.086	Retention payable	
Jumlah	-	783.742.102.837	Total	

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen risiko mata uang asing

Grup terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing atas pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Grup terutama terekspos terhadap Dollar Amerika Serikat ("USD").

Tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan risiko mata uang asing kepada personel manajemen kunci adalah 1% (2024: 2%), yang merupakan perubahan dalam nilai tukar mata uang asing yang menurut manajemen cukup mungkin akan memengaruhi item-item moneter dalam uang asing pada akhir periode.

Berdasarkan analisis dalam kaitannya dengan USD, dampak laba atau rugi tidak material.

b. Manajemen risiko tingkat bunga

Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dengan tingkat bunga tetap dan mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup dengan mempertahankan gabungan yang tepat antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang.

Grup terekspos pada acuan suku Bunga IDR JIBOR dalam transaksi dana pinjaman, yang terdampak reformasi acuan suku bunga.

Grup telah memantau pasar dan output dari kelompok kerja berbagai industri yang mengelola transisi ke suku bunga acuan yang baru. Sampai dengan laporan keuangan ini terbit, Grup tetap menggunakan JIBOR dan akan menggunakan IndONIA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setelah proses pergantian tersebut selesai secara penuh.

Eksposur Grup terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

Untuk utang dengan suku bunga mengambang, Grup akan memulai diskusi dengan debitor terkait dengan perubahan atas suku bunga acuan yang baru untuk AEB dan AHM.

Analisis sensitivity suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga baik untuk instrumen non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

35. FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Interest rate risk management

The Group is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly because of foreign currency denominated transactions from term loans denominated in foreign currencies.

Foreign currency sensitivity analysis

The Group is mainly exposed to the U.S. Dollar ("USD").

The sensitivity rate used when reporting foreign currency risk to key management personnel is 1% (2024: 2%), which is the change in foreign exchange rate that management deems reasonably possible which will affect outstanding foreign currency denominated monetary items at period end.

Based on analysis in relation to USD, impact on profit or loss is not material.

b. Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds at both fixed and floating interest rates. The risk is managed by the Group by maintaining an appropriate mix between fixed and floating rate borrowings.

The Group is exposed to the IDR JIBOR interest rate benchmark in transaction loan which is subject to interest rate benchmark reform.

The Group has closely monitored the market and the output from the various industry working groups managing the transition to new benchmark interest rates, the Group continues to use JIBOR and will use IndONIA was issued by Bank Indonesia after the replacement process is fully completed.

The Group's exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

For the Group's floating rate debt, the Group will start discussions with debitor for the new benchmark interest rate for AEB and AHM.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to interest rates for non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variable lainnya tetap konstan:

- Laba akan turun/naik sebesar Rp 1.383.635.055 untuk tahun 2025 (2024: Rp 1.441.949.405). Hal ini terutama disebabkan oleh exposure Grup terhadap suku bunga pinjaman dengan suku bunga variabel.

c. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek, menengah dan panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate %	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year Rp	1 sampai 5 tahun/ 1 to 5 years Rp	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years Rp	Jumlah/Total Rp
31 Desember 2025					
Tanpa bunga					
Utang usaha dan lainnya					
Pihak berelasi		5.966.315.254	-	-	5.966.315.254
Pihak ketiga		16.976.412.006	-	-	16.976.412.006
Utang retensi		10.475.579.634	-	-	10.475.579.634
Utang lainnya		5.078.004.000	5.077.984.000	-	10.155.988.000
Biaya masih harus dibayar		11.282.169.402	-	-	11.282.169.402
Instrumen tingkat bunga variable					
Pinjaman berjangka	JIBOR 3 Months plus 5% - 5,5%	47.852.761.399	328.682.995.864	361.113.370.372	737.649.127.635
Instrumen tingkat bunga tetap					
Cerukan bank	8,5%	25.985.911.797	-	-	25.985.911.797
Pinjaman dari pihak berelasi	7,76% - 9,5%	30.650.644.028	253.827.584.522	7.177.477.483	291.655.706.033
Utang obligasi	9,5% - 10%	335.288.067.459	25.201.656.079	-	360.489.723.538
Utang bank	7,7%	2.120.581.018	5.828.372.967	-	7.948.953.985
		<u>394.045.204.302</u>	<u>284.857.613.568</u>	<u>7.177.477.483</u>	<u>686.080.295.353</u>

If interest rates had been 50 basis points higher/lower and all variables were held constant, Group's:

- Profit for the year would decrease/increase Rp 1,383,635,055 in 2025 (2024: Rp 1,441,949,405). This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its variable rate borrowings.

c. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short-, medium- and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Liquidity and interest risk tables

The following tables detail the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The tables include both interest and principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 sampai 5 tahun/ 1 to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/Total	
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	
31 Desember 2024						December 31, 2024
Tanpa bunga						Non-interest bearing
Utang usaha dan lainnya						Trade and other accounts payable
Pihak berelasi		12.500.189.783	-	-	12.500.189.783	Related parties
Pihak ketiga		9.018.505.043	-	-	9.018.505.043	Third parties
Utang retensi		8.333.271.086	-	-	8.333.271.086	Retention payable
Utang lainnya		5.078.004.000	10.155.988.000	-	15.233.992.000	Other payable
Biaya masih harus dibayar		13.944.036.578	-	-	13.944.036.578	Accrued expenses
Instrument tingkat bunga variable						Variable interest rate instruments
Pinjaman berjangka	JIBOR 3 Months plus 5% - 5,5%	41.943.549.304	188.908.657.169	394.585.950.979	625.438.157.452	Term loans
Instrument tingkat bunga tetap						Fixed interest rate instruments
Cerukan bank	8,50%	16.801.733.195	-	-	16.801.733.195	Bank overdraft
Pinjaman dari pihak berelasi	9,50%	10.876.591.135	92.758.801.964	3.767.857.144	107.403.250.243	Loan from related parties
Utang obligasi	9,5% - 10%	772.210.375	341.300.955.656	-	342.073.166.031	Bonds payable
Utang bank	7,7%	2.207.588.027	7.842.502.304	-	10.050.090.331	Bank loan
		<u>30.658.122.732</u>	<u>441.902.259.924</u>	<u>3.767.857.144</u>	<u>476.328.239.800</u>	

d. Manajemen risiko kredit

Tinjauan eksposur Grup terhadap risiko kredit

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian, mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

Selain itu, Grup terekspos terhadap risiko kredit dalam kaitannya dengan jaminan keuangan yang diberikan kepada bank oleh Grup. Eksposur maksimum Grup dalam hal ini adalah jumlah maksimum yang harus dibayar Grup jika jaminan tersebut ditarik.

Kerangka peringkat risiko kredit kini Grup terdiri dari kategori berikut:

d. Credit risk management

Overview of the Group's exposure to credit risk

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses, represents the Group's exposure to credit risk.

In addition, the Group is exposed to credit risk in relation to financial guarantees given to banks provided by the Group. The Group's maximum exposure in this respect is the maximum amount the Group could have to pay if the guarantee is called upon.

The Group's current credit risk grading framework comprises the following categories:

Kategori/ Category	Deskripsi/Description	Dasar pengakuan ECL/ Basis for recognizing ECL
Lancar/ Performing	Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan./ <i>The counterparty has a low risk of default and does not have any past-due amounts.</i>	ECL 12 bulan/ 12-month ECL
Dicadangkan/ Doubtful	Jumlah yang tertunggak > 60 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal./ <i>Amount is >60 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.</i>	ECL sepanjang umur –kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL – not credit-impaired
Gagal bayar/ In default	Jumlah yang tertunggak > 90 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit./ <i>Amount is >90 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.</i>	ECL sepanjang umur – kredit memburuk/ Lifetime ECL – credit-impaired
Penghapusan/ Write-off	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Grup tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis./ <i>There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and the Group has no realistic prospect of recovery.</i>	Saldo dihapuskan/ Amount is written off

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan Grup serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit:

The table below details the credit quality of the Group's financial assets as well as maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades:

Akun deskripsi/ Accounts description	Peringkat Kredit Internal/ Internal Credit Rating	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	31 Desember/December 31, 2025			31 Desember/December 31, 2024		
			Jumlah tercatat bruto/ Gross carrying amount Rp	Cadangan kerugian/ Loss allowance Rp	Jumlah tercatat bersih/ Net carrying amount Rp	Jumlah tercatat bruto/ Gross carrying amount Rp	Cadangan kerugian/ Loss allowance Rp	Jumlah tercatat bersih/ Net carrying amount Rp
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL	96.212.732.005	-	96.212.732.005	36.732.647.420	-	36.732.647.420
Piutang usaha pihak ketiga/ Trade accounts receivable third party	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	17.665.607.887	-	17.665.607.887	15.879.455.725	-	15.879.455.725
Piutang lain-lain pihak ketiga/ Other account receivable third parties	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	21.191.564.306	-	21.191.564.306	802.648.838	-	802.648.838
Piutang lain-lain pihak berelasi/ Other account receivable third parties	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	-	-	-	2.671.988	-	2.671.988
Aset lain-lain/ Other assets	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL	7.516.602.372	-	7.516.602.372	8.143.152.372	-	8.143.152.372
Aset keuangan dari proyek konsesi/ Financial assets from concession project	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	1.220.747.663.605	-	1.220.747.663.605	733.061.925.787	-	733.061.925.787

- i. Perusahaan menentukan ECL pada pos-pos tersebut menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status utang debitur masa lalu, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan.

- i. The Company determines the ECL on these items by using a provision matrix, estimated based on historical credit loss experience based on the past due status of the debtors, adjusted as appropriate to reflect current conditions and estimates of future economic conditions.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Kecuali aset finansial dari proyek konsesi (Catatan 10), utang obligasi (Catatan 18), dan pinjaman dari pihak berelasi (Catatan 29), manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat dalam laporan keuangan dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun mendekati nilai wajarnya karena terpengaruh tingkat bunga pasar atau dampak pendiskontoan tidak signifikan.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan

Tingkatan nilai wajar adalah sebagai berikut:

- Pengukuran nilai wajar Level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

e. Fair value Measurements

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

Except for the financial asset from concession project (Note 10), bonds payable (Note 18), and loan from related parties (Note 29), management consider that the carrying amounts of the Company's financial assets and financial liabilities recognized in the financial statements with maturities of more than 1 year approximates their fair value because it carries the market interest or the impact of discounting is not significant.

Fair value measurement hierarchy of the Company's financial statement

The fair value hierarchy are as follows:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

- Pengukuran nilai wajar Level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar Level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Nilai wajar aset finansial dari proyek konsesi termasuk dalam Level 3.

f. Manajemen modal

Grup mengelola modalnya untuk memastikan mereka dapat mempertahankan kelangsungan usaha disamping memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas.

Struktur modal Grup terdiri dari utang pihak ketiga dan pinjaman dari pihak berelasi yang saling hapus dengan kas dan setara kas dan ekuitas pemegang saham yang terdiri dari modal saham, agio saham dan laba.

Direksi Grup secara berkala melakukan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Tidak terdapat perubahan terhadap eksposur risiko modal Grup dimana risiko ini telah dikelola dan diukur.

- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The fair value of financial asset from concession project falls into Level 3.

f. Capital management

The Group manages its capital to ensure that it will be able to continue as a going concern while maximizing the return to stakeholders through the optimization of debt and equity balance.

The capital structure of the Group consists of third party loan and loan from related party, offset by cash and cash equivalents and equity shareholder consist of capital stock, agio capital and retained earnings.

The Directors of the Group periodically review the Group's capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risk.

There has been no change to the Group's exposure to capital risk or the manner in which these risks are managed and measured.

36. SEGMENT OPERASI

Pengambil keputusan dalam operasional utama adalah Direksi. Direksi memeriksa kinerja Grup dari sudut pandang geografis yang terdiri dari 6 segmen yang dapat dilaporkan: pembangkit listrik tenaga minihidro 7,4 MW di Cikopo (Jawa Barat), pembangkit listrik tenaga minihidro 10 MW di Tomasa (Sulawesi Tengah), pembangkit listrik tenaga minihidro 10 MW di Yaentu (Sulawesi Tengah), pembangkit listrik tenaga mini hydro 5,4 MW di Kukusan (Lampung) dan pembangkit listrik tenaga minihidro 10 MW di Tomoni (Sulawesi Selatan) serta jasa konstruksi.

36. OPERATING SEGMENTS

The chief operating decision-maker has been identified as the members of Board of Directors. The Board of Directors examine the Group's performance from a geographic perspective which consists of 6 reportable segments: 7.4 MW minihydro electric power plant in Cikopo (West Java), the 10 MW minihydro electric power plant in Tomasa (Sulawesi Tengah), the 10 MW minihydro electric power plant in Yaentu (Central Sulawesi), the 5.4 MW minihydro electric power plant in Kukusan (Lampung) and the 10 MW minihydro electric power plant in Tomoni (Sulawesi Selatan) and construction service.

PT ARKORA HYDRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT ARKORA HYDRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

31 December / Desember 31, 2025										
	Cikopo Rp	Tomasia Rp	Yaentu Rp	Kukusan Rp	Tomoni Rp	Jasa konstruksi/ Service construction Rp	Lainnya/ Others Rp	Eliminasi/ Elimination Rp	Jumlah/ Total Rp	
PENDAPATAN	44.045.012.799	10.223.837.783	4.274.208.684	116.365.953.518	168.272.369.197	98.136.086.829	1.561.032.570	(99.557.119.399)	343.321.381.981	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(16.052.268.329)	(10.532.657.666)	(1.961.859.408)	(124.564.581.348)	(125.623.819.714)	(68.835.724.462)	(352.850.000)	94.315.140.010	(253.608.620.917)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	27.992.744.470	(308.819.883)	2.312.349.276	(8.198.627.830)	42.648.549.483	29.300.362.367	1.208.182.570	(5.241.979.389)	89.712.761.064	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(21.347.865.868)	(9.264.345.620)	(13.029.533.347)	(10.876.810.182)	(7.512.940.811)	(13.121.378.660)	(3.093.322.926)	6.000.000.000	(72.246.197.414)	OPERATING EXPENSES
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN										OTHER INCOME (EXPENSE)
Penghasilan keuangan	845.508.996	18.556.676.398	44.123.832.661	18.925.825.584	14.442.909.206	351.226.922	990.274.779	-	98.236.254.546	Finance income
Beban keuangan	(54.701.162.807)	(7.641.582.697)	(32.472.146.771)	-	(173.819.381)	-	-	16.462.913.563	(78.525.798.093)	Finance cost
Keuntungan (kerugian) atas selisih kurs	17.919.300	(7.964.346)	(1.888.760)	-	5.616	-	-	-	8.071.810	Gain (loss) on foreign exchanges
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih	23.354.316.969	776.669.989	13.847.871.568	3.464.334.800	-	(61.812.174)	9.999.358.464	(28.603.729.856)	22.777.009.760	Other gain (losses) - net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(23.838.538.940)	2.110.633.841	14.780.484.627	3.314.722.372	49.404.704.113	16.468.398.455	9.104.492.887	(11.382.795.682)	59.962.101.673	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
MANFAAT PAJAK	7.147.052.099	(668.365.215)	(4.270.665.635)	-	-	-	-	1.723.196.579	3.931.217.828	TAX BENEFIT
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(16.691.486.841)	1.442.268.626	10.509.818.992	3.314.722.372	49.404.704.113	16.468.398.455	9.104.492.887	(9.659.599.103)	63.893.319.501	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK										OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) NET OF TAX
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:										Items that will not reclassified subsequently to profit or loss:
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja pasti	874.955.869	(2.822.719)	-	-	-	-	-	-	872.133.150	Actuarial gain (loss) of defined benefit plan
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	(192.490.291)	620.998	-	-	-	-	-	-	(191.869.293)	Tax of actuarial gain (loss)
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	682.465.578	(2.201.721)	-	-	-	-	-	-	680.263.857	Total other comprehensive income (loss) profit for the year - net of tax
JUMLAH (KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(16.009.021.263)	1.440.066.905	10.509.818.992	3.314.722.372	49.404.704.113	16.468.398.455	9.104.492.887	-	64.573.583.358	TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:										NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk									63.439.255.804	Owners of the Company
Keuntungan non-pengendali									(10.136.303)	Non-controlling interest
JUMLAH									63.429.119.501	TOTAL
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:										TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk									64.119.520.080	Owners of the Company
Keuntungan non-pengendali									(10.136.722)	Non-controlling interest
JUMLAH									64.109.383.358	TOTAL
INFORMASI LAINNYA										OTHER INFORMATION
Aset segmen	661.197.671.768	296.183.212.011	551.341.190.245	275.924.187.452	272.961.096.043	45.052.497.483	306.476.532.598	(712.592.573.678)	1.696.543.813.922	Segment assets
Liabilitas segmen	654.760.597.140	94.685.380.700	355.369.649.745	195.674.364.393	201.890.715.952	21.020.515.637	129.844.728.046	(472.902.441.077)	1.180.343.510.536	Segment liabilities

31 December / Desember 31, 2024										
	Cikopo Rp	Tomasia Rp	Yaentu Rp	Kukusan Rp	Tomoni Rp	Jasa konstruksi/ Service construction Rp	Lainnya/ Others Rp	Eliminasi/ Elimination Rp	Jumlah/ Total Rp	
PENDAPATAN	44.418.264.000	7.754.345.093	25.260.756.564	93.755.411.475	67.139.238.347	78.953.229.575	1.999.790.300	(80.366.613.475)	238.914.421.879	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(14.614.077.082)	(7.519.800.354)	(92.428.995.626)	(62.380.302.721)	(47.208.695.573)	(36.557.751.896)	-	80.366.613.475	(180.343.009.777)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	29.804.186.918	234.544.739	(67.168.239.062)	31.375.108.754	19.930.542.774	42.395.477.679	1.999.790.300	-	58.571.412.102	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(19.631.455.124)	(8.455.928.985)	(9.791.278.520)	(8.359.015.539)	(5.039.954.016)	(7.747.825.643)	(2.471.831.962)	4.200.000.000	(57.297.289.789)	OPERATING EXPENSES
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN										FINANCE INCOME (EXPENSE)
Penghasilan keuangan	215.673.587	20.386.368.129	50.520.700.919	9.481.365.021	2.372.753.421	-	439.092.894	-	83.415.953.971	Finance income
Beban keuangan	(52.148.020.388)	(7.125.223.140)	(15.861.926.817)	-	(7.423.174)	-	-	11.112.894.560	(64.022.275.785)	Finance cost
Keuntungan (kerugian) atas selisih kurs	119.057.003	38.853.769	218.580	-	(7.423.174)	-	-	-	150.706.178	Gain (loss) on foreign exchanges
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih	17.274.825.293	500.094.867	(2.354.214.914)	-	(73.755.179)	209.926.271	(387.172)	(15.250.695.117)	305.794.049	Other gain (losses) - net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(24.365.732.711)	5.578.709.379	(44.654.739.814)	32.497.458.236	17.182.163.826	34.857.578.307	(33.335.940)	62.199.443	21.124.300.726	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
MANFAAT PAJAK	12.413.920.179	614.711.629	7.647.738.685	-	-	-	-	-	20.676.370.493	TAX BENEFIT
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(11.951.812.532)	6.193.421.008	(37.007.001.129)	32.497.458.236	17.182.163.826	34.857.578.307	(33.335.940)	-	41.800.671.219	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK										OTHER COMPREHENSIVE LOSS NET OF TAX
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:										Items that will not reclassified subsequently to profit or loss:
Kerugian aktuarial atas program imbalan kerja pasti	(287.457.640)	(75.009.991)	-	-	-	-	-	-	(362.467.631)	Actuarial loss of defined benefit plan
Pajak dari kerugian aktuarial	63.240.681	16.502.198	-	-	-	-	-	-	79.742.879	Tax of actuarial loss
Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	(224.216.959)	(58.507.793)	-	-	-	-	-	-	(282.724.752)	Total other comprehensive (loss) profit for the year - net of tax
JUMLAH (KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(12.176.029.491)	6.134.913.215	(37.007.001.129)	32.497.458.236	17.182.163.826	34.857.578.307	(33.335.940)	-	41.517.946.467	TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:										NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk									41.799.739.448	Owners of the Company
Keuntungan non-pengendali									931.771	Non-controlling interest
JUMLAH									41.800.671.219	TOTAL
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:										TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk									41.517.025.840	Owners of the Company
Keuntungan non-pengendali									920.627	Non-controlling interest
JUMLAH									41.517.946.467	TOTAL
INFORMASI LAINNYA										OTHER INFORMATION
Aset segmen	513.112.746.572	310.373.667.315	508.262.078.472	185.552.720.238	100.919.939.626	35.646.615.845	207.380.310.285	(541.893.419.416)	1.319.354.658.937	Segment assets
Liabilitas segmen	490.806.724.724	110.368.732.850	322.800.356.964	108.618.002.601	79.254.263.648	18.596.468.963	47.489.758.487	(310.206.369.327)	867.727.938.910	Segment liabilities

**37. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 75 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2026.

**37. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND
APPROVAL CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 75 were the responsibilities of the management, and were approved by the President Director and Director to authorize for issuance on March 5, 2026.
